

**PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL DAN EFISIENSI
PENGELUARAN PUBLIK TERHADAP PERTUMBUHAN
EKONOMI, PENYERAPAN TENAGA KERJA, KEMISKINAN DAN
KESEJAHTERAAN
(Studi Kasus Provinsi di Indonesia)**

TESIS

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister**



OLEH:

**VIKTORIA NOFRIDA RAME BEI
NIM 146020106011004**

**PROGRAM MAGISTER ILMU EKONOMI
MINAT KEUANGAN DAERAH
PASCASARJANA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2018**



T E S I S

PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL DAN EFISIENSI PENGELUARAN PUBLIK TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI, PENYERAPAN TENAGA KERJA, KEMISKINAN DAN KESEJAHTERAAN (Studi Kasus Provinsi di Indonesia)

Oleh :

VIKTORIA NOFRIDA RAME BEI
146020106011004

Dipertahankan di depan penguji
Pada tanggal : 01 Agustus 2018
Dan dinyatakan memenuhi syarat

Komisi Pembimbing,



Prof. Candra Fajri Ananda, SE., M.Sc., Ph.D
Ketua



Dr. Moh. Khusaini, SE., M.Si., MA
Anggota

Mengetahui,

a/n. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Brawijaya
Ketua Program Magister Ilmu Ekonomi



Devanto Shasta Pratomo, SE., M.Si., Ph.D.
NIP. 19761003 200112 1 003

LEMBAR IDENTITAS KOMISI PEMBIMBING DAN PENGUJI

Judul : PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL DAN EFISIENSI PENGELUARAN PUBLIK TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI, PENYERAPAN TENAGA KERJA, KEMISKINAN DAN KESEJAHTERAAN (Studi Kasus Provinsi di Indonesia)

Nama Mahasiswa : VIKTORIA NOFRIDA RAME BEI
Program Studi : ILMU EKONOMI

KOMISI PEMBIMBING

Pembimbing 1 : Prof. Candra Fajri Ananda, SE.,M.Sc.,Ph.D
Pembimbing 2 : Dr. Moh. Khusaini, SE., M.Si., MA.

TIM PENGUJI

Dosen Penguji 1 : Dr. Susilo, SE., MS
Dosen Penguji 2 : Setyo Tri Wahyudi, SE.,M.Ec.,Ph.D

Tanggal Ujian : 01 Agustus 2018

a.n. Dekan

Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi



Devanto Shasta Pratomo, SE., M.Si., Ph.D.

NIP. 19761003 200112 1 003



PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam naskah TESIS dengan judul:

"PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL DAN EFISIENSI PENGELUARAN PUBLIK TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI, PENYERAPAN TENAGA KERJA, KEMISKINAN DAN KESEJAHTERAAN (Studi Kasus Provinsi di Indonesia)"

Tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah TESIS ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia TESIS ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (MAGISTER) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku: (UU NO. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, 01 Agustus 2018

Mahasiswa,



Nama : VIKTORIA NOFRIDA RAME BEI
NIM : 146020106011004
PS : MAGISTER ILMU EKONOMI
PPS FEB UB

ABSTRAK

Bei, Viktoria. N.R. Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, 2018. PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL DAN EFISIENSI PENGELUARAN PUBLIK TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI, PENYERAPAN TENAGA KERJA, KEMISKINAN DAN KESEJAHTERAAN (Studi Kasus Provinsi di Indonesia). Ketua

Pembimbing Prof. Candra Fajri A, SE., M.Sc., Ph.D, Komisi

Pembimbing: Dr. Moh. Khusaini SE, M.Si, M.A.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal dan efisiensi pengeluaran publik terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, kemiskinan, dan kesejahteraan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian terbagi menjadi tiga tahapan yaitu metode *Data Envelopment Analysis* (DEA) untuk mengukur nilai efisiensi pengeluaran publik, metode Regresi Data Panel untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi pengeluaran publik, dan metode Analisis Jalur untuk menganalisis pengaruh langsung dan tidak langsung desentralisasi fiskal (dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil) dan efisiensi pengeluaran publik terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, kemiskinan, dan kesejahteraan di Kawasan Indonesia Barat (KIB) dan Kawasan Indonesia Timur (KIT).

Hasil penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar provinsi di Indonesia telah melaksanakan pengeluaran publiknya secara efisien.

Peningkatan belanja daerah berpengaruh terhadap penurunan efisiensi pengeluaran publik, sedangkan peningkatan penerimaan daerah (pendapatan asli daerah) berpengaruh terhadap peningkatan efisiensi pengeluaran publik.

Peningkatan dana alokasi umum, dana bagi hasil dan efisiensi pengeluaran

publik secara langsung berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di KIB dan KIT, sedangkan peningkatan dana alokasi khusus secara langsung berpengaruh terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi di KIB dan KIT. Peningkatan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja, namun berpengaruh terhadap peningkatan kemiskinan dan penurunan kesejahteraan di KIB dan KIT. Peningkatan penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kemiskinan berpengaruh terhadap penurunan kesejahteraan di KIB dan tidak berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan di KIT.

Peningkatan dana alokasi umum dan dana bagi hasil secara tidak langsung berpengaruh terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja namun tidak berpengaruh terhadap kemiskinan dan kesejahteraan melalui pertumbuhan ekonomi di KIB. Sedangkan di KIT, peningkatan dana alokasi umum dan dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja dan berpengaruh terhadap peningkatan kemiskinan serta penurunan kesejahteraan melalui pertumbuhan ekonomi. Peningkatan dana alokasi khusus secara tidak langsung berpengaruh terhadap penurunan penyerapan tenaga kerja, penurunan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan melalui pertumbuhan ekonomi di KIB dan KIT. Peningkatan efisiensi pengeluaran publik secara tidak langsung tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja dan penurunan kemiskinan serta berpengaruh terhadap penurunan kesejahteraan melalui pertumbuhan ekonomi di KIB. Sedangkan di KIT, peningkatan efisiensi pengeluaran publik berpengaruh terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja, namun berpengaruh terhadap peningkatan kemiskinan dan penurunan kesejahteraan melalui pertumbuhan ekonomi.

Kesimpulannya, desentralisasi fiskal dan efisiensi pengeluaran publik memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang mampu



mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja (*pro-job*) namun belum berhasil mendukung penurunan kemiskinan (*anti-poor*) dan peningkatan kesejahteraan.

Kata Kunci: desentralisasi fiskal, efisiensi pengeluaran publik, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, kemiskinan, dan kesejahteraan.



ABSTRACT

Bei, Viktoria N.R. Graduate Program in Economics, Faculty of Economics and Business, Brawijaya University, 2018. THE INFLUENCE OF

FISCAL DECENTRALIZATION AND PUBLIC EXPENDITURE EFFICEINCY ON ECONOMIC GROWTH, EMPLOYMENT, POVERTY, AND WELFARE (A Case Study in East Java). Chief Advisor: Prof.

Candra Fajri A, SE., M.Sc., Ph.D, Advisory Commission: Dr. Moh.

Khusaini SE, M.Si, M.A.

The purpose of this research is to analyze the influence of fiscal decentralization and public expenditure efficiency on economic growth, employment, poverty, and welfare. The analysis of this research is divided into three stages: the first is Data Envelopment Analysis (DEA) to measure the value of public expenditure efficiency; the second is Data Panel Regression to analyze factors affecting the efficiency of public expenditure; and the third is Path Analysis to analyze the direct and indirect influence of general allocation fund, special allocation fund, revenue sharing fund, and public expenditure efficiency on economic growth, employment, poverty, and welfare in Western and Eastern Indonesia.

The results of this study are that public expenditures in most provinces in Indonesia are inefficient. Increased local expenditures are proven to have a negative effect on public expenditure efficiency, while increased local revenues are proven to have a positive effect on public expenditure efficiency. Increased general allocation fund, revenue sharing, and efficiency of public expenditure is proven to have a positive effect on economic growth in Western and Eastern Indonesia, while increased special allocation fund is proven to have a negative effect on economic growth in Western and Eastern Indonesia. Increased

economic growth has a positive influence on employment, but it is proven to have effects on increased poverty and decreased welfare in Western and Eastern Indonesia. Increased employment and increased poverty are proven to trigger decreased welfare in Western and Eastern Indonesia. Furthermore, increased general allocation funds and revenue sharing funds have indirect effects on increased employment, but they do not influence reduction of poverty yet influence reduction of welfare in Western Indonesia. Whereas, in Eastern Region, increased general allocation funds and revenue sharing funds do not influence increased employment, influence increased poverty, and influence reduced welfare through economic growth. Increased special allocation funds have indirect effects on reduced employment, reduced poverty, and increased welfare through economic growth in Western and Eastern Region. Increased efficiency of public expenditure indirect do not effects on employment and poverty thus, have influence reduced welfare through economic growth in Western Region. Whereas, in Eastern Region, Increased efficiency of public expenditure indirect effects on increased employment, but have influence increased poverty and reduced welfare through economic growth.

Finally, fiscal decentralization and efficiency of public expenditure have a positive effect on economic growth that is able to encourage increase employment (pro-job) but they do not influence reduced poverty (anti-poor) and increased welfare.

Keywords: fiscal decentralization, public expenditure efficiency, general allocation fund, special allocation fund, revenue sharing fund, economic growth, employment, poverty, welfare

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala Berkat dan Karuniah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Efisiensi Pengeluaran Publik Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Penyerapan Tenaga Kerja, Kemiskinan dan Kesejahteraan (Studi Kasus Provinsi di Indonesia)”. Tesis ini disusun sebagai persyaratan mendapatkan gelar Magister Ekonomi di Jurusan Ilmu Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk beberapa pihak yang telah membantu kelancaran penulis di dalam penulisan tesis ini antara lain:

1. Bapak Prof. Candra Fajri A, SE., M.Sc., Ph.D selaku dosen pembimbing I kesabaran, arahan, dan seluruh bantuan yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
2. Bapak Dr. Moh. Khusaini SE, M.Si, MA selaku dosen pembimbing II atas kesabaran, arahan, dan seluruh bantuan yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
3. Bapak Dr. Susilo, SE., MS selaku dosen penguji I atas seluruh saran dan masukan yang bermanfaat bagi penulis.
4. Bapak Setyo Tri Wahyudi, SE., M.Ec., Ph.D selaku dosen penguji II atas saran dan masukan yang bermanfaat bagi penulis.
5. Bapak Nurkholis, SE., M.Buss. (Acc)., Ak., Ph.D selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
6. Bapak Devanto Shasta Pratomo, SE., M.Si., Ph.D selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi.

7. Kedua orang tuaku tercinta dan keluarga terima kasih atas segala bimbingan dan dukungannya dan tetap menjadi inspirasi dan penerang hidup penulis.

8. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan banyak ilmu dan arahan kepada penulis.

9. Bapak dan Ibu Karyawati Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.

10. Semua pihak yang telah membantu penulis di dalam menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari sepenuhnya tesis ini jaug dari kata sempurna dan tidak lepas dari segala kekurangan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan selanjutnya. Semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Malang, September 2018

Penulis



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	18
1.3 Tujuan Penelitian	19
1.4 Manfaat Penelitian	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
2.1 Teori Desentralisasi Fiskal	20
2.1.1 Desentralisasi Penerimaan	22
2.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	22
2.1.1.2 Dana Perimbangan	22
2.1.1.3 Pinjaman Daerah	26
2.1.2 Desentralisasi Pengeluaran.....	26
2.1.2.1 Belanja Langsung	27
2.1.2.2 Belanja Tidak Langsung	27
2.2 Teori Pengeluaran Publik	28
2.3 Teori Efisiensi Pengeluaran Publik	30
2.4 Teori Pertumbuhan Ekonomi	33
2.4.1 Teori pertumbuhan Ekonomi Klasik	35
2.4.2 Teori Pertumbuhan Harrold Domar	35
2.5 Teori Ketenagakerjaan	37
2.6 Teori Kemiskinan	39
2.7 Teori Kesejahteraan	41
2.8 Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Penyerapan Tenaga Kerja, Kemiskinan, dan Kesejahteraan	42
2.9 Pengaruh Efisiensi Pengeluaran Publik Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Penyerapan Tenaga Kerja, Kemiskinan, dan Kesejahteraan.....	44

2.10 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja, Kemiskinan, dan Kesejahteraan	45
2.11 Penelitian Terdahulu	47
BAB III KERANGKA KONSEP PENELITIAN	54
3.1 Kerangka Pikir Penelitian	54
3.2 Hipotesis	66
BAB IV METODE PENELITIAN	68
4.1 Pendekatan Penelitian	68
4.2 Ruang Lingkup Penelitian	68
4.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	71
4.4 Metode Pengumpulan Data	74
4.5 Metode Analisis Data	75
4.5.1 Analisis Deskriptif	75
4.5.2 Pengukuran Efisiensi Pengeluaran Publik dengan Metode <i>Data Envelopment Analysis</i> (DEA)	76
4.5.3 Model Regresi Data Panel	80
4.5.3.1 Pengujian Spesifikasi Model	82
4.5.3.2 Pengujian Statistik	85
4.5.3.2.1 Uji Statistik F (Uji Signifikansi Parameter Simultan)	85
4.5.3.2.2 Uji Statistik t (Uji Signifikansi Parameter Individual)	86
4.5.3.3 Pengujian Asumsi Klasik	89
4.5.3.3.1 Uji Normalitas	89
4.5.3.3.2 Uji Multikolinieritas	89
4.5.3.3.3 Uji Heterokedastisitas	89
4.5.3.3.4 Autokorelasi	90
4.5.4 Metode Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>)	91
4.5.4.1 Langkah-langkah dalam Metode <i>Path Analysis</i>	92

4.5.4.2 Uji Asumsi Klasik	96
4.5.4.2.1 Uji Linearitas	96
4.5.4.2.2 Uji Normalitas	96
4.5.4.2.3 Uji Outlier	97
4.5.4.3 Pengujian Hipotesis	97
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	98
5.1 Gambaran Umum Indonesia	98
5.2 Analisis Deskriptif	99
5.2.1 Belanja Daerah	99
5.2.2 Pendapatan Asli Daerah	103
5.2.3 Investasi Swasta	105
5.2.4 Dana Alokasi Umum	108
5.2.5 Dana Alokasi Khusus	110
5.2.6 Dana Bagi Hasil	112
5.2.7 Efisiensi Pengeluaran Publik	115
5.2.8 Pertumbuhan Ekonomi	119
5.2.9 Penyerapan Tenaga Kerja	121
5.2.10 Kemiskinan	123
5.2.11 Kesejahteraan	125
5.3 Hasil Penelitian	127
5.3.1 Efisiensi Pengeluaran Publik Menggunakan Analisis <i>Data Envelopment Analysis (DEA)</i>	127
5.3.2 Analisis Regresi Data Panel	132
5.3.2.1 Pengujian Asumsi Klasik	132
5.3.2.1.1 Uji Normalitas	132
5.3.2.1.2 Uji Multikolinearitas	133
5.3.2.1.3 Uji Heteroskedastisitas	133

5.3.2.1.4 Uji Autokorelasi	134
5.3.2.2 Pengujian Spesifikasi Model	135
5.3.2.3 Hasil Regresi Data Panel Model <i>Random Effect</i>	137
5.3.2.4 Pengujian Statistik	138
5.3.2.4.1 Uji Statistik F (Uji Signifikansi Parameter Simultan)	138
5.3.2.4.2 Uji Statistik t (Uji Signifikansi Paramater Individual)	138
5.3.3 Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>)	140
5.3.3.1 Latar Belakang Pemilihan Kawasan Indonesia Barat (KIB) dan Kawasan Indonesia Timur (KIT)	140
5.3.3.2 Hasil Pengujian Asumsi <i>Path Analysis</i>	148
5.3.3.2.1 Uji Linearitas	148
5.3.3.2.2 Uji Normalitas	149
5.3.3.2.3 Uji <i>Outlier</i>	150
5.3.3.3 Hasil Estimasi Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>)	151
5.3.3.3.1 Hasil Pengujian Analisis Jalur Kawasan Indonesia Barat (KIB)	151
5.3.3.3.2 Hasil Pengujian Analisis Jalur Kawasan Indonesia Timur (KIT)	164
5.4 Pembahasan Hasil dan Implikasi Penelitian	176
5.4.1 Efisiensi Pengeluaran Publik	176
5.4.2 Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Efisiensi Pengeluaran Publik	182
5.4.2.1 Peningkatan Belanja Daerah Berpengaruh Terhadap Penurunan Efisiensi Pengeluaran Publik	182
5.4.2.2 Peningkatan Penerimaan Daerah Berpengaruh Terhadap Peningkatan Efisiensi Pengeluaran Publik	189
5.4.3 Pengaruh Langsung Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus,	



Dana Bagi Hasil, Efisiensi Pengeluaran Publik

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Penyerapan

Tenaga Kerja, Kemiskinan, dan Kesejahteraan 191

5.4.3.1 Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap

Pertumbuhan Ekonomi 191

5.4.3.2 Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap

Pertumbuhan Ekonomi 195

5.4.3.3 Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap

Pertumbuhan Ekonomi 197

5.4.3.4 Pengaruh Efisiensi Pengeluaran Publik Terhadap

Pertumbuhan Ekonomi 200

5.4.3.5 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap

Penyerapan Tenaga Kerja 201

5.4.3.6 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan 204

5.4.3.7 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan..... 207

5.4.3.8 Pengaruh Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Kesejahteraan..... 209

5.4.3.9 Pengaruh Kemiskinan Terhadap Kesejahteraan 214

5.4.4 Pengaruh Tidak Langsung Dana Alokasi Umum,

Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil,

Efisiensi Pengeluaran Publik terhadap

Penyerapan Tenaga Kerja, Kemiskinan, dan

Kesejahteraan Melalui Pertumbuhan Ekonomi 217

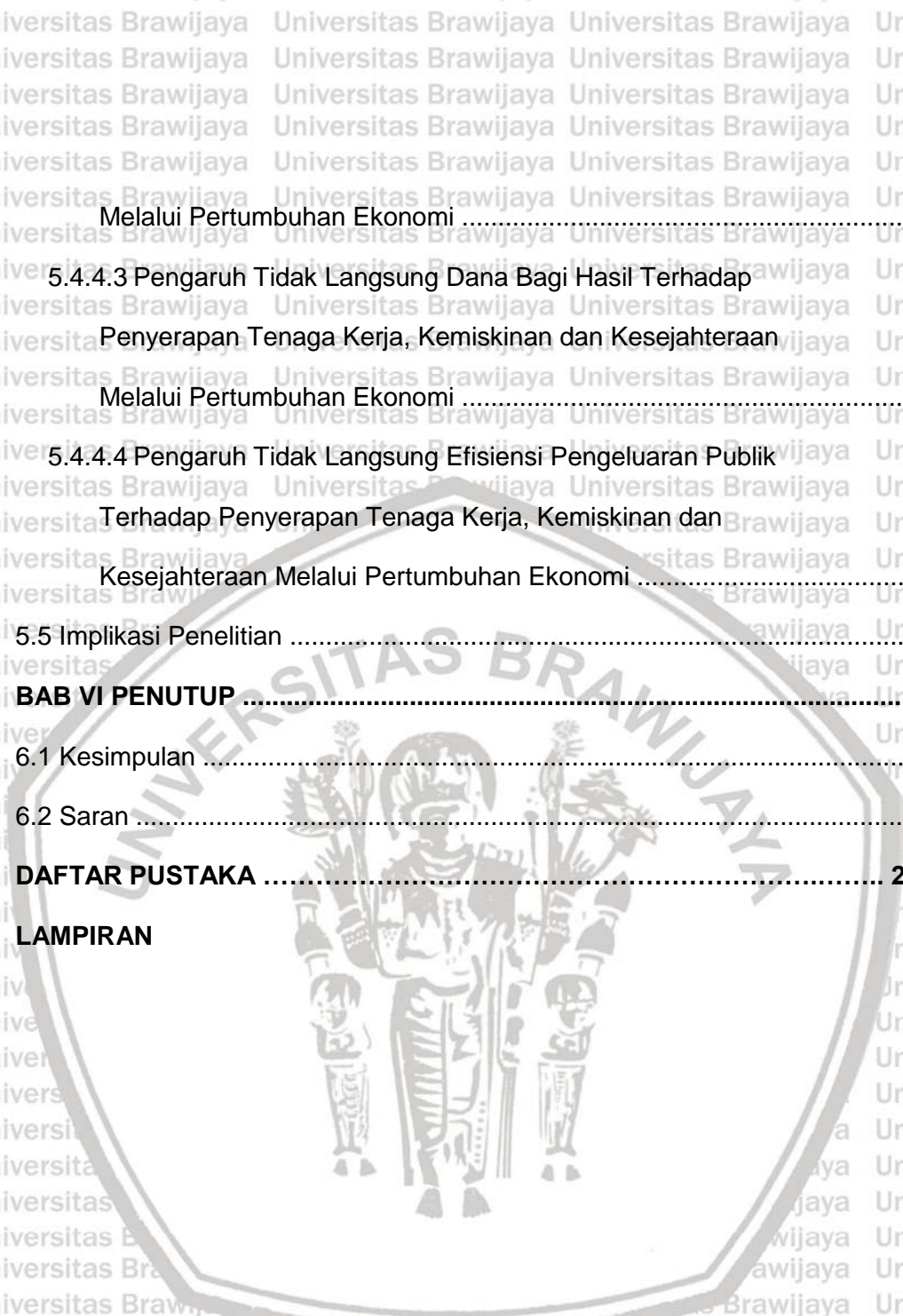
5.4.4.1 Pengaruh Tidak Langsung Dana Alokasi Umum Terhadap

Penyerapan Tenaga Kerja, Kemiskinan dan Kesejahteraan

Melalui Pertumbuhan Ekonomi 218

5.4.4.2 Pengaruh Tidak Langsung Dana Alokasi Khusus Terhadap

Penyerapan Tenaga Kerja, Kemiskinan dan Kesejahteraan



Melalui Pertumbuhan Ekonomi 223

5.4.4.3 Pengaruh Tidak Langsung Dana Bagi Hasil Terhadap
Penyerapan Tenaga Kerja, Kemiskinan dan Kesejahteraan
Melalui Pertumbuhan Ekonomi 226

5.4.4.4 Pengaruh Tidak Langsung Efisiensi Pengeluaran Publik
Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja, Kemiskinan dan
Kesejahteraan Melalui Pertumbuhan Ekonomi 228

5.5 Implikasi Penelitian 230

BAB VI PENUTUP 235

6.1 Kesimpulan 235

6.2 Saran 237

DAFTAR PUSTAKA 239

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

5.1 Efisiensi Pengeluaran Publik Provinsi di Indonesia	129
5.2 Hasil Uji Multikolinieritas	133
5.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas	133
5.4 Hasil <i>Durbin-Watson</i> (D-W)	134
5.5 Hasil <i>Uji Chow</i>	135
5.6 Hasil <i>Uji Hausman</i>	136
5.7 Hasil Regresi Data Panel Model <i>Random Effect</i>	137
5.8 Hasil Pengujian Outlier 33 Provinsi di Indonesia	141
5.9 Hasil Pengujian Outlier di KIB dan KIT	147
5.10 Hasil Pengujian Asumsi Linearitas	149
5.11 Hasil Pengujian Asumsi Normalitas	150
5.12 Ringkasan Hasil Estimasi Jalur Pengaruh Langsung (<i>Direct</i>), Tidak Langsung (<i>Indirect</i>), Pengaruh Total (<i>Total Effect</i>) dan R-Squared di Kawasan Indonesia Barat (KIB)	162
5.13 Ringkasan Hasil Estimasi Jalur Pengaruh Langsung (<i>Direct</i>), Tidak Langsung (<i>Indirect</i>), Pengaruh Total (<i>Total Effect</i>) dan R-Squared di Kawasan Indonesia Timur (KIT)	174
5.14 Jumlah Provinsi yang Efisien dan Tidak Efisien	177



DAFTAR GAMBAR

1.1 Pendapatan Asli daerah (PAD) dan Dana Perimbangan	3
1.2 Penerimaan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi.....	5
1.3 Belanja Operasional dan Belanja Modal	7
1.4 Investasi Swasta Daerah Di Indonesia	10
1.5 Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin	13
1.6 Tingkat Partispasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	14
1.7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	15
3.1 Kerangka Konsep Penelitian.....	65
3.2 Kerangka Pikir Penelitian.....	66
4.1 Kerangka Penelitian Data Envelopment Analysis (DEA)	79
4.2 Kerangka Penelitian Model Regresi Data Panel	88
4.3 Daerah Batas Serial Korelasi	90
4.4 Model Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>)	92
5.1 Peta Geografi Indonesia	98
5.2 Belanja Operasional di Kawasan Indonesia Barat (KIB)	100
5.3 Belanja Operasional di Kawasan Indonesia Timur (KIT)	101
5.4 Belanja Modal di Kawasan Indonesia Barat (KIB)	102
5.5 Belanja Modal di Kawasan Indonesia Timur (KIT)	102
5.6 Pendapatan Asli Daerah di Kawasan Indonesia Barat (KIB)	103
5.7 Pendapatan Asli Daerah di Kawasan Indonesia Timur (KIT)	104
5.8 Investasi Swasta di Kawasan Indonesia Barat (KIB)	106
5.9 Investasi Swasta di Kawasan Indonesia Timur (KIT)	107
5.10 Dana Alokasi Umum di Kawasan Indonesia Barat (KIB)	108
5.11 Dana Alokasi Umum di Kawasan Indonesia Timur (KIT)	109
5.12 Dana Alokasi Khusus di Kawasan Indonesia Barat (KIB)	111

5.13 Dana Alokasi Khusus di Kawasan Indonesia Timur (KIT)	112
5.14 Dana Bagi Hasil di Kawasan Indonesia Barat (KIB)	113
5.15 Dana Bagi Hasil di Kawasan Indonesia Timur (KIT)	114
5.16 Nilai Efisiensi Pengeluaran di Kawasan Indonesia Barat (KIB)	116
5.17 Nilai Efisiensi Pengeluaran di Kawasan Indonesia Timur (KIT)	117
5.18 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) KIB	119
5.19 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) KIT	120
5.20 Tenaga Kerja di Kawasan Indonesia Barat (KIB)	121
5.21 Tenaga Kerja di Kawasan Indonesia Timur (KIT)	122
5.22 Jumlah Penduduk Miskin di Kawasan Indonesia Barat (KIB)	123
5.23 Jumlah Penduduk Miskin di Kawasan Indonesia Timur (KIT)	124
5.24 Indeks Pembangunan Manusia di Kawasan Indonesia Barat	125
5.25 Indeks Pembangunan Manusia di Kawasan Indonesia Timur	126
5.26 Hasil Uji Normalitas	132
5.27 Diagram Jalur Hasil Uji Hipotesis KIB	152
5.28 Diagram Jalur Pengaruh Tidak Langsung Penyerapan Tenaga Kerja (PTK) di KIB	156
5.29 Diagram Jalur Pengaruh Tidak Langsung Kemiskinan (TK) di KIB	158
5.30 Diagram Jalur Pengaruh Tidak Langsung Kesejahteraan (IPM) di KIB	160
5.31 Diagram Jalur Hasil Uji Hipotesis KIT	164
5.32 Diagram Jalur Pengaruh Tidak Langsung Penyerapan Tenaga Kerja (PTK) di KIT	168
5.33 Diagram Jalur Pengaruh Tidak Langsung Kemiskinan (TK) di KIT	170
5.34 Diagram Jalur Pengaruh Tidak Langsung	



Kesejahteraan (IPM) di KIT	172
5.35 Rata-rata Realisasi APBD 2011-2014 (Presentase)	178
5.36 Investasi Swasta Aktual dan <i>Projection</i> Provinsi di Indonesia	180
5.37 Pendapatan Asli Daerah Aktual dan <i>Projection</i> Provinsi di Indonesia.....	181
5.38 Belanja Kesehatan di Indonesia	184
5.39 Belanja Pendidikan di Indonesia	186
5.40 Realisasi Belanja Kawasan Indonesia Barat (KIB)	192
5.41 Realisasi Belanja Kawasan Indonesia Timur (KIT)	193
5.42 Perkembangan Dana Alokasi Khusus KIB dan KIT	196
5.43 Dana Bagi Hasil Kawasan Indonesia Barat (KIB)	197
5.44 Dana Bagi Hasil Kawasan Indonesia Barat (KIT)	198
5.45 Pertumbuhan Industri Pengolahan Tembakau	199
5.46 Perkembangan Investasi Swasta di Indonesia	202
5.47 Jumlah Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha di Indonesia	203
5.48 Jumlah Pengangguran dan Kemiskinan	205
5.49 Koefisien Gini Ratio	206
5.50 Nilai Tukar Petani di Indonesia	208
5.51 Jumlah Tenaga Kerja Menurut Status Pekerja Utama	210
5.52 Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan	211
5.53 Upah/Gaji/Pendapatan Bersih Per Bulan	212
5.54 Jumlah Pengangguran Menurut Keahlian	214
5.55 Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (p1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (p2)	216
5.56 Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Lapangan Usaha KIB	218
5.57 Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Lapangan Usaha KIT	220



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang berkelanjutan dan terarah demi terwujudnya kemajuan serta perbaikan yang ingin dicapai suatu bangsa. Pada dasarnya pembangunan bertujuan meningkatkan kualitas dan standar kehidupan manusia untuk mencapai kesejahteraan secara mutlak. Pembangunan merupakan suatu proses multidimensional percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan dan pemberantasan kemiskinan yang absolut (Todaro, 2000:18). Proses pembangunan di Indonesia masih sangat rentan terhadap guncangan yang secara berulang akan menimbulkan krisis ekonomi, sosial dan politik. Salah satu penyebab kegagalan pembangunan di Indonesia adalah kebijaksanaan yang menyimpang (*misleading policy*) yang berdampak pada melebarnya ketimpangan pembangunan antar wilayah dan antar kelompok pendapatan (Suwandi, 2011).

Berdasarkan teori federalisme fiskal yang dikemukakan Musgrave (1959) dalam Oates (2005), pemerintah secara aktif dan memiliki peran penting dalam memperbaiki berbagai bentuk kegagalan pasar, menetapkan pemerataan pendapatan dan menstabilkan ekonomi. Salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam memperbaiki ekonomi dan mengatasi kesenjangan antara daerah adalah dengan cara memberikan kewenangan yang seluas-luasnya dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah dalam mengatur dan mengelola daerahnya (otonomi daerah) yaitu melalui desentralisasi fiskal.

Desentralisasi fiskal di Indonesia dimulai tahun 2001 dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah

Daerah yang sekarang telah dirubah menjadi Undang-undang Nomor 32

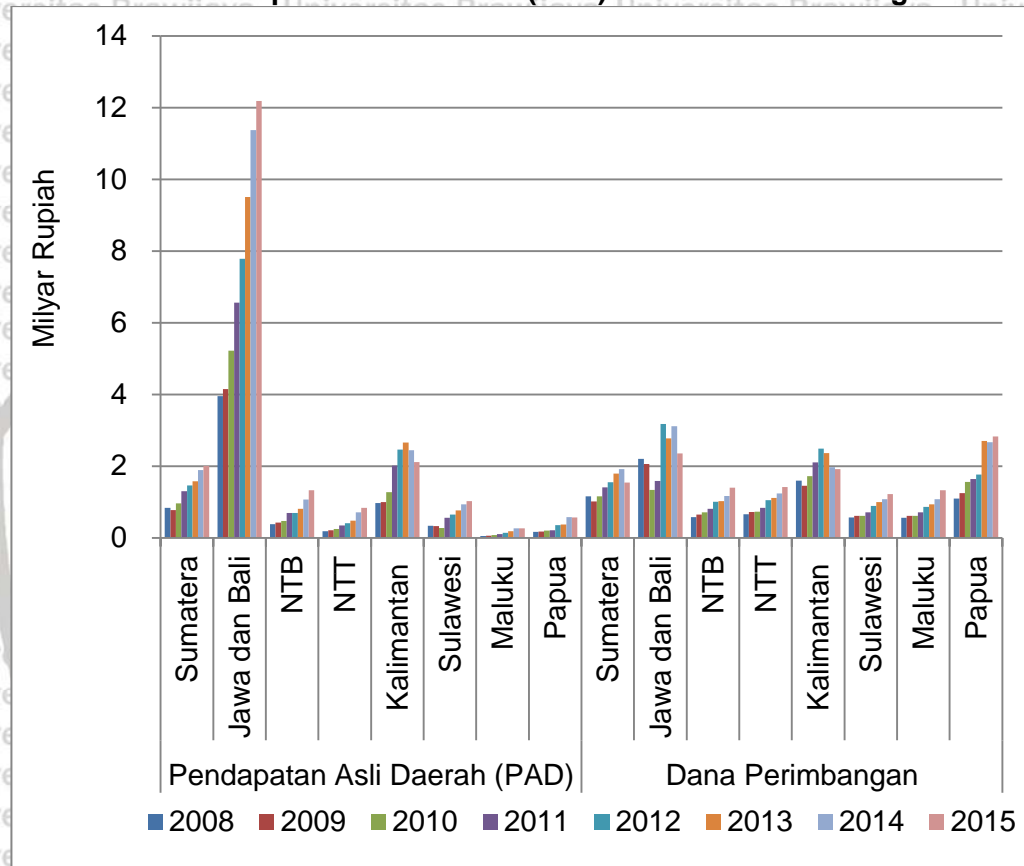
Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat yang sekarang telah dirubah menjadi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004.

Undang-undang ini mereflesikan pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah serta memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menggali potensi sumber daya keuangan daerahnya.

Desentralisasi fiskal banyak membantu daerah dalam meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan daerahnya yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan ekonomi. Penerimaan daerah merupakan salah satu indikator dalam menentukan desentralisasi fiskal dapat dikategorikan berhasil atau tidak (Khusaini, 2006). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sumber penerimaan daerah berasal dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan pinjaman. PAD merupakan penerimaan yang diperoleh dari potensi sumber daya dalam wilayahnya sendiri seperti pajak daerah dan restribusi daerah. PAD mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Jika semakin besar PAD maka kemandirian daerah tinggi artinya daerah tersebut mampu melaksanakan desentralisasi fiskal. Dana perimbangan merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan daerah. Dana perimbangan terdiri dari dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana bagi hasil (DBH). DAU digunakan untuk menutup celah fiskal karena kebutuhan daerah (*fiscal need*) lebih besar dari potensi penerimaan daerah (*fiscal capacity*). DAK digunakan untuk membantu kebutuhan khusus yang menjadi prioritas nasional yaitu pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. DBH berfungsi untuk menambah pendapatan

daerah yang berasal dari dana bagi hasil pajak, dan sumber daya alam seperti kehutanan, perikanan, pertambangan umum, pertambangan minyak dan gas bumi serta pertambangan panas bumi.

Gambar 1.1: Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan



Sumber: Badan Pusat Statistika (data diolah)

Berdasarkan gambar 1.1, secara keseluruhan terjadi peningkatan penerimaan PAD dan dana perimbangan pada setiap daerah di Indonesia dari tahun ke tahun. Daerah-daerah di Kawasan Indonesia Barat (KIB) yaitu Jawa, Bali, dan Sumatera memiliki PAD dan dana perimbangan tertinggi, walaupun pada tahun 2013 dan 2015 PAD mengalami penurunan dikarenakan adanya krisis ekonomi global yang menyebabkan pemerintah menambah alokasi dana perimbangan untuk membantu pembiayaan di daerah. Sedangkan PAD dan dana perimbangan pada daerah-daerah di kawasan Indonesia Timur (KIT) yaitu Nusa Tenggara, Kalimantan Sulawesi, Maluku dan Papua mengalami

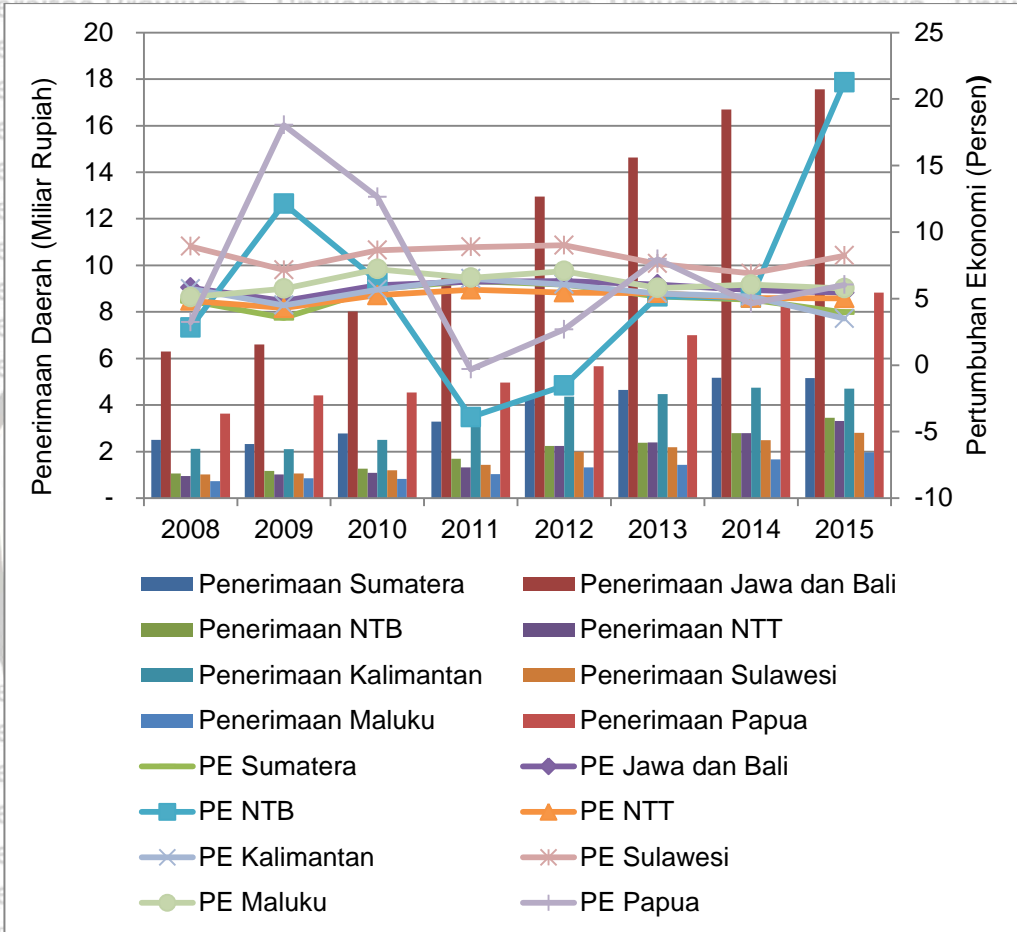
peningkatan setiap tahun, akan tetapi pertumbuhan PAD dan dana perimbangan masih relatif rendah. Jika dilihat bahwa proporsi penerimaan PAD di KIB lebih besar dari dana perimbangan, dapat diartikan bahwa tingkat kemandirian daerah di KIB relatif tinggi. Sedangkan penerimaan PAD di KIT lebih kecil dari dana perimbangan, dapat diartikan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah di KIT terhadap pemerintah pusat masih relatif tinggi.

Desentralisasi fiskal dapat meningkatkan kemandirian pemerintah daerah dalam pembiayaan dan kemampuan pengelolaan daerah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut Oates (1993), desentralisasi fiskal mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, karena pemerintah daerah akan lebih efisien dalam produksi penyediaan barang-barang publik. Neyapti (2013), mengemukakan desentralisasi fiskal adalah mekanisme kelembagaan yang membantu mengungkapkan preferensi daerah dan memfasilitasi penyediaan layanan publik daerah yang efektif melalui peningkatan perekonomian daerah secara transparansi dan akuntabilitas. Peningkatan penerimaan daerah berupa PAD dan perimbangan secara normative akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini didukung dengan beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan Mutiah (2017), Tirtosuharto (2009), Muharajabdinul *et al* (2015), dan Zakaria (2012) menemukan bahwa peningkatan PAD dan dana perimbangan berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yushkov (2015), menemukan dana transfer fiskal dari pemerintah pusat berpengaruh positif dengan pertumbuhan ekonomi di Rusia.

Akan tetapi, fenomena menarik terjadi di beberapa daerah di Indonesia, dimana ketika tren PAD dan dana perimbangan setiap tahun meningkat, hal tersebut tidak serta diikuti dengan peningkatan pertumbuhan

ekonomi. Peningkatan penerimaan daerah tidak selamanya akan berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah atau pengaruhnya tidak selalu linear.

Gambar 1.2: Penerimaan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah



Sumber: Badan Pusat Statistika (data diolah)

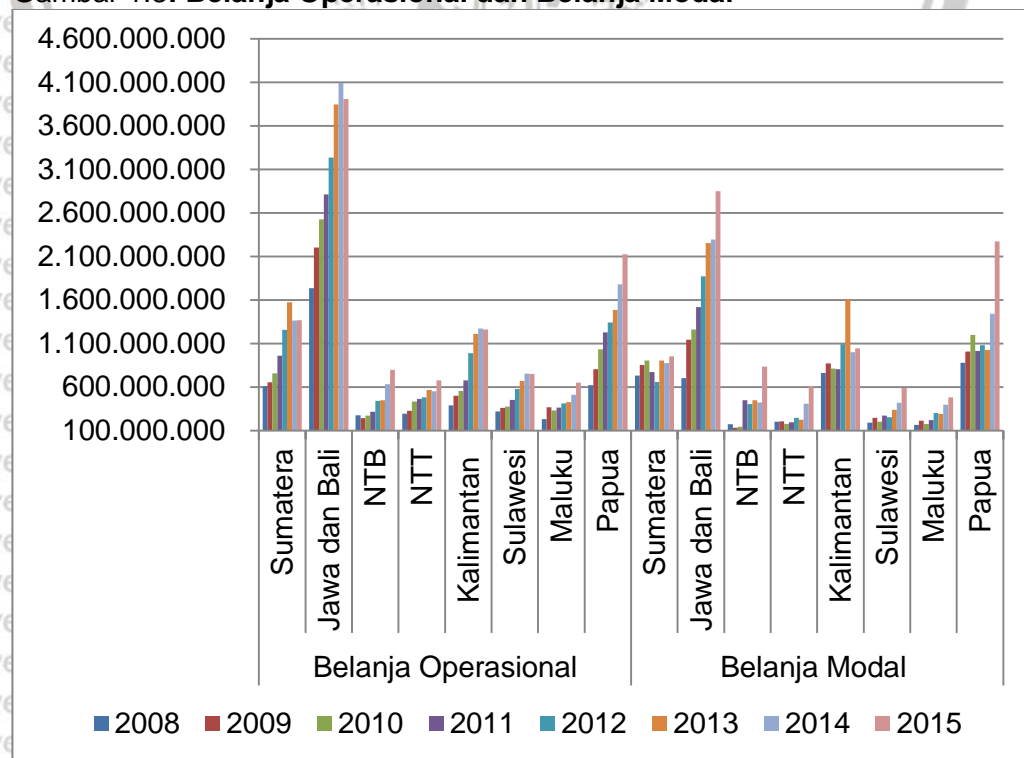
Berdasarkan pada gambar 1.2 diatas, terlihat tren peningkatan penerimaan daerah yaitu PAD dan dana perimbangan di KIB dan KIT dari tahun 2008-2015 tidak diikuti dengan tren peningkatan pertumbuhan ekonomi di KIB dan KIT yang sempat mengalami penurunan. Pada tahun 2011-2012 pertumbuhan ekonomi NTB mengalami penurunan yang cukup tajam bahkan menunjukkan pertumbuhan negatif. Memasuki tahun 2013-2015 sebagian besar daerah di Kawasan Indonesia Timur seperti NTT, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Rahrarjo

(2006) menyatakan bahwa upaya-upaya peningkatan PAD hanya dapat dilaksanakan pada kondisi dan hal-hal tertentu saja, karena umumnya usaha tersebut justru dapat meningkatkan beban masyarakat. Disisi lain penurunan pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu krisis ekonomi global yang terjadi pada tahun 2009 dan 2013, yang menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional. Ketika terjadi krisis dan perlambatan ekonomi, penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) cenderung akan mengalami penurunan sehingga pemerintah pusat akan meningkatkan alokasi dana perimbangan untuk membiayai pembangunan ekonomi di daerah. Hal ini didukung dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Zhang & Zou (1998) dan Yang (2016), menemukan peningkatan penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah diikuti dengan penurunan pertumbuhan ekonomi di China. Pepinsky dan Maria (2011) menemukan desentralisasi di Indonesia tidak memiliki efek yang nyata terhadap kinerja ekonomi nasional. Sasana (2015), menemukan desentralisasi fiskal tidak berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Marwani dkk (2013), dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh tahun 2005-2011. Kresnandra (2016), dana perimbangan tidak memperkuat pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Bali.

Sejalan dengan peningkatan penerimaan daerah yaitu PAD dan dana perimbangan maka akan diikuti dengan peningkatan kualitas belanja daerah. Berdasarkan teori murni pengeluaran publik yang dikemukakan Samuelson (1954), pengeluaran publik merupakan elemen penting dalam pertumbuhan ekonomi yang menempatkan pemerintah menjadi peran utama. Khusaini (2006), pengeluaran pemerintah merupakan salah satu indikator dalam menilai keberhasilan suatu desentralisasi fiskal selain penerimaan pemerintah daerah. Soejoto, *et al* (2015) dan Pal (2017), peningkatan dana desentralisasi

dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah terutama belanja modal produktif yaitu di bidang pendidikan dan kesehatan, bidang transportasi dan komunikasi. Belanja modal akan meningkatkan produktifitas masyarakat dan iklim investasi daerah yang berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Utomo dan Sumarsono (2009) menyatakan kebijakan pengeluaran pemerintah melalui belanja modal secara langsung mendorong pertumbuhan ekonomi, sedangkan belanja operasional memiliki pengaruh yang kecil terhadap penguatan ekonomi daerah karena cenderung konsumtif dan mengarah kepada peningkatan inflasi. Keterbatasan sumber daya fiskal di daerah menyebabkan kebanyakan pemerintah daerah mengurangi belanja modal, dimana hal ini memiliki dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini terjadi di beberapa daerah di Indonesia, dimana komposisi belanja modal masih lebih rendah dari belanja operasional.

Gambar 1.3: Belanja Operasional dan Belanja Modal



Sumber: Badan Pusat Statistika (data diolah)

Jika dilihat dari gambar 1.3, menunjukkan tren peningkatan belanja operasional dan belanja modal di Indonesia dari tahun 2008-2015. Peningkatan belanja sejalan dengan kenaikan dana perimbangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Alokasi belanja daerah di kawasan Barat Indonesia seperti Sumatera, Jawa dan Bali lebih besar dibandingkan di kawasan Timur Indonesia seperti Kalimantan, NTB, NTT, Maluku, dan Papua masih relatif rendah, hal ini disesuaikan dengan kebutuhan fiskal setiap daerah. Akan tetapi, berdasarkan komposisi belanja daerah di semua wilayah di Indonesia diketahui bahwa belanja operasional memiliki alokasi lebih tinggi di bandingkan belanja modal. Dengan adanya proporsi belanja modal yang masih lebih kecil dari belanja operasional maka diartikan bahwa pemerintah daerah belum sepenuhnya berhasil mengalokasikan pengeluaran publik secara dan efisien dan efektif. Dimana pengelolaan anggaran daerah harus dilaksanakan berdasarkan *prinsip value for money* yaitu ekonomis, efisien dan efektif sehingga dianggap mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.

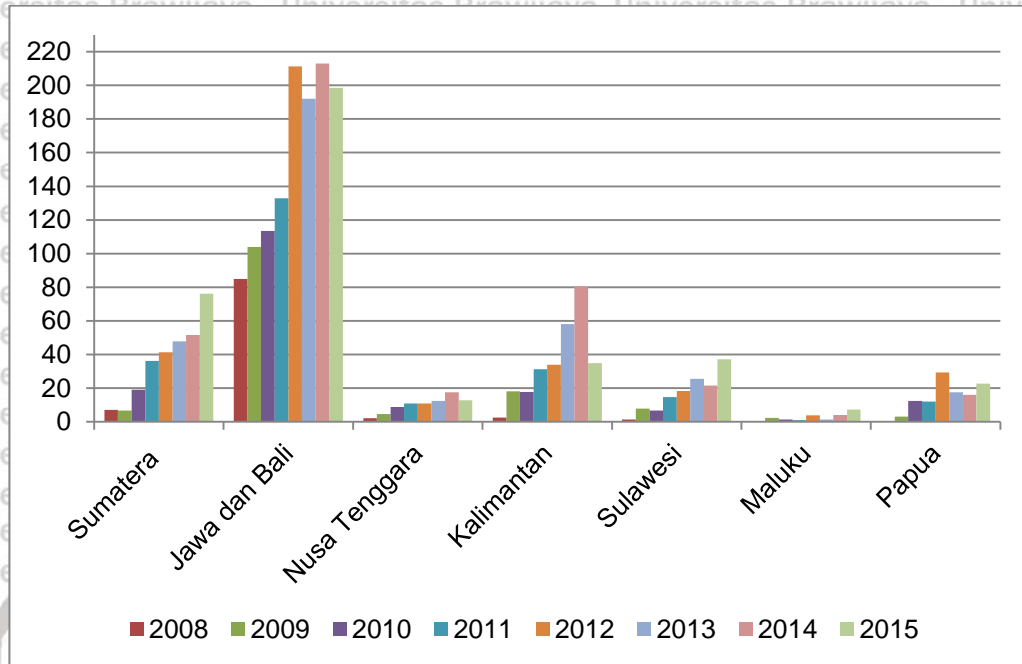
Kebijakan desentralisasi fiskal dipandang sebagai salah satu cara untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengeluaran publik sehingga berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi karena pemerintah daerah lebih mengetahui kondisi kebutuhan dan preferensi pembangunan daerahnya (Utomo dan Sumarsono, 2009). Menurut Bardhan (2002), salah satu tujuan dari pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah dapat mendorong investasi baru. Pilihan yang diambil pemerintah daerah melalui pengeluarannya dapat menentukan tingkat akumulasi modal, yang diidentifikasi sebagai faktor kunci pertumbuhan ekonomi. Tiebout (1956), menghubungkan antara pengeluaran publik dan teori stok modal neoklasik, dimana stok modal diasumsikan memiliki peran kunci dalam menentukan tingkat output, dan dapat berubah

seiring berjalannya waktu karena adanya tambahan investasi dan penyusutan stok modal. Berdasarkan prinsip pertumbuhan Harrod-Domar (Kusnadi, 1999:297) di dalam teori pertumbuhan modern adalah efek ganda dari investasi bersih. Investasi bersih akan menciptakan permintaan akan output dan meningkatkan kapasitas ekonomi untuk menghasilkan output. Peran pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan investasi di wilayahnya merupakan suatu usaha yang dapat membantu kesuksesan daerah dalam mendukung proses pembangunan ekonomi di masa depan karena membuka lapangan kerja baru yang dapat menyerap tenaga kerja dan berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Dampak negatif yang potensial dari peningkatan pengeluaran publik adalah investasi dan konsumsi agregat yang lebih rendah pada sektor swasta (Tirtosuahrto, 2009). Kondisi ini biasanya disebut sebagai "*crowding-out*", dimana modal publik bertindak sebagai pengganti modal swasta dan dengan demikian akan menghalangi insentif bagi sektor swasta untuk berinvestasi. Modal publik adalah input produksi dan pelengkap modal swasta. Pemerintah daerah harus menjaga keseimbangan antara investasi dari modal publik dan swasta. Pemerintah daerah bersaing untuk mendukung tingkat pengembalian investasi modal yang lebih tinggi ke sektor swasta. Dengan demikian, sangat penting bagi pemerintah daerah untuk memberikan insentif bagi sektor swasta untuk berinvestasi.

Investasi swasta sudah bukan lagi menjadi hal tabu di Indonesia. Investasi swasta daerah bersumber dari investasi asing dan investasi domestik. Menurut data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), investasi swasta di Indonesia pada umumnya didominasi pada sektor andalan salah satunya adalah sektor pariwisata, hal ini dibuktikan dari tingginya nilai investasi di sektor sekunder (industri manufaktur) dan tersier (industri jasa).

Gambar 1.4: Investasi Swasta Daerah Di Indonesia



Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal (data diolah)

Pada gambar 1.4, menunjukkan perkembangan investasi swasta beberapa daerah di Indonesia dari tahun 2008-2015. Perkembangan investasi swasta menunjukkan tren pertumbuhan yang fluktuatif. Pertumbuhan investasi swasta terbesar terjadi di kawasan Jawa dan Bali, Sumatera, dan Kalimantan artinya pembangunan ekonomi tinggi sehingga mampu menarik minat investor. Sedangkan pertumbuhan investasi swasta di NTB, NTT, Sulawesi, Maluku, dan Papua masih relatif rendah artinya pembangunan ekonomi masih rendah sehingga daerah belum mampu menarik minat investor. Kondisi ini menunjukkan pertumbuhan investasi swasta di Indonesia belum merata dan daya saing daerah masih rendah.

Penyebab ketidakmerataan investasi swasta daerah di Indonesia dikarenakan sebagian besar daerah seperti di kawasan Indonesia Timur masih memiliki akses dan kemampuan terbatas dalam mengalokasikan sumber daya fiskal. Hal ini tercermin dalam kebijakan, strategi dan keputusan tentang bagaimana mengalokasikan pengeluaran publik secara efisien.

Sebagian besar pengeluaran daerah dialokasikan pada belanja operasional bukan pada belanja modal. Kurangnya insentif dan regulasi yang mendukung pihak swasta, kualitas sumber daya manusia yang masih rendah, keterbatasan infrastruktur, kapasitas kelembagaan pemerintah masih lemah dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih rendah menyebabkan melambatnya pertumbuhan investasi. Tingkat investasi swasta rendah berpotensi membatasi kemampuan daerah untuk bersaing dengan kekuatan global maupun regional yang lebih besar dan terintegasi.

Dengan adanya fenomena di Indonesia dimana peningkatan kapasitas fiskal yaitu penerimaan fiskal berupa PAD dan dana perimbangan yang tidak diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, dan proporsi belanja modal lebih kecil dari belanja operasional, serta ketidakmerataan pertumbuhan investasi swasta di daerah, sehingga peneliti mengasumsikan bahwa pemerintah daerah belum efisien dan efektif dalam mengelola kapasitas fiskal. Pemerintah daerah dinilai belum berhasil mencapai tujuan utama dari pelaksanaan desentralisasi fiskal yaitu pemerataan distribusi pendapatan melalui inisiatif daerah yang akan mempercepat pertumbuhan regional. Hal ini di dukung dengan beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tirtosuharto (2009), desentralisasi fiskal memberikan struktur insentif yang lebih besar bagi daerah-daerah di Indonesia untuk menjadi lebih efisien, akan tetapi hal ini tidak selalu mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang kuat karena karena ketidakmampuan daerah mengelola sumber daya fiskal dan kurangnya investasi dalam belanja modal atau produktif. Utomo dan Sumarsono (2009), menemukan desentralisasi pengeluaran publik memiliki dampak positif yang signifikan terhadap inefisiensi pengeluaran publik di Jawa Timur. Herrera dan Pang (2005), menemukan bahwa negara dengan tingkat pengeluaran yang lebih tinggi mendapatkan skor efisiensi yang

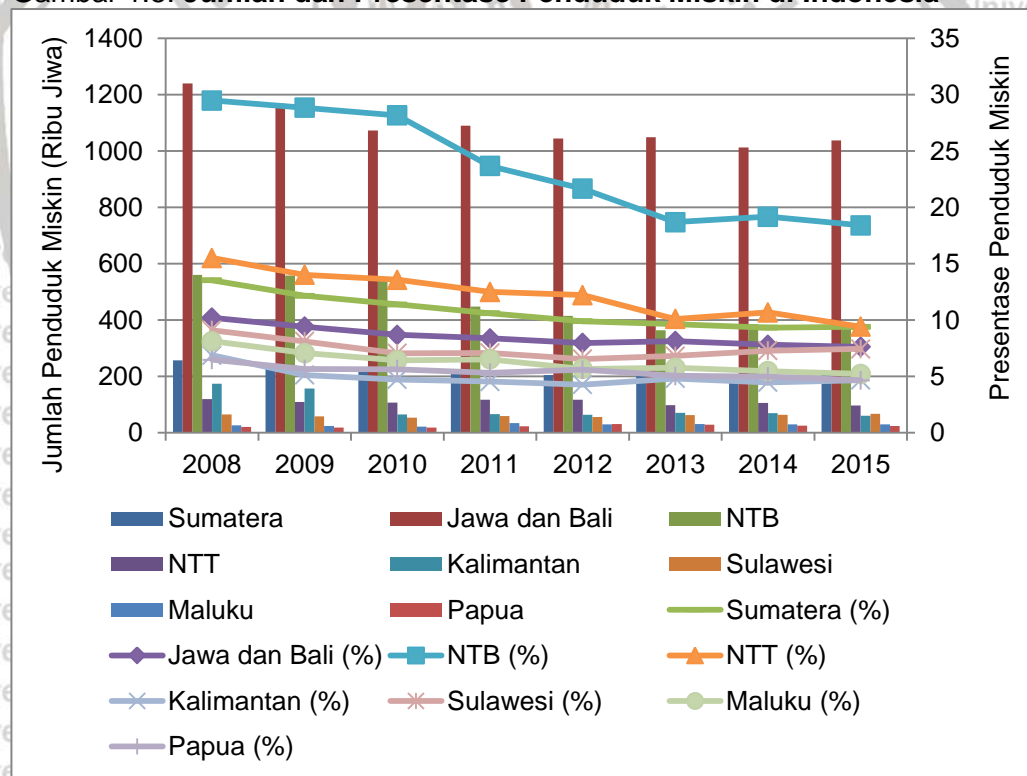
lebih rendah. Liu *et al* (2016), menemukan bahwa terdapat ketidakkonsistenan efek spasial pengeluaran fiskal dan pendapatan fiskal terhadap efisiensi keuangan di daerah. Inefisiensi pemerintah daerah mengalokasikan pengeluaran publik dikarenakan beberapa daerah masih menghadapi tantangan dalam menstimulasi ekonomi daerahnya walaupun memiliki kapasitas fiskal yang lebih besar, adanya peningkatan korupsi dan *rent seeking* di tingkat daerah, serta pelaksanaan desentralisasi di Indonesia tidak mengarah pada konvergensi ekonomi, dimana tingkat disparitas regional di Indonesia masih sangat tinggi.

Brennan dan Buchanan (1980), mengemukakan sangat penting untuk mengukur efisiensi pengalokasian pengeluaran publik oleh pemerintah daerah. Hal ini tercermin dalam kebijakan, strategi dan keputusan tentang bagaimana mengalokasikan belanja daerah. Pengukuran kinerja daerah melalui efisiensi belanja juga dimungkinkan karena semua daerah mengikuti standar dan metode penilaian yang sama. Kemampuan daerah untuk mengalokasikan belanja daerah secara efisien menunjukkan tingkat kinerja mereka dan sampai batas tertentu menunjukkan kualitas institusi daerah pada umumnya. Diasumsikan bahwa pemerintah daerah akan mengoptimalkan alokasi sumber daya fiskal mereka yang langka untuk memenuhi kebutuhan daerah mereka secara efektif. Keputusan dan strategi yang dibuat oleh daerah yang mempengaruhi bagaimana belanja daerah dialokasikan, dapat mempengaruhi efisiensi faktor produksi dan ekonomi daerah.

Desentralisasi fiskal diharapkan dapat memacu percepatan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Desentralisasi fiskal mendukung berbagai tujuan kebijakan, seperti pengurangan kemiskinan, persamaan pendapatan, penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengeluaran publik

menggambarkan peran daerah yang dapat diukur dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Barzelay (1991) mengemukakan desentralisasi fiskal menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Beberapa tahun terakhir ini dampak pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia terhadap kondisi ekonomi dan sosial yaitu kemiskinan, tenaga kerja dan kesejahteraan menunjukkan hasil yang relatif baik meskipun belum optimal.

Gambar 1.5: Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin di Indonesia

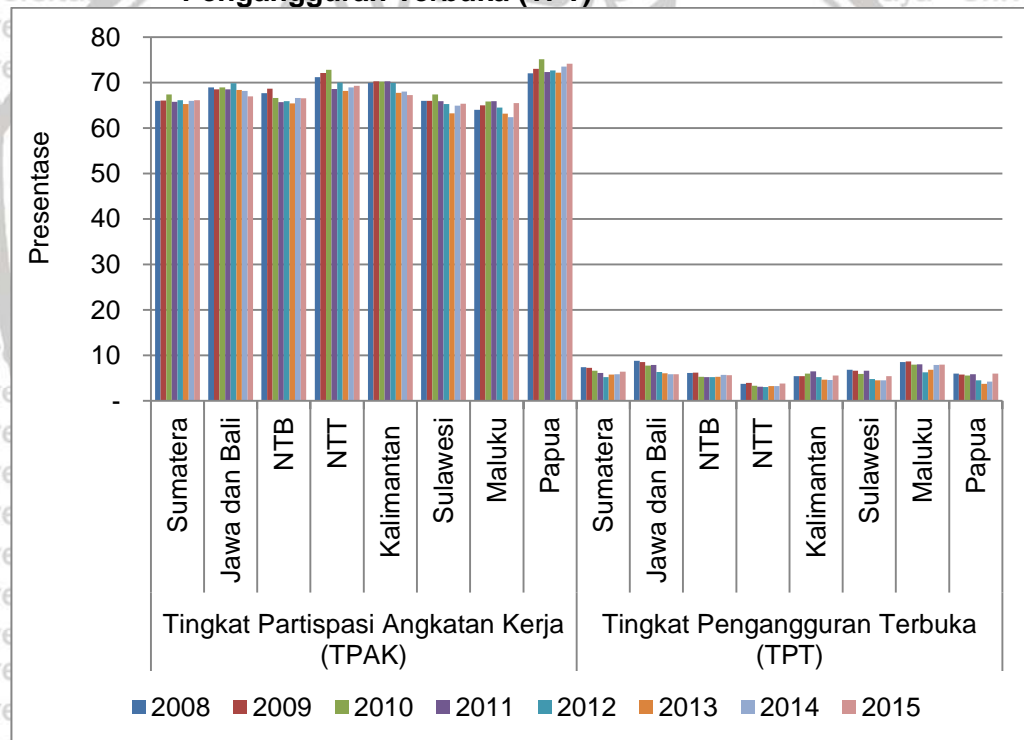


Sumber: Badan Pusat Statistika (data diolah)

Pada gambar 1.5 menggambarkan jumlah dan presentase penduduk miskin beberapa daerah di Indonesia. secara keseluruhan jumlah penduduk miskin di Indonesia menunjukkan tren penurunan, akan tetapi jika dilihat dari jumlah dan presentase penduduk miskin masih relatif tinggi. Jumlah penduduk miskin tertinggi di daerah Jawa dan Bali, namun jika dilihat dari presentase

penduduk miskin tertinggi adalah provinsi NTB. Penyebab jumlah penduduk miskin di daerah Jawa dan Bali tinggi dikarenakan jumlah penduduknya tinggi dan daerah Jawa dan Bali merupakan pusat kegiatan perekonomian sehingga banyak masyarakat yang melakukan migrasi sehingga menyebabkan kepadatan penduduk. Peningkatan jumlah penduduk dan kepadatan penduduk di suatu daerah memiliki pengaruh terhadap peningkatan jumlah penduduk miskin.

Gambar 1.6: Tingkat Partispasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

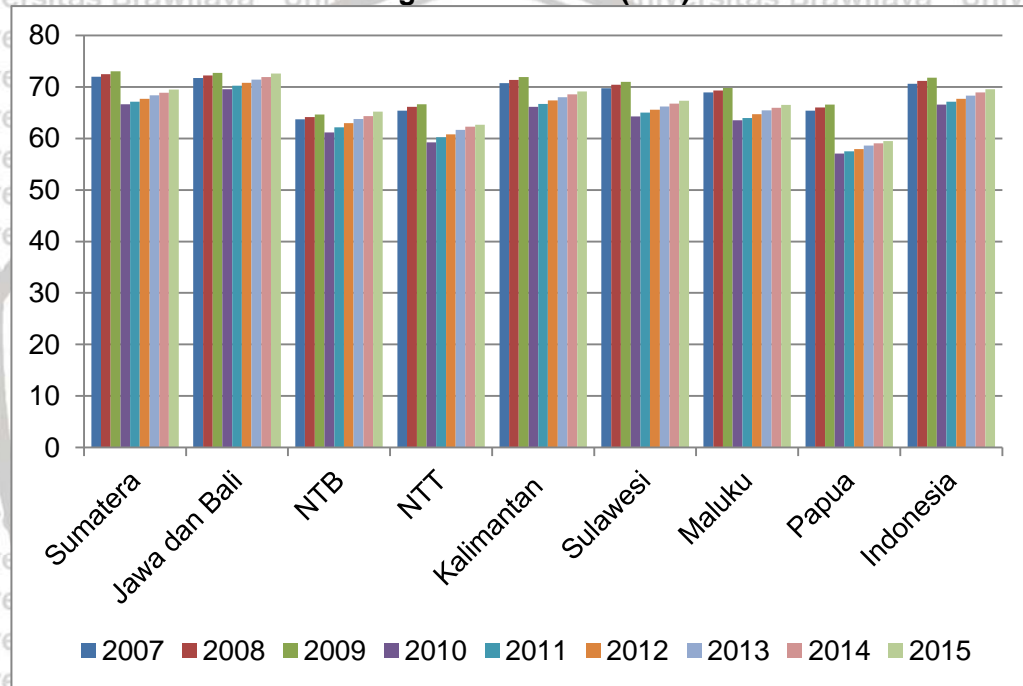


Sumber: Badan Pusat Statistika (data diolah)

Berdasarkan gambar 1.6, peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) beberapa daerah di Indonesia. Secara keseluruhan pertumbuhan TPAK dan TPT beberapa di daerah Indonesia cenderung menunjukkan tren fluktuatif. Pertumbuhan TPAK di beberapa daerah di Indonesia sekitar 60-75% dan pada tahun 2014-2015 mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan adanya peningkatan investasi di beberapa daerah di Indonesia khususnya investasi infrastruktur. Iklim

investasi yang baik akan mendorong terciptanya lapangan kerja baru yang bisa menyerap tenaga kerja. Akan tetapi bisa dilihat bahwa pertumbuhan TPT di beberapa daerah di Indonesia masih relatif tinggi yaitu berkisar antara 3-8%, dan secara keseluruhan pada tahun 2015 TPT di semua daerah mengalami peningkatan yaitu daerah Maluku, Sumatera dan Papua.

Gambar 1.7: Indeks Pembangunan Manusia (IPM)



Sumber: Badan Pusat Statistika, 2007-2015 (data diolah)

Pada gambar 1.7, menunjukkan perkembangan indeks pembangunan manusia (IPM) beberapa daerah di Indonesia. Pada tahun 2010 IPM mengalami penurunan, dikarenakan adanya perubahan metode perhitungan IPM. Pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 IPM terus mengalami peningkatan sehingga dapat diartikan bahwa pembangunan daerah Indonesia mengalami perbaikan secara bertahap. Indeks pembangunan manusia merupakan salah indikator untuk mengukur kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu dengan adanya peningkatan IPM mengindikasikan bahwa kesejahteraan masyarakat juga meningkat.

Masalah desentralisasi fiskal tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, sosial, politik dan administratif. Dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal di pengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kapasitas pengambilan keputusan daerah, kebebasan politik dan globalisasi. Disisi lain, hasil-hasil penelitian ilmiah terkait desentralisasi fiskal seringkali mendapatkan kesimpulan yang berbeda dengan teori desentralisasi fiskal. Adanya perbedaan tersebut memiliki argumentasi yang logis dan telah membuktikannya secara empiris.

Hasil-hasil penelitian-penelitian terdahulu yang meneliti pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, kemiskinan dan kesejahteraan, menghasilkan temuan yang berbeda-beda (*research gap*). Sasana (2009), menemukan desentralisasi fiskal (PAD dan dana perimbangan) secara langsung dan tidak langsung memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan. pertumbuhan ekonomi memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di tingkat kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah. Suwandi (2011), menemukan desentralisasi fiskal (dana otonomi khusus dan belanja daerah) secara langsung dan tidak langsung berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan di kabupaten/kota Provinsi Papua. Soejoto *et al* (2015), menemukan peningkatan dana desentralisasi terbukti memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (IPM) di Indonesia. Santosa (2013), memukan secara tidak langsung PAD dan dana perimbangan berpengaruh terhadap penurunan pengangguran dan penurunan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Hasil yang berbeda ditemukan Anwar dkk (2016) bahwa peningkatan desentralisasi fiskal (dana perimbangan dan PAD) secara langsung dan langsung tidak berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Kota Manado. Joalinis (2016), menemukan desentralisasi fiskal (PAD dan dana perimbangan) tidak berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan. Tajuddin *et al* (2014) menemukan bahwa peningkatan desentralisasi fiskal (dana perimbangan) secara tidak berpengaruh terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja melalui pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Setiyawati dan Hamzah (2007) menemukan bahwa peningkatan desentralisasi fiskal (DAU dan DAK, dan belanja pembangunan) secara tidak langsung tidak berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur.

Adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu merupakan fenomena yang nyata terjadi. Apalagi tidak sedikit peneliti justru mendapatkan hasil yang bertolak belakang dengan teori federalisme fiskal dan pendapat beberapa ahli ekonomi tentang dampak desentralisasi fiskal. Hal ini menyiratkan bahwa pelaksanaan desentralisasi masih belum sepenuhnya berhasil. Perbedaan hasil penelitian sebelumnya juga menimbulkan kekhawatiran jika pelaksanaan desentralisasi fiskal awalnya ditunjukan untuk mengakselerasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah, sebaliknya akan meningkatkan ketimpangan antar daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini menganalisis

Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Efisiensi Pengeluaran Publik terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Penyerapan Tenaga Kerja, Kemiskinan dan Kesejahteraan (Studi Kasus Provinsi di Indonesia).

1.2 Perumusan Masalah

Desentralisasi fiskal merupakan kunci kesuksesan bagi pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan perekonomian daerah, mengurangi kesenjangan pembangunan daerah dan pemerataan pendapatan. Akan tetapi pelaksanaan desentralisasi dinilai belum sepenuhnya berhasil dan masih meninggalkan beberapa persoalan, diantaranya;

1. Sumber penerimaan daerah terbesar di Indonesia bersumber dari dana perimbangan, artinya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer pemerintah pusat masih relatif tinggi.
2. Peningkatan PAD dan dana perimbangan ternyata tidak selamanya diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi.
3. Alokasi belanja modal yang lebih kecil dari belanja operasional.
4. Pertumbuhan investasi swasta daerah di Indonesia belum merata, dimana investasi terbesar masih dominan di kawasan barat Indonesia sedangkan investasi di daerah timur Indonesia masih relatif rendah.
5. Masih adanya kesenjangan pembangunan ekonomi dan sosial di daerah-daerah di Indonesia. Dampak positif pelaksanaan desentralisasi fiskal lebih terlihat di daerah-daerah maju yaitu kawasan Barat Indonesia sedangkan daerah-daerah tertinggal yaitu daerah di kawasan Timur Indonesia dinilai gagal menuai keuntungan dari pelaksanaan desentralisasi fiskal, hal ini dilihat dari peningkatan PAD dan proporsi dana perimbangan yang lebih besar di kawasan barat daripada kawasan timur Indonesia, dan pertumbuhan ekonomi dan investasi yang belum merata antara kawasan Barat Indonesia dan Timur Indonesia.
6. Masih adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu yang menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, kemiskinan dan kesejahteraan.

Dengan mempertimbangkan beberapa hal tersebut diatas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efisiensi pengeluaran publik dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efisiensi pengeluaran publik di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh langsung dan tidak langsung desentralisasi fiskal dan efisiensi pengeluaran publik terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, kemiskinan, dan kesejahteraan di Kawasan Indonesia Barat (KIB) dan Kawasan Indonesia Timur (KIT)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Menganalisis efisiensi pengeluaran publik dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efisiensi pengeluaran publik di Indonesia.
2. Menganalisis pengaruh langsung dan tidak langsung desentralisasi fiskal dan efisiensi pengeluaran publik terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, kemiskinan, dan kesejahteraan di Kawasan Indonesia Barat (KIB) dan Kawasan Timur Indonesia (KIT).

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dan informasi yang bermanfaat bagi para pembuat kebijakan pemerintah dan bagi peneliti lain yang ingin mendalami tentang dampak desentralisasi fiskal dan efisiensi pengeluaran publik terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, kemiskinan, dan kesejahteraan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi merupakan sebuah alat untuk mencapai salah satu tujuan bernegara dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Pelaksanaan desentralisasi fiskal merupakan upaya pemerintah dalam rangka membentuk daerah yang otonom dengan mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan.

Menurut Bird (1993) desentralisasi dapat diartikan apapun sesuai dengan kepentingan orang dalam menggunakan istilah tersebut, akan tetapi secara umum desentralisasi merupakan pengalihan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah yang ada di bawahnya (daerah) dengan tujuan untuk mengatasi defisit dan mencapai tujuan alokatif yang lebih efisien.

Program desentralisasi dilandaskan pada lima pilar utama yang saling terkait yaitu: desentralisasi politik, desentralisasi administrasi, sistem perencanaan terdesentralisasi, pengelolaan kemitaraan sektor swasta-pemerintah yang terdesentralisasi, dan desentralisasi fiskal (Agama, 2003).

Penyerahan wewenang dan tanggungjawab kepada pemerintah daerah merupakan kesempatan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi – fungsi desentralisasi fiskal secara efisien dan efektif. Menurut Musgrave (1991:6), ada tiga fungsi yang dijadikan rujukan dalam analisis desentralisasi yaitu:

1. Fungsi Alokasi

Fungsi alokasi adalah penyediaan dan pembagian sumber daya untuk digunakan sebagai barang pribadi (*private goods*) dan barang sosial (*social goods*).



2. Fungsi Distribusi

Fungsi distribusi merupakan penyesuaian kesetaraan distribusi penerimaan masyarakat.

3. Fungsi Stabilisasi

Fungsi stabilisasi merupakan penggunaan dana untuk meningkatkan kesempatan kerja dan laju pertumbuhan ekonomi yang tepat, dengan memperhitungkan segala akibat terhadap perdagangan dan neraca pembayaran.

Desentralisasi fiskal di Indonesia dimulai dari tahun 2001 dengan dikeluarkan dasar hukum kebijakan yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang sekarang telah dirubah menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat yang sekarang telah dirubah menjadi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004. Undang-undang ini mereflesikan pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah serta memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menggali potensi sumberdaya keuangan daerahnya. Dalam melaksanakan desentralisasi fiskal yang efektif pemerintah daerah harus perdoman pada hal-hal berikut ini (Khusaini, 2006) yaitu adanya pemerintah pusat yang kapabel dalam melakukan pengawasan dan *law enforcemnet*, dan terdapat keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan dalam melakukan pungutan pajak dan retribusi daerah. Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia terdapat tiga indikator yaitu desentralisasi pengeluaran, desentralisasi pengeluaran pembangunan, dan desentralisasi penerimaan (Khusaini, 2006).

2.1.1 Desentralisasi Penerimaan

Penerimaan pemerintah merupakan penerimaan pajak, penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan barang dan jasa yang dimiliki dan dihasilkan oleh pemerintah, pinjaman pemerintah, mencetak uang, dan sebagainya (Suparmoko,1987:93). Pelaksanaan desentralisasi memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak/retribusi (*tax assignment*), pemberian bagi hasil penerimaan (*revenue sharing*), dan dana perimbangan serta melakukan pinjaman baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri (Khusaini, 2006:33).

2.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan salah satu wujud dari desentralisasi fiskal yaitu pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensi masing-masing (khusaini, 2006:33). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, PAD didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. PAD dapat dijadikan sebagai indikator dalam menilai tingkat kemandirian suatu daerah dalam mengelola keuangan daerahnya, makin tinggi rasio PAD dibandingkan dengan total pendapatan makin tinggi tingkat kemandirian suatu daerah.

2.1.1.2 Dana Perimbangan

Dana perimbangan terdiri dari tiga komponen yaitu dana alokasi umum (*block grants*), dana alokasi khusus (*specific grants*) dan dana bagi hasil.

Penggunaan dana alokasi umum diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah, sedangkan untuk dana alokasi khusus penggunaannya ditentukan oleh

pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menyediakan dana pendamping sebesar 10% sebagaimana diatur dalam pasal 38-41 UU No 33 Tahun 2004.

a. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana alokasi umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU merupakan dana perimbangan yang memiliki tujuan utama adalah pengurangan kesenjangan fiskal antara daerah (Prawoto, 2015: 404). Berdasarkan undang-undang nomor 33 tahun 2004, DAU merupakan sarana untuk mengatasi ketimpangan fiskal antar daerah dan di sisi lain juga memberikan sumber pembiayaan daerah. DAU lebih diprioritaskan untuk daerah yang mempunyai kapasitas fiskal yang rendah.

Menurut Undang-undang nomor 33 tahun 2004 porsi DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN. Sementara itu, proporsi pembagian DAU untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan sesuai dengan imbalan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota. DAU bersifat "*Block Grant*" yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka otonomi daerah.

DAU dihitung dengan menggunakan pendekatan celah fiskal (*fiscal gap*) yaitu selisih antara kebutuhan fiskal (*fiscal needs*) dikurangi dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) daerah dan Alokasi Dasar AD berupa jumlah gaji PNS.

Alokasi Dasar (AD) dihitung berdasarkan realisasi gaji PNS daerah tahun sebelumnya (t-1) yang meliputi gaji pokok dan tunjangan-tunjangan yang melekat sesuai dengan peraturan penggajian PNS yang berlaku. Celah Fiskal (CF) merupakan selisih dari kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal ($KbF - KpF$).

Dengan demikian, daerah yang memiliki kapasitas fiskal tinggi dengan kebutuhan fiskalnya rendah maka perolehan DAUs yang akan didapatkan jumlahnya akan kecil. Dan sebaliknya bagi daerah yang kapasitas fiskalnya rendah, sementara kebutuhan akan fiskalnya tinggi, sudah dipastikan DAU yang akan didapatkan jumlahnya akan besar.

Jika dalam perhitungan menghasilkan celah fiskal negatif maka jumlah DAU yang diterima oleh pemerintah daerah sebesar alokasi dasar setelah diperhitungkan dengan celah fiskalnya. Celah fiskal negatif atau kapasitas fiskal yang lebih besar dari kebutuhan fiskal menandakan bahwa pendapatan daerah yang berasal dari PAD, Dana Bagi Hasil Pajak, dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dari Pemda tersebut sudah cukup tinggi sehingga daerah tersebut lebih sedikit atau tidak membutuhkan alokasi dari pusat untuk membiayai belanja daerah.

b. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana alokasi umum (DAK) merupakan suatu bentuk transfer pusat guna mendanai kewenangan yang telah didesentralisasikan, yang juga sekaligus mengembang tugas untuk mendukung prioritas nasional (Prawoto, 2015:406).

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1, Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Menurut Yani (2002:166) dana alokasi khusus dimaksudkan untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas nasional, sesuai dengan fungsi yang merupakan perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu, khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat. Kebutuhan khusus dalam DAK meliputi:

1) Kebutuhan prasarana dan sarana fisik daerah terpencil yang tidak mempunyai akses yang memadai ke daerah lain.

2) Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah yang menampung transmigrasi. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik yang terletak di daerah pesisir/kepulauan yang kurang memadai.

3) Kebutuhan sarana dan prasarana fisik di daerah guna mengatasi dampak kerusakan lingkungan

DAK ditujukan untuk daerah khusus yang terpilih untuk tujuan khusus, karena itu alokasi yang didistribusikan oleh pemerintah pusat sepenuhnya merupakan wewenang pusat untuk tujuan nasional khusus. DAK disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah dimana daerah penerima DAK harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis. Daerah dapat menerima DAK apabila memenuhi tiga kriteria, yaitu:

- 1) Kriteria umum berdasarkan indeks fiskal neto
- 2) Kriteria khusus berdasarkan peraturan perundangan dan karakteristik daerah
- 3) Kriteria teknis berdasarkan indeks teknis bidang terkait.

c. Dana Bagi Hasil (DBH)

Menurut (Prawoto, 2015:410), dana bagi hasil (DBH) merupakan dana perimbangan yang strategis bagi daerah-daerah yang memiliki sumber-sumber penerimaan pusat di daerahnya, meliputi penerimaan pajak pusat yaitu pajak penghasilan perseorangan (PPh perseorangan), pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan penerimaan dari sumber daya alam (minyak bumi, gas alam, pertambangan umum, kehutanan dan perikanan). Berdasarkan UU No.33/2004, bagian daerah dari pajak maupun sumber daya alam tersebut telah ditetapkan besarnya berdasarkan suatu presentase tertentu.

2.1.1.3 Pinjaman Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2004, pinjaman daerah merupakan alternatif sumber pembiayaan APBD dan untuk menutup kekurangan kas. Pinjaman daerah digunakan untuk membiayai kegiatan yang merupakan inisiatif dan kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Menurut Khusaini (2006:39), pinjaman daerah digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah berkaitan dengan penyediaan prasarana yang dapat menghasilkan (pengeluaran modal, daerah juga dapat melakukan pinjaman baik dari dalam negeri (pusat dan lembaga keuangan) maupun dari luar negeri, dengan persetujuan pemerintah pusat. Ketentuan penggunaan pinjaman daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Pinjaman jangka panjang, untuk membiayai pembangunan prasarana yang merupakan aset daerah, yang dapat menghasilkan penerimaan untuk pembayaran pinjaman yang bersangkutan, serta memberikan manfaat bagi pelayanan umum.
- 2) Pinjaman jangka pendek, hanya dapat dilakukan dalam rangka pengelolaan kas daerah.

2.1.2 Desentralisasi Pengeluaran

Pengeluaran atau belanja daerah untuk keperluan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dibiayai melalui APBD. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan

undang-undang. Di dalam operasional penyusunan anggaran, belanja daerah dikelompokkan ke dalam belanja langsung dan belanja tidak langsung.

2.1.2.1 Belanja Langsung

Belanja langsung adalah belanja yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan kegiatan dan dapat diukur dengan capaian prestasi kerja yang telah ditetapkan. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

- a. Belanja pegawai merupakan belanja untuk horarium atau upah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan.
- b. Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengadaan dan pemakian jasa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, seperti sewa keperluan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan kerja, dan perjalanan dinas.
- c. Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan atau pembangunan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

2.1.2.2 Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak terkait langsung dengan kegiatan yang dilaksanakan dan secara teknis sulit diukur dengan capaian prestasi kerja yang ditetapkan. Belanja tidak langsung digunakan secara bersama-sama (*common cost*) untuk melaksanakan seluruh program atau kegiatan unit kerja atau aktivitas umum lainnya. Belanja tidak langsung terdiri atas belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, bantuan sosial, dan belanja tidak terduga.

2.2 Teori Pengeluaran Publik

Pengeluaran publik atau pengeluaran pemerintah merupakan penggunaan dana anggaran dan sumber daya suatu negara untuk melaksanakan fungsi pemerintahannya guna mencapai kesejahteraan.

Pengeluaran publik mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Mangkoesoebroto, 1988:129). Menurut Suparmoko (1987:47), pengeluaran pemerintah dapat dinilai dari berbagai segi sehingga dapat dibedakan menjadi empat klasifikasi sebagai berikut:

- a. Pengeluaran itu merupakan investasi untuk menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa yang akan datang.
- b. Pengeluaran itu langsung memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.
- c. Pengeluaran pemerintah merupakan penghematan pengeluaran yang akan datang.
- d. Pengeluaran pemerintah merupakan sarana penyedia kesempatan kerja lebih banyak dan penyebaran daya beli (konsumsi) yang lebih luas.

Pengeluaran pemerintah merupakan indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah itu sendiri. Semakin meningkatnya peranan dan kegiatan pemerintah maka semakin besarnya pengeluaran pemerintah dan proporsinya terhadap pendapatan nasional (Suparmoko, 1987:23). Dalam teori ekonomi makro pengeluaran pemerintah terdiri dari tiga pos utama yang dapat digolongkan sebagai berikut (Boediono, 1999) dalam Prasetya, 2012):

- a. Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa.
- b. Pengeluaran pemerintah untuk belanja pegawai.

Perubahan gaji pegawai mempunyai pengaruh terhadap proses makro ekonomi, di mana perubahan gaji pegawai akan mempengaruhi tingkat permintaan secara tidak langsung.

c. **Pengeluaran pemerintah untuk *transfer payment*.**

Transfer payment bukan pembelian barang atau jasa oleh pemerintah dipasar barang melainkan mencatat pembayaran atau pemberian langsung kepada warganya yang meliputi misalnya pembayaran subsidi atau bantuan langsung kepada berbagai golongan masyarakat, pembayaran pensiun, pembayaran bunga untuk pinjaman pemerintah kepada masyarakat. Secara ekonomis transfer payment mempunyai status dan pengaruh yang sama dengan pos gaji pegawai meskipun secara administrasi keduanya berbeda.

Menurut Mangkoesebroto (1988: 129), teori mengenai pengeluaran pemerintah juga dapat dibedakan menjadi 2 bagian yaitu teori makro dan teori mikro.

a. Teori Makro Mengenai Pengeluaran Pemerintah

Menurut Mangkoesebroto (1988:130), teori makro mengenai pengeluaran pemerintah dikemukakan oleh para ahli ekonomi dan dapat digolongkan menjadi 3 kelompok yaitu:

1. **Teori Rostow dan Musgrave**

Rostow dan Musgrave menghubungkan pengeluaran publik dengan perkembangan ekonomi, investasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik berupa pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

2. **Teori Adolf Wagner**

Adolf Wagner menyatakan bahwa peningkatan pendapatan perkapita akan mendorong peningkatan pengeluaran pemerintah dikarenakan pemerintah harus menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana layanan publik.

3. Teori Peacock dan Wiseman

Teori Peacock dan Wiseman didasarkan pada suatu analisis penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Penerimaan pemerintah berupa pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin semakin besar.

b. Teori Mikro Mengenai Pengeluaran Pemerintah

Menurut Mangkoesoebroto (1988: 135), tujuan dari teori mikro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Interaksi antara permintaan dan penawaran untuk barang publik menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja. Jumlah barang publik yang akan disediakan tersebut selanjutnya akan menimbulkan permintaan akan barang lain.

Teori mikro mengenai pengeluaran pemerintah dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Penentuan Permintaan } U^i = f(G, X)$$

Dimana: G = vektor dari barang publik

X = Vektor barang swasta

I = individu; = 1, ..., m

U = fungsi utilitas

2.3 Teori Efisiensi Pengeluaran Publik

Efisiensi merupakan suatu kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan kebijakan pemerintah. Suatu perekonomian yang efisien dimana perekonomian memproduksi apa yang diinginkan masyarakat dengan biaya yang serendah mungkin (Case dan Fair, 2007: 462). Efisiensi terjadi apabila bisa menyediakan barang dan jasa yang diinginkan masyarakat dengan sumberdaya-sumberdaya dan teknologi tertentu dalam perekonomian. Menurut Mardiasmo (2002:134), efisiensi di bagi menjadi dua yaitu efisiensi alokasi terkait dengan

kemampuan mendayagunakan sumber daya input pada tingkat kapasitas optimal dan efisiensi teknis (manajerial) terkait dengan kemampuan mendayagunakan sumber daya input pada tingkat output tertentu. Menurut Mardiasmo (2002:132), pengertian efisiensi berhubungan dengan konsep produktivitas. Efisiensi merupakan pencapaian output tertentu dengan sumber daya yang serendah-rendahnya (*spending well*). Efisiensi penyelenggaraan pemerintah daerah dapat tercapai dengan memperhatikan aspek hubungan dan tata kerja antar instansi pemerintah daerah dengan memanfaatkan potensi dan keanekaragaman suatu daerah. Brennan dan Buchanan (1980) memperkenalkan cara untuk mengukur efisiensi sektor publik yaitu dengan mengukur pengalokasian pengeluaran publik oleh pemerintah daerah.

Menurut Kurnia (2006), dalam kaitannya dengan pengeluaran pemerintah ada tiga jenis efisiensi yang penting untuk dilihat yaitu sebagai berikut.

a. Efisiensi Produksi

Efisiensi produksi adalah menyangkut biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan output tertentu. Dalam kaitannya dengan desentralisasi fiskal, efisiensi produksi bisa dicapai karena sumber daya yang ada dialokasikan di antara berbagai pengeluaran yang menghasilkan output yang paling maksimal. Pengukuran dan perbandingan relatif efisiensi produksi ini bisa dilakukan secara langsung dengan kategori-kategori tertentu yang akan dilihat misalnya tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan.

b. Efisiensi Alokasi

Efisiensi alokasi adalah efisiensi yang menyangkut kesesuaian pengeluaran belanja dengan preferensi masyarakat. Dalam kaitannya dengan desentralisasi fiskal, efisiensi alokasi terjadi karena sumber daya yang ada dialokasikan di antara berbagai jenis pengeluaran belanja yang sesuai dengan preferensi masyarakat daerah. Pengukuran efisiensi alokasi ini tidak

bisa dilakukan secara langsung karena ukuran preferensi marginal masyarakat sulit diketahui.

c. Efisiensi Fiskal

Efisiensi fiskal adalah efisiensi yang menyangkut sumber penerimaan pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran belanja pemerintah daerah. Secara umum sumber penerimaan daerah berasal dari dua komponen utama yaitu pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan. Efisiensi fiskal dalam kaitannya dengan sumber penerimaan daerah ini menyangkut tiga hal yaitu: (1) apakah pajak dan retribusi yang dipungut merupakan pajak yang tepat dalam artian bahwa pajak dan retribusi daerah yang dipungut dari objek pajak tertentu langsung terkait dengan target-target pengeluaran tertentu, (2) dana perimbangan seharusnya ditujukan untuk penyesuaian-penyesuaian karena adanya eksternalitas tanpa mengganggu kepentingan pemerintah, (3) anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) seharusnya tidak menyebabkan tekanan dan dampak negatif terhadap stabilitas makroekonomi regional.

Pengukuran efisiensi pengeluaran publik dapat dilihat dari kualitas belanja daerah. Belanja pemerintah berfungsi sebagai stabilisasi, redistribusi dan alokasi sumber daya dalam rangka mendorong pertumbuhan dan pemerataan kesejahteraan. Kualitas belanja berarti suatu ukuran atas belanja yang mempunyai karakteristik dengan suatu derajat ekselensi yang tinggi (Juanda,dkk 2013). Belanja yang berkualitas adalah bagaimana memperbesar porsi belanja modal yang produktif yang akan berdampak langsung pada perekonomian (Aditia, 2010). Raharjo (2006) menyatakan bahwa kebijakan pengeluaran pemerintah melalui belanja pembangunan atau belanja modal dapat secara langsung mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut Khusaini (2016), belanja modal merupakan belanja yang langsung digunakan untuk membiayai kegiatan

investasi (menambah aset). Belanja modal digunakan untuk membiayai penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana publik serta pembangunan infrastruktur daerah. Belanja modal yang dapat meningkatkan produktifitas masyarakat dan iklim investasi daerah yang tentunya akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Menurut Shah (2007), kualitas anggaran daerah berkaitan dengan pemenuhan nilai-nilai ekonomi, efisiensi, efektifitas, *equity* atau keadilan, akuntabilitas, dan responsivitas. Ekonomi berarti anggaran tersebut selalu meningkat jumlahnya. Efisien berarti alokasi anggaran sesuai dengan hasil yang didapatkan. Efektif berarti alokasi anggaran sesuai dengan tujuan yang direncanakan. *Equity* atau keadilan berarti alokasi dan hasilnya sesuai dengan nilai keadilan. Responsif berarti proses penganggaran sesuai dengan aspirasi masyarakat.

2.4 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan GDP atau GNP tanpa memandang apakah kenaikan lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, dan apakah terjadi perubahan struktur ekonomi atau perbaikan sistem kelembagaan (Todaro 2003:12). Secara sederhana pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai suatu proses dimana PDB riil atau pendapatan riil per kapita meningkat secara terus menerus melalui kenaikan produktivitas per kapita. Kuznets dalam Jhingan (2003:57), mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan serta ideologi. Definisi ini memiliki tiga komponen yaitu:

- 1) Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus menerus persediaan barang.

2) Kemajuan teknologi merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk.

3) Penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan dapat dimanfaatkan secara tepat.

Kuznets mengemukakan enam karakteristik atau ciri pertumbuhan ekonomi modern yang biasanya ditemui di hampir semua negara maju, yaitu:

a. Laju pertumbuhan penduduk dan tingkat pertumbuhan output per kapita.

Pertumbuhan ekonomi moderen diartikan sebagai kenaikan tajam pada tingkat pertumbuhan output/produk dan jumlah penduduk.

b. Peningkatan produktivitas

Semakin meningkatnya laju pertumbuhan output sebagai akibat adanya perbaikan kualitas input yang meningkatkan efisiensi atau produktivitas per unit input khususnya produktivitas tenaga kerja.

c. Tingkat perubahan struktural ekonomi yang tinggi.

Perubahan struktural ekonomi merupakan peralihan kegiatan pertanian ke non pertanian, dari industri ke jasa, perubahan dalam skala unit-unit produktif, dan peralihan dari perusahaan perseorangan menjadi perusahaan berbadan hukum, serta perubahan status kerja buruh.

d. Urbanisasi.

Urbanisasi merupakan perpindahan penduduk dari pedesaan ke perkotaan. Urbanisasi umumnya merupakan produk industrialisasi. Urbanisasi juga mempengaruhi tingkat dan struktur konsumen negara.

e. Ekspansi negara maju

Ekspansi negara-negara mau dikarenakan adanya revolusi teknologi di bidang transportasi dan komunikasi. Dampak dari ekspansi negara maju

adalah adanya penyebaran ilmu pengetahuan, perdagangan dan pemasaran sumber bahan baku.

f. Arus barang, modal dan migrasi antar bangsa.

Peningkatan arus barang, modal dan migrasi antar barang merupakan salah dampak dari ekspansi negara-negara maju. Dengan adanya perdagangan internasional yang menyebabkan meningkatnya arus barang, arus modal asing, dan perpindahan tenaga kerja.

2.4.1 Teori pertumbuhan Ekonomi Klasik

Teori ekonomi klasik menurut pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua faktor utama yakni pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk.

Unsur pokok dari sistem produksi suatu negara ada tiga (Arsyad, 2010:115) yaitu:

- 1) Sumber daya alam yang tersedia merupakan wadah paling mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat dimana jumlah sumber daya alam yang tersedia mempunyai batas maksimum bagi pertumbuhan suatu perekonomian.
- 2) Sumber daya insani (jumlah penduduk) merupakan peran pasif dalam proses pertumbuhan output, maksudnya jumlah penduduk akan menyesuaikan dengan kebutuhan akan tenaga kerja.
- 3) Stok modal merupakan unsur produksi yang sangat menentukan tingkat pertumbuhan output.

2.4.2 Teori Pertumbuhan Harrold Domar

Teori Harrold Domar menganalisis syarat-syarat yang diperlukan agar suatu perekonomian dapat tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang.

Dengan kata lain, teori ini berusaha menunjukkan syarat-syarat yang dibutuhkan agar suatu perekonomian dapat tumbuh dan berkembang. Teori ini mengharuskan dalam perekonomian pada dasarnya harus mencadangkan atau

menabung sebagian tertentu dari pendapatan nasionalnya untuk menambah atau menggantikan barang-barang modal yang telah susut atau rusak. Namun, untuk memacu pertumbuhan ekonomi, dibutuhkan investasi baru yang merupakan tambahan neto atau stok modal (*capital stock*) (Arsyad, 2010:86).

Adapun asumsi pertumbuhan ekonomi yang digunakan dalam teori ini (Arsyad, 2010:86) yaitu sebagai berikut:

- 1) Perekonomian dalam keadaan *full employment* dan barang-barang modal yang ada di masyarakat digunakan secara penuh.
- 2) Berlangsung dalam dua perekonomian sektor (sektor rumah tangga dan sektor perusahaan).
- 3) Besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan besarnya pendapatan nasional, berarti fungsi tabungan dimulai dari titik origin(nol).
- 4) Kecenderungan untuk menabung (*marginal propensity to save/MPS*) besarnya tetap, demikian juga rasio antar modal dan output (*incremental capital output ratio*).

Diasumsikan juga terdapat hubungan ekonomi langsung antara besarnya total stok modal (K), dengan GNP total (Y). Setiap tambahan neto terhadap stok modal dalam bentuk investasi baru akan menghasilkan kenaikan arus output nasional atau $GNP \Delta Y/Y = s/k$ Persamaan tersebut menjelaskan bahwa tingkat pertumbuhan GNP ($\Delta Y/Y$) ditentukan bersama-sama oleh rasio tabungan nasional(s), serta rasio modal output nasional (k) (Arsyad, 2010:86). Secara lebih spesifik, persamaan tersebut mentakan bahwa tanpa adanya intervensi pemerintah, tingkat pertumbuhan pendapatan nasional berbanding lurus dengan rasio tabungan (semakin besar bagian GNP yang ditabung atau diinvestasikan, maka pertumbuhan GNP yang akan dihasilkan menjadi lebih besar), dan berbanding terbalik dengan rasio modal output di suatu perekonomian (semakin besar rasio modal-output nasional (k), maka tingkat pertumbuhan ekonomi

semakin rendah). Jadi berdasarkan teori Harrold-Domar agar dapat tumbuh dengan pesat, maka setiap perekonomian harus menabung dan menginvestasikan sebanyak mungkin GNP-nya.

2.5 Teori Ketenagakerjaan

Menurut Djojohadikusumo (1955:160), tenaga kerja merupakan penduduk yang menghasilkan barang dan jasa. Menurut *International Labour Organization* (ILO), batasan penduduk usia kerja yang digunakan Badan Pusat Statistika (BPS) adalah penduduk yang berumur 15 tahun keatas, yang dibedakan angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Kelompok angkatan kerja mencakup penduduk yang bekerja dengan penduduk yang mencari kerja. Sementara bukan angkatan kerja adalah penduduk yang tidak aktif secara ekonomi, antara lain sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya.

Indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan ketenagakerjaan adalah tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), tingkat pengangguran terbuka (TPT), tingkat kesempatan kerja, produktivitas, ILOR, dengan elastistas kesempatan kerja.

a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) merupakan indikator untuk melihat perbandingan jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Secara umum, apabila tingginya TPAK dikarenakan tingginya penduduk yang bekerja maka TPAK tersebut menunjukkan kinerja partisipasi angkatan kerja yang baik, namun bila tingginya TPAK diiringi dengan rendahnya tingkat kesempatan kerja (presentase penduduk yang bekerja), hal ini cukup mengkhawatirkan, karena berarti penduduk yang mencari pekerjaan meningkat yang akan memicu tingginya angka pengangguran.

b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan salah satu indikator yang menunjukkan keadaan perekonomian dalam kondisi yang baik atau buruk.

Tingkat pengangguran yang tinggi dapat berakibat pada munculnya masalah ekonomi dan sosial, seperti meningkatnya kriminalitas, dan menurunnya tingkat kesehatan (status gizi). Penduduk yang bekerja dapat dilihat dari berbagai sudut, diantaranya dari sudut lapangan usaha atau sektor, status pekerjaan dan jenis pekerjaan. Pengelompokan penduduk yang bekerja berdasarkan lapangan usaha atau sektor dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu agrikultur (pertanian), manufaktur, dan jasa (*services*). Komposisi penduduk yang berkerja menurut status pekerjaan dibagi menjadi dua yaitu kegiatan formal dan informal. Berdasarkan survei BPS, pekerja formal merupakan kategori berusaha dengan dibantu buruh tetap dan buruh karyawan. Sedangkan pekerja informal merupakan kategori berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, pekerja bebas di pertanian dan non-pertanian, dan pekerja tak dibayar.

c. Produktivitas Tenaga Kerja

Peningkatan produktivitas sangat penting dalam hubungan dengan peningkatan upah pekerja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Kebijakan pengupahan dan penggajian harus selalu memperhatikan peningkatan produktivitas tenaga kerja dan pertumbuhan produksi juga perlu terus diarahkan pada peningkatan kesejahteraan serta peningkatan daya beli golongan penerima upah atau gaji rendah.

Terdapat perbedaan antara permintaan tenaga kerja dan jumlah tenaga kerja yang diminta atau dalam hal ini tenaga kerja yang diserap oleh perusahaan atau suatu sektor. Permintaan tenaga kerja adalah keseluruhan hubungan antara berbagai tingkat upah dan jumlah orang yang diminta untuk dipekerjakan.

Sedangkan jumlah tenaga kerja yang diminta lebih ditunjukkan kepada kuantitas atau banyaknya permintaan tenaga kerja pada tingkat upah tertentu (Sadono Sukirno, 2005). Penyerapan tenaga kerja merupakan jumlah tenaga kerja yang bekerja dalam suatu unit usaha. Penyerapan tenaga kerja dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal (Zamrowi, 2007). Faktor eksternal tersebut antara lain tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, pengangguran dan tingkat bunga. Sedangkan faktor internal dari industri yang meliputi tingkat upah, produktivitas tenaga kerja, modal, serta pengeluaran tenaga kerja non upah.

2.6 Teori Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang berkaitan dengan banyak aspek, namun secara sederhana adalah ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar minimumnya (*basic needs*). Definisi miskin di bagi menjadi dua aspek yaitu aspek primer yaitu berupa miskin aset (harta), organisasi sosial politik, pengetahuan dan keterampilan. Dan aspek sekunder yaitu berupa miskin terhadap jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi (Arsyad, 2010;299). Penduduk miskin adalah masyarakat yang berpenghasilan sangat rendah, dan memiliki masalah dalam hal kesehatan, pendidikan dan aspek sosial ekonomi lainnya. Oleh karena itu, penganggulangan kemiskinan khususnya di Indonesia harus lebih diutamakan dengan memperhatikan akar masalah utama kemiskinan.

Karakteristik masyarakat miskin selain diukur dari tingkat pendapatan dan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, dapat juga dilihat dari berbagai aspek sosial seperti lingkungan dan kebudayaan. Masyarakat miskin biasanya diartikan dengan mereka yang tinggal di daerah pedesaan yang sebagian besar melakukan aktivitas pertanian dan masyarakat dengan kebudayaan yang masih sangat kuat.

Menurut Todaro (2011:261), dalam mengukur kemiskinan sangat penting untuk memperhatikan mengenai cakupan dan besaran kemiskinan absolut (*absolute poverty*). Kemiskinan absolut merupakan kondisi ketidakmampuan atau nyaris tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kemiskinan absolut diukur berdasarkan proporsi jumlah penduduk suatu negara di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan besarnya nilai pengeluaran (dalam rupiah) untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum makanan dan non makanan. Garis kemiskinan ditentukan pada tingkat yang tetap atau konstan secara riil sehingga dapat memetakan kemajuan yang diperoleh pada tingkat absolut dari waktu ke waktu. Nilai garis kemiskinan yang digunakan mengacu pada kebutuhan minimum (*basic need*) 2.100 kkal per Kapita per hari ditambah dengan kebutuhan minimum non makanan yang merupakan kebutuhan dasar seseorang yang meliputi kebutuhan dasar untuk papan, sandang, sekolah, transportasi, serta kebutuhan rumah tangga dan individu yang mendasar lainnya.

Masalah kemiskinan merupakan salah satu indikator sosial yang masih menjadi pekerjaan utama bagi suatu negara terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Upaya mengangguni kemiskinan menjadi salah satu tujuan dan fokus utama negara guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Kebijakan dan peraturan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan terus ditingkatkan sesuai dengan kondisi kemiskinan di suatu negara. Menurut Todaro (2011:301), kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi kemiskinan adalah dengan meningkatkan kepemilikan aset atau harta masyarakat miskin seperti kepemilikan lahan dan modal fisik (rumah dan bangunan), modal manusia dan sumber daya keuangan yang menghasilkan pendapatan bagi pemiliknya seperti mengembangkan usaha wiraswasta. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah adalah kebijakan redistribusi dimana semua kebijakan

diarahkan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dan memperluas peluang ekonomi untuk menggerakkan pembangunan, mencakup kebijakan pajak pendapatan, kebijakan pembangunan desa, dan berbagai layanan yang didanai negara. Salah bentuk nyata kebijakan pemerintah Indonesia untuk mengurangi kemiskinan saat ini adalah dengan adanya kebijakan dana desa yang diharapkan akan mampu mengatasi kemiskinan dari unit yang paling dasar (masyarakat pedesaan yang bekerja di sektor pertanian).

2.7 Teori Kesejahteraan

Kesejahteraan merupakan sistem suatu bangsa tentang manfaat dan jasa untuk membantu masyarakat guna memperoleh kebutuhan sosial, ekonomi pendidikan, kesehatan yang penting bagi kelangsungan masyarakat tersebut. Seseorang yang mempunyai kekurangan kemampuan mungkin memiliki kesejahteraan yang rendah. Kurangnya kemampuan dapat mengartikan bahwa kesejahteraan juga berkurang. Kesejahteraan dapat secara langsung dan tidak langsung dikaitkan dengan dengan pengukuran uang.

United Nations Development Programme (UNDP) mulai tahun 1990 telah menyusun suatu indikator kesejahteraan manusia yang dapat menunjukkan kemajuan manusia yaitu rata-rata usai harapan hidup, rata-rata lama sekolah, angka melek huruf, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Pembangunan manusia pada hakekatnya adalah suatu proses memperbesar pilihan-pilihan manusia. Indikator kesejahteraan masyarakat yang disusun oleh UNDP dikenal dengan *Human Development Index* (HDI) atau indeks pembangunan manusia (IPM).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur salah satu aspek penting yang berkaitan dengan kualitas dari hasil pembangunan ekonomi, yakni derajat pembangunan manusia. IPM adalah suatu indeks komposit yang didasarkan pada tiga indikator, yakni kesehatan,

pendidikan yang dicapai, dan standar kehidupan. Ketiga unsur tersebut sangat penting dan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya dalam menentukan tingkat kemampun suatu Kabupaten/Kota untuk meningkatkan IPMnya.

Kesejahteraan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti ketersediaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan kebijakan pemerintah.

Nilai IPM yang tinggi menandakan keberhasilan-keberhasilan pembangunan ekonomi. Nilai IPM memiliki korelasi positif dengan derajat keberhasilan pembangunan ekonomi. Peningkatan nilai IPM menunjukkan pembangunan suatu wilayah semakin baik (meningkatnya pendapatan per kapita), besarnya angka harapan hidup (rata-rata semakin lama umur seseorang), angka kematian bayi yang rendah, semakin tinggi tingkat pendidikan rata-rata masyarakat (semakin tinggi angka melek huruf dan semakin lama rata-rata lama sekolah) di wilayah tersebut. Jika nilai IPM meningkat, maka semakin baik pembangunan ekonomi suatu wilayah, meningkatnya pendapatan riil perkapita masyarakat yang berarti semakin baik standar hidup masyarakat di daerah tersebut.

2.8 Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Penyerapan Tenaga Kerja, Kemiskinan, dan Kesejahteraan

Teori Federalisme Fiskal atau *Fiscal Federalisme Theory* adalah teori yang dikembangkan oleh Hayek (1945), Musgrave (1959) dan Oates (1972).

Dalam teori ini begitulah pertumbuhan ekonomi dicapai dengan jalan desentralisasi yaitu pendelegasian wewenang oleh pusat untuk daerah untuk mengatur daerahnya sendiri atau sering disebut dengan otonomi daerah.

Desentralisasi fiskal akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Oates, 1993). Desentralisasi fiskal melalui dana perimbangan yaitu dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana bagi hasil (DBH) memiliki dampak secara langsung maupun tidak langsung

terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, kemiskinan, dan kesejahteraan.

Permasalahan kemiskinan, tenaga kerja (pengangguran), dan kesejahteraan merupakan tiga persoalan utama dalam proses pembangunan ekonomi. Kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah penyerapan tenaga kerja, kemiskinan, dan kesejahteraan, melalui alokasi dana perimbangan (DAK, DAU, dan DBH) harus efisien dan efektif. Pengalokasian anggaran pendapatan harus tepat pada sektor-sektor yang memberikan kontribusi pada pembangunan sehingga hasil pembangunan yang dilakukan bisa memberikan kesejahteraan yang adil dan merata. Jika setiap daerah mampu mengoptimalkan dan mengelola anggaran pendapatannya sendiri, maka akan terjadi peningkatan berbagai potensi di sektor-sektor yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi (Setiyawati dan Hamzah, 2007:216). Dengan begitu daerah tersebut akan menekan tingkat pengangguran di daerahnya, mengurangi kemiskinan, dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Untuk mengoptimalkan dan mengelola anggaran pendapatan daerah yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan selanjutnya berimbas pada penekanan tingkat pengangguran dan mengurangi kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan pengelolaan alokasi anggaran sebagai salah satu strategi pengelolaan pendapatan. Strategi alokasi anggaran ini bisa mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus menjadi alat mengurangi kesenjangan atau ketimpangan regional (Kuncoro, 2003). Pengangguran berhubungan erat dengan ketersediaan lapangan kerja, ketersediaan lapangan kerja berhubungan dengan belanja pembangunan. Dengan demikian, strategi pengoptimalan dan pengelolaan anggaran akan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi sektor-sektor

pembangunan. Pertumbuhan ekonomi akan menekan tingkat pengangguran dan mengurangi jumlah kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan di daerah.

2.9 Pengaruh Efisiensi Pengeluaran Publik Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Penyerapan Tenaga Kerja, Kemiskinan, dan Kesejahteraan

Pengukuran efisiensi kinerja sektor publik dapat dilakukan dengan menganalisis efisiensi pemerintah daerah dalam mengalokasikan sumber daya fiskal. Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal merupakan salah satu usaha pemerintah untuk lebih mengeksplor potensi fiskal yang dimiliki daerahnya dan lebih dekat dengan masyarakat, sehingga pelayanan publik dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif. Menurut Musgrave (1991: 63), suatu pengaturan ekonomi tertentu adalah efisien jika di sana tidak dapat dilakukan pengaturan kembali yang akan menyebabkan seseorang menjadi lebih baik tanpa memperburuk posisi orang lain. Kemampuan pemerintah untuk mengalokasikan pengeluaran publik secara efisien menunjukkan tingkat kinerja dan kualitas institusi/lembaga pemerintah daerah (Borner, et al, 2004). Kebijakan, strategi dan keputusan yang dibuat oleh pemerintah daerah tentang bagaimana mengalokasikan pengeluaran publik dapat mempengaruhi efisiensi faktor produksi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Pengeluaran publik menggambarkan peran daerah yang dapat diukur dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (Tirtosuharto, 2009).

2.10 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja, Kemiskinan, dan Kesejahteraan

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator pengukur keberhasilan pembangunan suatu negara. Ekonomi dikatakan bertumbuh jika produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya dan menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat dalam periode waktu tertentu. Pertumbuhan merupakan syarat penting bagi terciptanya pertumbuhan inklusif (*Inclusive Growth*). Pertumbuhan inklusif adalah pertumbuhan yang melibatkan semua pihak tanpa diskriminasi dan mampu melibatkan seluruh sektor ekonomi. Pertumbuhan inklusif merupakan tolak ukur apakah pertumbuhan ekonomi suatu negara merupakan pertumbuhan yang berkualitas. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas merupakan pertumbuhan yang menyerap lebih banyak tenaga kerja yang berdampak pada pengurangan pengangguran (*pro-job*), mengurangi kemiskinan (*pro-poor*), dan menciptakan pemerataan pendapatan (*growth with equity*). Pertumbuhan ekonomi semakin berkualitas ketika semakin besar masyarakat yang terlibat dan menikmati hasil ekonomi produktif di dalam sistem perekonomian.

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif merupakan pertumbuhan yang meluas antar sektor atau intensif terhadap tenaga kerja (Sholihah, 2014). Pertumbuhan ekonomi yang *pro-job* lebih ditekankan pada percepatan perluasan lapangan pekerjaan. Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas mampu mencerminkan adanya peningkatan aktivitas dunia usaha dan ekonomi yang pada gilirannya akan memberikan peluang besar kepada angkatan kerja di pasar (Prasetyo, 2008). Laju pertumbuhan permintaan tenaga kerja ditentukan oleh laju pertumbuhan akumulasi modal dan laju pertumbuhan output (Arsyad, 2010;77). Berdasarkan fungsi produksi sederhana dari output

(Q) yaitu $Q = f(K, L)$, dimana ketika terjadi perubahan output (ΔQ) yang meningkat mengindikasikan bahwa produktivitas dari tenaga kerja meningkat. Peningkatan produktivitas akan berdampak pada peningkatan upah, sehingga penawaran tenaga kerja juga meningkat. Peningkatan output akan terjadi jika menambahkan jumlah tenaga kerja dengan jumlah jam kerja tetap (Djojhadikusumo, 1955).

Peningkatan jumlah partisipasi angkatan kerja dan penurunan pengangguran mengindikasikan bahwa kemampuan masyarakat untuk mengambil manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan menikmati bagian dari peningkatan pendapatan. Oleh karena itu, dalam mengatasi pengangguran, kebijakan pemerintah harus mampu mendorong sektor riil yang banyak menyerap tenaga kerja

Pertumbuhan ekonomi yang *pro-poor* merupakan pertumbuhan yang diarahkan untuk mengurangi kemiskinan. Jika pertumbuhan dihasilkan seluruh golongan masyarakat maka manfaat yang didapatkan semakin besar sehingga dapat mengurangi masalah kemiskinan dan pembangunan akan lebih merata (Todaro (2011: 251). Penurunan tingkat kemiskinan merupakan secara langsung mengindikasikan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan dan program pemerintah secara langsung maupun tidak langsung harus mampu menyentuh masyarakat di lapisan bawah. Sasaran pembangunan tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan, melainkan juga harus mampu untuk memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sebagainya.

Dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas diharapkan akan diperoleh hasil pembangunan ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan seluruh masyarakat (Prasetyo, 2008). Dengan pertumbuhan ekonomi yang

berkualitas diharapkan ada transformasi dari masyarakat yang terbelenggu dalam keterbelakangan (*vicious circle*) akan mampu menuju masyarakat yang lebih maju (*virtuous circle*). Pembangunan harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan, tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok-kelompok sosial yang ada di dalamnya untuk bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan yang serba lebih baik, secara material maupun spiritual (Todaro, 2003:21).

2.11 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan dasar dari sebuah ide dalam penelitian ini. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai pengaruh desentralisasi fiskal dan efisiensi pengeluaran publik terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, kemiskinan, dan kesejahteraan. Berikut ini disajikan beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan dan pedoman bagi peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.

Penelitian **Tirtosuharto (2009)** menemukan bahwa pelaksanaan pengeluaran publik sebagian besar provinsi-provinsi di Indonesia belum efisien. Penemuan Tirtosuharto didukung oleh **Prakoso (2016)** dan **Chusnah (2014)** menemukan bahwa masih banyak Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang tidak efisien dalam penggunaan pengeluaran publik. **Alfonso (2013)** menemukan bahwa sebagian besar negara-negara OECD belum melaksanakan pengeluaran publiknya secara efisien. **Liu et al (2016)** menemukan bahwa pelaksanaan pengeluaran publik di provinsi-provinsi di Cina belum sepenuhnya efisien. **Herrera & Pang (2005)** menemukan bahwa sebagian besar negara-negara berkembang belum melaksanakan pengeluaran publiknya secara efisien.

Penelitian **Tirtosuharto (2009)** menemukan bahwa peningkatan belanja modal dan belanja operasional berpengaruh terhadap penurunan efisiensi pengeluaran publik dan peningkatan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap peningkatan efisiensi pengeluaran publik di Indonesia. Penemuan Tirtosuharto didukung oleh **Herrera dan Pang (2005)** menemukan bahwa peningkatan belanja pelayanan publik berpengaruh terhadap penurunan efisiensi belanja publik pada negara-negara berkembang. **Liu et al (2016)** mengemukakan bahwa ketidakkonsistenan pengeluaran dan penerimaan fiskal berpengaruh terhadap penurunan efisiensi keuangan daerah. **Alfonso (2013)** mengemukakan bahwa negara-negara dengan pengeluaran publik kecil memiliki nilai efisiensi yang lebih besar dari negara-negara dengan pengeluaran publik tinggi. **Utomo dan Sumarno (2009)** menemukan bahwa peningkatan desentralisasi pengeluaran publik berpengaruh terhadap peningkatan inefisiensi pengeluaran publik di Jawa Timur.

Penelitian **Tirtosuharto (2009)** menemukan bahwa peningkatan efisiensi pengeluaran publik berpengaruh terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi.

Penemuan Tirtosuharto didukung oleh **Utomo dan Sumarno (2009)** menemukan bahwa peningkatan inefisiensi pengeluaran publik berpengaruh terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi. **Astuti (2015)** menemukan bahwa rasio efisiensi tidak berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Chusnah (2014) menemukan bahwa peningkatan efisiensi pengeluaran publik tidak berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. Namun hasil penemuan Tirtosuharto berbeda dengan temuan **Prakoso (2016)** bahwa peningkatan efisiensi pengeluaran publik berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. **Chusnah (2014)** menemukan bahwa peningkatan efisiensi pengeluaran publik berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan. **Maharajabdinul et al (2015)**

menemukan bahwa peningkatan belanja pendidikan dan kesehatan berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Penelitian Tirtosuharto (2009) menemukan bahwa peningkatan dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana bagi hasil (DBH) berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Penemuan Tirtosuharto didukung oleh **Fadli (2014)** menemukan bahwa peningkatan DAK berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia (KTI). **Soejoto et al (2015)** menemukan peningkatan dana perimbangan berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan.

Muharajabdinul et al (2015) menemukan bahwa peningkatan dana perimbangan, belanja pendidikan dan kesehatan berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dan investasi di Indonesia Timur. **Santosa (2013)** menemukan bahwa peningkatan DAK dan DBH berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan PAD dan DAU berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan, peningkatan PAD, DAU, DAK, DBH berpengaruh terhadap pengurangan kemiskinan. **Anwar dkk (2016)** menemukan

bahwa peningkatan DAU berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kota Manado. **Jolianis (2016)** menemukan peningkatan PAD dan DAU berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat. **Muti'ah (2017)** menemukan bahwa peningkatan PAD dan DBH berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Tajuddin et al (2014) menemukan peningkatan DAU berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. **Pujiati (2007)** menemukan peningkatan dana bagi hasil (DBH) berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. **Yushkov (2015)** menemukan bahwa dana transfer fiskal dari pemerintah pusat berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Namun hasil penemuan Tirtosuharto berbeda dengan penelitian dengan **Soejoto**

et al (2015), menemukan bahwa peningkatan dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan berpengaruh terhadap peningkatan kemiskinan. **Fadli (2014)** menemukan peningkatan DAU dan DBH tidak berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan peningkatan DAK berpengaruh terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi di Kawasan Barat Indonesia (KBI). **Muharajabdinul et al (2015)** menemukan bahwa peningkatan dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan. **Kresnandra (2016)** menemukan bahwa peningkatan dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di provinsi Bali. **Setywati dan Hamzah (2007)** menemukan peningkatan DAU berpengaruh terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan DAK tidak berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. **Santosa (2013)** menemukan bahwa peningkatan PAD dan DAU tidak berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan DAK dan DB tidak berpengaruh pada pengurangan pengangguran. **Anwar dkk (2016)** menemukan bahwa peningkatan DAK dan PAD tidak berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan di Kota Manado. **Jolianis (2016)** menemukan bahwa peningkatan DAK tidak berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. **Muti'ah (2017)** menemukan peningkatan DAK dan DAU tidak berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. **Tajuddin et al (2014)** menemukan bahwa peningkatan DAK berpengaruh terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan DBH tidak berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di provinsi-provinsi di Pulau Sulawesi. **Pujiati (2007)** menemukan peningkatan DAU berpengaruh terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi di Karesidenan Semarang.

Penelitian Sasana (2009) menemukan peningkatan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja, penurunan tenaga kerja dan peningkatan kemiskinan, peningkatan penyerapan tenaga kerja berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan, dan peningkatan kemiskinan berpengaruh terhadap penurunan kesejahteraan di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Penemuan Sasana didukung oleh Suwandi (2011) menemukan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja, penurunan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan, peningkatan penyerapan tenaga kerja berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan, dan peningkatan kemiskinan berpengaruh terhadap penurunan kesejahteraan di Kabupaten/Kota Papua. Soejoto et al (2015) menemukan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan, dan peningkatan kemiskinan berpengaruh terhadap penurunan kesejahteraan di Indonesia. Setywati dan Hamzah (2007) menemukan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan. Miar (2014) menemukan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan dan peningkatan penyerapan tenaga kerja berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan di Kalimantan Tengah. Kurniasih (2017) menemukan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap penurunan ketimpangan. Namun hasil temuan Sasana (2009) berbeda dengan penelitian Soejoto et al (2015) menemukan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan di Indonesia. Setywati dan Hamzah (2007) menemukan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap peningkatan pengangguran. Santosa (2013) menemukan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap penurunan pengangguran dan penurunan kemiskinan. Anwar dkk

(2016) menemukan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan. **Tajuddin et al (2014)** menemukan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja pada provinsi-provinsi di Pulau Sulawesi. **Kurniasih (2017)** menemukan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan, peningkatan penyerapan tenaga kerja berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan dan tidak berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan serta peningkatan ketimpangan pendapatan tidak berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan.

Penelitian **Maharajabdinul et al (2015)** menemukan bahwa peningkatan dana perimbangan secara tidak langsung berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan melalui investasi dan pertumbuhan ekonomi. Penemuan Maharajabdinul didukung oleh **Setiyawati dan Hamzah (2007)** menemukan peningkatan PAD dan DAU secara tidak langsung berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. **Santosa (2013)** menemukan bahwa peningkatan PAD, DAU, DAK, DBH secara tidak langsung berpengaruh terhadap penurunan pengangguran dan penurunan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di Indonesia Fadli (2014) menemukan bahwa peningkatan DAU dan PAD secara tidak langsung berpengaruh terhadap penurunan ketimpangan melalui pertumbuhan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Namun hasil penemuan Maharajabdinul berbeda dengan penelitian **Jolianis (2016)** menemukan bahwa peningkatan PAD dan DAU berpengaruh terhadap peningkatan kemiskinan dan peningkatan DAK tidak berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat. **Tajuddin et al (2014)** menemukan bahwa peningkatan DAU, DAK, DBH secara tidak langsung tidak berpengaruh terhadap peningkatan

penyerapan tenaga kerja melalui pertumbuhan ekonomi. **Setiyawati dan Hamzah (2007)** menemukan bahwa peningkatan PAD dan DAU secara tidak langsung berpengaruh terhadap peningkatan pengangguran melalui pertumbuhan ekonomi, peningkatan DAK dan belanja pembangunan secara tidak langsung tidak berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan dan penurunan pengangguran melalui pertumbuhan ekonomi. **Maharajabdinul et al (2015)** menemukan bahwa peningkatan belanja kesehatan dan belanja pendidikan secara tidak langsung tidak berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan melalui investasi dan pertumbuhan ekonomi.



BAB III**KERANGKA KONSEP PENELITIAN****3.1 Kerangka Pikir Penelitian**

Berdasarkan teori federalisme fiskal, peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional dapat dicapai dan digandakan kecepatannya dengan cara memberikan kewenangan kepada daerah yang lebih besar untuk mengatur pemerintahannya sendiri atau sering disebut dengan otonomi daerah dimana salah satunya adalah desentralisasi fiskal. Keuntungan alokatif yang dimiliki oleh pemerintah daerah akibat desentralisasi menyebabkan pemerintah daerah lebih baik dalam mengambil kebijakan terkait pelayanan publik di daerah jika dibandingkan dengan sistem yang tersentralisasi dimana semua kebijakan diambil oleh pusat. Melalui desentralisasi, pemerintah daerah dapat membuat kebijakan yang mengoptimalkan kinerja pelayanan publik di daerah. Dengan diberikannya kewenangan yang lebih besar, daerah nantinya akan mampu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang pada akhirnya akan meningkatkan pula pertumbuhan ekonomi nasional.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal banyak membantu daerah-daerah di Indonesia dalam meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan daerahnya yang nantinya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan ekonomi. Penerimaan daerah merupakan salah satu indikator dalam menentukan desentralisasi fiskal dapat dikategorikan berhasil atau tidak (Khusaini, 2006). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sumber penerimaan daerah berasal dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan pinjaman. PAD merupakan penerimaan yang diperoleh dari potensi sumber daya dalam wilayahnya sendiri seperti pajak daerah dan restribusi daerah. PAD mencerminkan tingkat kemandirian daerah, dimana jika semakin besar PAD



maka menunjukkan bahwa daerah itu mampu melaksanakan desentralisasi fiskal.

Dana perimbangan merupakan dana transfer dari pemerintah pusat yang digunakan untuk membantu pemerintah daerah dalam membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan daerahnya. Menurut Peraturan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005, Dana Perimbangan merupakan penerimaan daerah dalam bentuk pendapatan transfer yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang bersumber dari transfer pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK). Menurut Khusaini (2006), dana bagi hasil berfungsi untuk menambah pendapatan daerah yang berasal dari dana bagi hasil pajak, dan sumber daya alam seperti kehutanan, perikanan, pertambangan umum, pertambangan minyak dan gas bumi serta pertambangan panas bumi. DAU digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah (*fiscal need*) melebihi dari potensi penerimaan daerah (*fiscal capacity*) yang ada. DAK digunakan untuk membantu kebutuhan khusus seperti kebutuhan di kawasan transmigrasi dan pembangunan jalan di daerah terpencil. Penyaluran dana perimbangan dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari rekening Kas Umum Negara ke Kas Umum Daerah. Hal ini berkaitan dengan perimbangan antara pusat dan daerah, yang merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan antara pusat dan daerah dan menunjukkan terjadinya transfer yang cukup signifikan di dalam APBN dari Pemerintah Pusat ke Daerah, dimana dana tersebut secara leluasa dapat dipergunakan untuk pelaksanaan desentralisasi.

Berdasarkan Peraturan Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2005, dana alokasi umum (DAU) berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah untuk membiayai pelaksanaan

desentralisasi. Dana alokasi umum ini bersifat *Block Grant* yang berarti penggunaan dana ini diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Dasar hukum pengalokasian dana ini sesuai dengan Undang-undang nomor 33 tahun 2003 tentang perimbangan dana antara pusat dan daerah besaran DAU ini sekurang-kurangnya 26 % dari pendapatan dalam negeri (PDN) Netto yang ditetapkan dalam APBN. Sedangkan proporsi DAU untuk daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan antara propinsi dan kabuapten/kota . Formula perhitungan DAU menggunakan pendekatan celah fiskal (fiskal gap) yaitu selisih antara kebutuhan.

Pada kenyataannya penggunaan dana alokasi umum (DAU) tersebut digunakan daerah untuk membiayai kebutuhan operasionalnya seperti belanja barang dan jasa dan gaji pegawai. Penggunaan DAU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu untuk melihat pengaruh desentralisais fiskal maka digunakan rasio dana alokasi umum (DAU) terhadap belanja operasional/umum.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 juga menyebutkan bahwa dana alokasi khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendaptan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khsus yang merupakan urusan daerah yang sesuai dengan prioritas nasional yang dilaksanakan di tingkat daerah. Kegaitan khusus ini sulit untuk diperkirakan dengan rumus aloaksi khusus. DAK ditujukan untuk daerah khusus yang terpilih untuk tujuan khusus. Oleh karena itu, alokasi yang didistribusikan oleh pemerintah pusat sepenuhnya merupakan wewenang pemerintah pusat untuk tujuan nasional. Kebutuhan khusus alokasi DAK meliputi:

1. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik daerah terpencil yang tidak mempunyai akses memadai ke daerah lain.
2. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah yang menampung transmigrasi.
3. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik yang terletak di daerah pesisir kepulauan dan tidak mempunyai prasarana dan sarana yang memadai.
4. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah guna mengatasi dampak kerusakan lingkungan.
5. Pembangunan jalan, rumah sakit, irigasi, dan air bersih.

Dana alokasi khusus (DAK) tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penelitian, pelatihan dan perjalanan dinas. Pembiayaan yang bersumber dari DAK ini bisa disamakan dengan belanja pembangunan karena digunakan untuk mendanai peningkatan kualitas pelayanan publik berupa pembangunan sarana dan prasarana publik (Ndadari dan Adi, 2005). Menurut Abdullah, dkk (2006), aset tetap yang dimiliki dari penggunaan belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Infrastruktur dan sarana prasaran yang ada di daerah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Jika sarana prasaran memadai di daerah itu maka masyarakat akan dapat melaksanakan aktifitas pekerjaan sehingga akan berdampak positif terhadap roda perekonomian sehingga akan berpengaruh pada produktifitas yang semakin meningkat. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dana alokasi khusus (DAK) cenderung digunakan untuk belanja modal. Sehingga untuk melihat pengaruh desentralisasi fiskal dapat diperoleh dari dana alokasi khusus (DAK) terhadap belanja modal.

Berdasarkan Undang-undang No. 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dana bagi hasil

(DBH) merupakan dana yang bersumber dari APBN dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari dua (2) jenis yaitu: yaitu dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam (SDA). Pola bagi hasil penerimaan tersebut dilakukan dengan presentase tertentu yang didasarkan atas daerah penghasil. Penerimaan dana bagi hasil (DBH) pajak bersumber dari:

1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
3. Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri (PPH WPOPDN) dan Pajak Penghasilan Pasal 21 (pph 21).
4. Penerimaan dana bagi hasil sumber daya alam berasal dari: kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.

Penggunaan dari dana bagi hasil (DBH) diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan desentralisasi. Sehingga untuk melihat dampak desentralisasi fiskal tersebut dapat digunakan rasio perbandingan dana bagi hasil (DBH) terhadap total belanja daerah.

Variabel desentralisasi fiskal yang berikutnya digunakan dalam penelitian ini adalah pengeluaran publik/pemerintah yaitu belanja daerah.

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu indikator dalam menilai keberhasilan suatu desentralisasi fiskal selain penerimaan daerah (Khusaini, 2006). Berdasarkan teori murni pengeluaran publik yang dikemukakan Samuelson (1954), pengeluaran publik merupakan elemen penting dalam pertumbuhan ekonomi yang menempatkan pemerintah menjadi peran utama.

Karena ada keterbatasan sumber daya fiskal, maka sangat penting bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kemampuan untuk mengalokasikan

sumber daya fiskal secara efisien. Kemampuan pemerintah daerah untuk mengalokasikan pengeluaran publik secara efisien menunjukkan tingkat kinerja mereka dan sampai batas tertentu menunjukkan kualitas institusi daerah pada umumnya (Borner, et al, 2004). Brennan dan Buchanan (1980) memperkenalkan cara untuk mengukur efisiensi sektor publik yaitu dengan mengukur pengalokasian pengeluaran publik oleh pemerintah daerah. Kebijakan, strategi dan keputusan yang dibuat oleh pemerintah daerah tentang bagaimana mengalokasikan pengeluaran publik dapat mempengaruhi efisiensi faktor produksi dan ekonomi daerah. Pengeluaran publik menggambarkan peran daerah yang dapat diukur dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (Tirtosuharto, 2009).

Pengukuran efisiensi pengeluaran publik dapat dilihat dari kualitas belanja daerah. Menurut Shah (2007), kualitas anggaran daerah berkaitan dengan pemenuhan nilai-nilai ekonomi, efisiensi, efektifitas, *equity* atau keadilan, akuntabilitas, dan responsivitas. Belanja pemerintah berfungsi sebagai stabilisasi, redistribusi dan alokasi sumber daya dalam rangka mendorong pertumbuhan dan pemerataan kesejahteraan. Kualitas belanja berarti suatu ukuran atas belanja yang mempunyai karakteristik dengan suatu derajat ekselensi yang tinggi (Juanda, dkk 2013). Belanja yang berkualitas adalah bagaimana memperbesar porsi belanja modal yang produktif yang akan berdampak langsung pada perekonomian (Aditia, 2010). Raharjo (2006) dan Utomo dan Suamrsono (2009) menyatakan bahwa kebijakan pengeluaran pemerintah melalui belanja pembangunan atau belanja modal dapat secara langsung mendorong pertumbuhan ekonomi, sedangkan belanja operasional diasosiasikan lebih kecil dampaknya terhadap penguatan ekonomi daerah karena cenderung konsumtif dan mengarah pada peningkatan inflasi. Menurut Khusaini (2016), belanja modal merupakan belanja yang langsung digunakan

untuk membiayai kegiatan investasi (menambah aset). Belanja modal digunakan untuk membiayai penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana publik serta pembangunan infrastruktur daerah. Belanja modal yang dapat meningkatkan produktifitas masyarakat dan iklim investasi daerah yang tentunya akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Peningkatan pengeluaran publik yang lebih produktif secara langsung akan menstimulasi atau mendorong peningkatan penerimaan daerah dan investasi swasta di daerah. Menurut Afonso, dkk (2003), Herrera dan Pang (2005), dan Tirtosuharto (2009), belanja daerah adalah bagian dari PDRB dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan regional dapat terjadi melalui produksi sektor swasta yang didorong oleh *multiplier effect* dari pengeluaran pemerintah. Menurut Wang (2005), Sen dan Kaya (2014), dan Wanjiru (2015), menemukan bahwa peningkatan belanja pemerintah memiliki dampak positif terhadap peningkatan investasi swasta. Menurut Suparmoko (1979:17), efisiensi pemerintah akan tercapai jika pemerintah memberikan kesempatan dan mengikutsertakan peran pihak swasta dalam menjalankan fungsi ekonomi di dalam suatu perekonomian negara. Salah satu peran swasta dalam perekonomian adalah melalui investasi. Untuk mendukung upaya pembangunan ekonomi daerah, pemerintah daerah perlu membuat kebijakan yang mendukung penanaman modal yang saling menguntungkan baik bagi pemerintah daerah, pihak swasta maupun terhadap masyarakat. Tumbuhnya iklim investasi yang sehat dan kompetitif diharapkan akan memacu perkembangan investasi yang saling menguntungkan dalam pembangunan daerah.

Menurut Tirtosuharto (2009), penerimaan daerah juga berasal dari keuntungan yang dihasilkan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), seperti bank lokal dan utilitas publik. Pengeluaran untuk proyek atau layanan penanaman modal menghasilkan pendapatan bagi daerah baik secara langsung

walaupun terdapat biaya atau ongkos, atau secara tidak langsung melalui pemungutan pajak yang didorong oleh pengembangan sektor swasta. Tingkat investasi swasta juga dipengaruhi oleh keputusan daerah untuk melakukan investasi terutama pada proyek modal yang berhubungan dengan penyediaan layanan publik bagi masyarakat. Perluasan pengeluaran publik akan mendorong konsumsi pemerintah, meluasnya permintaan pasar, dan berpotensi mendorong investasi swasta di daerah. Ketersediaan infrastruktur, seperti jaringan transportasi, telekomunikasi, dan listrik akan menjadi bagian pertimbangan saat membuat keputusan untuk berinvestasi di suatu wilayah. Perluasan belanja daerah juga akan mendorong konsumsi pemerintah, meluasnya permintaan pasar, dan berpotensi mendorong investasi swasta di suatu daerah. Ini menyerupai konsep *multiplier effect* dari belanja pemerintah yang bisa berujung pada peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Dalam mengukur efisiensi pengeluaran publik pada penelitian ini menggunakan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA). DEA merupakan suatu pendekatan non-parametrik yang pada dasarnya merupakan teknik berbasis pemrograman linier. DEA dibuat sebagai alat bantu untuk mengevaluasi kinerja suatu aktivitas dalam sebuah entitas (organisasi). Menurut Tirtosuharto (2009), DEA) adalah kategori utama metode non parametrik yang mengukur kinerja relatif unit pengambilan keputusan tertentu (*decision making units /DMU*). Kinerja diukur dari segi efisiensi bila mengacu pada satu set unit yang dibandingkan satu sama lain. DEA digunakan untuk mengevaluasi efisiensi relatif dari sebuah kumpulan DMU dalam mengelola sumber daya (input) dengan jenis yang sama sehingga menjadi hasil (output) dengan jenis yang sama pula, dimana hubungan bentuk fungsi dari input ke output tidak diketahui. DEA menggunakan teknik program matematis yang dapat menangani variabel dan batasan yang

banyak, dan tidak membatasi input dan output yang akan dipilih karena teknis yang dipakai dapat mengatasinya.

Dua indikator dalam desentralisasi fiskal baik itu dari sisi penerimaan maupun pengeluaran daerah menjadi tolak ukur keberhasilan dari desentralisasi fiskal. Secara teori, peningkatan pada kedua indikator tersebut akan turut memengaruhi peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut Oates (1972), desentralisasi fiskal akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, karena pemerintah daerah akan lebih efisien dalam produksi dan penyediaan barang-barang publik. Pengambilan keputusan pada level pemerintah lokal akan lebih didengarkan untuk menganekaragamkan pilihan lokal dan lebih berguna bagi efisiensi alokasi. Pengukuran efisiensi kinerja sektor publik (pemerintah daerah) dapat dilakukan dengan menganalisis efisiensi pemerintah daerah dalam mengalokasikan sumber daya fiskal. Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal merupakan salah satu usaha pemerintah untuk lebih mengeksplor potensi fiskal yang dimiliki daerahnya dan lebih dekat dengan masyarakat, sehingga pelayanan publik dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif. Menurut Musgrave (1991: 63), suatu pengaturan ekonomi tertentu adalah efisien jika di sana tidak dapat dilakukan pengaturan kembali yang akan menyebabkan seseorang menjadi lebih baik tanpa memperburuk posisi orang lain.

Menurut Bardhan (2002) pelaksanaan desentralisasi fiskal mendukung berbagai tujuan kebijakan, seperti pengurangan kemiskinan, persamaan pendapatan, penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hubungan antara desentralisasi fiskal, efisiensi pengeluaran publik dan pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, kemiskinan dan kesejahteraan berdasarkan asumsi bahwa desentralisasi memberi insentif bagi pemerintah daerah untuk bersikap efisien, yang pada akhirnya akan mengarah

pada peningkatan pertumbuhan pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, pengurangan kemiskinan, meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Proses penyerapan tenaga kerja dengan peningkatan output memerlukan waktu. Namun sejalan dengan pertumbuhan pencari kerja yang masih tinggi serta tekanan ekonomi yang semakin berat pada negara berkembang ternyata penciptaan lapangan kerja baru belum cukup menyelesaikan masalah pengangguran. Perluasan industri guna meningkatkan output tidak dapat mengatasi masalah ketenakerjaan. Hal ini dikarenakan industri yang berkembang yang bercirikan pada modal daya serap terhadap tenaga kerja terbatas (Todaro, 1994). Laju pertumbuhan permintaan tenaga kerja ditentukan oleh laju pertumbuhan akumulasi modal dan laju pertumbuhan output (Arsyad, 2010;77). Keberhasilan pembangunan ekonomi hanya dapat dicapai melalui kekuatan investasi dan industrialisasi. Pembangunan sektor industri akan mencukupi kebutuhan pasar dalam negeri serta menyerap kelebihan tenaga kerja.

Kemiskinan adalah keterbatasan yang disandang oleh seseorang, sebuah keluarga, sebuah komunitas, atau bahkan sebuah negara yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam kehidupan, terancamnya penegakan hukum dan keadilan, terancamnya bargaining (posisi tawar) dalam pergaulan dunia, hilangnya generasi serta suramnya masa depan bangsa dan negara. Telah dikatakan di atas bahwa kemiskinan terkait dengan ketidaknyamanan dalam hidup, artinya bahwa orang yang miskin itu hidupnya hampir selalu dan sering tidak nyaman. Dalam segala bidang mereka selalu menjadi kaum tersingkir, karena mereka tidak dapat menyamakan kondisi mereka dengan kondisi masyarakat sekelilingnya. Menurut Badan Pusat Statistik, garis kemiskinan merupakan suatu ukuran yang menyatakan besarnya pengeluaran (dalam rupiah) untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum makanan dan kebutuhan non makanan, atau standar yang menyatakan batas seseorang dikatakan miskin,

bila dipandang sudut konsumsi. Garis kemiskinan digunakan untuk mengetahui batas seseorang dikatakan miskin atau tidak atau garis kemiskinan dapat digunakan mengukur dan menentukan jumlah kemiskinan absolut. Menurut Todaro (2004:236) terdapat adanya hubungan yang negatif antara kemiskinan dan kesejahteraan, karena kemiskinan mempunyai aspek yaitu miskin akan aset, organisasi sosial politik, pengetahuan dan keterampilan, miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi yang termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah, maka akan berpengaruh terhadap penurunan kesejahteraan.

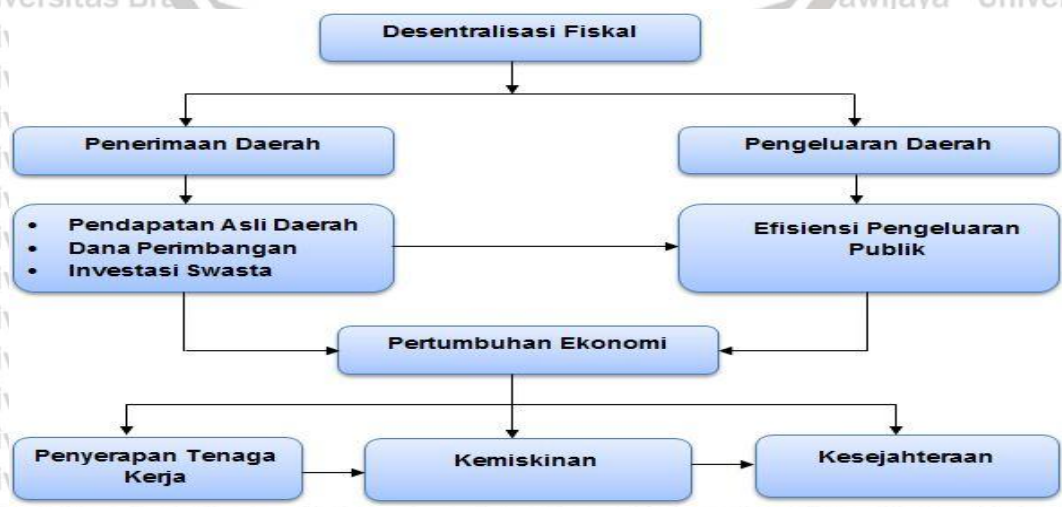
Teori ekonomi kesejahteraan menurut Pigou (1960:11) adalah bagian dari kesejahteraan sosial yang dapat dikaitkan secara langsung maupun tidak langsung dengan pengukuran uang. Sedangkan pengertian kesejahteraan sosial menurut Whithaker dan Federico (1997:361) merupakan sistem suatu bangsa tentang manfaat dan jasa untuk membantu masyarakat guna memperoleh kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan yang penting bagi kelangsungan masyarakat tersebut. Seseorang yang mempunyai kekurangan kemampuan mungkin memiliki kesejahteraan yang rendah kurangnya kemampuan dapat berarti kurang mampu untuk mencapai fungsi tertentu sehingga kurang sejahtera.

United Nations Development Programe (UNDP) mulai tahun 1990 telah menyusun suatu indikator kesejahteraan manusia yang dapat menunjukkan kemajuan manusia berdasarkan faktor-faktor, seperti rata-rata usia harapan hidup, rata-rata lama sekolah, angka melek huruf, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Laporan ini menganggap bahwa pembangunan manusia pada hakekatnya adalah suatu proses memperbesar pilihanpilihan manusia. Indikator kesejahteraan masyarakat yang disusun oleh UNDP dikenal dengan Human

Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (UNDP, 1994:94). Human Development Index (HDI) merupakan perangkat yang sangat bermanfaat untuk mengukur tingkat kesejahteraan antar negara maupun antar daerah (Todaro, 2003: 70). Indikator HDI jauh melebihi pertumbuhan konvensional. Pertumbuhan ekonomi penting untuk mempertahankan kesejahteraan rakyatnya, namun pertumbuhan bukan akhir dari pembangunan manusia. Pertumbuhan hanyalah salah satu alat, yang lebih penting adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi digunakan untuk memperbaiki kapabilitas manusianya dan bagaimana rakyat menggunakan kapabilitasnya tersebut. Salah satu keuntungan HDI adalah, indeks ini mengungkapkan bahwa sebuah negara atau daerah dapat berbuat jauh lebih baik pada tingkat pendapatan yang rendah, dan bahwa kenaikan pendapatan yang besar hanya berperan relatif kecil dalam pembangunan manusia (Todaro, 2003:71).

Untuk mempermudah dan memahami alur pikir penelitian dalam menganalisa pengaruh desentralisasi fiskal dan efisiensi pengeluaran publik terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, kemiskinan, dan kesejahteraan, dapat digambarkan kerangka konsep penelitian dibawah ini.

Gambar 3.1: Kerangka Konsep Penelitian

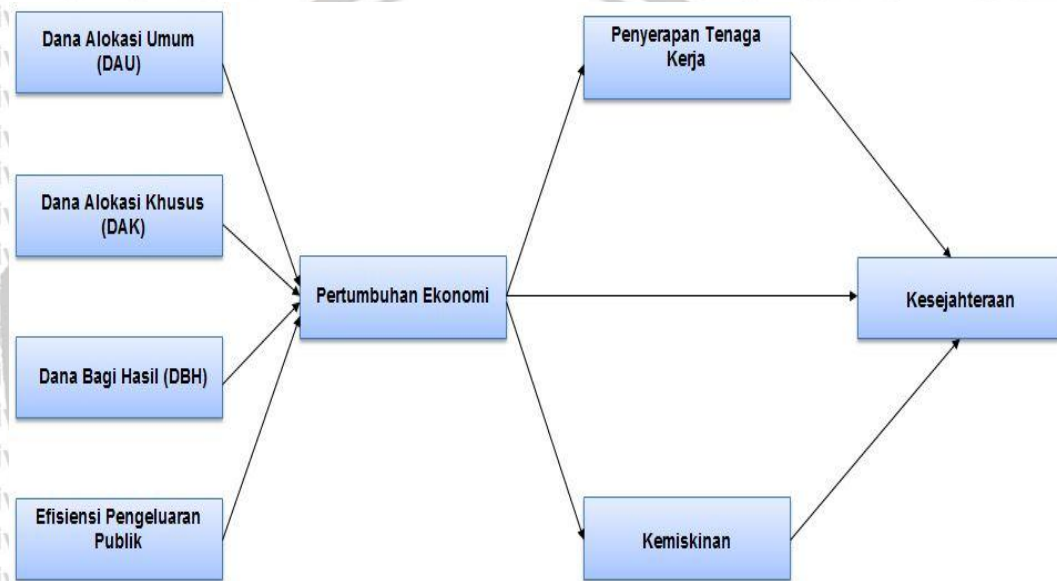


Sumber: Peneliti, 2018

Berdasarkan kerangka Konsep diatas, maka di bangun kerangka pikir

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Efisiensi Pengeluaran Publik terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Penyerapan Tenaga Kerja, Kemiskinan, Kesejahteraan penelitian seperti gambar dibawah ini.

Gambar 3.2: Kerangka Pikir Penelitian



Sumber: Peneliti, 2018

3.2 Hipotesis

Hipotesis yang diuji dalam penelitian ini untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat efisiensi pengeluaran publik pada provinsi-provinsi di Indonesia dan menguji pengaruh langsung dan tidak langsung dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana bagi hasil (DBH), dan efisiensi pengeluaran publik terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, kemiskinan, dan kesejahteraan di Kawasan Indonesia Barat dan Kawasan Indonesia Timur. Hipotesis pada penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu Hipotesis Nihil (H_0) yaitu hipotesis yang menyatakan tidak adanya pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat, dan Hipotesis Kerja (H_1) yaitu hipotesis yang

menyatakan adanya pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat.

Hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diduga rasio desentralisasi fiskal, rasio belanja modal, rasio belanja operasional, rasio kemandirian penerimaan berpengaruh signifikan positif terhadap efisiensi pengeluaran publik.
2. Diduga dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana bagi hasil (DBH), dan efisiensi pengeluaran publik berpengaruh langsung, signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kawasan Indonesia Barat (KIB) dan Kawasan Indonesia Timur (KIT).
3. Diduga pertumbuhan ekonomi berpengaruh langsung, signifikan positif terhadap penyerapan tenaga kerja, signifikan negatif terhadap kemiskinan, signifikan positif terhadap kesejahteraan di Kawasan Indonesia Barat (KIB) dan Kawasan Indonesia Timur (KIT).
4. Diduga penyerapan tenaga kerja berpengaruh langsung, signifikan positif terhadap kesejahteraan di Kawasan Indonesia Barat (KIB) dan Kawasan Indonesia Timur (KIT).
5. Diduga kemiskinan berpengaruh langsung, signifikan negatif terhadap kesejahteraan di Kawasan Indonesia Barat (KIB) dan Kawasan Indonesia Timur (KIT).
6. Diduga dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana bagi hasil (DBH), dan efisiensi pengeluaran publik secara tidak langsung berpengaruh signifikan positif terhadap penyerapan tenaga kerja, berpengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan, berpengaruh signifikan positif terhadap kesejahteraan melalui pertumbuhan ekonomi di Kawasan Indonesia Barat (KIB) dan Kawasan Indonesia Timur (KIT).

BAB IV**METODE PENELITIAN****4.1 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah metode ilmiah untuk memperoleh data yang valid dengan tujuan menemukan, menguji dan mengembangkan pengetahuan sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang tertentu (Sugiyono, 2008). Pendekatan kuantitatif merupakan penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dalam angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik.

4.2 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi pengeluaran publik dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi pengeluaran publik di 33 Provinsi di Indonesia, serta menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal dan efisiensi pengeluaran publik terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, kemiskinan, dan kesejahteraan di Kawasan Indonesia Barat (KIB) dan Kawasan Indonesia Timur (KIT) pada periode tahun 2008-2015. Kawasan Indonesia Barat (KIB) terdiri dari 17 provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, dan Bali. Sedangkan, Kawasan Indonesia Timur (KIT) terdiri 16 provinsi yaitu NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua.



Alasan pemilihan Kawasan Indonesia Barat (KIB) dan Kawasan Indonesia Timur (KIT) dikarenakan daerah-daerah KIB dan KIT memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda-beda setiap daerah. Perbedaan karakteristik dikarenakan beberapa faktor yaitu kondisi geografis, sumber daya alam (*natural resources*), dan sumber daya manusia (*human resources*). Kawasan Indonesia Barat (KIB) lebih unggul dalam hal sumber daya manusia yang berdampak pada kemajuan pembangunan ekonomi terutama pada sektor industri yang menjadi *leading sector*. Sedangkan Kawasan Indonesia Timur memiliki kekayaan sumber daya alam yang berlimpah sehingga sebagian masyarakat sangat tergantung pada sektor pertanian, pertambangan, pariwisata yang menjadi *leading sector*.

Perbedaan karakteristik dan potensi di KIB dan KIT menyebabkan pembangunan ekonomi dan sosial di setiap daerah mengalami berbeda-beda yang cenderung mengarah pada ketimpangan. Oleh karena itu mulai pada tahun 2001, Indonesia melaksanakan desentralisasi fiskal dengan tujuan meningkatkan kemandirian pemerintah daerah dalam pembiayaan dan kemampuan pengelolaan daerah yang mendukung pembangunan ekonomi, mengurangi ketimpangan antar daerah dan meningkatkan pelayanan publik. Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam menggali potensi sumber daya keuangan daerahnya. Menurut Khusaini (2006), penerimaan dan pengeluaran daerah merupakan salah satu indikator yang menilai keberhasilan pelaksanaan desentralisasi fiskal. Dengan adanya perbedaan potensi dan karakteristik di setiap daerah menyebabkan keberhasilan dan manfaat pelaksanaan desentralisasi yang diperoleh setiap daerah berbeda-beda. Menurut Tirtosuharto (2009), daerah-daerah maju di Kawasan Indonesia Barat (KIB) lebih besar merasakan keberhasilan dari desentralisasi fiskal, sedangkan daerah-daerah di Kawasan Indonesia Timur (KIT) kurang berhasil

untuk mendapatkan manfaat positif dari keberhasilan desentralisasi fiskal.

Menurut Fadli (2014), pelaksanaan desentralisasi fiskal belum sepenuhnya berhasil mengurangi ketimpangan pendapatan di Kawasan Indonesia Barat dan Kawasan Indonesia Timur. Hal ini bisa dilihat dengan masih tingginya ketimpangan pembangunan ekonomi di daerah. Pembangunan ekonomi di Kawasan Indonesia Barat (KIB) seperti Pulau Jawa, Bali dan Sumatera sudah cukup maju, tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi, peningkatan pertumbuhan investasi swasta dan investasi publik serta pendapatan daerah yang tinggi terutama proporsi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) yang lebih besar dibandingkan dana perimbangan artinya daerah-daerah di KIB tingkat kemandiriannya tinggi. Sedangkan pembangunan ekonomi di Kawasan Indonesia Timur (KIT) seperti Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua masih relatif rendah tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang masih rendah, rendahnya investasi publik dan investasi swasta serta penerimaan pendapatan daerah yang sebagian masih bersumber dari dana perimbangan artinya tingkat kemandirian daerah-daerah di KIT masih rendah karena ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat masih cukup tinggi. Kondisi ini yang menjadi latar belakang peneliti untuk menguji bagaimana pengaruh desentralisasi fiskal di Kawasan Indonesia Barat (KIB) dan Kawasan Indonesia Timur (KIT).

Pemilihan tahun 2008-2015 dikarenakan pada periode tersebut telah terjadi krisis yaitu pada tahun 2008 dan tahun 2013. Adanya krisis tersebut berdampak pada perlambatan ekonomi, dan menyebabkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) menurun, pada akhirnya pemerintah memberikan solusi dengan menaikkan dana perimbangan. Berdasarkan data publikasi dari kementerian keuangan dan badan pusat statistika (BPS), dana perimbangan

terus mengalami peningkatan dari 2008-2015. Faktor ketersediaan data menjadi pertimbangan peneliti memilih periode penelitian tersebut.

4.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Definisi operasional merupakan unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel yang didasarkan atas sifat-sifat hal yang didefinisikan yang dapat diobservasi. Dalam penelitian ini definisi operasional dari masing-masing variabel dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Efisiensi Pengeluaran Publik

Efisiensi pengeluaran publik merupakan suatu kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan kebijakan pemerintah dalam merealisasikan belanja daerahnya. Dalam penelitian pengukuran efisiensi pengeluaran publik menggunakan *Data Envelopment Analysis* (DEA). Pengukuran efisiensi pengeluaran publik dilakukan dengan membandingkan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). Dimana inputnya adalah belanja modal dan belanja operasional, sedangkan outputnya adalah investasi swasta dan pendapatan asli daerah (PAD).

2. Rasio Desentralisasi Fiskal

Rasio desentralisasi fiskal merupakan rasio antara total belanja daerah terhadap total belanja nasional. Pengeluaran yang lebih tinggi mewakili tingkat efisiensi pengeluaran publik yang tinggi juga. Perhitungannya menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Total Belanja Daerah}}{\text{Total Belanja Nasional}} \times 100\%$$

3. Rasio Belanja Modal

Rasio belanja modal merupakan rasio belanja modal daerah terhadap total belanja daerah. Belanja modal adalah perbaikan modal yang ada atau proyek

penanaman modal baru dan dianggap sebagai pengeluaran produktif.

Perhitungannya menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

4. Rasio Belanja Operasional

Rasio belanja operasional merupakan rasio belanja operasional daerah terhadap total belanja daerah. Hal ini juga dianggap sebagai belanja *overhead* yaitu belanja yang terkait dengan operasi dan pengelolaan pemerintah daerah.

Perhitungannya menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Operasional} = \frac{\text{Total Belanja Operasional}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

5. Rasio Kemandirian Penerimaan

Rasio kemandirian penerimaan merupakan rasio pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah. Rasio kemandirian penerimaan yang lebih tinggi mengindikasikan tingkat kemandirian daerah tinggi. Perhitungannya menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian Penerimaan} = \frac{\text{Total Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\%$$

6. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana alokasi umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Data variabel DAU dalam penelitian merupakan nilai DAU yang tercantum dalam laporan revalidasi APBD tahun 2008-2015 dari 33 provinsi di Indonesia.

7. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk

membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Data variabel DAK dalam penelitian merupakan nilai DAK yang tercantum dalam laporan realisasi APBD tahun 2008-2015 dari 33 provinsi di Indonesia.

8. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana perimbangan yang strategis bagi daerah-daerah yang memiliki sumber-sumber penerimaan pusat di daerahnya, meliputi penerimaan pajak pusat yaitu pajak penghasilan perseorangan (PPH perseorangan), pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan penerimaan dari sumber daya alam (minyak bumi, gas alam, pertambangan umum, kehutanan dan perikanan). Data variabel DBH dalam penelitian merupakan nilai DBH yang tercantum dalam laporan realisasi APBD tahun 2008-2015 dari 33 provinsi di Indonesia.

9. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat meningkat dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi daerah diukur melalui produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita provinsi di Indonesia. PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan seluruh unit usaha dalam wilayah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Data PDRB yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah PDRB atas dasar harga konstan tahun 2008-2015 dari 33 provinsi di Indonesia.

10. Penyerapan Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan penduduk yang menghasilkan barang dan jasa (Djojohadikusumo, 1955:160). Menurut *International Labour Organization* (ILO), batasan penduduk usia kerja yang digunakan Badan Pusat Statistika (BPS)

adalah penduduk yang berumur 15 tahun keatas, yang dibedakan angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Tenaga kerja terserap dalam data ini adalah jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang melakukan pekerjaan dari 33 provinsi di Indonesia pada tahun 2008-2015.

11. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang berkaitan dengan banyak aspek, namun secara sederhana adalah ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar minimumnya (*basic needs*). Pengukuran data kemiskinan dalam penelitian ini adalah jumlah penduduk miskin absolut dengan menggunakan kriteria dari Badan Pusat Statistika (BPS). Jumlah penduduk miskin merupakan jumlah penduduk miskin absolut 33 provinsi di Indonesia dalam satuan orang/jiwa.

12. Kesejahteraan

Kesejahteraan merupakan sistem suatu bangsa tentang manfaat dan jasa untuk membantu masyarakat guna memperoleh kebutuhan sosial, ekonomi pendidikan, kesehatan yang penting bagi kelangsungan masyarakat tersebut.

Pengukuran data kesejahteraan dalam penelitian adalah menggunakan nilai indeks pembangunan manusia (IPM) dari 33 provinsi di Indonesia.

4.4 Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari beberapa situs yaitu Badan Pusat Statistika (<http://www.bps.go.id>) untuk data untuk data realisasi APBD dan PAD, dana perimbangan, kemiskinan, tenaga kerja dan Indeks pembangunan manusia (kesejahteraan), Badan Koordinasi Penanaman Modal (<http://www.bkpm.go.id>), dan Bank Indonesia (<http://www.bi.go.id>) untuk data investasi swasta yaitu realisasi penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) serta sumber lainnya yaitu kementerian keuangan

(www.kemenkeu.go.id) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (<http://www.djpk.depkeu.go.id>). Data yang diperoleh dalam bentuk berkala (*time series*) dan lintas sektor (*cross section*) dengan periode tahun 2008 sampai dengan 2015 (8 tahun), sehingga hasil penelitian ini merupakan hasil penggunaan data selama periode tersebut.

4.5 Metode Analisis Data

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa efisiensi pengeluaran publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi pengeluaran publik, serta menganalisa pengaruh desentralisasi fiskal (dana perimbangan) dan efisiensi pengeluaran publik terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, kemiskinan, dan kesejahteraan pada 33 provinsi di Indonesia. Pada tahap pertama metode analisis dalam penelitian ini adalah mengukur efisiensi pengeluaran publik dengan menggunakan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA). Selanjutnya tahap kedua menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi pengeluaran publik dengan menggunakan metode Regresi Data Panel. Tahap ketiga menganalisa pengaruh desentralisasi fiskal dan efisiensi pengeluaran publik, terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, kemiskinan, dan kesejahteraan di Kawasan Indonesia Barat (KIB) dan Kawasan Indonesia Timur (KIT) dengan menggunakan metode analisis jalur (*path analysis*).

4.5.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk mempermudah mendeskripsi dan menafsirkan tabel dan grafik. Analisis ini menjelaskan perkembangan dan pertumbuhan data dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini yang disajikan dalam bentuk tabel dan grafik selama periode penelitian dari tahun 2008 sampai dengan 2015.

4.5.2 Pengukuran Efisiensi Pengeluaran Publik dengan Metode Data

Envelopment Analysis (DEA)

Data Envelopment Analysis (DEA) merupakan suatu pendekatan non-parametrik yang pada dasarnya merupakan teknik berbasis pemrograman linier. DEA dibuat sebagai alat bantu untuk mengevaluasi kinerja suatu aktivitas dalam sebuah entitas (organisasi). Pendekatan DEA diperkenalkan oleh Charnes, Cooper dan Rhodes pada tahun 1978 dan dimaksudkan untuk mengukur efisiensi unit organisasi. Konsep DEA merupakan perpanjangan dari fungsi produksi linier yang pada awalnya digabungkan dalam konsep ekonomi efisiensi empiris oleh Farrell pada tahun 1957 (Thanassoulis 2001). Farrell berusaha mengukur efisiensi unit produksi dalam satu kasus output tunggal, yang melibatkan pengukuran harga dan teknis efisiensi serta penurunan fungsi produksi yang efisien.

Data Envelopment Analysis (DEA) adalah kategori utama metode non-parametrik yang mengukur kinerja relatif unit pengambilan keputusan tertentu (*decision making units /DMU*). DEA digunakan untuk mengevaluasi efisiensi relatif dari sebuah kumpulan DMU dalam mengelola sumber daya (input) dengan jenis yang sama sehingga menjadi hasil (output) dengan jenis yang sama pula, dimana hubungan bentuk fungsi dari input ke output tidak diketahui. Dalam menganalisis efisiensi dengan DEA terdapat beberapa asumsi yaitu entitas yang dievaluasi menggunakan set input yang sama untuk menghasilkan set output yang sama pula, data bernilai positif dan bobot dibatasi pada nilai positif, dan Input dan output bersifat variabel. Langkah-langkah penelitian dengan metode DEA yaitu identifikasi DMU atau unit yang akan diobservasi beserta input dan output pembentuknya dan menghitung efisiensi tiap DMU untuk mendapatkan target input dan output yang diperlukan untuk mencapai kinerja optimal. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan

membandingkan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). Semakin besar output dibanding input, maka semakin tinggi efisiensi suatu organisasi.

$$\text{Teknis Efisiensi} = \frac{\sum \text{Output}}{\sum \text{Input}}$$

Dasar pemilihan variabel input dan output pada penelitian ini adalah berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Afonso, dkk (2003), Herrera dan Pang (2005), dan Tirtosuharto (2009). Dalam penelitian ini variabel input yang digunakan adalah

a. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset dan kekayaan daerah. Belanja modal mencakup pengeluaran untuk berbagai investasi publik, seperti infrastruktur, perumahan umum, kesehatan dan pendidikan. Dalam penelitian nilai belanja modal yang digunakan sudah dalam bentuk nilai absolut yang tercantum dalam laporan realisasi APBD tahun 2008-2015 dari 33 provinsi di Indonesia.

b. Belanja Operasional

Belanja operasional atau rutin adalah pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan tidak menambah aset atau kekayaan daerah. Belanja operasional terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Dalam penelitian nilai belanja operasional yang digunakan sudah dalam bentuk nilai absolut yang tercantum dalam laporan realisasi APBD tahun 2008-2015 dari 33 provinsi di Indonesia.

Sedangkan variabel output yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Penerimaan Daerah

Penerimaan daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan daerah lainnya yang sah. Dalam penelitian ini, nilai penerimaan daerah yaitu nilai PAD yang sudah dalam bentuk nilai absolut yang tercantum dalam laporan realisasi APBD tahun 2008-2015 dari 33 provinsi di Indonesia.

b. Investasi Swasta

Investasi swasta merupakan investasi yang dilakukan oleh pihak swasta, dimana keuntungan menjadi prioritas utama. Peran investasi memang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam teori federalisme fiskal, akan tetapi investasi tetap diperlukan dalam skema desentralisasi fiskal sebagai salah satu sumber penerimaan daerah selain dari dan perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Investasi modal publik memiliki sifat dan karakteristik dimana terdapat jeda waktu untuk sebuah proyek atau program yang akan dioperasikan sepenuhnya, maka data investasi yang digunakan dalam penelitian ini memiliki lag satu tahun ($t+1$) sehingga data yang digunakan adalah jumlah investasi tahun 2009-2016. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Murty dan Soumya (2006) dan Tirtosuharto (2009), menemukan bahwa investasi infrastruktur publik mempengaruhi investasi sektor swasta dalam setahun setelah diimplementasikan. Dengan demikian, jeda satu tahun dianggap cukup untuk mengukur dampak dari investasi modal publik. Nilai investasi swasta yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari total penjumlahan penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri

(PMDN) yang tercantum pada realisasi PMA dan PMDN dari 33 provinsi di Indonesia.

Berdasarkan pemaparan diatas maka kerangka penelitian dalam mengukur efisiensi pengeluaran publik dengan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA) dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 4.1: Kerangka Penelitian *Data Envelopment Analysis* (DEA)



Sumber: Peneliti, 2018

Alasan pemilihan variabel input dan output diatas berdasarkan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Afonso, dkk (2003), Herrera dan Pang (2005), dan Tirtosuharto (2009). Dimana variabel input yang digunakan untuk mengukur efisiensi daerah adalah pengeluaran publik melalui belanja modal dan belanja operasional. Pengeluaran publik berpotensi mempengaruhi pertumbuhan output atau PDRB dari sudut pandang teoritis. Belanja daerah adalah bagian dari PDRB dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan regional dapat terjadi melalui produksi sektor swasta yang didorong oleh *multiplier effect* dari pengeluaran pemerintah.

Sedangkan untuk pemilihan variabel output yaitu penerimaan daerah dan investasi swasta ini didasarkan pada penelitian Tirtosuharto (2009). Pemilihan variabel output ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Alfonso, dkk (2003) dan Herrera dan Pang (2005), dimana mereka menggunakan variabel seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan, infrastruktur, ketimpangan pendapatan, kualitas kelembagaan dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel outputnya. Menurut Tirtosuharto (2009), beberapa penerimaan daerah juga berasal dari keuntungan yang dihasilkan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), seperti bank lokal dan

utilitas publik. Pengeluaran untuk proyek atau layanan penanaman modal menghasilkan pendapatan bagi daerah baik secara langsung walaupun terdapat biaya atau secara tidak langsung melalui pemungutan pajak yang didorong oleh pengembangan sektor swasta. Tingkat investasi swasta juga dipengaruhi oleh keputusan daerah untuk melakukan investasi terutama pada proyek modal yang berhubungan dengan penyediaan layanan publik bagi masyarakat. Perluasan pengeluaran publik akan mendorong konsumsi pemerintah, meluasnya permintaan pasar, dan berpotensi mendorong investasi swasta di daerah. Ketersediaan infrastruktur, seperti jaringan transportasi, telekomunikasi, dan listrik akan menjadi bagian pertimbangan saat membuat keputusan untuk berinvestasi di suatu wilayah. Peningkatan pengeluaran publik akan mendorong konsumsi pemerintah, meluasnya permintaan pasar, dan berpotensi mendorong investasi swasta di suatu daerah. Ini menyerupai konsep *multiplier effect* dari belanja pemerintah yang bisa berujung pada pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

4.5.3 Metode Regresi Data Panel

Penelitian ini menggunakan jenis data panel dari 33 provinsi di Indonesia selama periode tahun 2008-2015. Data panel merupakan perpaduan antara data runtun waktu (*time series*) dan data lintas tempat (*cross section*).

Analisis dengan menggunakan data panel memiliki kelebihan karena memungkinkan peneliti untuk lebih mendalami efek ekonomi yang tidak dapat diperoleh apabila peneliti hanya menggunakan data *time series* atau *cross section* saja.

Menurut Widarjono (2009) ada beberapa metode yang umum digunakan dalam melakukan estimasi dengan data panel, yaitu:

1. *Pooled Least Square* atau *Common Effect Model* (CE)
2. Model Efek Tetap atau *Fixed Effect Model* (FE)

3. Model Efek Random atau *Random Effect Model* (RE)

Model yang paling sederhana diantara ketiga model diatas adalah model *common effect*. Model *common effect* merupakan gabungan antara data *cross section* dan *time series*, dimana untuk mengestimasi model data panel tersebut mempergunakan metode OLS (Widarjono, 2009). Ada kelemahan yang dimiliki model ini, yaitu tidak dapat membedakan varians *cross section* dan *time series* karena memiliki *intercept* yang tetap, serta tidak bervariasi secara random (Kuncoro, 2011). Sedangkan metode *fixed effect* memiliki *intercept* yang berbeda untuk masing-masing subjek (*cross section*), namun slope setiap subjek tidak berubah seiring waktu (Gujarati, 2004). Dalam membedakan satu subjek dengan subjek lain digunakan variabel *dummy* (Kuncoro, 2011). Sedangkan model *random effect* mengestimasi data panel yang variabel residualnya diduga mempunyai hubungan antar *series* dan antar *cross section*. Kelemahan model *fixed effect* yang mempergunakan variabel *dummy* dapat diatasi dengan model *random effect* (Widarjono, 2009). Adapun persyaratan yang harus dipenuhi dalam penggunaan metode *random effect* untuk analisis data panel adalah jumlah *cross section* harus lebih besar dibandingkan dengan jumlah variabel penelitian. Analisis data panel dalam penelitian ini menggunakan program Eviews 10.

Bentuk persamaan regresi data panel dalam penelitian ini secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$EPP_{it} = f(RDF_{it}, RBM_{it}, RBO_{it}, RKP_{it}), i = 1, 2, \dots, 33; t = 1, 2, \dots, 8$$

$$EPP_{it} = \beta_0 + \beta_1 RDF_{it} + \beta_2 RBM_{it} + \beta_3 RBO_{it} + \beta_4 RKP_{it} + \varepsilon_{it}$$

Dimana:

EPP : Efisiensi Pengeluaran Publik

β_0 : Konstanta

β_{1-4} : Koefisien Regresi

- i : Provinsi ke- i (*cross section*), $i = 1, 2, \dots, 33$
- t : Periode tahun ke- t (*time series*), $t = 2008, \dots, 2015$
- RDF : Rasio Desentralisasi Fiskal
- RBM : Rasio Belanja Modal
- RBO : Rasio Belanja Operasional
- RKP : Rasio Kemandirian Penerimaan
- ε_{it} : *Error term*

4.5.3.1 Pengujian Spesifikasi Model

Dalam memilih model terbaik untuk analisis regresi data panel, yaitu data yang merupakan kombinasi dari data silang tempat atau *cross section* dan data runtun waktu atau *time series*, diperlukan suatu pengujian spesifikasi model. Terdapat dua jenis uji yang digunakan dalam penelitian model terbaik antara *common effect* model, *fixed effect* model, dan *random effect* model, yaitu:

a. Uji Chow (*Chow Test*)

Uji Chow merupakan uji memilih model terbaik antara model *Pooled Least Square (Common Effect)* dalam mengetimasi model data panel menggabungkan data *cross section* dan *time series* menggunakan *Ordinary Least Square (OLS)*. Model ini tidak dapat membedakan varians antara silang tempat (*cross section*) dan titik waktu karena memiliki *intercept* yang tetap, dan bukan bervariasi secara random (Kuncoro, 2012). Dengan demikian asumsi untuk model ini adalah *intercept* antar individu dianggap sama, sehingga metode *Pooled Least Square* tidak dapat menangkap gambaran sesungguhnya tentang hubungan antar individu *cross section*. Sedangkan model *fixed effect* adalah model dengan *intercept* berbeda-beda untuk setiap subjek (*cross section*), tetapi slope setiap subjek tidak berubah sering waktu (Gujarati, 2012). Model *Random Effect* mengestimasi data panel yang variabel

residualnya diduga mempunyai hubungan antar waktu dan antar subjek. Dalam membedakan satu subjek dengan subjek lainnya digunakan variabel *dummy*.

Hipotesis yang digunakan dalam Uji Chow adalah sebagai berikut:

H_0 : Model *Common Effect*

H_1 : Model *Fixed Effect*

Uji chow menggunakan Statistik F (*F-statistic*) sebagai dasar untuk pengujian hipotesis, seperti yang dirumuskan oleh Chow sebagai berikut:

$$F = \frac{(RRSS - URSS)/(N - 1)}{URSS/(NT) - N - K}$$

dengan:

RRSS : jumlah *error* kuadrat yang dihasilkan dari perhitungan estimasi data panel dengan metode *Pooled Least Square* atau *Common Effect*.

URSS : jumlah *error* kuadrat yang dihasilkan dari perhitungan estimasi data panel dengan metode *Fixed Effect*.

N : jumlah data individu (*cross section*)

T : jumlah data deret waktu (*time series*)

K : jumlah variabel bebas (*independent variable*)

Hipotesis nol (H_0) akan ditolak jika nilai Statistik Chow (*F-statistic*) lebih besar dari nilai F tabel. Nilai F tabel didapat dari:

$$F_{Tabel} = \{ \alpha; df(n - 1, nt - n - k) \}$$

dimana:

α : tingkat signifikansi yang digunakan

n : jumlah silang tempat atau *cross section*

t : jumlah runtun waktu atau *time series*

k : jumlah variabel bebas

Penelitian ini menggunakan program *Eviews 10* untuk menghitung Statistik Chow (*F-statistic*). Dari hasil output perhitungan Statistik Chow (*F-*

statistic) juga akan diperoleh nilai probabilitas Statistik F (*p-value*). Apabila nilai probabilitas Statistik F (*p-value*) lebih kecil daripada tingkat signifikansi α , maka hipotesis nol (H_0) ditolak. Hal ini berarti model yang terbaik adalah model *fixed effect*. Sebaliknya apabila nilai probabilitas (*p-value*) lebih besar daripada tingkat signifikansi α , maka hipotesis nol (H_0) diterima. Hal ini berarti model yang paling sesuai adalah model *common effect*.

b. Uji Hausman (*Hausman Test*)

Uji *Hausman* adalah uji untuk memilih model terbaik antara model *fixed effect* dan *random effect*. Sedangkan dalam pengujian dengan uji *Hausman*, hipotesis yang dibentuk adalah sebagai berikut:

H_0 : Model *Random Effect*

H_1 : Model *Fixed Effect*

Sedangkan rumus untuk menghitung nilai Statistik Hausman adalah sebagai berikut:

$$H = [\hat{b}_{RE} - \hat{\beta}_{FE}]' \left[\sum RE - \sum FE \right]^{-1} [\hat{b}_{RE} - \beta_{FE}]$$

dimana:

\hat{b}_{RE} : koefisien parameter untuk estimasi model *random effect*

$\hat{\beta}_{FE}$: koefisien parameter untuk estimasi model *fixed effect*

$\sum RE$: matriks kovariansi untuk estimasi model *random effect*

$\sum FE$: matriks kovariansi untuk estimasi model *fixed effect*

Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan antara nilai Statistik Hausman (H) dengan nilai *Chi-square* tabel. Hipotesis nol (H_0) akan ditolak jika nilai $H > \text{Chi-square}$ tabel. Nilai *Chi-square* tabel didapat dari:

$$X^2(v; \alpha)$$

dimana:

v : jumlah variabel bebas



α : tingkat kepercayaan

Perhitungan nilai Statistik Hausman dalam penelitian ini menggunakan Eviews 10. Dari hasil output perhitungan Statistik Hausman juga akan diperoleh nilai probabilitas Statistik Hausman (*p-value*). Apabila nilai probabilitas (*p-value*)

lebih kecil daripada tingkat signifikansi α , maka hipotesis nol (H_0) ditolak. Hal tersebut berarti model yang paling sesuai adalah model *random effect*.

Sebaliknya apabila nilai probabilitas (*p-value*) lebih besar daripada tingkat signifikansi α , maka hipotesis nol (H_0) diterima. Hal ini berarti model *fixed effect* adalah model yang paling tepat.

4.5.3.2 Pengujian Statistik

4.5.3.2.1 Uji Statistik F (Uji Signifikansi Parameter Simultan)

Uji Statistik F atau Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh bersama dari beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini variabel independen meliputi: rasio desentralisasi fiskal, rasio belanja modal, rasio belanja operasional, dan rasio kemandirian penerimaan.

Sedangkan variabel dependennya adalah efisiensi pengeluaran publik.

Uji F dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dan nilai F tabel, dimana nilai F hitung diperoleh melalui formula:

$$F_{hitung} = \frac{R^2 / (k - 1)}{(1 - R^2) / (n - k)}$$

dimana:

R^2 : koefisien determinasi

k : jumlah variabel

n : jumlah sampel

berdasarkan hasil yang didapat dari Uji F, apabila didapatkan nilai F hitung yang lebih kecil daripada nilai F tabel maka hipotesis nol (H_0) akan ditolak,

dimana H_0 menyatakan bahwa variabel independen secara simultan atau bersama-sama berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel dependen.

4.5.3.2.2 Uji Statistik t (Uji Signifikansi Parameter Individual)

Uji Statistik t atau Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan cara membandingkan nilai t hitung dan nilai t tabel, dimana nilai t hitung diperoleh dengan formula sebagai berikut:

$$t_{hitung} = \frac{b_i}{SE_{b_i}}$$

dimana:

b_i : koefisien regresi

$se(b)$: *standart error* koefisien regresi

Apabila t hitung lebih besar dari t tabel, maka hipotesis nol akan ditolak, dimana H_0 menyatakan bahwa variabel independen secara individual tidak signifikan berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya apabila t hitung lebih kecil dari t tabel maka variabel independen secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Oleh karena itu, model regresi Data Panel digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat efisiensi pengeluaran publik di Indonesia. Bagian ini merupakan perpanjangan dari analisis empiris tahap pertama yang mengukur nilai efisiensi pengeluaran publik menggunakan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA). Beberapa faktor yang diidentifikasi sebagai faktor penentu efisiensi pengeluaran publik digunakan untuk membangun variabel tertimbang (*weighted variable*) yang akan menyesuaikan tingkat efisiensi pada model pertumbuhan. Penyesuaian ini dibuat sangat berperan untuk menciptakan faktor efisiensi pengeluaran publik yang lebih tepat.

Menurut Tirtosuharto (2009), faktor-faktor yang dianalisis untuk menentukan kemungkinan bahwa mempengaruhi tingkat efisiensi pengeluaran publik dan merupakan variabel independent dalam model regresi Data Panel adalah sebagai berikut:

a. Rasio Desentralisasi Fiskal

Rasio desentralisasi fiskal merupakan rasio antara total belanja daerah terhadap total belanja nasional. Pengeluaran yang lebih tinggi mewakili tingkat efisiensi pengeluaran publik yang tinggi juga. Perhitungannya menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Total Belanja Daerah}}{\text{Total Belanja Nasional}} \times 100\%$$

b. Rasio Belanja Modal

Rasio belanja modal merupakan rasio belanja modal daerah terhadap total belanja daerah. Belanja modal adalah perbaikan modal yang ada atau proyek penanaman modal baru dan dianggap sebagai pengeluaran produktif. Perhitungannya menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

c. Rasio Belanja Operasional

Rasio belanja operasional merupakan rasio belanja operasional daerah terhadap total belanja daerah. Hal ini juga dianggap sebagai belanja *overhead* yaitu belanja yang terkait dengan operasi dan pengelolaan pemerintah daerah.

Perhitungannya menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Operasional} = \frac{\text{Total Belanja Operasional}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

d. Rasio Kemandirian Penerimaan

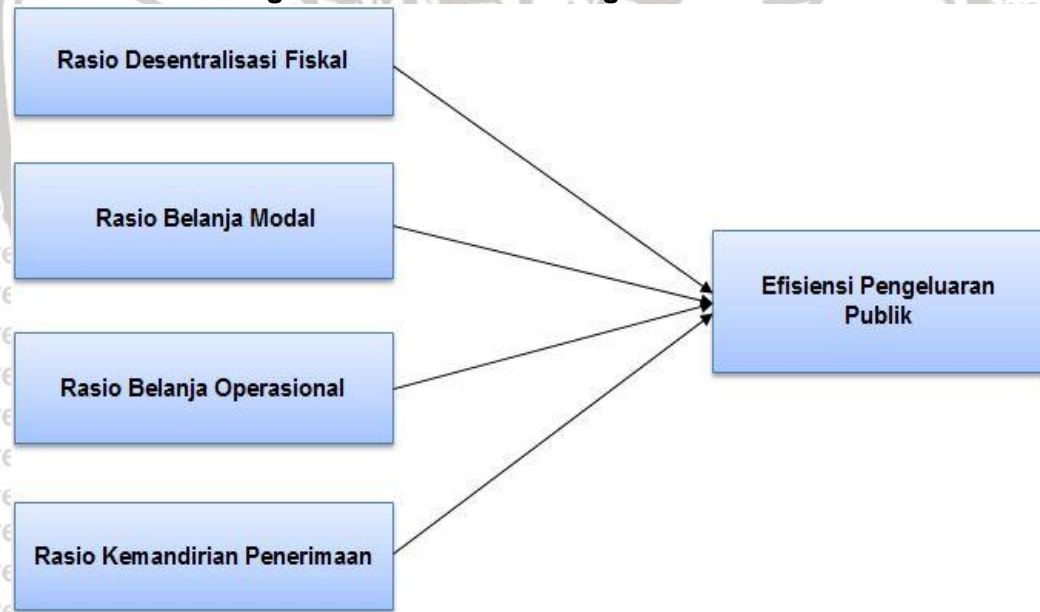
Rasio kemandirian penerimaan merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari hasil pengelolaan sumber daya daerah itu sendiri yaitu

pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya yang sah terhadap total penerimaan daerah. Rasio kemandirian penerimaan yang lebih tinggi mengindikasikan adanya kenaikan pendapatan daerah. Perhitungannya menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian Penerimaan} = \frac{\text{Total Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\%$$

Untuk mempermudah dan memahami alur pikir penelitian dalam menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi pengeluaran publik dengan menggunakan model Regresi Data Panel, dapat digambarkan kerangka pikir dibawah ini.

Gambar 4.2: Kerangka Penelitian Model Regresi Data Panel



Sumber: Peneliti, 2018

Dasar pengambilan keputusan dalam model regresi Data Panel adalah sebagai berikut:

- Jika Probabilitas < 0,05 maka rasio desentralisasi fiskal, rasio belanja modal, rasio belanja operasional dan rasio kemandirian penerimaan berpengaruh terhadap efisiensi pengeluaran publik.

- Jika Probabilitas $> 0,05$ maka rasio desentralisasi fiskal, rasio belanja modal, rasio belanja operasional dan rasio kemandirian penerimaan tidak berpengaruh terhadap efisiensi pengeluaran publik.

4.5.3.3 Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik merupakan persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi yang berbasis *Ordinary Least Square* (OLS). Uji asumsi klasik terdiri dari uji Normalitas, Multikolinieritas, Heteroskedastisitas, dan Autokorelasi.

4.5.3.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas adalah untuk melihat nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Uji normalitas dapat ditempuh dengan Uji *Jarque-Berra* (*JB test*). Jika probabilitas (*p-value*) lebih besar dari tingkat kepercayaan maka data penelitian dianggap normal.

4.5.3.3.2 Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas berarti adanya hubungan linier yang sempurna atau pasti, di antara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dari model regresi. Ada atau tidaknya multikolinieritas dapat diketahui atau dilihat dari koefisien korelasi masing-masing variabel bebas. Jika koefisien korelasi di antara masing-masing variabel bebas lebih besar dari 0,8, maka terjadi multikolinieritas (Ajija,dkk 2011).

4.5.3.3.3 Uji Heterokedastisitas

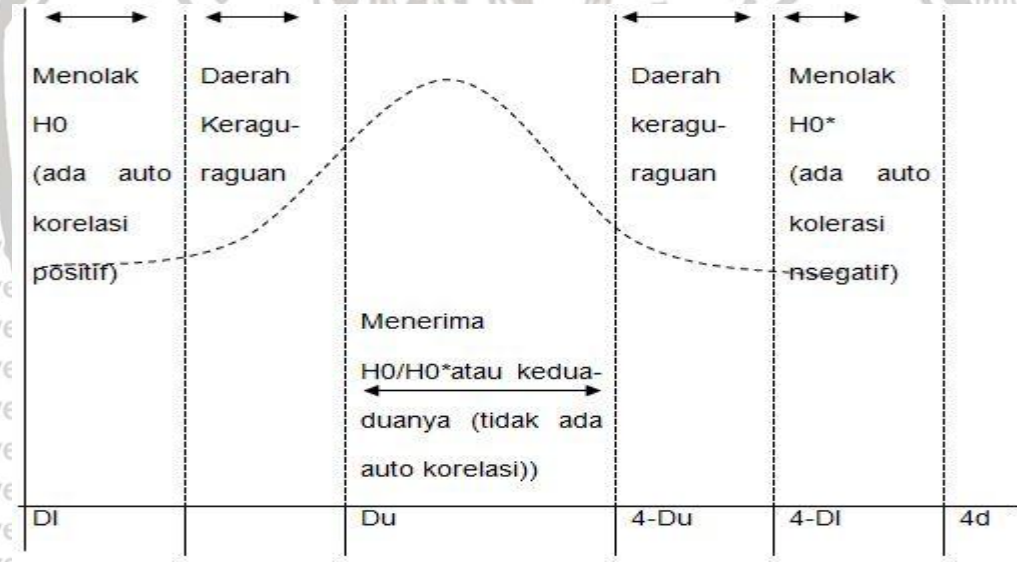
Heterokedastisitas merupakan keadaan di mana semua gangguan yang muncul dalam fungsi regresi populasi tidak memiliki varians yang sama. Salah satu cara yang dapat untuk menguji heterokedastisitas ini dengan cara uji *uji Glejser* yang tersedia dalam program *evIEWS*. uji *Glejser* yaitu dengan meregresikan variabel-variabel bebas terhadap nilai absolut residualnya

(Gujarati, 2006). Jika nilai Probabilitas dari masing-masing variabel bebas lebih besar dari tingkat kepercayaan (0.05), maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.5.3.3.4 Uji Autokorelasi

Autokorelasi menunjukkan korelasi di antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu atau ruang. Untuk mendeteksi adanya autokorelasi dilakukan dengan memperhatikan nilai *Durbin Watson statistic*. Uji autokorelasi yang dilakukan dengan melihat nilai *Durbin Watson Stat* dari hasil eviews dan tabel *Durbin watson*. Dari hasil estimasi, diketahui bahwa nilai *DW statistic* relative kecil, artinya ada kemungkinan terjadi autokorelasi.

Gambar 4.3: Daerah Batas Serial Korelasi



Keterangan :

H0 = Tidak ada autokorelasi positif

H0* = Tidak ada autokorelasi negatif

4.5.4 Metode Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Dalam menganalisis pengaruh langsung dan tidak langsung desentralisasi fiskal (dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana bagi hasil (DBH)) dan efisiensi pengeluaran publik terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, kemiskinan, dan kesejahteraan, maka penelitian menggunakan metode analisis jalur (*path analysis*). Alasan peneliti menggunakan analisis jalur dikarenakan jalur variabel yang digunakan merupakan jalur rekursif atau yang biasa dikenal dengan pengaruh satu arah. Hubungan antara variabel desentralisasi fiskal, dan efisiensi pengeluaran publik, merupakan hubungan searah dengan variabel pertumbuhan ekonomi. Begitu pula dengan hubungan pertumbuhan ekonomi dengan penyerapan tenaga kerja, kemiskinan, dan kesejahteraan, yang merupakan hubungan searah saja. Karena apabila hubungan tersebut merupakan hubungan dua arah maka metode analisis jalur tidak bisa digunakan.

Melalui diagram jalur, secara garis besar sangat membantu untuk menggambarkan pola hubungan kausal antara sejumlah peubah dan analisis jalur memiliki daya guna untuk mencetak atau menguji kausal yang diteorikan dan bukan untuk menurunkan teori kausal tersebut (Kuncoro dan Riduwan, 2008). Dalam analisis jalur terdapat pengaruh langsung dan tidak langsung. Pengaruh langsung artinya arah hubungan antara dua variabel langsung tanpa variabel lain, sementara pengaruh tidak langsung antar variabel dengan menggunakan koefisien beta atau koefisien regresi yang distandarisasi, adapun besarnya pengaruh tidak langsung dalam *path analysis* adalah dengan cara mengalikan koefisien *path* pengaruh langsung variabel bebas (*independent variable*) terhadap variabel terikat (*dependent variable*).

4.5.4.1 Langkah-langkah dalam Metode *Path Analysis*

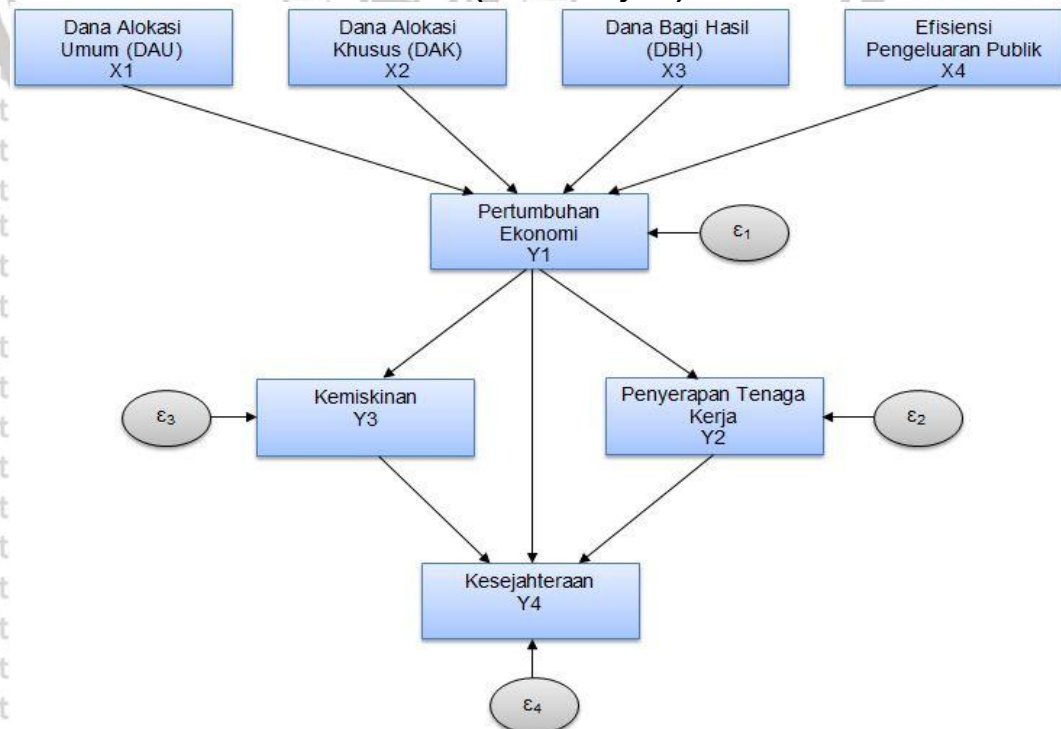
Tahapan yang dijalankan dalam melakukan analisis menggunakan *path analysis* yaitu sebagai berikut:

1. Pengembangan Model Berbasis Konsep dan Teori

Dalam mengembangkan model, langkah awal yang dilakukan adalah merancang atau membuat hipotetik berdasarkan konsep dan teori. Secara konsep desentralisasi fiskal yaitu dana alokasi umum (X1), dana alokasi khusus (X2), dana bagi hasil (X3), dan efisiensi pengeluaran publik (X4) memiliki pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi (Y1), Penyerapan Tenaga Kerja (Y2), Kemiskinan (Y3) dan kesejahteraan (Y4).

Berdasarkan hubungan-hubungan antar variabel tersebut, langkah selanjutnya adalah mengkonstrusikan ke dalam diagram jalur dan selanjutnya dapat dikonversi dalam model analisis sebagai berikut:

Gambar 4.4: Model Analisis Jalur (*Path Analysis*)



Sumber: Peneliti, 2018

Berdasarkan model analisis jalur diatas, maka diperoleh persamaan untuk model hipotesis analisis jalur untuk pengaruh langsung desentralisasi fiskal dan efisiensi pengeluaran publik terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengaruh pertumbuhan ekonomi pertumbuhan ekomi terhadap penyerapan tenaga kerja, kemiskinan, dan kesejahteraan adalah sebagai berikut:

$$Y1 = P_{y1x1} X1 + P_{y1x2} X2 + P_{y1x3} X3 + P_{y1x4} X4 + \epsilon_1$$

$$Y2 = P_{y2y1} Y1 + \epsilon_2$$

$$Y3 = P_{y3y1} Y1 + \epsilon_3$$

$$Y4 = P_{y4y1} Y1 + P_{y4y2} Y2 + P_{y4y3} Y3 + \epsilon_4$$

Persamaan untuk model hipotesis analisis jalur untuk pengaruh tidak langsung desentralisasi fiskal dan efisiensi pengeluaran publik terhadap penyerapan tenaga kerja, kemiskinan, dan kesejahteraan melalui pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut:

$$Y2 = P_{y2x1} X1 + P_{y2x2} X2 + P_{y2x3} X3 + P_{y2x4} X4 + \epsilon_1$$

$$Y3 = P_{y3x1} X1 + P_{y3x2} X2 + P_{y3x3} X3 + P_{y3x4} X4 + \epsilon_1$$

$$Y4 = P_{y4x1} X1 + P_{y4x2} X2 + P_{y4x3} X3 + P_{y4x4} X4 + \epsilon_1$$

Dimana:

X1 :Dana Alokasi Umum (DAU)

X2 :Dana Alokasi Khusus (DAK)

X3 :Dana Bagi Hasil (DBH)

X4 :Efisiensi pengeluaran publik

Y1 :Pertumbuhan Ekonomi (PE)

Y2 :Penyerapan Tenaga Kerja

Y3 :Kemiskinan

Y4 :Kesejahteraan

$\epsilon_{1,2,3,4}$:error



2. Pengintegrasian dengan asumsi yang melandasi.

Adapun asumsi yang melandasi *path analysis* adalah sebagai berikut:

- Di dalam model analisis path, hubungan variabel adalah linier dan aditif. Hanya model rekursif yang dapat dipertimbangkan, yaitu hanya sistem aliran kausal ke satu arah, sedangkan pada model yang mengandung kausal bolak-balik atau dua arah tidak dapat dilakukan *path analysis*.
- Data variabel endogen minimal dalam skala interval.
- *Observed variables* dikur tanpa kesalahan (instrumen pengukuran valid dan reliabel).
- Model yang dianalisis dispesifikasikan (diidentifikasi) dengan benar berdasarkan teori-teori dan konsep-konsep yang relevan.

3. Pendugaan parameter (perhitungan koefisien jalur).

Pendugaan parameter lebih diimplementasikan dalam perhitungan koefisien path, perhitungan ada gambar diagram *path* dijelaskan sebagai berikut:

- Untuk anak panah bolak-balik \leftrightarrow koefisiennya merupakan koefisien korelasi, r dihitung seperti biasanya.
- Untuk anak panah satu arah \rightarrow digunakan perhitungan regresi dengan data ibakukan (*standardize data*), secara parsial pada masing-masing persamaan. Metode yang digunakan adalah OLS, yaitu metode kuadrat terkecil biasa. Hal ini dapat dilakukan mengingat modelnya rekursif. Dari perhitungan ini diperoleh koefisien path pengaruh langsung. Di samping itu juga masih ada dua metode yang dapat digunakan untuk menghitung koefisien jalur, yaitu menggunakan pendekatan matriks korelasi dan melakukan perhitungan lebih lanjut terhadap koefisien regresi (data mentah).

Koefisien *path* tersebut di ambil dari *Standardize Coeficients Beta*, dan dalam hal ini berlaku sebagai berikut:

$$Z_{yi} = \frac{y_i - \bar{y}}{S_y}, \quad Z_{x1} = \frac{X_{i1} - \bar{X}_1}{S_{x1}}$$

Dengan mengubah setiap data pengamatan ke dalam data *standardize*, maka semua unit satuan dari setiap variabel adalah hilang (Z tidak mempunyai satuan) dan sakalanya juga menajdi seragam (-4 s/d +4), seberapapun nilai minimal dan maksimal dari data asli).

Metode perhitungan koefisien jalur terdapat tiga cara, yaitudengan pendekatan matriks ($p = R_x^{-1} R_y$), koefisien regresi dilanjutkan dengan suatu proses perhitungan $\{p_i = b_i(S_{xi}/S_y)\}$, dan koefisien regresi *standardize*. Pada penelitian ini, metode yang dipilih adalah metode yang terskhir, yaitu regresi *standardize*, mengingat metode ini di pandang paling sederhana. Di samping itu, perhitungan *goodness of fit* berupa Koefisien Determinasi Total dapat dilakukan secara sederhana, dan pelaksanaan *Theory Triming* daaat dilakukan dengan mudah. Perhitungan regresi data *standardize* dilakukan secara parsial pada masing-masing persamaan. Mengingat modelnya rekursif, maka metode yang digunakan adalah OLS, yaitu metode kuadrat terkecil biasa.

4. Pengujian validitas model.

Uji validasi korfisien *path* pada setiap jalur untuk pengaruh langsung adalah sama dengan pada regresi, menggunakan nilai p dari uji t, yaitu pengujian koefisiean regresi variabel dilakukan secara parsial. Berdasarkan teori trimimg, maka jalur-jalur yang nonsignifikan dibuang, sehingga diperoleh model yang didukung (konfirmasi) oleh data empiirik.

5. Interpretasi model.

Langkah terakhir di dalam *path analysis* adalah melakukan interpretasi model terhadap analisis. Pertama dengan memperhatikan hasil validitas model. Dan selanjutnya menghitung pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung, dan pengaruh total dari setiap variabel yang mempunyai pengaruh kausal ke variabel endogen.

4.5.4.2 Uji Asumsi Klasik

Dalam penggunaan analisis regresi maka perlunya dipenuhi dahulu beberapa uji persyaratan analisis atau uji asumsi klasik, dengan maksud agar diperoleh perkiraan yang tidak bias dan efisien dari persamaan regresi linier berganda. Beberapa asumsi klasik yang harus dipenuhi adalah:

4.5.4.2.1 Uji linieritas

Uji linieritas dilakukan untuk mengetahui model yang dibuktikan merupakan model linear atau tidak. Uji linieritas dilakukan dengan menggunakan *curve fit* dan menerapkan pengaruh antar variabel dinyatakan linier jika (1) model linier signifikan atau nilai Sig Linier $< 0,05$, atau (2) seluruh model yang mungkin adalah nonsignifikan atau seluruh model memiliki nilai Sig $> 0,05$.

4.5.4.2.2 Uji normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diteliti berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan aplikasi AMOS 24. Hal ini dimaksudkan untuk melihat normalitas model yang diujikan secara univariat dan multivariat. Rujukan nilai menggunakan nilai pada kolom C.R atau *critical ratio*. Apabila terdapat nilai $> 2,58$, maka dikatakan bahwa distribusi data tidak normal. Jadi, normalnya distribusi data yaitu apabila *critical ratio* yang terjadi $\leq 2,58$.

4.5.4.2.3 Uji *Outlier*

Outlier (angka esktrim) merupakan observasi yang muncul dengan nilai-nilai esktrim secara univariat maupun multivariat yaitu yang muncul karena kombinasi karakteristik unik yang dimilikinya dan terlihat sangat berbeda dari observasi-observasi lainnya.

4.5.4.3 Pengujian Hipotesis

Pendekatan yang dilakukan dalam pengujian variabel-variabel yang mempengaruhi variabel dependent adalah dengan uji signifikasi. Uji signifikasi secara umum merupakan suatu produser untuk memeriksa benar atau tidaknya suatu hipotesis. Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini baik untuk *direct effect* maupun *indirect effect* menggunakan uji t. Nilai t hitung merujuk pada nilai *critical ratio* yang diperoleh dai hasil perhitungan menggunakan aplikasi AMOS 24. Dasar pengambilan keputusannya berdasarkan kriteria dari uji t koefisien *path*, yaitu:

- a. Jika nilai Probabilitas $< 0,05$ maka terdapat pengaruh signifikan pada jalur yang dipilih (H_0 ditolak, H_a diterima).
- b. Jika nilai Probabilitas $> 0,05$ maka tidak terdapat pengaruh signifikan pada jalur yang dipilih (H_0 diterima, H_a ditolak).

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Gambaran Umum Indonesia

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau sebanyak 17.504 baik pulau yang bernama maupun yang belum bernama. Luas wilayah yang di miliki Indonesia seluruhnya adalah 5,2 juta km² yang terdiri dari 1,9 juta km² darataan dan 3,3 juta km² lautan. Secara geografis, Indonesia berada di antara 6° LU-11° LS dan 95° BT-141° BT. Dan jika dibentangkan, wilayah Indonesia berada di sepanjang 3.977 mill antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Posisi Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudera yang tentunya ini memberi pengaruh besar terhadap kebudayaan, sosial, dan ekonomi masyarakatnya. Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari 34 provinsi (setelah ditetapkannya Provinsi Kalimantan Utara pada 2012 silam).

Gambar 5.1: Peta Geografi Indonesia



Sumber: wordpress, 2018

Bentuk pemerintahan Negara Indonesia adalah Republik dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyatnya.

Pada tiap-tiap provinsi dipimpin oleh seorang gubernur dan mewakili DPRD



Provinsi. Dan kabupaten atau kota dipimpin oleh bupati atau walikota dan DPRD

Kabupaten atau DPRD Kota. Negara Indonesia juga menghormati dan mengakui satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa sebagaimana diatur dalam undang-undang.

5.2 Analisis Deskriptif

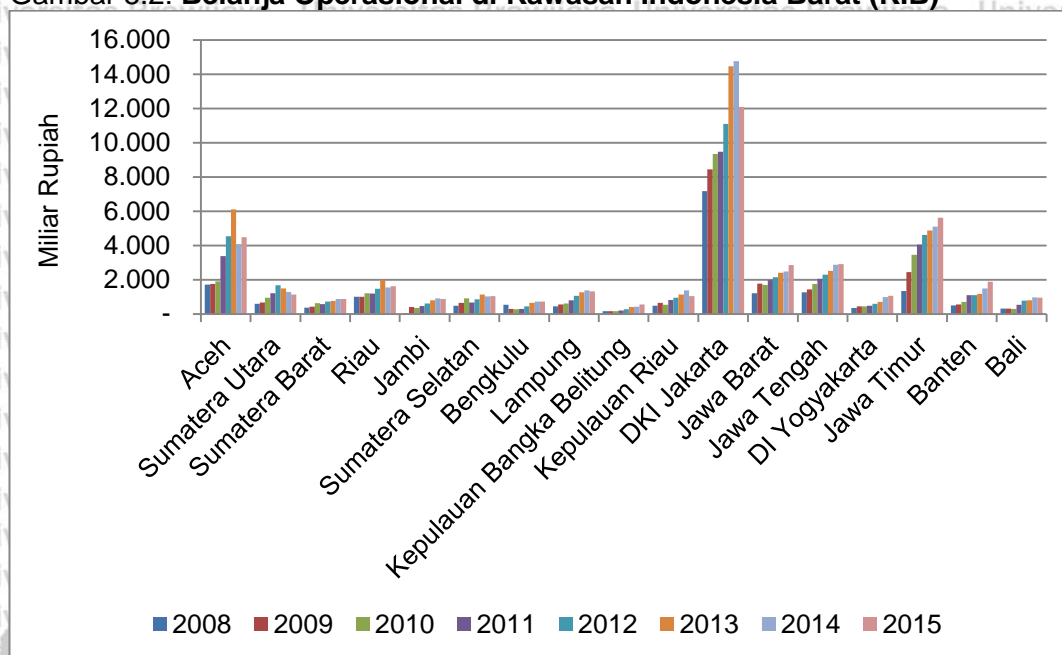
Analisis deskriptif menjelaskan gambaran umum dan pengukuran dari masing-masing variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

5.2.1 Belanja Daerah

Pengeluaran atau belanja daerah untuk keperluan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dibiayai melalui APBD. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah dalam penelitian ini dibagi atas 2 (dua) yaitu belanja operasional dan belanja modal. Belanja operasional adalah pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan tidak menambah aset atau kekayaan daerah seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas, dan belanja pemeliharaan), dan belanja operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana.

Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan atau pembangunan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Perkembangan belanja operasional dan belanja modal dari 33 provinsi di Indonesia yang dibagi kedalam kawasan Indonesia Barat (KIB) kawasan Indonesia Timur (KIT) dan dapat dilihat pada gambar dibawah.

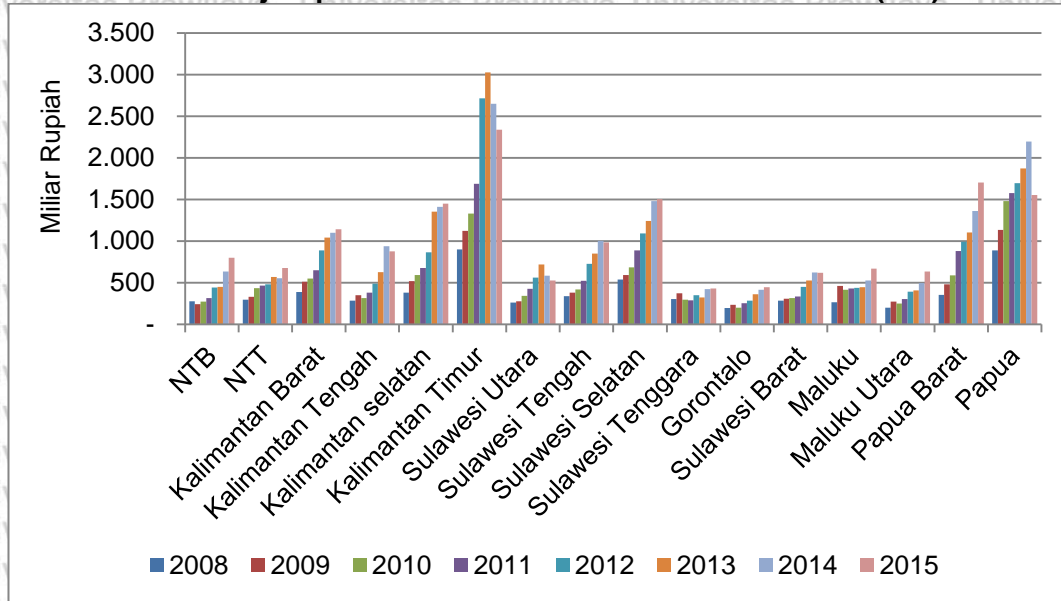
Gambar 5.2: Belanja Operasional di Kawasan Indonesia Barat (KIB)



Sumber: Badan Pusat Statistika

Berdasarkan gambar 5.2, menjelaskan perkembangan belanja operasional 17 provinsi di kawasan Indonesia barat (KIB) dari tahun 2008 sampai tahun 2015. Perkembangan belanja operasional sebagian besar provinsi mengalami peningkatan setiap tahun seperti Sumatera Barat, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, dan Bali. Peningkatan realisasi belanja operasional sejalan dengan peningkatan pagu APBD setiap tahun dan adanya peningkatan urusan administrasi daerah seperti belanja pegawai dan belanja barang dan jasa di setiap daerah. Akan tetapi, terdapat beberapa provinsi yang mengalami penurunan belanja operasional seperti provinsi Aceh, Sumatera Utara, DKI Jakarta dan Kepulauan Riau dikarenakan beberapa daerah meningkatkan alokasi pada belanja modal untuk pembangunan infrastruktur. Penurunan alokasi belanja operasional artinya bahwa daerah mulai mengalokasikan belanja pada pos-pos yang menjadi prioritas.

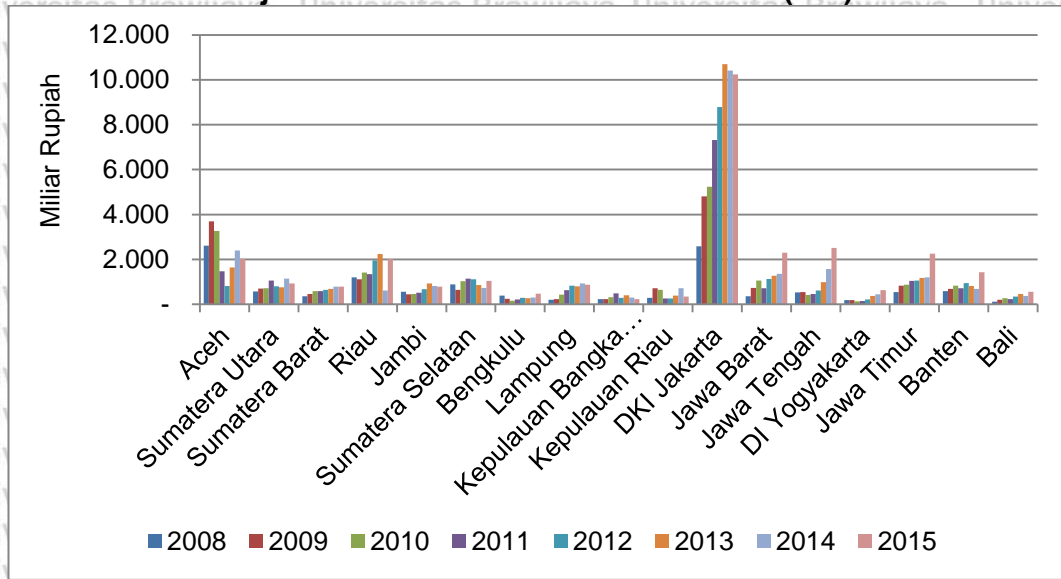
Gambar 5.3: Belanja Operasional di Kawasan Indonesia Timur (KIT)



Sumber: Badan Pusat Statistika

Berdasarkan gambar 5.3, menjelaskan perkembangan realisasi belanja operasional 16 provinsi di kawasan Indonesia Timur (KIT) dari tahun 2008-2015. Perkembangan realisasi belanja modal sebagian besar daerah mengalami peningkatan setiap tahun seperti NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat. Peningkatan realisasi belanja operasional sejalan dengan peningkatan pagu APBD setiap tahun dan adanya peningkatan urusan administrasi daerah seperti belanja pegawai dan belanja barang dan jasa di setiap daerah. Akan tetapi, terdapat beberapa provinsi yang mengalami penurunan belanja operasional seperti provinsi Kalimantan Tengah dan Papua, Kalimantan Timur dan Sulawesi Utara dikarenakan beberapa daerah meningkatkan alokasi pada belanja modal untuk pembangunan infrastruktur. Penurunan alokasi belanja operasional artinya bahwa daerah mulai mengalokasi belanja pada pos-pos yang menjadi prioritas.

Gambar 5.4: Belanja Modal di Kawasan Indonesia Barat (KIB)

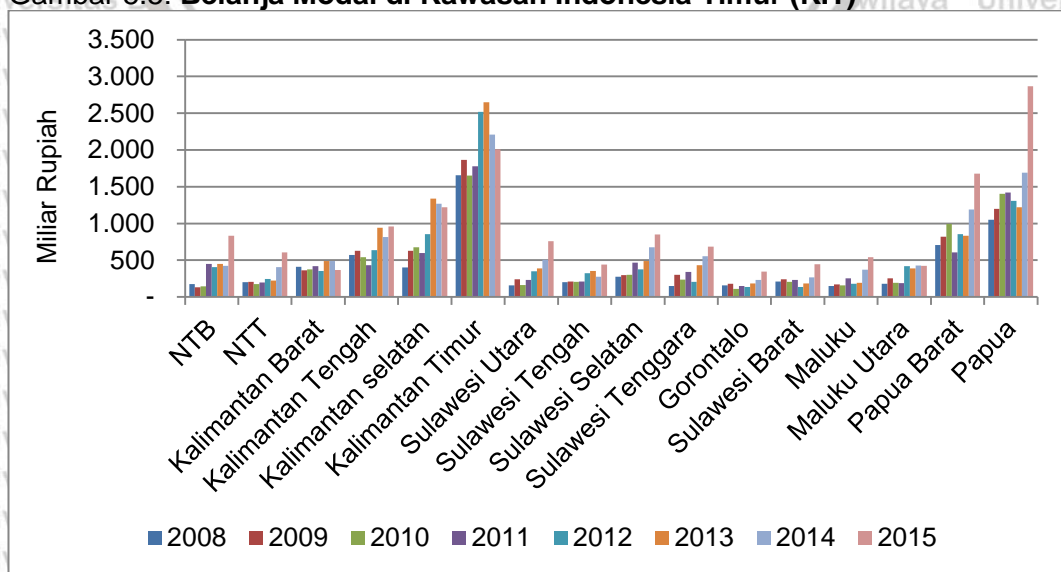


Sumber: Badan Pusat Statistika

Berdasarkan gambar 5.4, menjelaskan perkembangan realisasi belanja modal dari 17 provinsi di Kawasan Barat Indonesia (KIB) pada tahun 2008-2015.

Perkembangan realisasi belanja modal di KIB berfluktuatif dari masing-masing daerah. Peningkatan realisasi belanja modal di beberapa di beberapa daerah seperti Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten dikarenakan adanya peningkatan belanja pembangunan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, bermaga, irigasi dan waduk.

Gambar 5.5: Belanja Modal di Kawasan Indonesia Timur (KIT)



Sumber: Badan Pusat Statistika

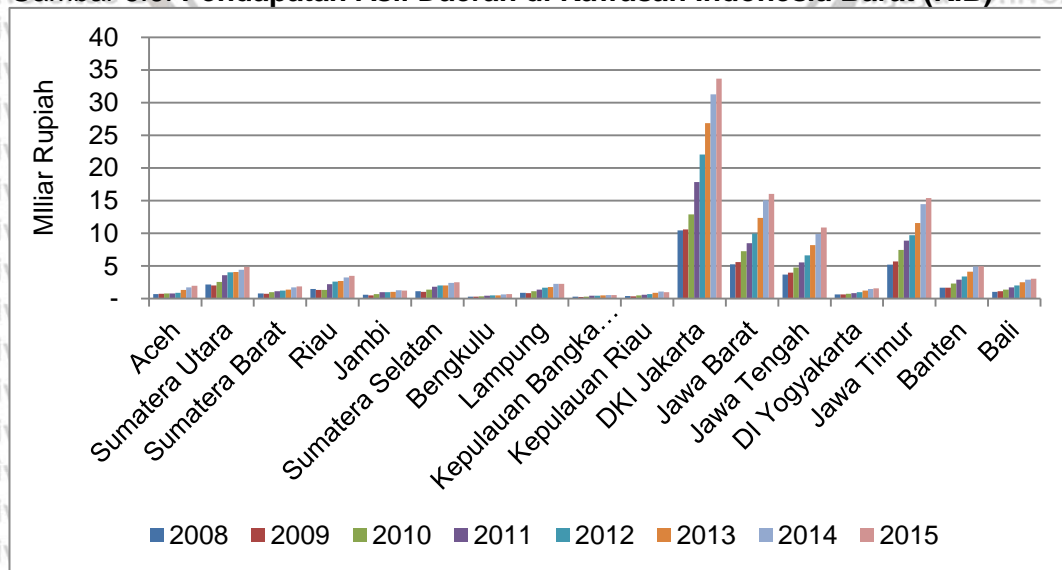


Berdasarkan gambar 5.5, menjelaskan perkembangan realisasi belanja modal dari 16 provinsi di kawasan Indonesia Timur (KIT) pada tahun 2008-2015. Secara keseluruhan terjadi peningkatan belanja modal pada provinsi-provinsi di kawasan Indonesia Timur (KIT) dikarenakan terjadi peningkatan belanja pembangunan infrastruktur antara lain jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, dermaga, saluran irigasi, dan waduk.

5.2.2 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan salah satu wujud dari desentralisasi fiskal yaitu pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensi masing-masing (khusaini, 2006:33). PAD bersumber dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan pengelolaan perusahaan daerah. Penerimaan PAD menggambarkan tingkat kemandirian suatu daerah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki oleh daerahnya masing-masing. Pertumbuhan PAD yang meningkat menunjukkan bahwa daerah tersebut tingkat kemandiriaannya tinggi, sedangkan jika pertumbuhan PAD menurun atau kecil dapat dikatakan bahwa kemandirian masih sangat rendah.

Gambar 5.6: Pendapatan Asli Daerah di Kawasan Indonesia Barat (KIB)

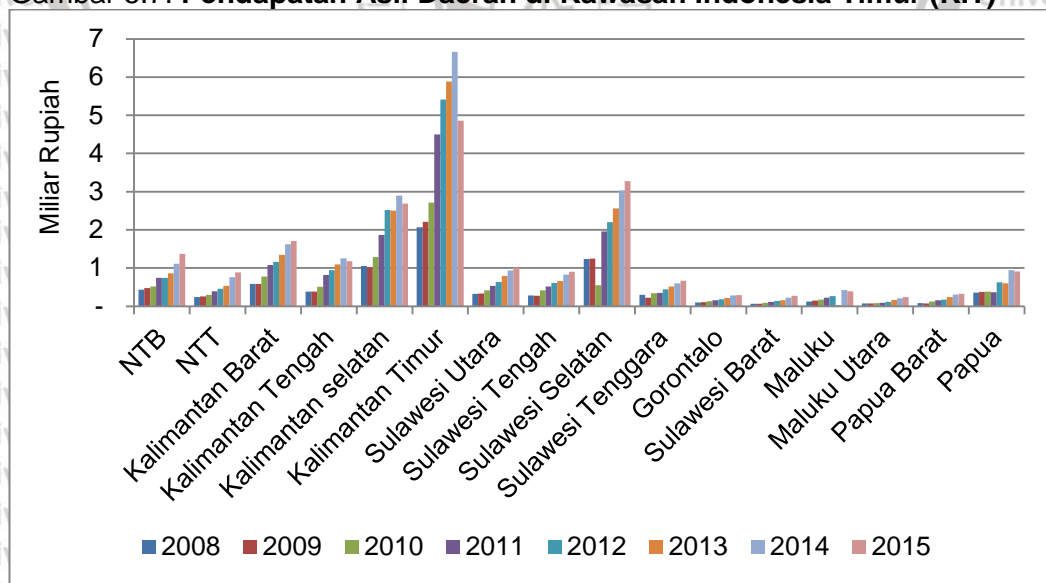


Sumber: Badan Pusat Statistika



Berdasarkan gambar 5.6, menjelaskan perkembangan PAD belanja di 17 provinsi di Kawasan Indonesia Barat (KIB) dari tahun 2008-2015. Secara keseluruhan pendapatan asli daerah (PAD) pada provinsi-provinsi di kawasan Indonesia Barat (KIB) mengalami peningkatan. Peningkatan PAD dikarenakan adanya peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah dari berbagai sektor usaha dan peningkatan penerimaan bagi hasil dari pengelolaan perusahaan milik daerah. Provinsi DKI Jakarta memiliki PAD tertinggi dan beberapa provinsi di Pulau Jawa seperti Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah juga memiliki PAD yang tinggi hal ini dikarenakan daerah-daerah di pulau jawa pembangunan daerahnya sudah baik dan memiliki daya saing yang cukup tinggi. Sehingga dapat dikatakan daerah-daerah di Pulau Jawa dan sekitarnya memiliki tingkat kemandirian yang tinggi. Beberapa provinsi di pulau Sumatera seperti Sumatera Utara, Riau, dan Sumatera Barat memiliki PAD yang tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di pulau Sumatera.

Gambar 5.7: Pendapatan Asli Daerah di Kawasan Indonesia Timur (KIT)



Sumber: Badan Pusat Statistika

Berdasarkan gambar 5.7 menjelaskan perkembangan PAD belanja di 16 provinsi di Kawasan Indonesia Timur (KIT) dari tahun 2008-2015. Secara keseluruhan pendapatan asli daerah (PAD) pada provinsi-provinsi di Kawasan



Indonesia Barat (KIB) mengalami peningkatan. Pertumbuhan PAD tertinggi adalah provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan yang bersumber dari pajak, retribusi, dan hasil pengelolaan sumber daya alam seperti pertambangan minyak dan batubara. Sedangkan provinsi-provinsi di pulau Sumatera, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua pertumbuhan PAD masih tergolong rendah artinya bahwa kemampuan daerah untuk mengelola sumber daya daerah masih sangat rendah. Tingkat kemandirian daerah yang rendah dan kemampuan daya saing yang masih sangat rendah menyebabkan pembangunan daerahnya masih rendah juga. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah daerah harus membuat kebijakan yang mampu mendorong peningkatan kinerja daerah terutama berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam karena daerah-daerah di kawasan Indonesia Timur memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah.

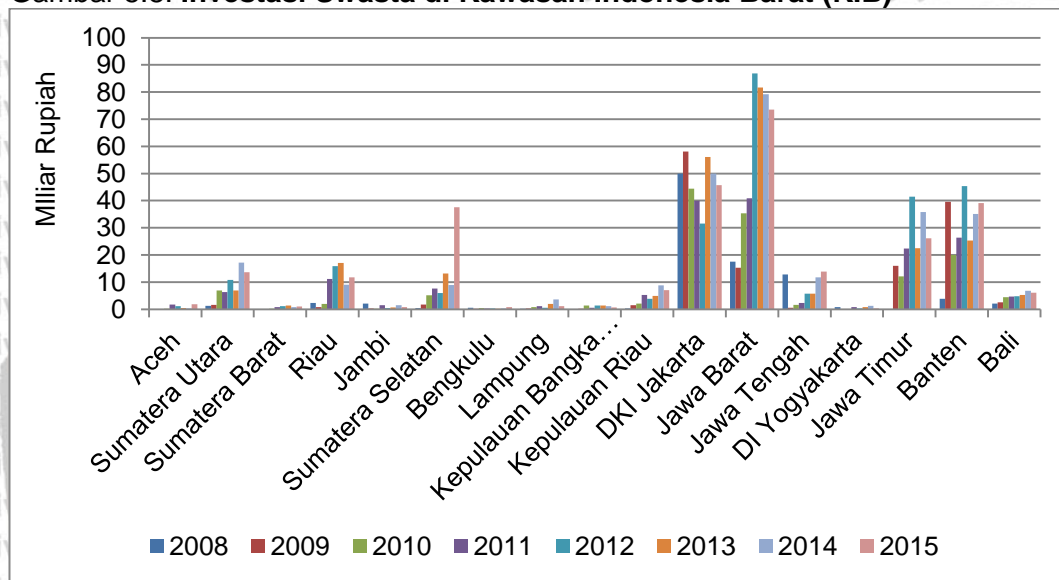
5.2.3 Investasi Swasta

Investasi swasta merupakan investasi yang dilakukan oleh pihak swasta, dimana keuntungan menjadi prioritas utama. Peran investasi swasta memang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam teori federalisme fiskal, akan tetapi investasi tetap diperlukan dalam skema desentralisasi fiskal sebagai salah satu sumber penerimaan daerah selain dari dan perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Investasi swasta bersumber dari penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN). Peran investasi swasta sangat penting dalam mendukung investasi publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui belanja modal untuk pembangunan daerahnya. Peningkatan investasi swasta akan berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan daerah melalui pajak daerah dan retribusi daerah. Investasi swasta yang bertumbuh dengan pesat mengindikasikan bahwa daerah tersebut memiliki daya saing yang tinggi yang menjadi daya tarik bagi investor-investor asing

maupun investor domestik untuk menanamkan modalnya di daerah tersebut.

Perkembangan PAD dari 33 provinsi di Indonesia yang dibagi kedalam kawasan Indonesia Barat (KIB) kawasan Indonesia Timur (KIT) dan dapat dilihat pada gambar dibawah.

Gambar 5.8: Investasi Swasta di Kawasan Indonesia Barat (KIB)



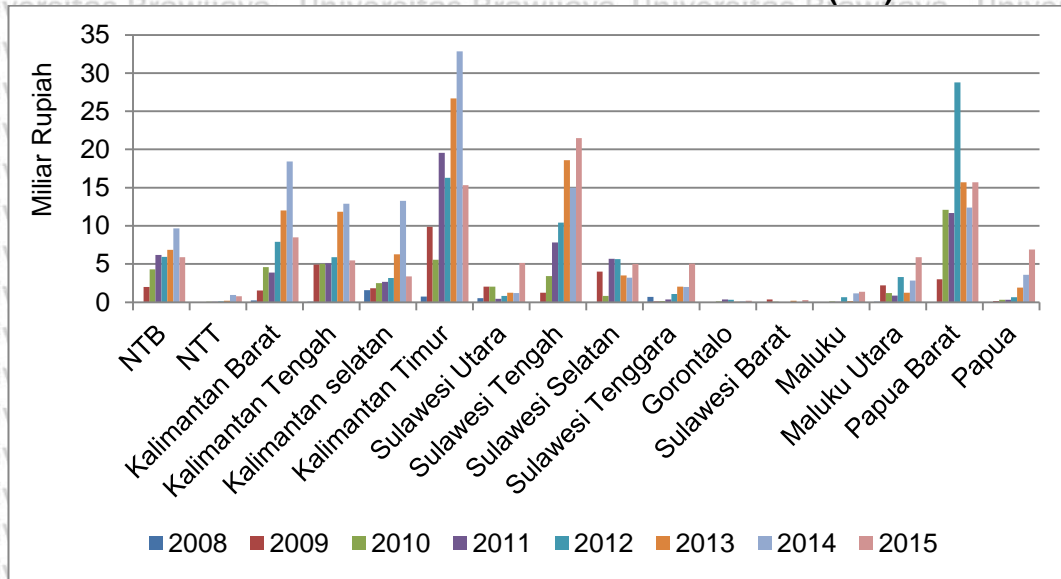
Sumber: Badan Pusat Statistika

Berdasarkan gambar 5.8, menjelaskan perkembangan realisasi investasi swasta dari 16 provinsi di kawasan Indonesia Timur (KIT) pada tahun 2008-2015.

Perkembangan investasi swasta pada provinsi-provinsi di KIT fluktuatif dan secara keseluruhan kecenderungan menunjukkan tren peningkatan. Pertumbuhan investasi swasta tertinggi terjadi di pulau jawa dan sekitarnya yaitu provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Banten. Sedangkan investasi di provinsi-provinsi di Pulau Sumatera tertinggi terjadi di Sumatera Utara, Riau dan Sumatera selatan. Peningkatan Investasi swasta di kawasan Indonesia Barat (KIB) terjadi hampir di semua sektor yaitu sektor primer, sekunder dan tersier.

Pertumbuhan investasi swasta yang tinggi mengindikasikan bahwa pembangunan ekonomi di KIB sudah cukup baik sehingga daya saingnya tinggi dan mampu menarik minat investor.

Gambar 5.9: Investasi Swasta di Kawasan Indonesia Timur (KIT)



Sumber: Badan Pusat Statistika

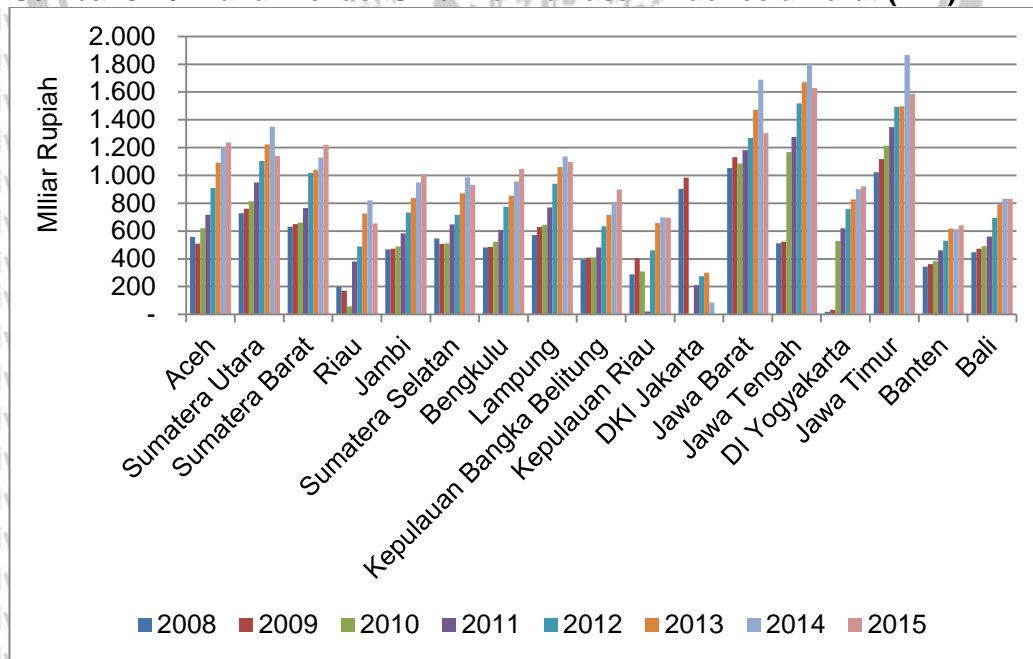
Berdasarkan gambar 5.9, menjelaskan perkembangan realisasi investasi swasta dari 16 provinsi di Kawasan Indonesia Timur (KIT) pada tahun 2008-2015. Perkembangan investasi swasta dari masing-masing provinsi berbeda-beda dan fluktuatif. Investasi swasta tertinggi di dominasi oleh provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Papua Barat dan NTB. Sedangkan provinsi-provinsi lainnya di KIT seperti Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua masih sangat rendah pertumbuhan investasi masih sangat rendah. Pertumbuhan investasi di daerah-daerah tersebut terjadi di sektor primer yaitu pertambangan dan sektor tersier seperti pariwisata, sedangkan investasi di sektor sekunder (industri pengolahan) masih cukup rendah. Jika dilihat dari sisi jumlah investasi, pertumbuhan jumlah investasi swasta di KIT masih sangat rendah jika di bandingkan dengan KIB. Perbedaan pertumbuhan investasi swasta menunjukkan bahwa kemampuan daya saing provinsi-provinsi di KIT masih sangat rendah, sehingga belum berhasil menarik minat investor untuk menanamkan modalnya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kesenjangan pembangunan antar daerah masih

tinggi.oleh karena itu pemerintah pusat mamupun daerah harus meningkatkan pembagunan di KIT guna mendorong pertumbuhan investasi swasta.

5.2.4 Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU merupakan dana perimbangan yang memiliki tujuan utama adalah pengurangan kesenjangan fiskal antara daerah (Prawoto, 2015: 404). Berdasarkan undang-undang nomor 33 tahun 2004, DAU merupakan sarana untuk mengatasi ketimpangan fiskal antar daerah dan di sisi lain juga memberikan sumber pembiayaan daerah. Perkembangan DAU dari 33 provinsi di Indonesia yang dibagi kedalam kawasan Indonesia Barat (KIB) kawasan Indonesia Timur (KIT) dan dapat dilihat pada gambar dibawah.

Gambar 5.10: Dana Alokasi Umum di Kawasan Indonesia Barat (KIB)



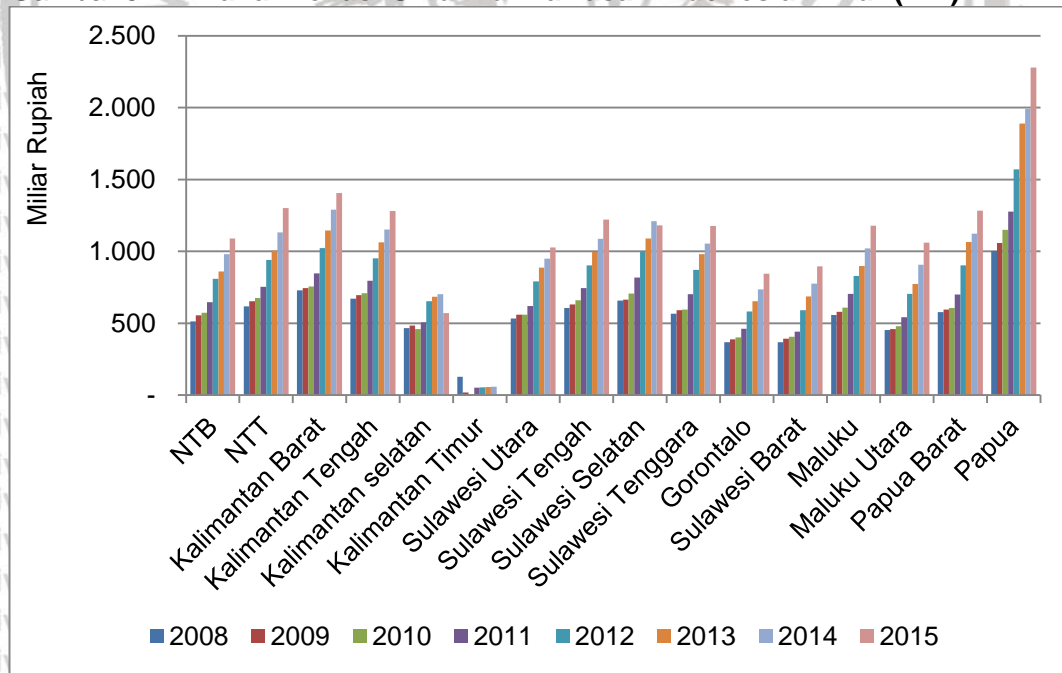
Sumber: Badan Pusat Statistika

Berdasarkan gambar 5.10, menjelaskan perkembangan realisasi dana alokasi umum (DAU) dari 17 provinsi di Kawasan Indonesia Barat (KIB) pada



tahun 2008-2015. Perkembangan dana alokasi umum (DAU) di KIB terus mengalami peningkatan setiap tahun. Peningkatan DAU tertinggi terjadi di provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dikarenakan kebutuhan fiskalnya juga besar. Perkembangan DAU di provinsi-provinsi di pulau Sumatera dan sekitarnya juga terus mengalami peningkatan. Peningkatan DAU setiap tahun mengindikasikan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat masih cukup tinggi, dimana pemerintah daerah belum bisa memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri. Oleh karena itu pemerintah harus meningkatkan dan menggali potensi fiskal yang ada di daerahnya masing-masing.

Gambar 5.11: Dana Alokasi Umum di Kawasan Indonesia Timur (KIT)



Sumber: Badan Pusat Statistika

Berdasarkan gambar 5.11, menjelaskan perkembangan realisasi dana alokasi umum (DAU) dari 16 provinsi di Kawasan Indonesia Timur (KIT) pada tahun 2008-2015. Perkembangan dana alokasi umum (DAU) di KIB terus mengalami peningkatan setiap tahun. Peningkatan DAU tertinggi terjadi di provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dikarenakan kebutuhan

fiskalnya juga besar. Perkembangan DAU di provinsi-provinsi di pulau Sumatera dan sekitarnya juga terus mengalami peningkatan. Peningkatan DAU setiap tahun mengindikasikan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat masih cukup tinggi, dimana pemerintah daerah belum bisa memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri. Oleh karena itu pemerintah harus meningkatkan dan menggali potensi fiskal yang ada di daerahnya masing-masing.

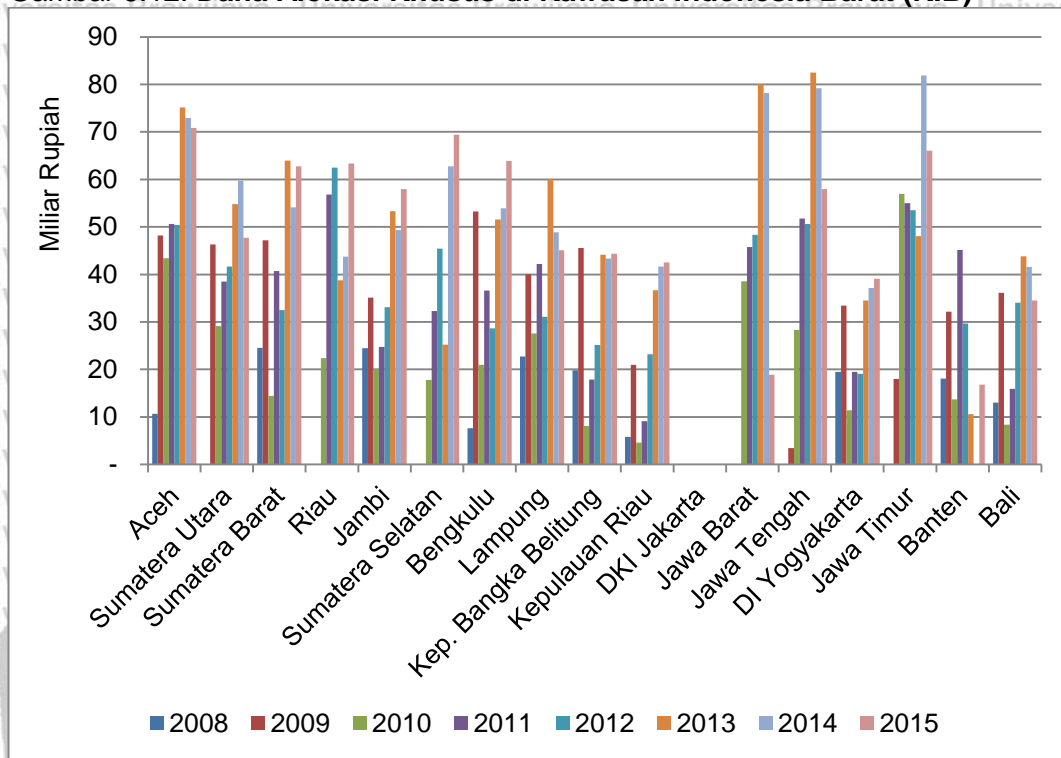
5.2.5 Dana Alokasi Khusus

Dana alokasi umum (DAK) merupakan suatu bentuk transfer pusat guna mendanai kewenangan yang telah didesentralisasikan, yang juga sekaligus mengembang tugas untuk mendukung prioritas nasional (Prawoto, 2015:406).

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1, Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Menurut Yani (2002:166) dana alokasi khusus dimaksudkan untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas nasional, sesuai dengan fungsi yang merupakan perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu, khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat. Perkembangan DAK dari 33 provinsi di Indonesia yang dibagi kedalam kawasan Indonesia Barat (KIB) kawasan Indonesia Timur (KIT) dan dapat dilihat pada gambar dibawah.

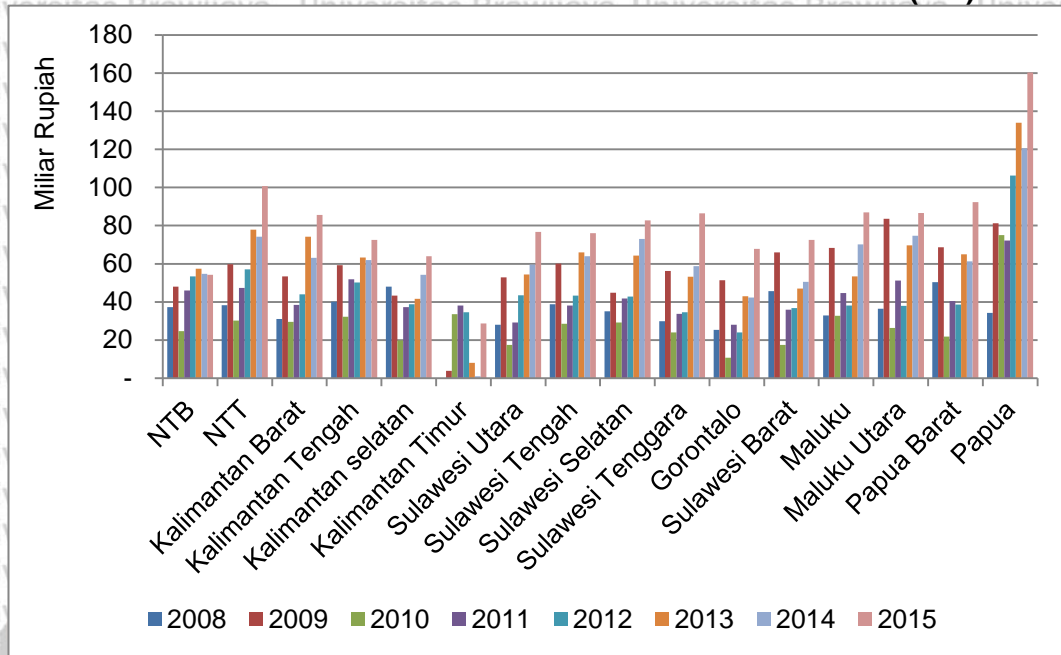
Gambar 5.12: Dana Alokasi Khusus di Kawasan Indonesia Barat (KIB)



Sumber: Badan Pusat Statistika

Berdasarkan gambar 5.12, menjelaskan perkembangan realisasi dana alokasi khusus (DAK) dari 17 provinsi di kawasan Indonesia Barat (KIB) pada tahun 2008-2015. Perkembangan DAK di provinsi-provinsi di KIB berfluktuatif. Besaran DAK di masing-masing provinsi tergantung pada prioritas pembangunan di daerahnya. Peningkatan DAK dikarenakan adanya peningkatan pembangunan di bidang infrastruktur transportasi seperti jalan, jembatan, dermaga, pelabuhan dan bandara di berbagai daerah di KIB. Provinsi DKI tidak mendapatkan alokasi DAK dikarenakan ibukota provinsi dan memiliki penerimaan daerah yang cukup besar.

Gambar 5.13: Dana Alokasi Khusus di Kawasan Indonesia Timur (KIT)



Sumber: Badan Pusat Statistika

Berdasarkan gambar 5.13, menjelaskan perkembangan realisasi dana alokasi khusus (DAK) dari 16 provinsi di kawasan Indonesia Timur (KIT) pada tahun 2008-2015. Perkembangan DAK di provinsi-provinsi di KIT berfluktuatif.

Besaran DAK di masing-masing provinsi tergantung pada prioritas pembangunan di daerahnya. Peningkatan DAK dikarenakan adanya peningkatan pembangunan di bidang infrastruktur transportasi seperti jalan, jembatan, dermaga, pelabuhan dan bandara di berbagai daerah di KIT.

5.2.6 Dana Bagi Hasil

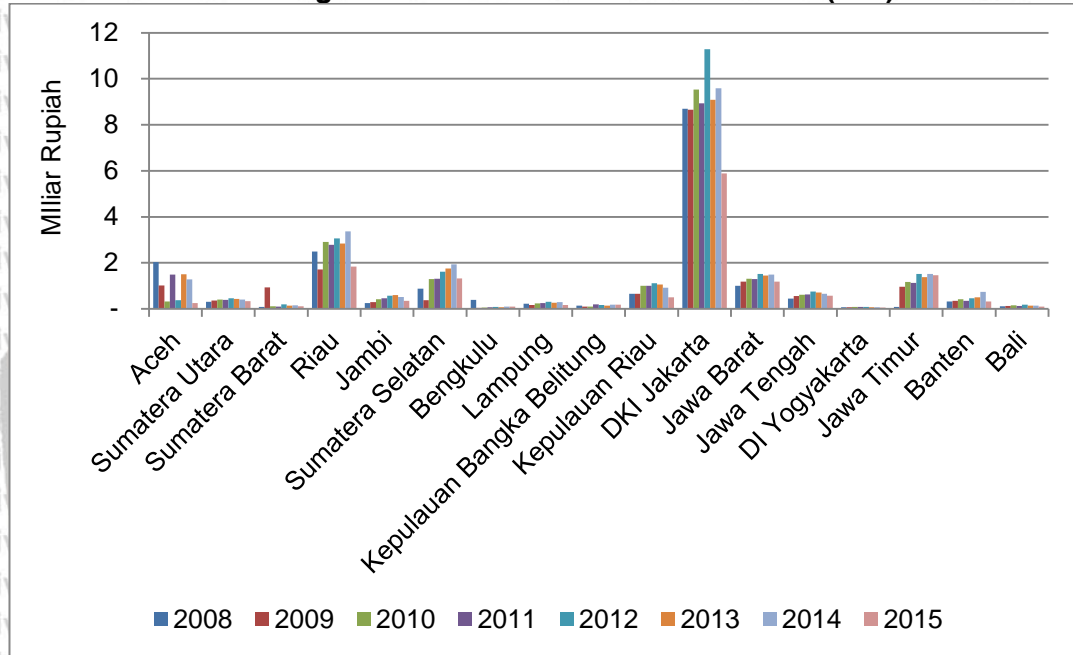
Dana bagi hasil (DBH) merupakan dana perimbangan yang strategis bagi daerah-daerah yang memiliki sumber-sumber penerimaan pusat di daerahnya, meliputi penerimaan pajak pusat yaitu pajak penghasilan perseorangan (PPH perseorangan), pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan penerimaan dari sumber daya alam (minyak bumi, gas alam, pertambangan umum, kehutanan dan perikanan). Berdasarkan UU No.33/2004, bagian daerah dari pajak maupun sumber daya alam tersebut



telah ditetapkan besarnya berdasarkan suatu presentase tertentu.

Perkembangan dana bagi hasil (DBH) dari 33 provinsi di Indonesia yang dibagi kedalam kawasan Indonesia Barat (KIB) kawasan Indonesia Timur (KIT) dan dapat dilihat pada gambar dibawah.

Gambar 5.14: Dana Bagi Hasil di Kawasan Indonesia Barat (KIB)

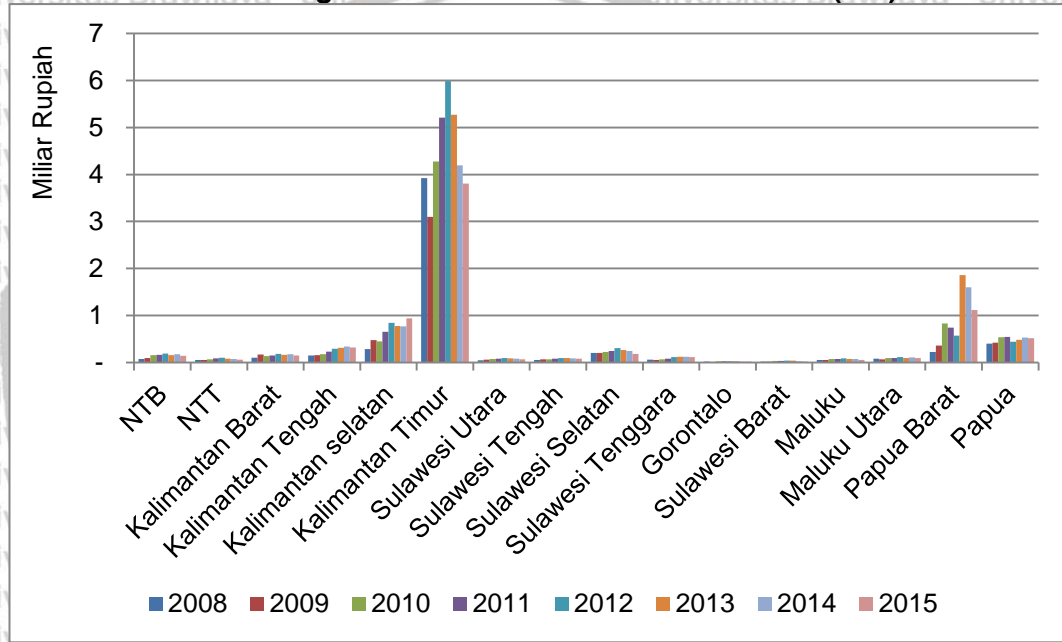


Sumber: Badan Pusat Statistika

Berdasarkan gambar 5.14, menjelaskan perkembangan realisasi dana bagi hasil (DBH) dari 17 provinsi di Kawasan Indonesia Barat (KIB) pada tahun 2008-2015. Perkembangan dana bagi hasil di provinsi-provinsi di KIB berbeda-beda dan fluktuatif. Secara keseluruhan proporsi alokasi DBH di beberapa provinsi menunjukkan kecenderungan menurun per tahun. Penurunan DBH tersebut dikarenakan oleh perbedaan sumber dana dari bagi hasil pajak (BHP) dan bagi hasil bukan pajak (BHBP) dari masing-masing provinsi. Provinsi DKI Jakarta memiliki DBH tertinggi dikarenakan ibu kota negara dan penerimaan pajak cukup besar. Besaran DBH provinsi-provinsi di KIB tergantung pada besaran penerimaan pajak penghasilan, pajak pembangunan dan dana bagi hasil sumber daya alam di masing-masing daerah. Penerimaan DBH di provinsi

Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah sebagian besar bersumber dari penerimaan pajak. Sedangkan penerimaan DBH di provinsi Aceh, dan provinsi di pulau sumatera dan sekitarnya sebagian besar bersumber dana bagi hasil sumber daya alam seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.

Gambar 5.15: Dana Bagi Hasil di Kawasan Indonesia Timur (KIT)



Sumber: Badan Pusat Statistika

Berdasarkan gambar 5.15, menjelaskan perkembangan realisasi dana bagi hasil (DBH) dari 16 provinsi di Kawasan Indonesia Timur (KIT) pada tahun 2008-2015. Secara keseluruhan proporsi alokasi DBH di beberapa provinsi menunjukkan kecenderungan menurun per tahun. Penurunan DBH tersebut dikarenakan oleh perbedaan sumber dana dari bagi hasil pajak (BHP) dan bagi hasil bukan pajak (BHBP) dari masing-masing provinsi. Besaran DBH provinsi-provinsi di KIT tergantung pada besaran penerimaan pajak penghasilan, pajak pembangunan dan dana bagi hasil sumber daya alam di masing-masing daerah. Provinsi Kalimantan Timur memiliki DBH tertinggi dikarenakan penerimaan pajak cukup besar dan dana bagi sumber daya alam khususnya dari sektor pertambangan. Penerimaan DBH di provinsi-provinsi pulau Kalimantan dan



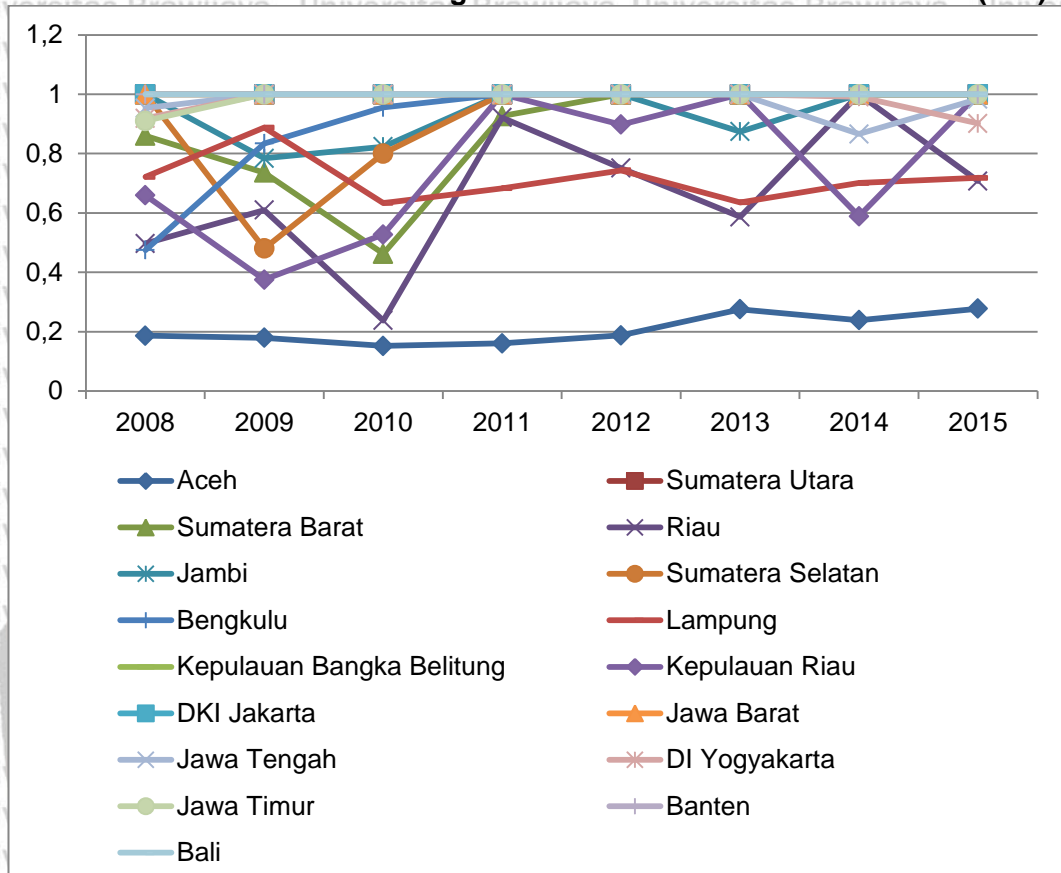
Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua sebagian besar bersumber dana bagi hasil sumber daya alam seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.

5.2.7 Efisiensi Pengeluaran Publik

Efisiensi pengeluaran publik merupakan suatu kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan kebijakan pemerintah dalam merealisasikan belanja daerahnya. Dalam penelitian pengukuran efisiensi pengeluaran publik menggunakan *Data Envelopment Analysis* (DEA). *Data Envelopment Analysis* (DEA). Pengukuran efisiensi pengeluaran publik dilakukan dengan membandingkan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). Dimana inputnya adalah belanja modal dan belanja operasional, sedangkan outputnya adalah investasi swasta dan pendapatan asli daerah (PAD).

Hasil *Data Envelopment Analysis* (DEA) dapat menjabarkan efisiensi pengeluaran publik di Indonesia yang dilihat dari 33 Provinsi dari tahun 2008-2015. Hasil tersebut menggambarkan dan menjelaskan apakah pengeluaran publik di 33 provinsi di Indonesia sudah efisien atau belum. Perkembangan nilai efisiensi pengeluaran publik dari 33 provinsi di Indonesia yang dibagi kedalam kawasan Indonesia Barat (KIB) kawasan Indonesia Timur (KIT) dan dapat dilihat pada gambar dibawah.

Gambar 5.16: Nilai Efisiensi Pengeluaran di Kawasan Indonesia Barat (KIB)



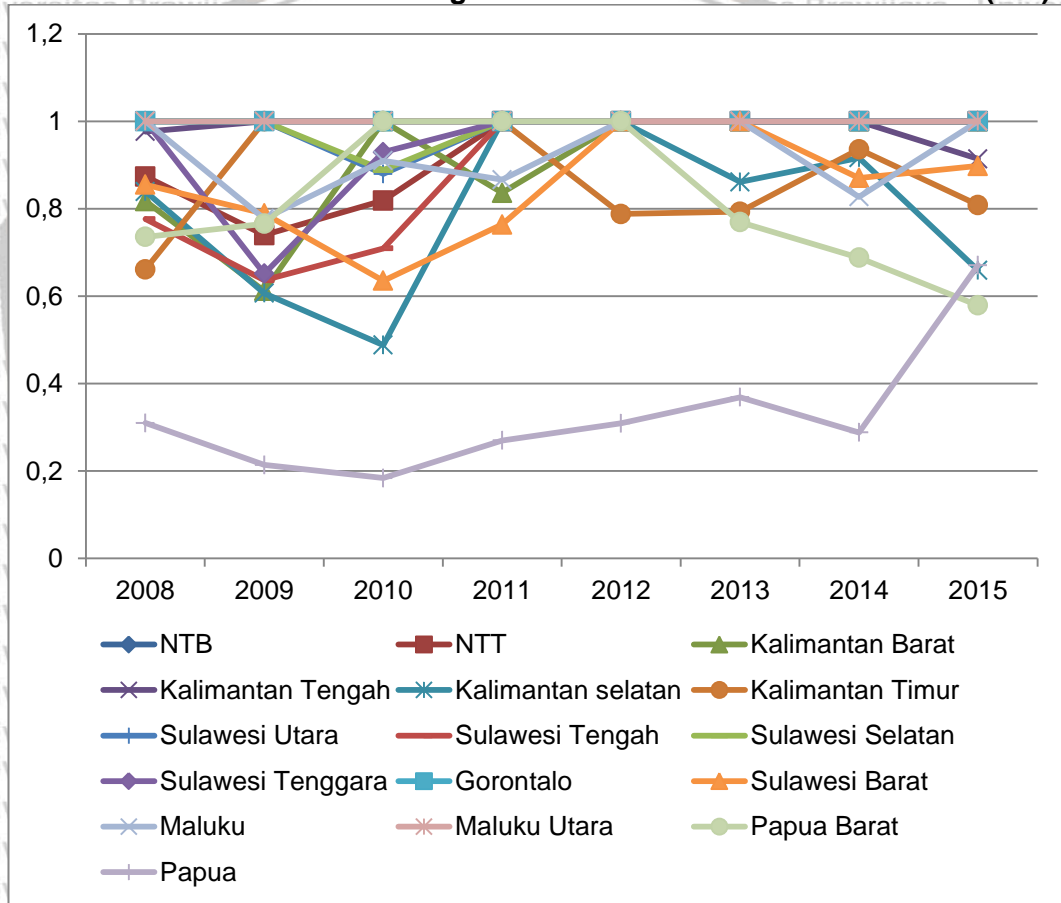
Sumber: DEA, data diolah (2018)

Berdasarkan gambar 5.16, menunjukkan perkembangan nilai efisiensi pengeluaran publik dari 17 provinsi di kawasan Indonesia Barat (KIB) pada tahun 2008-2015. Perkembangan efisiensi pengeluaran publik di KIB cenderung tidak stabil, artinya pemerintah daerah tidak mampu mempertahankan pelaksanaan pengeluaran publik secara efisien setiap tahun. Namun terdapat beberapa provinsi yang mampu secara konstan mempertahankan pelaksanaan pengeluaran publik untuk terus efisien. Adapun provinsi yang memiliki pengeluaran publik yang efisien memiliki nilai efisiensi sebesar 1 secara tetap selama kurun waktu 8 tahun dari tahun 2008-2015 yaitu provinsi Provinsi Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Bali, dan Jawa Timur. Provinsi-provinsi yang belum melaksanakan pengeluaran publik secara efisien dan belum bisa mempertahankan pelaksanaan



pengeluaran publinya secara efisien adalah provinsi yang memiliki nilai efisien lebih kecil dari satu (<1) seperti provinsi Sumatera Selatan, Bengkulu, Sumatera Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Kepulauan Riau. Provinsi Aceh dan provinsi Lampung yang dari tahun memiliki nilai efisiensi pengeluaran lebih kecil dari 1 dari tahun 2008-2015, sehingga dapat dikatakan bahwa provinsi Aceh dan Lampung belum melaksanakan pengeluaran publik secara efisien.

Gambar 5.17: Nilai Efisiensi Pengeluaran di Kawasan Indonesia Timur (KIT)



Sumber: DEA, data diolah (2018)

Berdasarkan gambar 5.17, menjelaskan perkembangan nilai efisiensi pengeluaran publik dari 16 provinsi di kawasan Indonesia Timur (KIT). Perkembangan efisiensi pengeluaran publik di KIT cenderung tidak stabil, artinya pemerintah daerah tidak mampu mempertahankan pelaksanaan pengeluaran publik secara efisien setiap tahun. Namun terdapat beberapa provinsi yang mampu secara konstan mempertahankan pelaksanaan pengeluaran publik untuk

terus efisien, yaitu provinsi Nusa Tenggara Barat, Gorontalo dan Maluku Utara.

Adapun provinsi yang memiliki pengeluaran publik yang efisien memiliki nilai efisiensi sebesar 1 secara tetap selama kurun waktu 8 tahun dari tahun 2008-

2015. Provinsi Provinsi-provinsi yang belum melaksanakan pengeluaran secara efisien adalah provinsi yang memiliki nilai efisien lebih kecil dari satu (<1).

Provinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan telah melaksanakan pengeluaran publiknya secara efisien kecuali tahun 2010. Provinsi Sulawesi Tengah dan NTT

pada tahun 2008-2010 belum melaksanakan pengeluaran publiknya secara efisien, akan tetapi mulai tahun 2011-2015 melaksanakan pengeluarannya telah

efisien. Dan beberapa yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, dan Maluku, belum mampu mempertahankan

pelaksanaan pengeluaran efisien secara konstan karena terdapat beberapa periode tertentu saja yang pengeluaran publiknya terlaksana secara efisien.

Pengeluaran publik di beberapa daerah yang belum efisien dikarenakan alokasi belanja daerah yang kurang tepat. Dimana pemerintah lebih banyak

mengalokasikan anggaran pada pos-pos belanja yang bukan merupakan prioritas utama seperti belanja pegawai, belanja perjalanan dinas, dan belanja

administrasi kantor. Hal ini bisa dilihat dari data realisasi APBD dari masing-masing provinsi, dimana proporsi belanja operasional lebih tinggi dari belanja

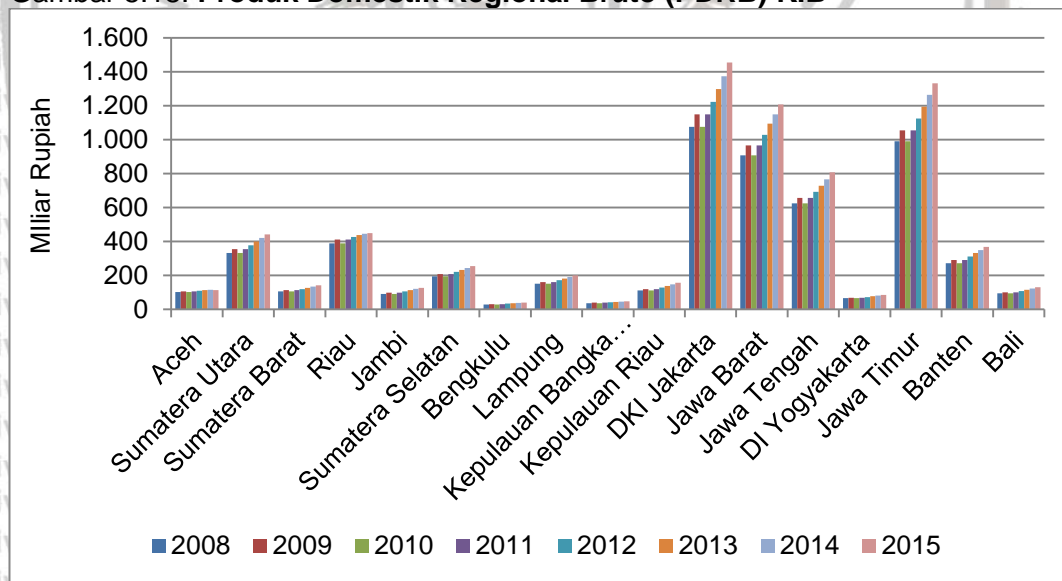
modal setiap tahunnya. Pemerintah daerah harus lebih fokus untuk mengalokasikan belanjanya pada pos-pos menjadi prioritas utama yang memiliki

dampak positif langsung terhadap masyarakat.

5.2.8 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat meningkat dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi daerah diukur melalui produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita provinsi di Indonesia. PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan seluruh unit usaha dalam wilayah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Perkembangan PDRB dari 33 provinsi di Indonesia yang dibagi kedalam Kawasan Indonesia Barat (KIB) Kawasan Indonesia Timur (KIT) dan dapat dilihat pada gambar dibawah.

Gambar 5.18: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) KIB

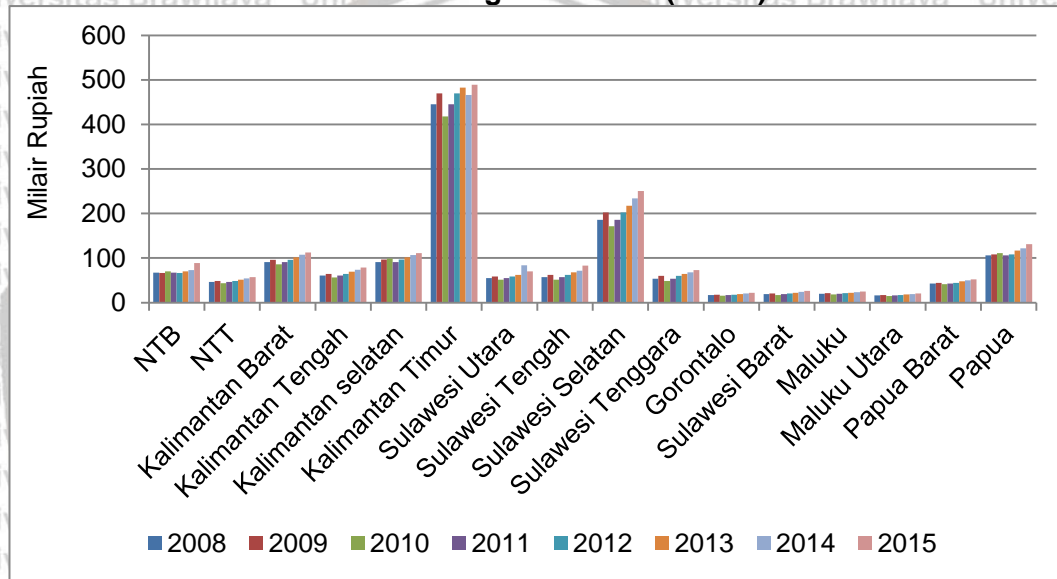


Sumber: Badan Pusat Statistika

Berdasarkan 5.18, menjelaskan bahwa jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kawasan Barat Indonesia secara keseluruhan mengalami peningkatan. Pertumbuhan positif PDRB dikarenakan adanya peningkatan pertumbuhan hampir di semua sektor yaitu pertambangan dan penggalian, jasa kemasyarakatan (pendidikan, kesehatan, keuangan, perusahaan, asuransi, dan jasa lainnya), sektor informasi dan komunikasi, sektor transportasi dan pergudangan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, dan sektor-

sektor lainnya. Sedangkan dari pengeluaran, kontribusi PDRB terbesar bersumber dari pembentukan modal tetap bruto (PMTB), konsumsi rumah tangga, dan konsumsi pemerintah. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dikarenakan peningkatan pertumbuhan investasi artinya iklim usaha tumbuh dengan baik.

Gambar 5.19: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) KIT



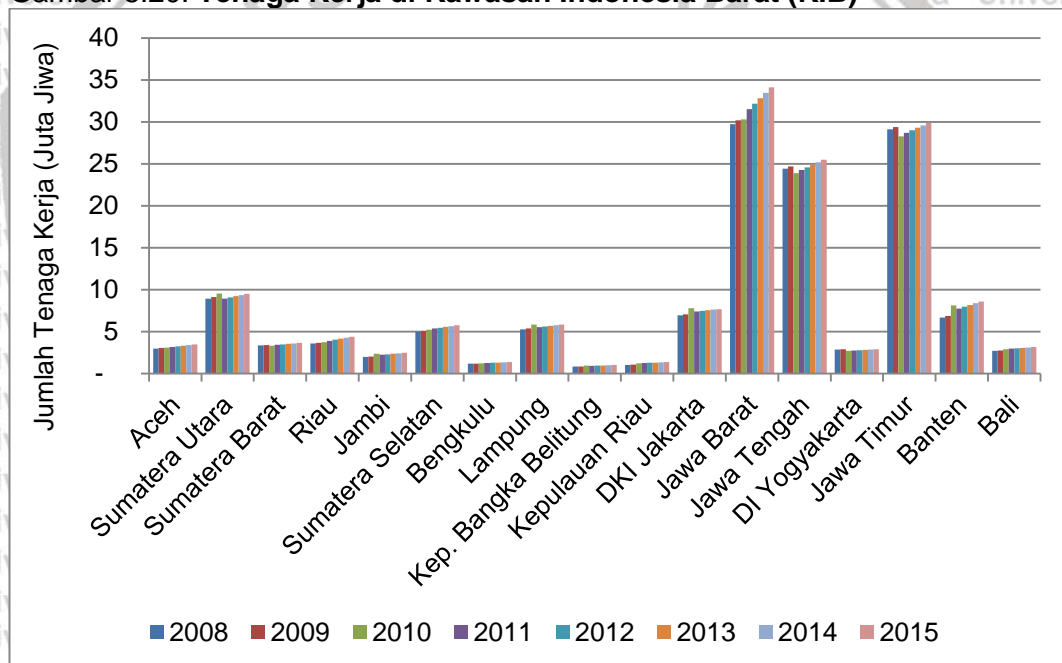
Sumber: Badan Pusat Statistika

Berdasarkan gambar 5.19, menjelaskan bahwa jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kawasan Barat Indonesia secara keseluruhan mengalami peningkatan. Pertumbuhan positif PDRB dikarenakan adanya peningkatan pertumbuhan hampir di semua sektor yaitu pertambangan dan penggalian, jasa kemasyarakatan (pendidikan, kesehatan, keuangan, perusahaan, asuransi, dan jasa lainnya), sektor informasi dan komunikasi, sektor transportasi dan pergudangan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, dan sektor-sektor lainnya. Sedangkan dari pengeluaran, kontribusi PDRB terbesar berasal dari pembentukan modal tetap bruto (PMTB), konsumsi rumah tangga, dan konsumsi pemerintah. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dikarenakan peningkatan pertumbuhan investasi artinya iklim usaha tumbuh dengan baik.

5.2.9 Penyerapan Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan penduduk yang menghasilkan barang dan jasa (Djojohadikusumo,1955:160). Menurut *International Labour Organization* (ILO), batasan penduduk usia kerja yang digunakan Badan Pusat Statistika (BPS) adalah penduduk yang berumur 15 tahun keatas, yang dibedakan angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Perkembangan jumlah tenaga kerja yang terserap dari 33 provinsi di Indonesia yang dibagi kedalam kawasan Indonesia Barat (KIB) kawasan Indonesia Timur (KIT) dan dapat dilihat pada gambar dibawah.

Gambar 5.20: **Tenaga Kerja di Kawasan Indonesia Barat (KIB)**



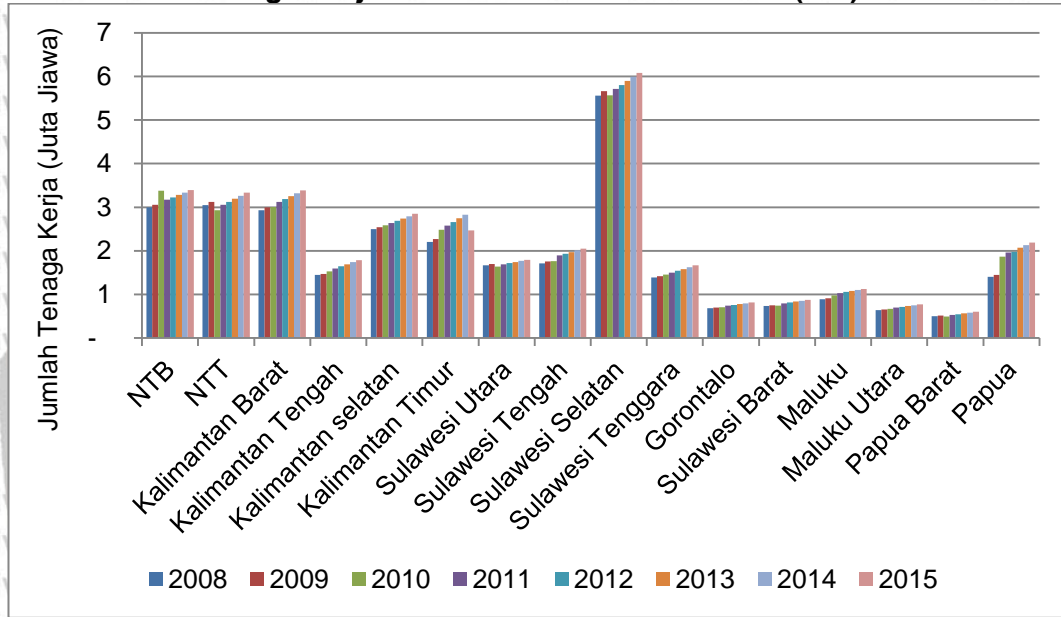
Sumber: Badan Pusat Statistika

Berdasarkan gambar 5.20, menunjukkan perkembangan penyerapan kerja di Kawasan Indonesia Barat (KIB) dari tahun 2008-2015. Secara keseluruhan penyerapan tenaga kerja di provinsi-provinsi di KIB mengalami peningkatan. Penyerapan tenaga kerja tertinggi terjadi di provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dikarenakan jumlah penduduk di pulau jawa juga tinggi. Peningkatan tenaga kerja terjadi hampir disetiap sektor yaitu pertanian, perdagangan, industri pengolahan, konstruksi, dan jasa kemasyarakatan.



Peningkatan tenaga kerja sebagian besar terjadi di sektor informal dikarenakan adanya peningkatan pembangunan ekonomi di berbagai daerah khususnya pembangunan infrastruktur seperti jalan, bandara, dermaga, pelabuhan, jaringan irigasi dan waduk.

Gambar 5.21: Tenaga Kerja di Kawasan Indonesia Timur (KIT)



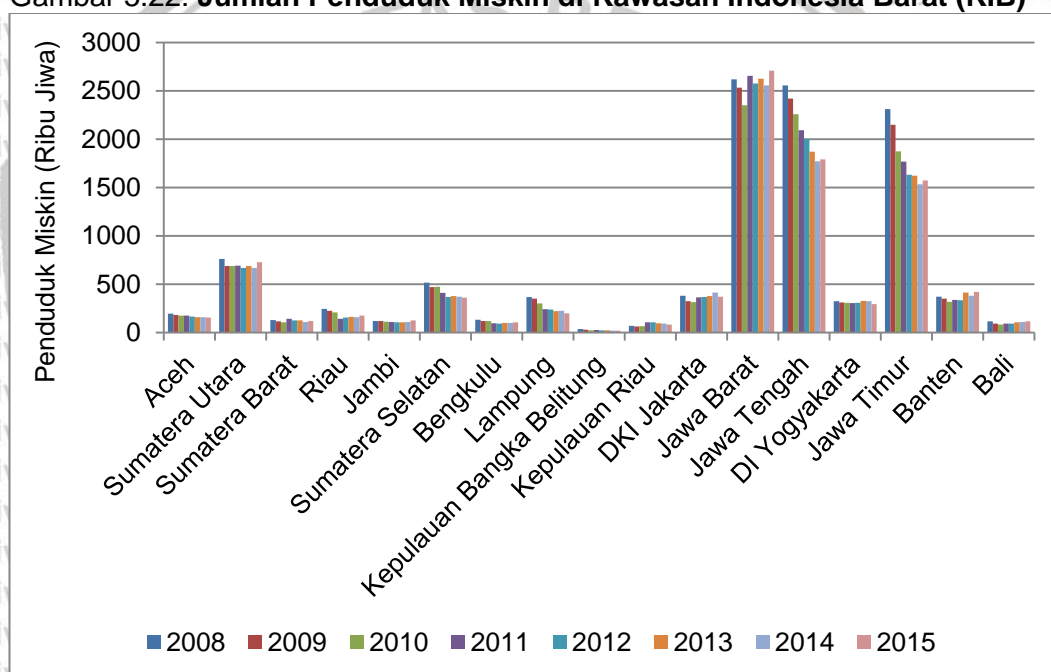
Sumber: Badan Pusat Statistika

Berdasarkan gambar 5.21, menunjukkan perkembangan penyerapan kerja di Kawasan Indonesia Timur (KIT) dari tahun 2008-2015. Secara keseluruhan penyerapan tenaga kerja di provinsi-provinsi di KIT mengalami peningkatan. Penyerapan tenaga kerja tertinggi terjadi di provinsi Sulawesi Selatan dan provinsi-provinsi lainnya di pulau Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Peningkatan tenaga kerja terjadi hampir disetiap sektor yaitu pertanian, pertambangan, perdagangan, industri pengolahan, konstruksi, dan jasa kemasyarakatan. Peningkatan tenaga kerja sebagian besar terjadi di sektor informal dikarenakan adanya peningkatan pembangunan ekonomi di berbagai daerah khususnya pembangunan infrastruktur seperti jalan, bandara, dermaga, pelabuhan, jaringan irigasi dan waduk.

5.2.10 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang berkaitan dengan banyak aspek, namun secara sederhana adalah ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar minimumnya (*basic needs*). Perkembangan jumlah penduduk miskin dari 33 provinsi di Indonesia yang dibagi kedalam kawasan Indonesia Barat (KIB) kawasan Indonesia Timur (KIT) dan dapat dilihat pada gambar dibawah.

Gambar 5.22: Jumlah Penduduk Miskin di Kawasan Indonesia Barat (KIB)



Sumber: Badan Pusat Statistika

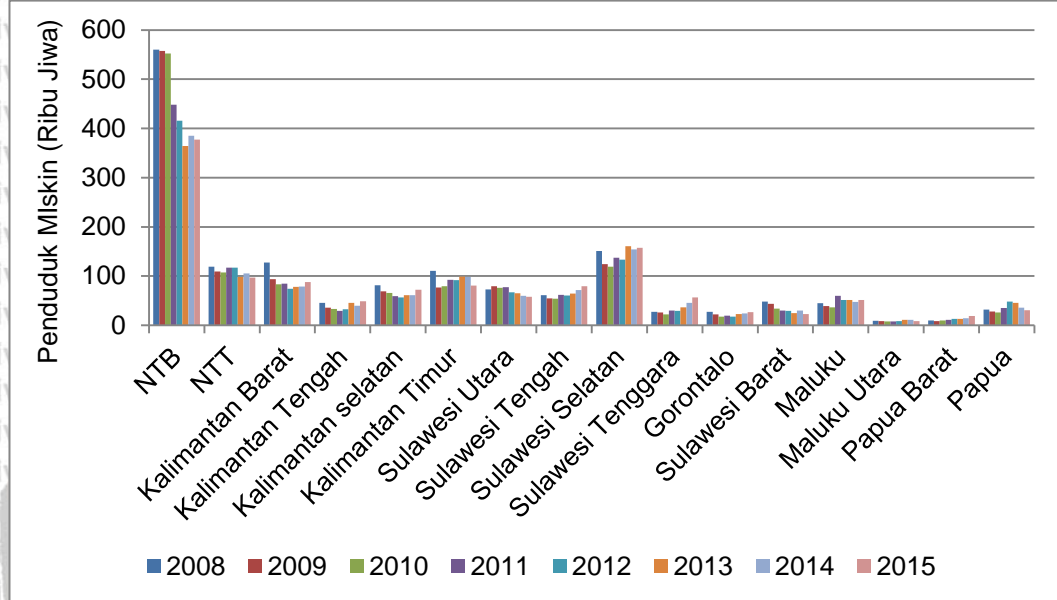
Berdasarkan gambar 5.22, menunjukkan jumlah penduduk miskin di Kawasan Indonesia Barat (KIB) dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2015.

Secara keseluruhan jumlah penduduk miskin di provinsi-provinsi di KIB mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah penduduk miskin dikarenakan jumlah pengangguran di KIB yang masih relatif tinggi. Jumlah penduduk miskin tertinggi terjadi di provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dikarenakan jumlah penduduknya tinggi yang menyebabkan jumlah pengangguran juga tinggi.

Peningkatan pengangguran berpengaruh terhadap penurunan penerimaan

pendapatan masyarakat akibatnya daya beli masyarakat menurun sehingga jumlah penduduk miskin meningkat.

Gambar 5.23: Jumlah Penduduk Miskin di Kawasan Indonesia Timur (KIT)



Sumber: Badan Pusat Statistika

Berdasarkan gambar 5.23, menunjukkan jumlah penduduk miskin di Kawasan Indonesia Timur (KIT) dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2015.

Secara keseluruhan jumlah penduduk miskin di provinsi-provinsi di KIT mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah penduduk miskin dikarenakan jumlah pengangguran di KIB yang masih relatif tinggi. Jumlah penduduk miskin tertinggi terjadi di provinsi Nusa Tenggara Barat (KIB) dikarenakan jumlah penduduknya tinggi yang menyebabkan jumlah pengangguran juga tinggi.

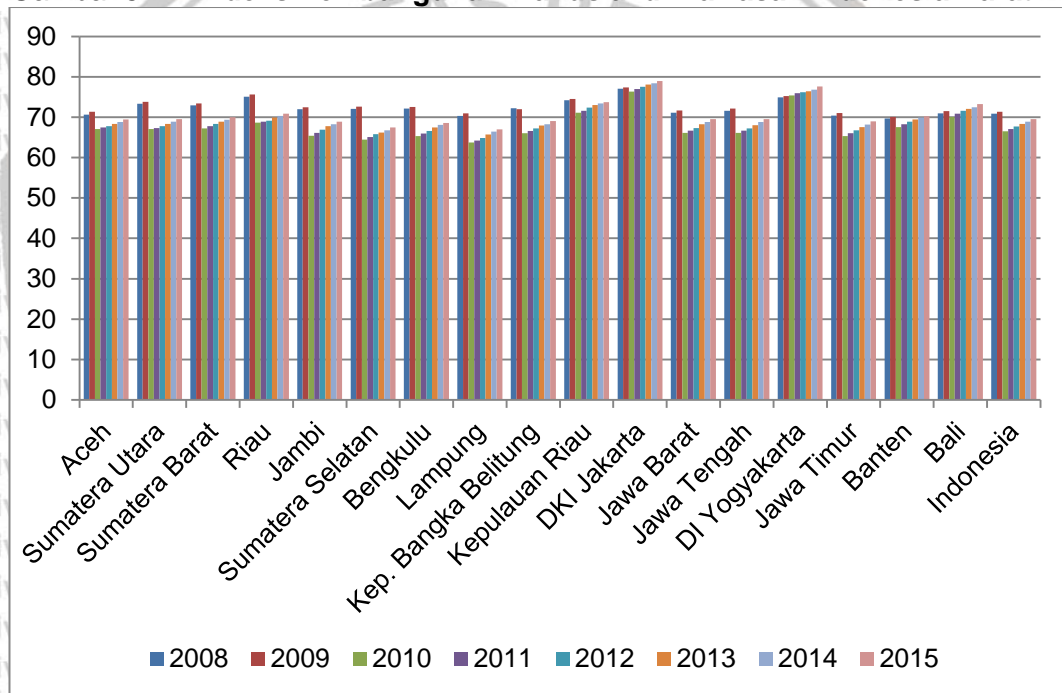
Peningkatan pengangguran berpengaruh terhadap penurunan penerimaan pendapatan masyarakat akibatnya daya beli masyarakat menurun sehingga jumlah penduduk miskin meningkat.

5.2.11 Kesejahteraan

Kesejahteraan merupakan sistem suatu bagasa tentang manfaat dan jasa untuk membantu masyarakat guna memperoleh kebutuhan sosial, ekonomi pendidikan, kesehatan yang penting bagi kelangsungan masyarakat tersebut.

Perkembangan indeks pembangunan manusia (IPM) dari 33 provinsi di Indonesia yang dibagi kedalam kawasan Indonesia Barat (KIB) kawasan Indonesia Timur (KIT) dan dapat dilihat pada gambar dibawah.

Gambar 5.24: Indeks Pembangunan Manusia di Kawasan Indonesia Barat



Sumber: Badan Pusat Statistika

Berdasarkan gambar 5.24, menunjukkan perkembangan indeks pembangunan manusi (IPM) di Kawasan Indonesia Barat (KIB). Perkembangan indeks pembangunan manusia (IPM) menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Perkembangan IPM di provinsi-provinsi di KIB mengalami peningkatan. Peningkatan IPM diukur dari tingkat pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Peningkatan IPM menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan. Besaran IPM di KIB lebih tinggi dari IPM nasional artinya bahwa tingkat kesejahteraan cukup tinggi.



Gambar 5.25: Indeks Pembangunan Manusia di Kawasan Indonesia Timur



Sumber: Badan Pusat Statistika

Berdasarkan gambar 5.25, menunjukkan perkembangan indeks pembangunan manusia (IPM) di Kawasan Indonesia Barat (KIT). Perkembangan indeks pembangunan manusia (IPM) menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Perkembangan IPM di provinsi-provinsi di KIT mengalami peningkatan. Peningkatan IPM diukur dari tingkat pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Peningkatan IPM menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan. Secara keseluruhan besaran IPM di KIT lebih rendah dari IPM nasional artinya bahwa tingkat kesejahteraan cukup rendah dikarenakan tingkat kemiskinan dan pengangguran masih cukup tinggi.



5.3 Hasil Penelitian

Pada penelitian ini akan membahas hasil penelitian yang terdiri dari tiga tahapan yaitu pertama untuk menganalisis efisiensi pengeluaran publik (33 Provinsi di Indonesia) menggunakan *Data Envelopment Analysis* (DEA). Kedua, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi pengeluaran publik menggunakan Regresi Data Panel. Ketiga, menganalisis pengaruh langsung dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, efisiensi pengeluaran publik terhadap pertumbuhan ekonomi, dan pengaruh tidak langsung dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, efisiensi pengeluaran publik terhadap kemiskinan, pengangguran dan kesejahteraan di Kawasan Indonesia Barat (KIB) dan Kawasan Indonesia Timur (KIT) menggunakan analisis jalur (*path analysis*).

5.3.1 Efisiensi Pengeluaran Publik Menggunakan Analisis *Data Envelopment Analysis* (DEA)

Efisiensi merupakan suatu kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan kebijakan pemerintah. Suatu perekonomian yang efisien dimana perekonomian memproduksi apa yang diinginkan masyarakat dengan biaya yang serendah mungkin. Pengukuran efisiensi kinerja sektor publik (pemerintah daerah) dapat dilakukan dengan menganalisis efisiensi pemerintah daerah dalam mengalokasikan sumber daya fiskal. Pengukuran efisiensi pengeluaran publik dapat dilihat dari kualitas belanja daerah. Belanja pemerintah berfungsi sebagai stabilisasi, redistribusi dan alokasi sumber daya dalam rangka mendorong pertumbuhan dan pemerataan kesejahteraan.

Oleh karena itu dalam penelitian ini dalam menilai efisiensi pengeluaran publik di Indonesia digunakan variabel belanja operasional dan belanja modal sebagai variabel input, sedangkan variabel output yang dihasilkan adalah investasi swasta dan pendapatan asli daerah (PAD). *Data Envelopment Analysis* (DEA) digunakan untuk menganalisis efisiensi pengeluaran publik di Indonesia yang dilihat melalui 33 Provinsi di Indonesia. Data belanja pemerintah dan investasi swasta, dan PAD yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data tahun 2008 – 2015 untuk melihat efisiensi pengeluaran publik sepanjang periode waktu tersebut. Adapun *Data Envelopment Analysis* (DEA) dilakukan dengan menggunakan bantuan software maxDEA 7.0. Penilaian efisiensi pengeluaran publik dilihat melalui nilai efisiensi yang didapatkan melalui *Data Envelopment Analysis* (DEA). Nilai efisiensi berkisar antara 0 sampai dengan 1, nilai efisiensi sebesar 1 menunjukkan efisiensi sempurna atau dapat dikatakan bahwa pengeluaran publik di suatu provinsi telah efisien, sedangkan apabila kurang dari satu maka dapat dinyatakan bahwa pengeluaran publik di suatu provinsi belum efisien. Nilai efisiensi hasil analisis DEA dijelaskan pada tabel 5.1 dibawah ini.

Tabel 5.1: Efisiensi Pengeluaran Publik Provinsi di Indonesia

Propinsi	Nilai Efisiensi Pengeluaran Publik							
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Sumatera Utara	1	1	1	1	1	1	1	1
Kep. Bangka Belitung	1	1	1	1	1	1	1	1
DKI Jakarta	1	1	1	1	1	1	1	1
Jawa Barat	1	1	1	1	1	1	1	1
Banten	1	1	1	1	1	1	1	1
Bali	1	1	1	1	1	1	1	1
Nusa Tenggara Barat	1	1	1	1	1	1	1	1
Gorontalo	1	1	1	1	1	1	1	1
Maluku Utara	1	1	1	1	1	1	1	1
Jawa Timur	0,91	1	1	1	1	1	1	1
Sumatera Selatan	1	0,48	0,80	1	1	1	1	1
Bengkulu	0,47	0,83	0,96	1	1	1	1	1
Sulawesi Utara	1	1	0,88	1	1	1	1	1
Sulawesi Tengah	0,78	0,64	0,71	1	1	1	1	1
Sulawesi Selatan	1	1	0,89	1	1	1	1	1
Sulawesi Tenggara	1	0,65	0,93	1	1	1	1	1
Nusa Tenggara Timur	0,87	0,74	0,82	1	1	1	1	1
Kalimantan Barat	0,82	0,61	1	0,84	1	1	1	1
Sumatera Barat	0,86	0,74	0,46	0,93	1	1	1	1
Jambi	1	0,78	0,82	1	1	0,87	1	1
Maluku	1	0,78	0,91	0,87	1	1	0,83	1
Kepulauan Riau	0,66	0,38	0,53	1	0,90	1	0,59	1
Jawa Tengah	0,95	1	1	1	1	1	0,87	0,98
Kalimantan Tengah	0,98	1	1	1	1	1	1	0,91
DI Yogyakarta	0,92	1	1	1	1	1	0,99	0,90
Sulawesi Barat	0,86	0,79	0,64	0,76	1	1	0,87	0,90
Kalimantan Timur	0,66	1	1	1	0,79	0,79	0,94	0,81
Riau	0,50	0,61	0,24	0,92	0,75	0,59	1	0,71
Kalimantan selatan	0,84	0,61	0,49	1	1	0,86	0,92	0,66
Papua Barat	0,74	0,77	1	1	1	0,77	0,69	0,58
Lampung	0,72	0,89	0,63	0,68	0,74	0,64	0,70	0,72
Papua	0,31	0,21	0,18	0,27	0,31	0,37	0,29	0,67
Aceh	0,19	0,18	0,15	0,16	0,19	0,28	0,24	0,28

Sumber: DEA data diolah (2018)

Berdasarkan pada tabel 5.1 menunjukkan nilai efisiensi dari 33 provinsi pada tahun 2008-2015. Nilai efisiensi menunjukkan terdapat beberapa provinsi yang memiliki nilai efisiensi sebesar 1 dari tahun 2008-2015, yaitu Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Bali, Banten, Nusa

Tenggara Barat, Gorontalo, dan Maluku Utara, sehingga menunjukkan efisiensi sempurna artinya bahwa pelaksanaan pengeluaran publik telah efisien. Provinsi Jawa Timur memiliki nilai efisiensi sebesar 1 artinya bahwa pengeluaran publik telah efisien kecuali tahun 2008. Provinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan memiliki nilai efisiensi sebesar 1 artinya bahwa pengeluaran publik telah efisien kecuali tahun 2010. Provinsi Sumatera Selatan dan Sulawesi Tenggara pada tahun 2009-2010. Provinsi Bengkulu, Sulawesi Tengah dan NTT pada tahun 2011-2015 memiliki nilai efisiensi sebesar 1 artinya pengeluaran publik telah efisien. Provinsi Kalimantan Barat memiliki nilai efisiensi sebesar 1 artinya pengeluaran publik telah efisien kecuali tahun 2008, 2009 dan 2011. Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2012-2015 memiliki nilai efisiensi sebesar 1 artinya pengeluaran publik telah efisien. Provinsi Jambi pada tahun 2008, 2011-2012, 2014- 2015 memiliki nilai efisiensi sebesar 1 artinya pengeluaran publik telah efisien. Provinsi Maluku pada tahun 2008, 2012, 2013, dan 2015 memiliki nilai efisiensi sebesar 1 artinya pengeluaran publik telah efisien. Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2011, 2013, dan 2015 memiliki nilai efisiensi sebesar 1 artinya pengeluaran publik telah efisien. Provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta pada tahun 2009-2013 memiliki nilai efisiensi sebesar 1 artinya pengeluaran publik telah efisien. Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2009-2014 memiliki nilai efisiensi sebesar 1 artinya pengeluaran publik telah efisien. Provinsi Sulawesi Barat pada tahun hanya pada tahun 2012-2013 memiliki nilai efisiensi sebesar 1 artinya pengeluaran publik telah efisien. Provinsi Kalimantan Timur hanya pada tahun 2009-2011 memiliki nilai efisiensi sebesar 1 artinya pengeluaran publik telah efisien. Provinsi Riau memiliki nilai efisiensi kurang dari 1 artinya pengeluaran publik belum efisien kecuali tahun 2014 (efisien). Provinsi Kalimantan Selatan hanya pada tahun 2011-2012 memiliki nilai efisiensi sebesar

1 artinya pengeluaran publik telah efisien. Provinsi Papua Barat hanya pada tahun 2011-2013 memiliki nilai efisiensi sebesar 1 artinya pengeluaran publik telah efisien. Provinsi Lampung, Papua dan Aceh pada tahun 2008-2015 memiliki nilai efisiensi kurang dari 1 artinya pengeluaran publik belum efisien.

Hasil selanjutnya dari *Data Envelopment Analysis* (DEA) adalah *proportionate movement* (PM) merupakan estimasi penambahan atau pengurangan input yang dapat dilakukan oleh *Decision Making Unit* (DMU) dalam penelitian ini yaitu provinsi yang belum menjalankan pengeluaran publik secara efisien agar pengeluaran publik menjadi efisien. Nilai *proportionate movement* (PM) merupakan estimasi input maupun output setelah dilakukan perubahan (dapat dilihat pada lampiran). Nilai *proportionate movement* dari provinsi-provinsi yang telah melaksanakan pengeluaran publik yang efisien (Sumatera Utara, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Bali, NTB, Gorontalo, dan Maluku Utara) bernilai 0 (nol) dikarenakan provinsi-provinsi tersebut telah melaksanakan pengeluaran publik secara efisien pada tahun 2008-2015, artinya bahwa besar input berupa belanja operasional dan belanja modal telah efisien dengan output berupa investasi swasta dan PAD yang didapatkan. Sedangkan nilai *proportionate movement* (PM) pada provinsi yang belum melaksanakan pengeluaran publik secara efisien bernilai negatif artinya bahwa agar mendapatkan proses yang efisien pemerintah daerah dapat mengurangi input yaitu belanja operasional dan belanja modal untuk menghasilkan output berupa PAD dan investasi swasta yang optimal.

5.3.2 Analisis Regresi Data Panel

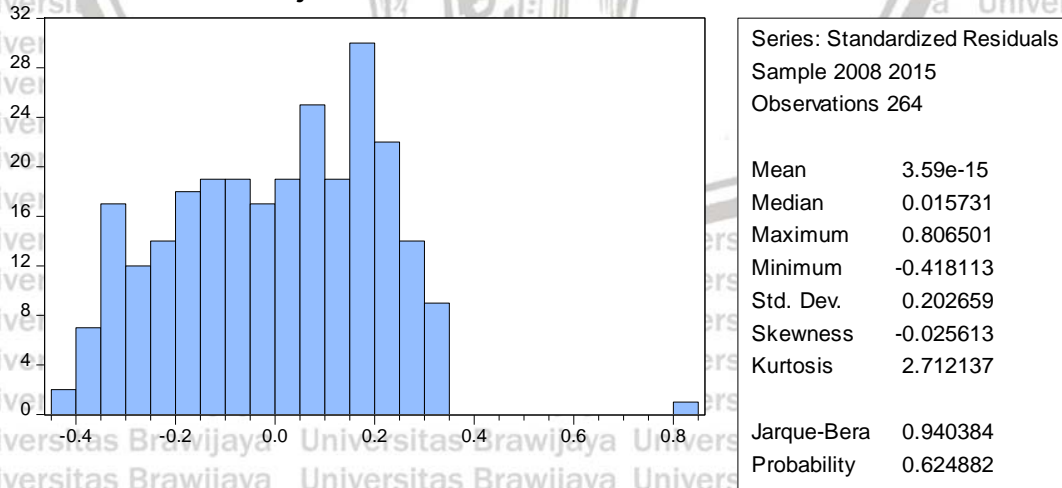
Analisis Regresi Data Panel digunakan untuk melihat pengaruh dari variabel bebas (*independent*) yaitu desentralisasi fiskal, belanja operasional belanja modal, dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap variabel terikat (*dependent*) yaitu efisiensi pengeluaran publik. Analisis Regresi Data Panel dan uji spesifikasi model dengan menggunakan paket program oleh data statistik *Eviews*. Dalam pembahasan selanjutnya akan ditunjukkan hasil analisis statistik deskriptif dari variabel-variabel yang digunakan pada pemodelan regresi data panel dalam penelitian.

5.3.2.1 Pengujian Asumsi Klasik

5.3.2.1.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah residual atau varians terstandarisasi yang diteliti berdistribusi normal atau tidak. Berikut ini merupakan hasil uji normalitas yang dilakukan dengan menggunakan *Histogram-Normality Test* pada *Eviews* di dapat hasil sebagai berikut:

Gambar 5.26: Hasil Uji Normalitas



Sumber: Data diolah (2018)

Berdasarkan hasil uji normalitas nilai *Jarque-Bera* adalah 0.940384 dengan *probabbility* sebesar 0.624882 lebih besar dari 5% (0.05), sehingga dapat dikatakan residual terdistribusi secara normal.



5.3.2.1.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independen*). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen.

Berikut ini adalah hasil uji multikolinieritas yang dilakukan dengan Uji *Correlation* pada Eviews didapat hasil sebagai berikut:

Tabel 5.2: Hasil Uji Multikolinieritas

Correlation				
	RDF (X1)	RBM (X2)	RBO (X3)	RKP (X4)
RDF	1	-0.1106062	-0.0453041	0.41666555
RBM	-0.1106062	1	0.23724441	-0.3898443
RBO	-0.0453041	0.23724441	1	-0.3350484
RKP	0.41666555	-0.3898443	1-0.335084	1

Sumber: data diolah (2018)

Berdasarkan hasil pengujian multikolinieritas, nilai korelasi pada variabel bebas berada dibawah 0.8 artinya tidak ada variabel bebas yang saling berkorelasi, sehingga disimpulkan tidak terjadi masalah multikolinieritas.

5.3.2.1.3 Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian. Uji heteroskedastisitas yang dilakukan dengan uji *Glejser* yaitu dengan meregresikan variabel-variabel bebas terhadap nilai absolut residualnya (Gujarati, 2006). Berikut ini adalah hasil uji heteroskedastisitas pada eviews, di dapa hasil sebagai berikut:

Tabel 5.3: Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Prob
C	0.6145
X1 (Rasio Desentralisasi Fiskal)	0.7108
X2 (Rasio Belanja Modal)	0.9942
X3 (Rasio Belanja Operasional)	0.5095
X4 (Rasio Kemandirian Penerimaan)	0.6040

Sumber: data diolah (2018)

Berdasarkan hasil pengujian heteroskedastisitas menunjukkan nilai probabilitas dari masing-masing variabel bebas (X_1, X_2, X_3, X_4) lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan variabel yang digunakan bebas dari masalah heteroskedastisitas.

5.3.2.1.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan mengetahui apakah ada korelasi antara anggota serangkaian data observasi yang diuraikan menurut waktu (*time series*) atau ruang (*cross section*). Berikut ini adalah hasil uji autokorelasi yang dilakukan dengan melihat nilai *Durbin Watson Stat* dari hasil *evIEWS* dan tabel *Durbin Watson*, di dapat hasil sebagai berikut:

Tabel 5.4: Hasil *Durbin-Watson (D-W)*

DW	Kesimpulan
Kurang dari 1.77344 (<dl)	Ada autokorelasi
1.77344 – 1.82010 (dl-du)	Tanpa kesimpulan
1.82010 – 2.1799 (du-4-du)	Tidak ada autokorelasi
2.1799 – 2.4573 (4-du-4-dl)	Tanpa kesimpulan
Lebih dari 2.22656 (>4-dl)	Ada autokorelasi

Sumber: data diolah (2018)

Berdasarkan hasil pengujian autokorelasi, diketahui bahwa nilai *Durbin Watson* berdasarkan tabel dengan derajat kepercayaan sebesar 5% adalah dl sebesar 1.77344 dan du sebesar 1.82010, sehingga nilai 4-dl adalah 2.22656 dan nilai 4-du adalah 2.1799. Dari hasil uji *Durbin-Watson Stat* pada *evIEWS* di dapat nilai 2.049786 ($1.82010 < d < 2.1799$), maka dapat disimpulkan model regresi tidak terjadi autokorelasi.



5.3.2.2 Pengujian Spesifikasi Model

Pengujian spesifikasi model menggunakan *Uji Chow* dan *Uji Hausman*. Uji Chow (*Chow Test*) digunakan untuk membandingkan model *pooled least square* (*Common effect*) dengan model *fixed effect*. Uji Hausman digunakan untuk membandingkan model *fixed effect* dengan model *random effect*. Model *common effect* (*pooled least square*) dalam mengestimasi model data panel menggabungkan data *cross section* dan *time series* menggunakan metode *ordinary least square* (OLS). Sedangkan model *fixed effect* adalah model dengan *intercept* berbeda-beda untuk setiap subjek (*cross section*), tetapi *slope* setiap subjek tidak berubah seiring waktu (Gujarati, 2012). Model *random effect* mengestimasi data panel yang variabel residualnya diduga mempunyai hubungan antar waktu dan anatar subjek. Dalam membedakan satu subjek dengan subjek lainnya digunakann variable *dummy*. Hasil output dari analisis regresi data panel dengan *Eviews 10* untuk model *common effect* dan *fixed effect* dapat dilihat pada lampiran.

Hipotesis yang digunakan dalam *Uji Chow* adalah sebagai berikut:

H_0 : Model *Common Effect*

H_1 : Model *Fixed Effect*

H_0 ditolak jika nilai probabilitas (*p-value*) lebih kecil dari tingkat signifikansi

α . Nilai α yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 5% atau $\alpha = 0,05$.

Hasil *Uji Chow* dengan menggunakan *Eviews 10* dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.5: Hasil *Uji Chow*

Effect Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	18.481933	(32,194)	0.0000*
Cross-section Chi-Square	338.560966	32	0.0000*

Sumber: Data diolah, keterangan :*) signifikan pada $\alpha = 5\%$



Dari hasil pengujian *Uji Chow* diperoleh hasil nilai probabilitas *Chi-Square* (Prob.) sebesar 0,00 atau lebih kecil dari tingkat signifikansi α sebesar 5% atau 0,05. Berdasarkan output hasil *Uji Chow* diatas maka H_0 akan ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa model *fixed effect* lebih baik dibandingkan dengan model *common effect (pooled least square)*.

Selanjutnya perlu dilakukan pengujian statistik kembali untuk membandingkan model *fixed effect* dan model *random effect* dengan menggunakan *Uji Hausman*. Hasil output dari analisis regresi data panel dengan menggunakan *Eviews 10* untuk model *random effect* dapat dilihat pada lampiran.

Hipotesis yang digunakan dalam *Uji Hausman* adalah sebagai berikut:

H_0 : Model *Random Effect*

H_1 : Model *Fixed Effect*

Dalam pengujian hipotesis *Uji Hausman*, H_0 ditolak jika nilai probabilitas Cross-section (Prob.) lebih kecil dari tingkat signifikansi α . Nilai α yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 5% atau $\alpha = 0,05$. Berikut ini merupakan output dari *Uji Hausman*.

Tabel 5.6: Hasil *Uji Hausman*

Test Summary	Chi-sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section Random	3.508847	4	0.4765*

Sumber: Data diolah, keterangan :*) signifikan pada $\alpha = 5\%$

Dari output *Uji Hausman* diatas diperoleh nilai probabilitas *Chi-Square* (Prob.) sebesar 0,4765 yang lebih besar dari nilai $\alpha = 0,05$. Dengan demikian maka H_0 diterima. Hal ini menunjukkan model *random effect* lebih baik dibandingkan dengan model *fixed effect*. Jadi, model yang digunakan sebagai estimasi model regresi data panel dalam penelitian ini adalah model *random effect*.



5.3.2.3 Hasil Regresi Data Panel Model *Random Effect*

Berdasarkan hasil pemilihan model terbaik dengan menggunakan *Uji Chow* dan *Uji Hausman* telah didapat model regresi terbaik yakni model *random effect*. Berikut output analisis regresi data panel dengan model *random effect*.

Tabel 5.7: Hasil Regresi Data Panel Model *Random Effect*

Variabel Bebas	Koefisien	t-Statistic	Prob.	Pengaruh	Keputusan
Konstanta	0.978264	15.34193	0.0000*		
Rasio Desentralisasi Fiskal (X1)	-1.555564	-2.140598	0.0332*	Negatif dan signifikan	H ₀ ditolak
Rasio Belanja Modal (X2)	-0.562945	-6.204972	0.0000*	Negatif dan signifikan	H ₀ ditolak
Rasio Belanja Operasional (X3)	-0.300022	-2.789145	0.0057*	Negatif dan signifikan	H ₀ ditolak
Rasio Kemandirian Penerimaan (X4)	0.386951	3.709031	0.0003*	Positif dan signifikan	H ₀ ditolak
R-squared	0.222773				
Adjusted R-squared	0.210769				
F-statistic	18.55895				
Prob (F-statistic)	0.000000				
Durbin-Watson stat	1.722581				

Sumber: Data diolah, keterangan :*) signifikan pada $\alpha = 5\%$

Berdasarkan tabel hasil regresi data panel model *random effect* diatas, diperoleh model persamaan regresi data panel sebagai berikut:

$$EPP_{it} = 0.978264 - 1.555564 RDF_{it} - 0.562945 RBM_{it} - 0.300022 RBO_{it} + 0.386951 RKP_{it} + \epsilon_{it}$$

Dimana:

EPP : Efisiensi Pengeluaran Publik

RDF : Rasio Desentralisasi Fiskal

RBM : Rasio Belanja Modal

RBO : Rasio Belanja Operasional

RKP : Rasio Kemandirian Penerimaan



5.3.2.4 Pengujian Statistik

5.3.2.4.1 Uji Statistik F (Uji Signifikansi Parameter Simultan)

Berdasarkan output regresi data panel di atas, dari uji statistik F (*F-statistic*) untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (rasio desentralisasi fiskal (X1), rasio belanja modal (X2), rasio belanja operasional (X3), dan rasio kemandirian penerimaan (X4)) terhadap variabel terikat (efisiensi pengeluaran publik (Y)) secara simultan diperoleh nilai probabilitas (prob.) sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai kepercayaan sebesar 0,05 ($\alpha=5\%$). sehingga menunjukkan hasil yang signifikan. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa rasio desentralisasi fiskal rasio belanja modal, rasio belanja operasional, dan rasio kemandirian penerimaan secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap efisiensi pengeluaran publik.

5.3.2.4.2 Uji Statistik t (Uji Signifikansi Paramater Individual)

Uji statistik t untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel bebas yaitu rasio desentralisasi fiskal (X1), rasio belanja modal (X2), rasio belanja operasional (X3), dan rasio kemandirian penerimaan (X4) secara parsial (masing-masing) terhadap variabel terikat yaitu efisiensi pengeluaran publik. Dengan memperhatikan nilai probabilitas dan t-statistic pada Tabel Hasil Uji Regresi data panel dapat diinterpretasikan besarnya nilai masing-masing koefisien sebagai berikut:

- Dari persamaan regresi data panel diatas, dapat dilihat bahwa nilai probabilitas dari varibel rasio desentralisasi fiskal adalah sebesar 0.03 lebih kecil dari 0.05 ($\alpha=5\%$). Dan juga dilihat bahwa nilai t hitung sebesar -2.140598 lebih besar dari t tabel (1.97190). Dilhat dari nilai koefisien rasio desentralisasi fiskal -1.555564, diartikan bahwa jika rasio desentralisasi fiskal meningkat sebesar 1 satuan, maka secara rata-rata efsiensi pengeluaran publik akan turun sebesar 1.555564 satuan dengan asumsi

ceteris paribus. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak artinya bahwa rasio desentralisasi berpengaruh negatif signifikan terhadap efisiensi pengeluaran publik.

b. Dari persamaan regresi data panel diatas, dapat dilihat bahwa nilai probabilitas dari variabel rasio belanja modal adalah sebesar 0.00 lebih kecil dari 0.05 ($\alpha=5\%$). Dan juga dilihat bahwa nilai t hitung sebesar -6.204972 lebih besar dari t tabel (1.97190). Dihat dari nilai koefisien rasio desentralisasi fiskal -0.562945, diartikan bahwa jika rasio belanja modal meningkat sebesar 1 satuan, maka secara rata-rata efisiensi pengeluaran publik akan turun sebesar 0.562945 satuan dengan asumsi *ceteris paribus*. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak artinya bahwa rasio belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap efisiensi pengeluaran publik.

c. Dari persamaan regresi data panel diatas, dapat dilihat bahwa nilai probabilitas dari variabel rasio belanja operasional adalah sebesar 0.00 lebih kecil dari 0.05 ($\alpha=5\%$). Dan juga dilihat bahwa nilai t hitung sebesar -2.789145 lebih besar dari t tabel (1.97190). Dihat dari nilai koefisien rasio desentralisasi fiskal -0.300022, diartikan bahwa jika rasio belanja operasional meningkat sebesar 1 satuan, maka secara rata-rata efisiensi pengeluaran publik akan turun sebesar 0.300022 satuan dengan asumsi *ceteris paribus*. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak artinya bahwa rasio belanja operasional berpengaruh negatif signifikan terhadap efisiensi pengeluaran publik.

d. Dari persamaan regresi data panel diatas, dapat dilihat bahwa nilai probabilitas dari variabel rasio kemandirian penerimaan adalah sebesar 0.00 lebih kecil dari 0.05 ($\alpha=5\%$). Dan juga dilihat bahwa nilai t hitung sebesar -2.789145 lebih besar dari t tabel (1.97190). Dihat dari nilai koefisien rasio kemandirian penerimaan -0.386951, diartikan bahwa jika rasio kemandirian

penerimaan meningkat sebesar 1 satuan, maka secara rata-rata efisiensi pengeluaran publik akan naik sebesar 0.386951 satuan dengan asumsi *ceteris paribus*. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak yang artinya bahwa rasio kemandirian penerimaan berpengaruh positif signifikan terhadap efisiensi pengeluaran publik.

5.3.3 Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Analisis Jalur (*path analysis*) digunakan untuk melihat pengaruh secara langsung dan tidak langsung dari dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana bagi hasil (DBH), dan efisiensi pengeluaran publik terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, kemiskinan, dan kesejahteraan di Kawasan Indonesia Barat (KIB) dan Kawasan Indonesia Timur (KIT).

5.3.3.1 Latar Belakang Pemilihan Kawasan Indonesia Barat (KIB) dan Kawasan Indonesia Timur (KIT)

Pada awalnya penelitian ini memiliki dua tujuan yaitu pertama, untuk menguji pengaruh desentralisasi fiskal dan efisiensi pengeluaran publik terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, kemiskinan dan kesejahteraan pada 33 provinsi di Indonesia (secara nasional). Kedua, menguji seberapa jauh perbedaan pengaruh desentralisasi fiskal dan efisiensi pengeluaran publik terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, kemiskinan dan kesejahteraan antara Kawasan Indonesia Barat (KIB) dan Kawasan Indonesia Timur (KIT). Akan tetapi, berdasarkan hasil pengujian outlier yang dilakukan pada 33 provinsi di Indonesia ditemukan bahwa terdapat beberapa observasi yaitu beberapa provinsi di daerah Jawa, Bali, dan Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua bersifat outlier karena nilainya memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda jauh dari observasi-observasi lainnya sehingga muncul nilai ekstrim (outlier).

Uji Outlier adalah uji yang dilakukan untuk melihat apakah data-data observasi memiliki nilai-nilai ekstrim (*outlier*) baik secara univariat maupun multivariat, apabila observasi bersifat outlier maka observasi harus dibuang untuk menghasilkan penelitian yang bias atau valid. Uji outlier merupakan salah satu syarat uji asumsi klasik yang harus dilakukan sebelum melakukan pengujian dengan metode *path analysis*, dimana data observasi harus tidak memiliki nilai ekstrim (*outlier*). Dengannya adanya observasi yang outlier maka data tersebut harus dibuang agar hasil pengujian tidak menjadi unbias.

Hasil pengujian uji outlier pada penelitian ini menggunakan aplikasi AMOS 24 dapat dilihat pada lampiran IV. Berikut ini peneliti menunjukkan ringkasan hasil pengujian outlier pada pada 33 provinsi di Indonesia yang dapat dilihat pada tabel 5.8 dibawah ini.

Tabel 5.8: Hasil Pengujian Outlier 33 Provinsi di Indonesia

Pengujian Outlier	Observations Number
Pengujian 1	42 (Kep.Bangka Belitung, 2009), 135 (Sumatera Barat 2012), 22 (Kalimantan Selatan, 2008), 264 (Papua, 2015), 44 (DKI Jakarta, 2009), 11 (DKI Jakarta, 2008), 143 (DKI Jakarta, 2012), 242 (DKI Jakarta, 2015), 13 (Jawa Tengah, 2008), 209 (DKI Jakarta, 2014), 48 (Jawa Timur, 2009), 246 (Jawa Timur, 2015), 213 (Jawa Timur, 2014), 45 (Jawa Barat, 2009), 12 (Jawa Barat, 2008), 176 (DKI Jakarta, 2013), 46 (Jawa Tengah, 2009), 77 (DKI Jakarta, 2010), 15 (Jawa Timur, 2008), 180 (Jawa Timur, 2013), 110 (DKI Jakarta, 2011), 254 (Kalimantan Timur, 2015), 147 (Jawa Timur, 2012), 243 (Jawa Barat, 2015), 79 (Jawa Tengah, 2010), 111 (Jawa Barat, 2011), 179 (DI Yogyakarta, 2013), 177 (Jawa Barat, 2013), 231 (Papua, 2014), 210 (Jawa Barat, 2014), 114 (Jawa Timur, 2011), 256 (Sulawesi Tengah, 2015), 144 (Jawa Barat, 2012), 239 (Lampung, 2015), 99 (Papua, 2010), 198 (Papua, 2013), 70 (Riau, 2010), 257 (Sulawesi Selatan, 2015), 249 (NTB, 2015), 165 (Papua, 2012), 67 (Aceh, 2010), 1 (Aceh, 2008), 132 (Papua, 2011), 81 (Jawa Timur, 2010), 34 (Aceh, 2009), 78 (Jawa Barat, 2010).
Pengujian 2	216 (Maluku, 2015), 91 (Jawa Tengah, 2011), 128 (Kalimantan Timur, 2012), 119 (Jawa Tengah, 2012), 176 (Jawa Tengah, 2014), 204 (Jawa Tengah, 2015), 148 (Jawa Tengah, 2013), 100 (Kalimantan Timur, 2011), 156 (Kalimantan Timur, 2013), 169 (Riau, 2014), 117 (Kep.Bangka Belitung, 2012), 185 (Kalimantan Timur, 2014), 17 (Kalimantan Timur, 2008), 207 (Bali, 2015), 71 (Kalimantan Timur, 2010), 217 (Maluku Utara, 2015), 178 (Banten, 2014), 44 (Kalimantan Timur, 2009), 13 (NTB, 2008), 39 (NTB, 2009), 1 (Sumatera Utara, 2008), 66 (NTB, 2010), 54 (Papua, 2009), 166 (Aceh, 2014), 81 (Aceh, 2011), 110 (Aceh, 2012), 195 (Aceh, 2015), 28 (Sumatera Utara, 2009), 198 (Riau, 2015), 3 (Riau, 2008), 138 (Aceh, 2013), 141 (Riau, 2013), 27 (Papua, 2008), 112 (Riau, 2012), 36 (DI Yogyakarta, 2009), 84 (Riau,

	2011), 47 (Sulawesi Selatan, 2009), 64 (Banten, 2010), 37 (Banten, 2009), 205 (DI Yogyakarta, 2015), 177 (DI Yogyakarta, 2014), 32 (Sumatera Selatan, 2009), 10 (DI Yogyakarta, 2008), 218 (Papua Barat, 2015), 165 (Papua Barat, 2013), 35 (Kepulauan Riau, 2009), 194 (Papua Barat, 2014), 93 (Banten,2011).
Pengujian 3	3 (Sumatera Selatan, 2008), 23 (Riau, 2009), 136 (Sumatera Selatan, 2014), 8 (Banten, 2008), 155 (Sumatera Utara, 2015), 113 (Sumatera Selatan, 2013), 38 (Maluku Utara, 2009), 15 (Sulawesi Selatan, 2008), 162 (Banten, 2015), 4 (Bengkulu, 2008), 94 (Banten, 2012), 73 (NTB, 2011), 41 (Sumatera Barat, 2010), 47 (Kep.Riau, 2010), 133 (Sumatera Utara, 2014), 70 (Kep.Riau, 2011), 140 (Kep.Riau, 2014), 110 (Sumatera Utara, 2013), 89 (Sumatera Selatan, 2012), 63 (Sumatera Selatan, 2011), 147 (Sulawesi Utara, 2014), 40 (Sumatera Utara, 2010), 96 (NTB, 2012), 87 (Sumatera Utara, 2012), 43 (Sumatera Selatan, 2010),118 (Banten, 2013), 93 (DI Yogyakarta, 2012), 59 (Sulawesi Barat, 2010), 5 (Lampung, 2008), 158 (Sumatera Selatan, 2015), 166 (Kalimantan Selatan, 2015), 36 (Sulawesi Barat, 2009), 22 (Sumatera Barat, 2009), 26 (Lampung, 2009), 53 (Kalimantan Selatan, 2010), 62 (Papua Barat,2010), 163 (NTT, 2015), 48 (DI Yogyakarta, 2010), 71 (DI Yogyakarta,2011), 142 (NTB, 2014), 66 (Sumatera Selatan, 2011).
Pengujian 4	89 (NTB, 2013), 67 (Kep.Riau, 2012), 87 (Ke. Riau, 2013), 32 (Lampung, 2010), 4 (Kep.Riau, 2008), 123 (Kep.Riau, 2015), 63 (Papua Barat, 2011), 57 (Sulawesi Selatan, 2011), 96 (Sulawesi Selatan, 2013), 24 (Sulawesi Utara, 2009).
Pengujian 5	45 (Lampung, 2011), 22 (Kalimantan Selatan, 2009), 69 (Sulawesi Selatan, 2012), 61 (Lampung, 2012), 96 (Lampung, 2014), 20 (Kalimantan Barat, 2009), 85 (Kalimantan Selatan, 2013), 51 (Kalimantan Selatan, 2011), 17 (Bengkulu, 2009), 82 (NTT, 2013), 2 (Jambi, 2008), 29 (Papua Barat, 2009), 56 (Sulawesi Barat, 2011), 25 (Gorontalo, 2009), 63 (NTT, 2012), 19 (NTT, 2009), 115 (Kalimantan Tengah 2015), 29 (Bengkulu, 2010), 26 (Maluku, 2009).
Pengujian 6	52 (Kalimantan Selatan, 2012), 86 (Sulawesi Selatan, 2014), 84 (Kalimantan Selatan, 2014), 28 (Sulawesi Selatan, 2010), 60 (Papua Barat, 2012), 19 (Sulawesi Tenggara, 2009), 18 (Sulawesi Tengah, 2009), 1 (Sumatera Barat, 2008), 38 (NTT, 2011), 27 (Sulawesi Tengah, 2010), 16 (Bali, 2009), 81 (NTT, 2014).

Sumber: hasil pengujian *path analysis* (data diolah)

Pengujian outlier pertama dilakukan pada 33 provinsi dari tahun 2008-2015 (8 tahun) dengan jumlah observasi sebanyak 264 observasi. Dari hasil pengujian outlier pertama ditemukan 46 observasi yang outlier, hal ini dilihat dari nilai *Mahalanobis* (p_2) yang kurang dari 0,05 ($p_2 < 0,05$), sedangkan jika nilai $p_2 > 0,05$ maka data tersebut bebas dari outlier (memenuhi syarat asumsi klasik).

Sebagian besar observasi yang outlier adalah data dari provinsi-provinsi di KIB seperti DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera dan beberapa provinsi di KIT seperti Papu dan Kalimantan Selatan. Hal ini dikarenakan besaran data-data (DAU, DAK, DBH, pertumbuhan ekonomi, jumlah

penduduk miskin, dan jumlah tenaga kerja) dari provinsi tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan provinsi lainnya. Oleh karena itu, peneliti menghilangkan 46 observasi yang outlier, dengan melakukan kembali pengujian outlier kedua dengan jumlah observasi sebanyak 218 (264 – 46).

Berdasarkan hasil pengujian outlier kedua ditemukan 48 observasi yang outlier dengan nilai *Mahalanobis* (p^2) yang kurang dari 0,05 ($p^2 < 0,05$), dimana sebagian besar observasi yang outlier adalah provinsi-provinsi dari KIT seperti Kalimantan Timur, NTB, Sulawesi Selatan, Papua dan terdapat beberapa provinsi di KIB yaitu Jawa Tengah, Kep. Bangka Belitung, Riau, Sumatera, dan DI Yogyakarta. Oleh karena itu, peneliti menghilangkan 48 observasi yang outlier, dengan melakukan kembali pengujian outlier ketiga dengan jumlah observasi sebanyak 170 (218– 48).

Berdasarkan hasil pengujian outlier ketiga ditemukan 41 observasi yang outlier dengan nilai *Mahalanobis* (p^2) yang kurang dari 0,05 ($p^2 < 0,05$), dimana sebagian besar observasi yang outlier adalah provinsi-provinsi di KIB seperti Sumatera Selatan, Banten, Sumatera Utara, Kep. Riau, DI Yogyakarta dan beberapa provinsi di KIT seperti NTB, Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan, Papua Barat, NTB dan NTT. Oleh karena itu, peneliti menghilangkan 41 observasi yang outlier, dengan melakukan kembali pengujian outlier keempat dengan jumlah observasi sebanyak 129 (170 – 41).

Berdasarkan hasil pengujian outlier keempat ditemukan 10 observasi yang outlier dengan nilai *Mahalanobis* (p^2) yang kurang dari 0,05 ($p^2 < 0,05$), dimana observasi yang outlier adalah provinsi-provinsi di KIB seperti Kep. Riau, Lampung, dan beberapa provinsi di KIT seperti NTB, Papua Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. Oleh karena itu, peneliti menghilangkan 10 observasi yang outlier, dengan melakukan kembali pengujian outlier kelima dengan jumlah observasi sebanyak 119 (129 – 10).

Berdasarkan hasil pengujian outlier kelima ditemukan 19 observasi yang outlier dengan nilai *Mahalanobis* (p_2) yang kurang dari 0,05 ($p_2 < 0,05$), dimana observasi yang outlier adalah beberapa provinsi di KIB seperti Lampung, Jambi, Bengkulu dan beberapa provinsi di KIT seperti Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, NTT, Sulawesi Barat, Papua Barat, Gorontalo dan Maluku. Oleh karena itu, peneliti menghilangkan 19 observasi yang outlier, dengan melakukan kembali pengujian outlier keenam dengan jumlah observasi sebanyak 100 (119 – 19).

Berdasarkan hasil pengujian keenam ditemukan 12 observasi yang outlier dengan nilai *Mahalanobis* (p_2) yang kurang dari 0,05 ($p_2 < 0,05$), dimana observasi yang outlier adalah beberapa provinsi di KIT seperti Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, NTT, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Papua Barat, Maluku dan provinsi di KIB yaitu Bali dan Sumatera Barat. Karena jumlah observasi yang tersisa sebanyak 88 setelah dikurangi outlier dari pengujian 1 sampai dengan pengujian 6, maka data tersebut tidak dapat dilanjutkan untuk melakukan pengujian dengan metode *path analysis* dikarenakan syarat untuk melakukan pengujian dengan *path analysis* jumlah observasi minimal 100 observasi.

Oleh karena itu karena jumlah observasi tersisa 88 observasi (kurang dari 100) dan sebagian besar data outlier adalah observasi di KIB karena besaran data provinsi-provinsi di KIB jauh lebih besar dari KIT, peneliti memutuskan untuk membaginya kedalam Kawasan Indonesia Barat (KIB) dan Kawasan Indonesia Timur (KIT) dengan tujuan untuk mengelompokkan provinsi-provinsi yang memiliki karakteristik data yang sama. Akibatnya tujuan pertama pada penelitian ini untuk melihat pengaruhnya secara nasional (33 Provinsi di Indonesia) tidak dapat dilakukan, sehingga hanya tujuan penelitian kedua yang dapat dilakukan yaitu menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal dan efisiensi pengeluaran publik terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, kemiskinan

dan kesejahteraan di Kawasan Indonesia Barat (KIB) dan Kawasan Indonesia Timur (KIT).

Perbedaan data observasi antara Kawasan Indonesia Barat (KIB) dan Kawasan Indonesia Timur (KIT) dikarenakan daerah-daerah KIB dan KIT memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda-beda setiap daerah. Perbedaan karakteristik dikarenakan beberapa faktor yaitu kondisi geografis, sumber daya alam (*natural resources*), dan sumber daya manusia (*human resources*).

Kawasan Indonesia Barat (KIB) lebih unggul dalam hal sumber daya manusia yang berdampak pada kemajuan pembangunan ekonomi terutama pada sektor industri yang menjadi *leading sector*. Sedangkan Kawasan Indonesia Timur memiliki kekayaan sumber daya alam yang berlimpah sehingga sebagian masyarakat sangat tergantung pada sektor pertanian, pertambangan, pariwisata yang menjadi *leading sector*.

Perbedaan karakteristik dan potensi di KIB dan KIT menyebabkan pembangunan ekonomi dan sosial di setiap daerah mengalami kesenjangan.

Oleh karena itu mulai pada tahun 2001, Indonesia melaksanakan desentralisasi fiskal dengan tujuan meningkatkan kemandirian pemerintah daerah dalam pembiayaan dan kemampuan pengelolaan daerah yang mendukung pembangunan ekonomi, mengurangi ketimpangan antar daerah dan meningkatkan pelayanan publik. Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam menggali potensi sumber daya keuangan daerahnya. Menurut Khusaini (2006), penerimaan dan pengeluaran daerah merupakan salah satu indikator yang menilai keberhasilan pelaksanaan desentralisasi fiskal. Dengan adanya perbedaan potensi dan karakteristik di setiap daerah menyebabkan keberhasilan dan manfaat pelaksanaan desentralisasi yang diperoleh setiap daerah berbeda-beda. Menurut Tirto Suharto (2009), daerah-daerah maju di Kawasan Indonesia Barat (KIB) lebih besar merasakan

keberhasilan dari desentralisasi fiskal, sedangkan daerah-daerah di Kawasan Indonesia Timur (KIT) kurang berhasil untuk mendapatkan manfaat positif dari keberhasilan desentralisasi fiskal. Menurut Fadli (2014), pelaksanaan desentralisasi fiskal belum sepenuhnya berhasil mengurangi ketimpangan pendapatan di Kawasan Timur dan Barat Indonesia. Hal ini bisa dilihat dengan masih tingginya ketimpangan pembangunan ekonomi di daerah. Pembangunan ekonomi di Kawasan Indonesia Barat (KIB) seperti Pulau Jawa, Bali dan Sumatera sudah cukup maju, tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi, peningkatan pertumbuhan investasi swasta dan investasi publik serta pendapatan daerah yang tinggi terutama proporsi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) yang lebih besar dibandingkan dana perimbangan artinya daerah-daerah di KIB tingkat kemandiriannya tinggi. Sedangkan pembangunan ekonomi di Kawasan Indonesia Timur (KIT) seperti Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua masih relatif rendah tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang masih rendah, rendahnya investasi publik dan investasi swasta serta penerimaan pendapatan daerah yang sebagian masih bersumber dari dana perimbangan artinya tingkat kemandirian daerah-daerah di KIT masih rendah karena ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat masih cukup tinggi. Kondisi ini yang menjadi latar belakang peneliti untuk mengkomparasikan bagaimana pengaruh desentralisasi fiskal dan efisiensi pengeluaran publik terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, kemiskinan, dan kesejahteraan di Kawasan Indonesia Barat (KIB) dan Kawasan Indonesia Timur (KIT).

Hasil pengujian outlier di Kawasan Indonesia Barat (KIB) dan Kawasan Indonesia Timur (KIT) pada penelitian ini menggunakan aplikasi AMOS 24 dapat dilihat pada lampiran IV. Berikut ini peneliti menunjukkan ringkasan hasil

pengujian outlier di Kawasan Indonesia Barat (KIB) dan Kawasan Indonesia Timur (KIT) yang dapat dilihat pada tabel 5.9 dibawah ini.

Tabel 5.9: Hasil Pengujian Outlier di KIB dan KIT

Pengujian Outlier	Observations Number	
	KIB	KIT
Pengujian 1	99 (DI Yogyakarta, 2013), 106 (Riau, 2014), 66 (Jawa Timur, 2011), 79 (DKI Jakarta, 2012), 63 (Jawa Barat, 2011), 31 (DI Yogyakarta, 2009), 96 (DKI Jakarta, 2013).	120 (Sulawesi Tengah, 2015), 65 (NTB, 2012), 95 (Papua Barat, 2013), 97 (NTB, 2014), 125 (Maluku, 2015), 81 (NTB, 2013), 16 (Papua, 2008), 111 (Papua Barat, 2014), 127 (Papua Barat, 2015), 89 (Sulawesi Selatan, 2013), 117 (Kalimantan Selatan, 2015), 41 (Sulawesi Selatan, 2010), 73 (Sulawesi Selatan, 2012), 57 (Sulawesi Selatan, 2011), 44 (Sulawesi Barat, 2010).
Pengujian 2	Tidak ada observasi yang outlier	Tidak ada observasi yang outlier

Sumber: hasil pengujian *path analysis* (data diolah)

Pengujian outlier pertama di Kawasan Indonesia Barat (KIB) dilakukan pada 17 provinsi dari tahun 2008-2015 (8 tahun) dengan jumlah observasi sebanyak 136 (17 x 8) observasi. Dari hasil pengujian outlier pertama ditemukan 7 observasi yang outlier, hal ini dilihat dari nilai *Mahalanobis* (p_2) yang kurang dari 0,05 ($p_2 < 0,05$). Observasi yang outlier adalah provinsi DI Yogyakarta, Jawa Timur, DKI Jakarta, Riau dan Jawa Barat. Hal ini dikarenakan besaran data-data (DAU, DAK, DBH, pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk miskin, dan jumlah tenaga kerja) dari provinsi tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan provinsi lainnya. Oleh karena itu, peneliti menghilangkan 7 observasi yang outlier, dengan melakukan kembali pengujian outlier kedua dengan jumlah observasi sebanyak 129 (136 – 7). Berdasarkan hasil pengujian outlier kedua tidak ditemukan observasi yang outlier dimana semua nilai observasi yaitu nilai *Mahalanobis* (p_2) lebih besar dari 0,05 ($p_2 > 0,05$), sehingga data KIB dalam penelitian ini bebas dari masalah outlier.

Pengujian outlier pertama di Kawasan Indonesia Timur (KIT) dilakukan pada 16 provinsi dari tahun 2008-2015 (8 tahun) dengan jumlah observasi

sebanyak 128 (16 x 8) observasi. Dari hasil pengujian outlier pertama ditemukan 15 observasi yang outlier, hal ini dilihat dari nilai *Mahalanobis* (p_2) yang kurang dari 0,05 ($p_2 < 0,05$). Observasi yang outlier adalah provinsi Sulawesi Tengah, NTB, Papua Barat, Maluku, Papua, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Kalimantan Selatan. Hal ini dikarenakan besaran data-data (DAU, DAK, DBH, pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk miskin, dan jumlah tenaga kerja) dari provinsi tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan provinsi lainnya. Oleh karena itu, peneliti menghilangkan 15 observasi yang outlier, dengan melakukan kembali pengujian outlier kedua dengan jumlah observasi sebanyak 113 (128 – 15). Berdasarkan hasil pengujian outlier kedua tidak ditemukan observasi yang outlier dimana semua nilai observasi yaitu nilai *Mahalanobis* (p_2) lebih besar dari 0,05 ($p_2 > 0,05$), sehingga data KIT dalam penelitian ini bebas dari masalah outlier.

5.3.3.2 Hasil Pengujian Asumsi *Path Analysis*

Dalam penggunaan analisis jalur (*path analysis*) mensyaratkan perlunya dipenuhi dahulu beberapa uji persyaratan analisis atau uji asumsi klasik, dengan maksud agar diperoleh perkiraan yang tidak bias dan efisien dari persamaan regresi linier berganda. Beberapa asumsi klasik yang harus dipenuhi adalah:

5.3.3.2.1 Uji Linearitas

Uji Linearitas dilakukan untuk mengetahui bentuk hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Dimana hubungan variabel bebas dan terikat harus linear atau garis lurus. Uji Linearitas dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS 21. Dasar pengambilan keputusan pada uji linearitas adalah:

- Jika nilai *Sig. deviation from linearity* $> 0,05$, maka terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dan terikat.

- Jika nilai *Sig.deviation from linearity* < 0,05, maka tidak terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dan terikat.

Hasil pengujian asumsi linearitas setiap hubungan antar variabel bebas dan variabel terikat, dapat dilihat tabel berikut:

Tabel 5.10: Hasil Pengujian Asumsi Linearitas

Variabel	Nilai <i>Sig.deviation from linearity</i>		Keputusan
	KIB	KIT	
DAU ke PE	0,540	0,999	Linier
DAK ke PE	0,993	0,999	Linier
DBH ke PE	0,540	0,999	Linier
EPP ke PE	0,329	0,658	Linier
PE ke PTK	0,913	0,838	Linier
PE ke TK	0,922	0,920	Linier
PE ke IPM	0,999	0,797	Linier
PTK ke IPM	0,198	0,229	Linier
TK ke IPM	0,639	0,219	Linier

Sumber: data diolah, 2018

Berdasarkan hasil uji asumsi linearitas diketahui nilai *Sig.deviation from linearity* lebih besar 0,05 (> 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa model secara keseluruhan berbentuk linier.

5.3.3.2.2 Uji Normalitas

Uji Normalitas pada *path analysis* untuk melihat apakah model yang diujikan sudah normal atau belum secara univariat dan multivariat. Untuk mengetahui apakah model yang diujikan normal atau tidak maka diujikan normalitas dengan menggunakan aplikasi AMOS 24 dengan merujuk pada kolom C.R, yaitu jika kolom C.R terdapat nilai yang lebih besar dari 2.58 maka data tersebut tidak terdistribusi normal, tetapi sebaliknya jika kolom C.R terdapat nilai yang lebih kecil dari 2.58 maka data tersebut terdistribusi normal. Hasil pengujian normalitas dengan berdasarkan pada kolom nilai C.R pada tabel *Assessment of Normality* yakni sebagai berikut:

Tabel 5.11: Hasil Pengujian Asumsi Normalitas

Variabel	C.R (Kawasan Indonesia Barat)	C.R (Kawasan Indonesia Timur)
DAU	0,077	-0,784
DAK	-1,753	1,760
DBH	2,473	2,432
EPP	2,122	1,125
PE	2,343	-2,179
PTK	2,216	-2,293
TK	2,028	-0,723
IPM	-1,050	0,429
Multivariate	2,486	2,188

Sumber: data diolah, 2018

Berdasarkan tabel pengujian asumsi normalitas diketahui bahwa semua variabel baik di Kawasan Indonesia Barat (KIB) dan Kawasan Indonesia Timur (KIT), memiliki nilai C.R. dibawah 2,58 baik secara individu maupun bersama-sama (*multivariate*) sehingga dapat disimpulkan data dalam penelitian ini terdistribusi secara normal.

5.3.3.2.3 Uji *Outlier*

Outlier merupakan observasi yang muncul dengan nilai-nilai ekstrim secara univariate maupun multivariate, yaitu yang muncul karena kombinasi karakteristik unik yang dimilikinya dan terlihat sangat jauh dari observasi-observasi yang lainnya. Uji *outlier* dalam penelitian ini menggunakan aplikasi AMOS 24 dengan merujuk pada nilai *Mahalanobis d-squared*, jika jarak p^2 bernilai dibawah 0,05 maka membuktikan bahwa ada data yang bersifat *outlier*.

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan dengan menggunakan AMOS 24 pada Kawasan Indonesia Barat terdapat 7 data observasi yang nilai dibawah 0,05 sehingga terdapat data yang memiliki perbedaan cukup jauh dengan data-data yang lainnya, sehingga untuk proses selanjutnya data observasi harus



dibuang, jadi data observasi yang harus disertakan dalam perhitungan analisis path berjumlah 129 ($136-7=129$). Sedangkan pada Kawasan Indonesia Timur terdapat 15 data observasi yang nilai dibawah 0,05 sehingga terdapat data yang memiliki perbedaan cukup jauh dengan data-data yang lainnya, sehingga untuk proses selanjutnya data observasi harus dibuang, jadi data observasi yang harus disertakan dalam perhitungan analisis path berjumlah 113 ($128-15=113$). Setelah data outlier dihilangkan (dibuang), maka nilai *Mahalanobis d-square* p^2 bernilai lebih besar dari 0,05 (dapat dilihat pada lampiran IV), sehingga data dalam penelitian ini bebas dari masalah outlier.

5.3.3.3 Hasil Estimasi Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Hasil estimasi analisis jalur pada penelitian akan menjelaskan pengaruh secara langsung dan tidak langsung dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), bana bagi hasil (DBH), dan efisiensi pengeluaran publik terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapaan tenaga kerja, kemiskinan dan kesejahteraan di Kawasan Indonesia Barat (KIB) dan Kawasan Indonesia Timur (KIT).

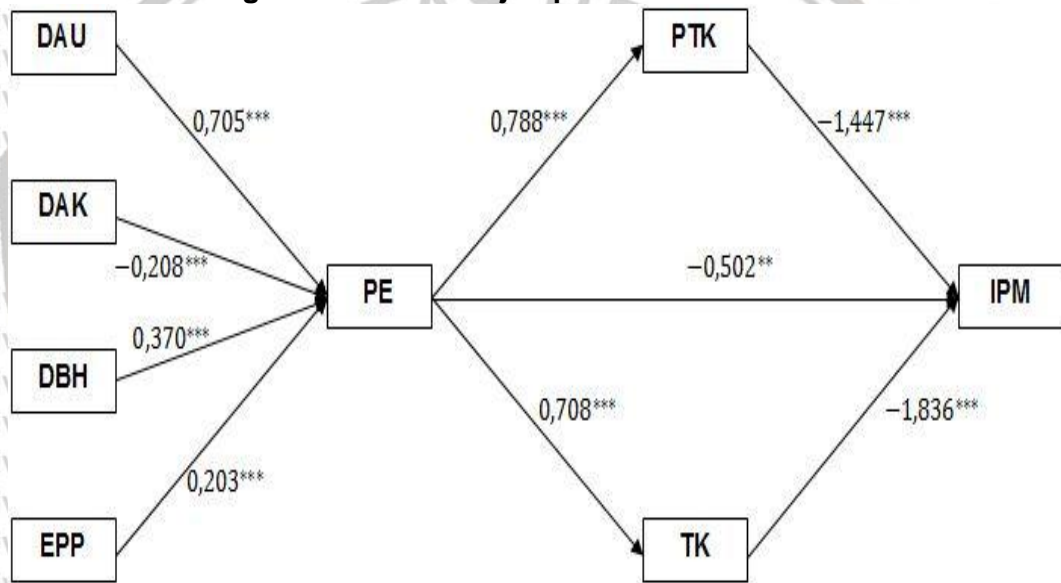
5.3.3.3.1 Hasil Pengujian Analisis Jalur Kawasan Indonesia Barat (KIB)

Analisis jalur digunakan untuk melihat pengaruh secara langsung dan tidak langsung dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana bagi hasil (DBH), dan efisiensi pengeluaran publik (EPP) terhadap pertumbuhan ekonomi (PE), penyerapaan tenaga kerja (PTK), kemiskinan (TK) dan kesejahteraan (IPM) di Kawasan Indonesia Barat (KIB).

1. Pengaruh Langsung di Kawasan Indonesia Barat (KIB)

Pada bagian ini akan menunjukkan hasil pengujian pengaruh langsung dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana bagi hasil (DBH), dan efisiensi pengeluaran publik (EPP) terhadap pertumbuhan ekonomi (PE), penyerapan tenaga kerja (PTK), kemiskinan (TK) dan kesejahteraan (IPM) di Kawasan Indonesia Barat (KIB). Hasil pengujian analisis jalur (*path analysis*) dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 5.27: Diagram Jalur Hasil Uji Hipotesis KIB



Keterangan: ***signifikan pada taraf 1% ($\alpha=0,01$) dan **signifikan pada taraf 5% ($\alpha=0,05$)

Dari gambar 5.27, maka dapat diperoleh model persamaan sebagai berikut:

$$PE = 0,705 \text{ DAU} - 0,208 \text{ DAK} + 0,370 \text{ DBH} + 0,203 \text{ EPP} + e_1$$

$$PTK = 0,788 \text{ PE} + e_2$$

$$TK = 0,708 \text{ PE} + e_3$$

$$IPM = -0,502 \text{ PE} - 1,447 \text{ PTK} - 1,836 \text{ TK} + e_4$$



Berdasarkan hasil pengujian hipotesis KIB pada gambar 5.27 dapat dijelaskan bahwa:

a. Nilai koefisien DAU sebesar 0,705 dan nilai signifikansi DAU sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,01 ($\alpha=1\%$), sehingga dapat diartikan bahwa jika DAU meningkat sebesar 1 Rupiah, maka secara rata-rata pertumbuhan ekonomi akan meningkat sebesar 0,705 Rupiah dengan asumsi *ceteris paribus*.

Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak artinya bahwa dana alokasi umum (DAU) secara langsung berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kawasan Indonesia Barat (KIB).

b. Nilai koefisien DAK sebesar -0,208 dan nilai signifikansi DAK sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,01 ($\alpha=1\%$), sehingga dapat diartikan bahwa jika DAK meningkat sebesar 1 Rupiah, maka secara rata-rata pertumbuhan ekonomi akan menurun sebesar 0,208 Rupiah dengan asumsi *ceteris paribus*. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak artinya bahwa dana alokasi khusus (DAK) secara langsung berpengaruh signifikan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kawasan Indonesia Barat (KIB).

c. Nilai koefisien DBH sebesar 0,370 dan nilai signifikansi DBH sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,01 ($\alpha=1\%$), sehingga dapat diartikan bahwa jika DBH meningkat sebesar 1 Rupiah, maka secara rata-rata pertumbuhan ekonomi akan meningkat sebesar 0,370 Rupiah dengan asumsi *ceteris paribus*.

Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak artinya bahwa dana bagi hasil (DBH) secara langsung berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kawasan Indonesia Barat (KIB).

d. Nilai koefisien EPP sebesar 0,203 dan nilai signifikansi EPP sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,01 ($\alpha=1\%$), sehingga dapat diartikan bahwa jika EPP meningkat sebesar 1 satuan, maka secara rata-rata pertumbuhan ekonomi akan meningkat sebesar 0,203 satuan dengan asumsi *ceteris paribus*. Maka

dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak artinya bahwa efisiensi pengeluaran publik secara langsung berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kawasan Indonesia Barat (KIB).

e. Nilai koefisien PE sebesar 0,788 dan nilai signifikansi PE sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,01 ($\alpha=1\%$), sehingga dapat diartikan bahwa jika PE meningkat sebesar 1 Rupiah, maka secara rata-rata penyerapan tenaga kerja akan meningkat sebesar 0,788 Jiwa dengan asumsi *ceteris paribus*.

Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak artinya bahwa pertumbuhan ekonomi (PE) secara langsung berpengaruh signifikan positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Kawasan Indonesia Barat (KIB).

f. Nilai koefisien PE sebesar 0,708 dan nilai signifikansi PE sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,01 ($\alpha=1\%$), sehingga dapat diartikan bahwa jika PE meningkat sebesar 1 Rupiah, maka secara rata-rata jumlah penduduk miskin akan meningkat sebesar 0,708 jiwa dengan asumsi *ceteris paribus*. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak artinya bahwa pertumbuhan ekonomi (PE) secara langsung berpengaruh signifikan positif terhadap kemiskinan di Kawasan Indonesia Barat (KIB).

g. Nilai koefisien PE sebesar -0,502 dan nilai signifikansi PE sebesar 0,038 lebih kecil dari 0,05 ($\alpha=5\%$), sehingga dapat diartikan bahwa jika PE meningkat sebesar 1 Rupiah, maka secara rata-rata jumlah kesejahteraan akan menurun sebesar 0,502 jiwa dengan asumsi *ceteris paribus*. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak artinya bahwa pertumbuhan ekonomi (PE) secara langsung berpengaruh signifikan negatif terhadap kesejahteraan di Kawasan Indonesia Barat (KIB).

h. Nilai koefisien PTK sebesar -1,447 dan nilai signifikansi PTK sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,01 ($\alpha=1\%$), sehingga dapat diartikan bahwa jika PTK meningkat sebesar 1 Jiwa, maka secara rata-rata kesejahteraan akan

menurun sebesar 1,447 Jiwa dengan asumsi *ceteris paribus*. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak artinya bahwa penyerapan tenaga kerja (PTK) secara langsung berpengaruh signifikan negatif terhadap kesejahteraan di Kawasan Indonesia Barat (KIB).

- i. Nilai koefisien TK sebesar -1,836 dan nilai signifikansi TK sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,01 ($\alpha=1\%$), sehingga dapat diartikan bahwa jika kemiskinan meningkat sebesar 1 Jiwa, maka secara rata-rata kesejahteraan akan menurun sebesar 1,836 dengan asumsi *ceteris paribus*. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak artinya bahwa kemiskinan (TK) secara langsung berpengaruh signifikan negatif terhadap kesejahteraan di Kawasan Indonesia Barat (KIB).

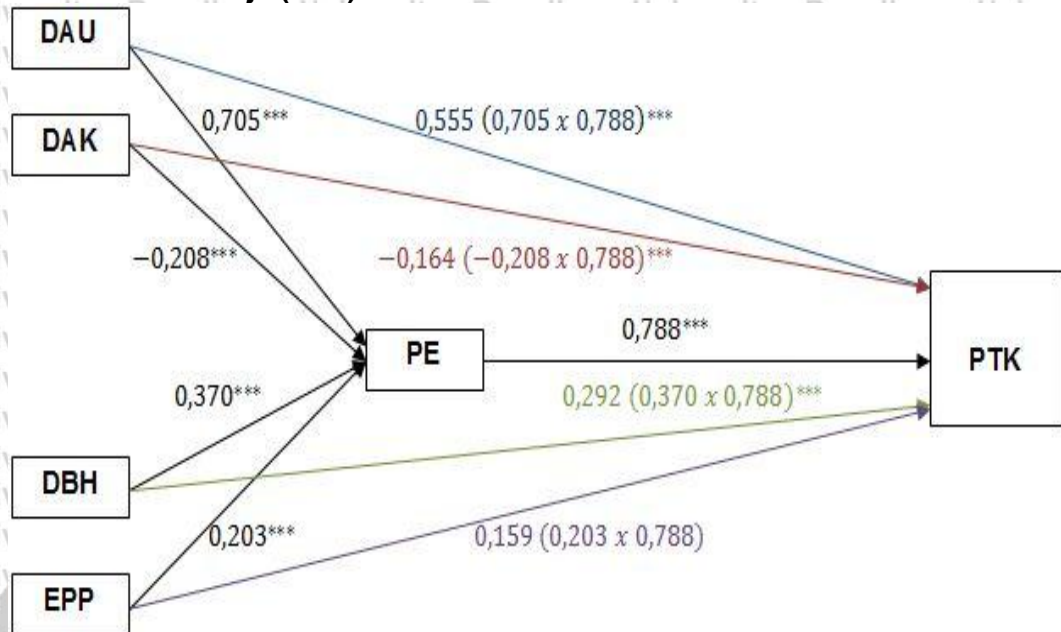
2. Pengaruh Tidak Langsung di Kawasan Indonesia Barat (KIB)

Pada bagian ini akan menyajikan pengaruh tidak langsung dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana bagi hasil (DBH), dan efisiensi pengeluaran publik (EPP) terhadap penyerapan tenaga kerja (PTK), kemiskinan (TK) dan kesejahteraan (IPM) melalui pertumbuhan ekonomi (PE) di Kawasan Indonesia Barat (KIB). Hasil pengujian ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

a. Pengaruh Tidak Langsung DAU, DAK, DBH, dan EPP terhadap penyerapan tenaga kerja (PTK) melalui Pertumbuhan Ekonomi di KIB

Hasil pengujian analisis jalur pengaruh tidak langsung DAU, DAK, DBH dan EPP terhadap penyerapan tenaga kerja (PTK) melalui pertumbuhan ekonomi (PE) di Kawasan Indonesia Barat (KIB), dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 5.28: Diagram Jalur Pengaruh Tidak Langsung Penyerapan Tenaga Kerja (PTK) di KIB



Keterangan: ***signifikan pada taraf 1% ($\alpha=0,01$)

Dari gambar 5.28, maka dapat diperoleh model persamaan sebagai berikut:

$$PTK = 0,555 DAU - 0,164 DAK + 0,292 DBH + 0,159 EPP + e$$

Berdasarkan hasil pengujian jalur pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja pada gambar 5.28, dapat dijelaskan bahwa:

- Nilai koefisien DAU sebesar 0,555 dan nilai signifikansi DAU sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,01 ($\alpha=1\%$), sehingga dapat diartikan bahwa jika DAU meningkat sebesar 1 Rupiah, maka secara rata-rata penyerapan tenaga kerja akan meningkat sebesar 0,555 jiwa dengan asumsi *ceteris paribus*. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak artinya bahwa dana alokasi umum (DAU) secara tidak langsung berpengaruh signifikan positif terhadap penyerapan tenaga kerja melalui pertumbuhan ekonomi di Kawasan Indonesia Barat (KIB).
- Nilai koefisien DAK sebesar -0,164 dan nilai signifikansi DAK sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,01 ($\alpha=1\%$), sehingga dapat diartikan bahwa jika DAK meningkat sebesar 1 Rupiah, maka secara rata-rata penyerapan tenaga kerja

akan menurun sebesar 0,164 jiwa dengan asumsi *ceteris paribus*. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak artinya bahwa dana alokasi khusus (DAK) secara tidak langsung berpengaruh signifikan negatif terhadap penyerapan tenaga kerja melalui pertumbuhan ekonomi di Kawasan Indonesia Barat (KIB).

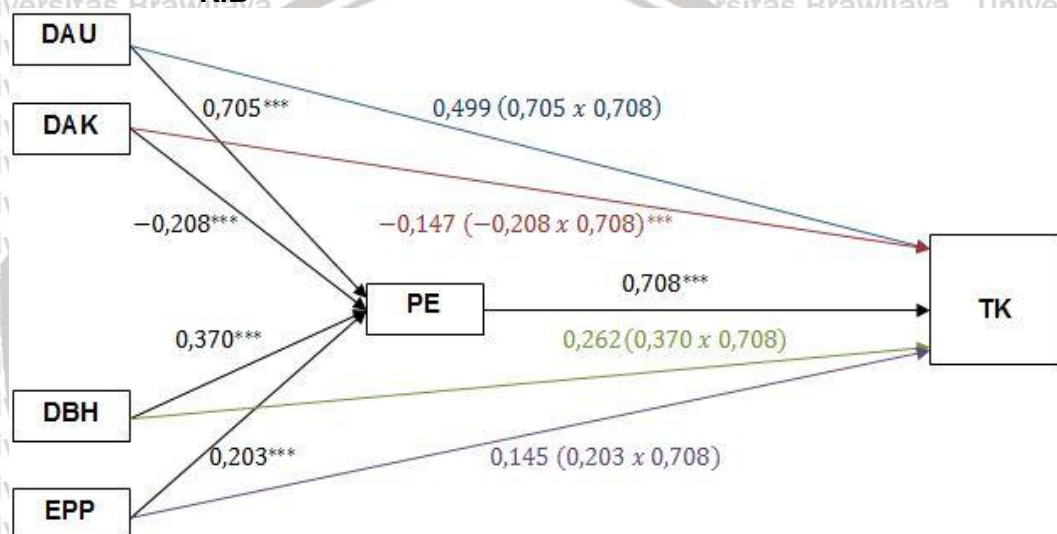
c. Nilai koefisien DBH sebesar 0,292 dan nilai signifikansi DBH sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,01 ($\alpha=1\%$), sehingga dapat diartikan bahwa jika DBH meningkat sebesar 1 Rupiah, maka secara rata-rata penyerapan tenaga kerja akan meningkat sebesar 0,292 jiwa dengan asumsi *ceteris paribus*. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak artinya bahwa dana bagi hasil (DBH) secara tidak langsung berpengaruh signifikan positif terhadap penyerapan tenaga kerja melalui pertumbuhan ekonomi di Kawasan Indonesia Barat (KIB).

d. Nilai koefisien EPP sebesar 0,159 dan nilai signifikansi EPP sebesar 0,999 lebih besar dari α (1%, 5%, 10%), sehingga dapat diartikan bahwa peningkatan efisiensi pengeluaran publik tidak berpengaruh terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima artinya bahwa efisiensi pengeluaran publik (EPP) secara tidak langsung tidak berpengaruh signifikan positif terhadap penyerapan tenaga kerja melalui pertumbuhan ekonomi di Kawasan Indonesia Barat (KIB).

b. Pengaruh Tidak Langsung DAU, DAK, DBH, dan EPP terhadap Kemiskinan melalui Pertumbuhan Ekonomi di KIB

Hasil pengujian analisis jalur pengaruh tidak langsung DAU, DAK, DBH dan EPP terhadap kemiskinan (TK) melalui pertumbuhan ekonomi (PE) di Kawasan Indonesia Barat (KIB), dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 5.29: Diagram Jalur Pengaruh Tidak Langsung Kemiskinan (TK) di KIB



Keterangan: ***signifikan pada taraf 1% ($\alpha=0,01$)

Dari gambar 5.29, maka dapat diperoleh model persamaan sebagai berikut:

$$TK = 0,499 DAU - 0,147 DAK + 0,262 DBH + 0,145 EPP + e$$

Berdasarkan hasil pengujian jalur pengaruh terhadap kemiskinan pada gambar 5.29, dapat dijelaskan bahwa:

- a. Nilai koefisien DAU sebesar 0,499 dan nilai signifikansi DAU sebesar 8,621 lebih besar dari α (1%, 5%, 10%), sehingga dapat diartikan bahwa peningkatan DAU tidak berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima artinya bahwa dana alokasi umum (DAU) secara tidak langsung tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di Kawasan Indonesia Barat (KIB).
- b. Nilai koefisien DAK sebesar -0,147 dan nilai signifikansi DAK sebesar 0,008 lebih kecil dari 0,01 ($\alpha=1\%$), sehingga dapat diartikan bahwa jika DAK

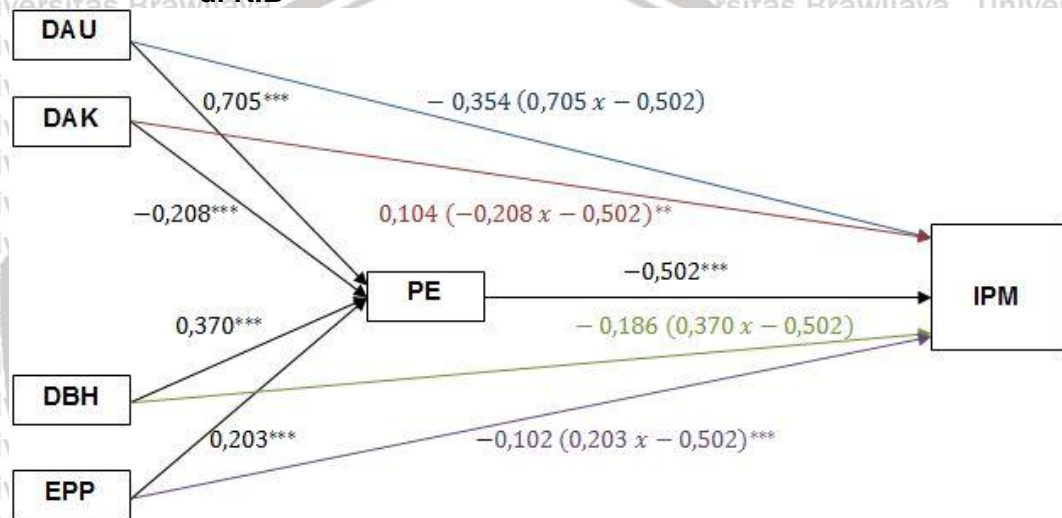
meningkat sebesar 1 Rupiah, maka secara rata-rata kemiskinan akan menurun sebesar 0,147 jiwa dengan asumsi *ceteris paribus*. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak artinya bahwa dana alokasi khusus (DAK) secara tidak langsung berpengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di Kawasan Indonesia Barat (KIB).

- c. Nilai koefisien DBH sebesar 0,262 dan nilai signifikansi DBH sebesar 4,166 lebih besar dari α (1%, 5%, 10%), sehingga dapat diartikan bahwa peningkatan DBH tidak berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima artinya bahwa dana bagi hasil (DBH) secara tidak langsung tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di Kawasan Indonesia Barat (KIB).
- d. Nilai koefisien EPP sebesar 0,145 dan nilai signifikansi EPP sebesar 8,721 lebih besar dari α (1%, 5%, 10%), sehingga dapat diartikan bahwa peningkatan EPP tidak berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima artinya bahwa efisiensi pengeluaran publik (EPP) secara tidak langsung tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di Kawasan Indonesia Barat (KIB).

c. Pengaruh Tidak Langsung DAU, DAK, DBH, dan EPP terhadap Kesejahteraan melalui Pertumbuhan Ekonomi di KIB

Hasil pengujian analisis jalur pengaruh tidak langsung DAU, DAK, DBH dan EPP terhadap kesejahteraan (IPM) melalui pertumbuhan ekonomi (PE) di Kawasan Indonesia Barat (KIB), dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 5.30: Diagram Jalur Pengaruh Tidak Langsung Kesejahteraan (IPM) di KIB



Keterangan: ***signifikan pada taraf 1% ($\alpha=0,01$) dan **signifikan pada taraf 5% ($\alpha=0,05$)

Dari gambar 5.30, maka dapat diperoleh model persamaan sebagai berikut:

$$IPM = -0,354 DAU + 0,104 DAK - 0,186 DBH - 0,102 EPP + e$$

Berdasarkan hasil pengujian jalur pengaruh terhadap kesejahteraan pada gambar 5.30, dapat dijelaskan bahwa:

- a. Nilai koefisien DAU sebesar -0,354 dan nilai signifikansi DAU sebesar 3,067 lebih besar dari α (1%, 5%, 10%), sehingga dapat diartikan bahwa peningkatan DAU tidak berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima artinya bahwa dana alokasi umum (DAU) secara tidak langsung tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kesejahteraan melalui pertumbuhan ekonomi di Kawasan Indonesia Barat (KIB).

- b. Nilai koefisien DAK sebesar 0,104 dan nilai signifikansi DAK sebesar 0,021 lebih kecil dari 0,05 ($\alpha=5\%$), sehingga dapat diartikan bahwa jika DAK meningkat sebesar 1 Rupiah, maka secara rata-rata kesejahteraan akan meningkat sebesar 0,021 dengan asumsi *ceteris paribus*. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak artinya bahwa dana alokasi khusus (DAK) secara tidak langsung berpengaruh signifikan positif terhadap kesejahteraan melalui pertumbuhan ekonomi di Kawasan Indonesia Barat (KIB).
- c. Nilai koefisien DBH sebesar -0,186 dan nilai signifikansi sebesar 7,919 lebih besar dari α (1%, 5%, 10%), sehingga dapat diartikan bahwa peningkatan DBH tidak berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima artinya bahwa dana bagi hasil (DBH) secara tidak langsung tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kesejahteraan melalui pertumbuhan ekonomi di Kawasan Indonesia Barat (KIB).
- d. Nilai koefisien EPP sebesar -0,102 dan nilai signifikansi EPP sebesar 0,003 lebih kecil dari 0,01 ($\alpha=1\%$), sehingga dapat diartikan bahwa jika EPP meningkat sebesar 1 satuan, maka secara rata-rata kesejahteraan akan menurun sebesar 0,091 dengan asumsi *ceteris paribus*. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak yang artinya bahwa efisiensi pengeluaran publik (EPP) secara tidak langsung berpengaruh signifikan negatif terhadap kesejahteraan melalui pertumbuhan ekonomi di Kawasan Indonesia Barat (KIB).

3. Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung di Kawasan Indonesia Barat (KIB)

Gambar analisis jalur sebelumnya menjelaskan besar koefisien jalur pada setiap pengaruh dua variabel yang bersifat langsung dan tidak langsung. Besar pengaruh langsung dihitung dari koefisien jalur, sedangkan besar pengaruh tidak langsung adalah jumlah hasil dua kali jalur yang menghubungkan pengaruh tidak langsung. Tabel berikut menjelaskan pengaruh langsung dan tidak langsung yang ada dalam model hipotesis penelitian ini dapat disajikan pada tabel 5.12 dibawah ini.

Tabel 5.12: Ringkasan Hasil Estimasi Jalur Pengaruh Langsung (*Direct*), Tidak Langsung (*Indirect*), Pengaruh Total (*Total Effect*) dan R-Squared di Kawasan Indonesia Barat (KIB)

Pengaruh Variabel	Pengaruh Kausal (Rekursif)		Total Effect	R-squared
	Direct	Indirect (Melalui PE)		
DAU terhadap PE	0,705***	-	0,705	49,70%
DAK terhadap PE	-0,208***	-	-0,208	04,33%
DBH terhadap PE	0,370***	-	0,307	13,69%
EPP terhadap PE	0,203***	-	0,203	04,12%
PE terhadap PTK	0,788***	-	0,788	62,10%
PE terhadap TK	0,708***	-	0,708	50,13%
PE terhadap IPM	-0,502**	-	-0,502	25,20%
PTK terhadap IPM	-1,447***	-	-1,447	97,91%
TK terhadap IPM	-1,836***	-	-1,836	96,63%
DAU terhadap PTK	0,196	0,555***	0,751	56,40%
DAU terhadap TK	0,258	0,499	0,757	57,30%
DAU terhadap IPM	-0,124	-0,354	-0,478	22,85%
DAK terhadap PTK	-0,146	-0,164***	-0,310	09,61%
DAK terhadap TK	-0,195	-0,147***	-0,342	11,70%
DAK terhadap IPM	-0,053	0,104**	0,051	00,26%
DBH terhadap PTK	-0,027	0,292***	0,270	07,29%
DBH terhadap TK	-0,012	0,262	0,250	06,25%
DBH terhadap IPM	0,058	-0,186	-0,128	01,64%
EPP terhadap PTK	-0,002	0,159	0,157	02,46%
EPP terhadap TK	0,004	0,145	0,149	02,22%
EPP terhadap IPM	0,008	-0,102***	-0,094	00,88%

Sumber: hasil *path analysis* (data diolah)

Keterangan: ***signifikan pada taraf 1% ($\alpha=0,01$) dan **signifikan pada taraf 5% ($\alpha=0,05$)

Dari tabel 5.12 diatas dapat dilihat bahwa pengaruh langsung yang paling kuat bersumber dari pertumbuhan terhadap penyerapan tenaga kerja (PTK) dengan koefisien sebesar 0,788 dengan besaran nilai kontribusi (*R-squared*) sebesar 0,6210 artinya kemampuan variabel independen pertumbuhan ekonomi

(PE) dalam menjelaskan variabel dependen penyerapan tenaga kerja (PTK) sebesar 62,10% sedangkan sisanya 37,90% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel pertumbuhan ekonomi (PE). Sedangkan, pengaruh tidak langsung yang paling kuat bersumber dari dana alokasi umum (DAU) terhadap penyerapan tenaga kerja melalui pertumbuhan ekonomi dengan koefisien sebesar 0,555 dengan besaran nilai kontribusi (*R-squared*) sebesar 0,3080 artinya kemampuan variabel independen DAU dalam menjelaskan variabel dependen penyerapan tenaga kerja sebesar 30,80% sedangkan sisanya 69,20% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel DAU. Hasil ini menerangkan bahwa pemerintah daerah di KIB lebih memprioritaskan penggunaan DAU untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui investasi publik yang bersifat padat karya sehingga mampu menyerap banyak tenaga kerja. Hal ini dikarenakan penggunaan DAU yang bersifat *block grant* artinya penggunaan diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan daerahnya sehingga pemerintah daerah menjadi lebih optimal dalam mengalokasikan anggaran untuk membangun daerahnya.

Sedangkan dilihat dari *Total effect* yang merupakan hasil penjumlahan dari pengaruh langsung (*direct*) dan pengaruh tidak langsung (*indirect*) di Kawasan Indonesia Barat (KIB), dimana pengaruh yang paling kuat bersumber dari dana alokasi umum (DAU) terhadap kemiskinan dengan koefisien sebesar 0,757 dengan besaran nilai kontribusi (*R-squared*) sebesar 0,5730, artinya kemampuan variabel independen DAU dalam menjelaskan variabel dependen kemiskinan (TK) sebesar 57,30% sedangkan sisanya 42,70% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel DAU. Namun, jika dilihat dari hubungannya bahwa pengaruh DAU terhadap kemiskinan bersifat positif artinya bahwa peningkatan DAU berpengaruh terhadap peningkatan kemiskinan. Hasil ini mengindikasikan bahwa penggunaan DAU oleh pemerintah daerah pada program-program yang

bertujuan untuk mendukung kemiskinan (*pro-poor*) dinilai tidak berhasil untuk mengurangi jumlah penduduk miskin di Kawasan Indonesia Barat (KIB).

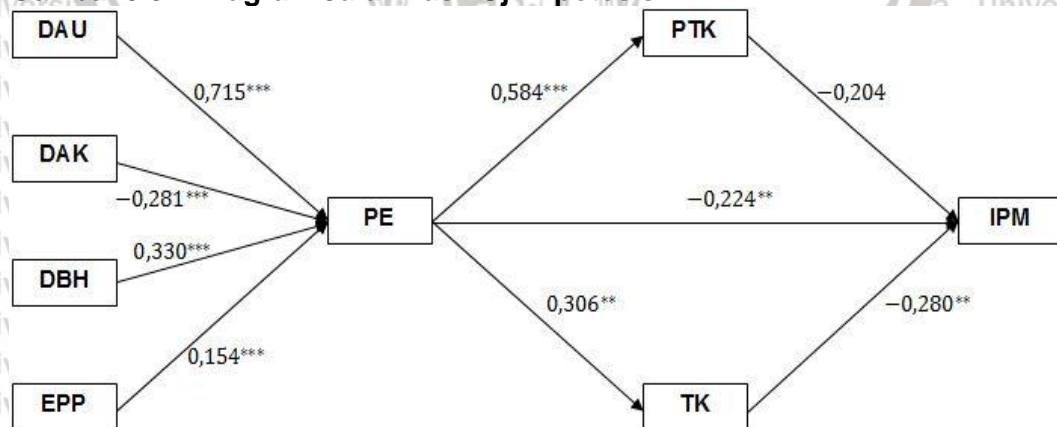
5.3.3.3.2 Hasil Pengujian Analisis Jalur Kawasan Indonesia Timur (KIT)

Analisis jalur digunakan untuk melihat pengaruh secara langsung dan tidak langsung dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana bagi hasil (DBH), dan efisiensi pengeluaran publik (EPP) terhadap pertumbuhan ekonomi (PE), penyerapaan tenaga kerja (PTK), kemiskinan (TK) dan kesejahteraan (IPM) di Kawasan Indonesia Timur (KIT).

1. Pengaruh Langsung di Kawasan Indonesia Timur (KIT)

Pada bagian ini akan menyajikan pengaruh langsung dari dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana bagi hasil (DBH), dan efisiensi pengeluaran publik (EPP) terhadap pertumbuhan ekonomi (PE), penyerapaan tenaga kerja (PTK), kemiskinan (TK) dan kesejahteraan (IPM) di Kawasan Indonesia Timur (KIT). Hasil pengujian analisis jalur (*path analysis*) dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 5.31: Diagram Jalur Hasil Uji Hipotesis KIT



Keterangan: ***signifikan pada taraf 1% ($\alpha=0,01$) dan **signifikan pada taraf 5% ($\alpha=0,05$)

Dari gambar 5.31, maka dapat diperoleh model persamaan sebagai berikut:

$$PE = 0,715 DAU - 0,281 DAK + 0,330 DBH + 0,154 EPP + e_1$$

$$PTK = 0,584 PE + e_2$$



$$TK = 0,306 PE + e_3$$

$$IPM = -0,224 PE - 0,204 PTK - 0,280 + e_4$$

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis KIT pada gambar 5.31 dapat dijelaskan bahwa:

a. Nilai koefisien DAU sebesar 0,715 dan nilai signifikansi DAU sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,01 ($\alpha=1\%$), sehingga dapat diartikan bahwa jika DAU meningkat sebesar 1 Rupiah, maka secara rata-rata pertumbuhan ekonomi akan meningkat sebesar 0,715 Rupiah dengan asumsi *ceteris paribus*. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak artinya bahwa dana alokasi umum (DAU) secara langsung berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kawasan Indonesia Timur (KIT).

b. Nilai koefisien DAK sebesar -0,281 dan nilai signifikansi DAK sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,01 ($\alpha=1\%$), sehingga dapat diartikan bahwa jika DAK meningkat sebesar 1 Rupiah, maka secara rata-rata pertumbuhan ekonomi akan menurun sebesar 0,281 Rupiah dengan asumsi *ceteris paribus*. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak artinya bahwa dana alokasi khusus (DAK) secara langsung berpengaruh signifikan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kawasan Indonesia Timur (KIT).

c. Nilai koefisien DBH sebesar 0,330 dan nilai signifikansi DBH sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,01 ($\alpha=1\%$), sehingga dapat diartikan bahwa jika DBH meningkat sebesar 1 Rupiah, maka secara rata-rata pertumbuhan ekonomi akan meningkat sebesar 0,330 Rupiah dengan asumsi *ceteris paribus*. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak artinya bahwa dana bagi hasil (DBH) secara langsung berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kawasan Indonesia Timur (KIT).

d. Nilai koefisien EPP sebesar 0,154 dan nilai signifikansi EPP sebesar 0,002 lebih kecil dari 0,01 ($\alpha=1\%$), sehingga dapat diartikan bahwa jika EPP

meningkat sebesar 1 satuan, maka secara rata-rata pertumbuhan ekonomi akan meningkat sebesar 0,154 satuan dengan asumsi *ceteris paribus*. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak artinya bahwa efisiensi pengeluaran publik secara langsung berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kawasan Indonesia Timur (KIT).

e. Nilai koefisien PE sebesar 0,584 dan nilai signifikansi PE sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,01 ($\alpha=1\%$), sehingga dapat diartikan bahwa jika PE meningkat sebesar 1 Rupiah, maka secara rata-rata penyerapan tenaga kerja akan meningkat sebesar 0,584 Jiwa dengan asumsi *ceteris paribus*. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak artinya bahwa pertumbuhan ekonomi (PE) secara langsung berpengaruh signifikan positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Kawasan Indonesia Timur (KIT).

f. Nilai koefisien PE sebesar 0,306 dan nilai signifikansi PE sebesar 0,022 lebih kecil dari 0,05 ($\alpha=5\%$), sehingga dapat diartikan bahwa jika PE meningkat sebesar 1 Rupiah, maka secara rata-rata jumlah penduduk miskin akan meningkat sebesar 0,306 jiwa dengan asumsi *ceteris paribus*. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak artinya bahwa pertumbuhan ekonomi (PE) secara langsung berpengaruh signifikan positif terhadap kemiskinan di Kawasan Indonesia Timur (KIT).

g. Nilai koefisien PE sebesar -0,224 dan nilai signifikansi PE sebesar 0,017 lebih kecil dari 0,05 ($\alpha=5\%$), sehingga dapat diartikan bahwa jika PE meningkat sebesar 1 Rupiah, maka secara rata-rata jumlah kesejahteraan akan menurun sebesar 0,224 jiwa dengan asumsi *ceteris paribus*. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak artinya bahwa pertumbuhan ekonomi (PE) secara langsung berpengaruh signifikan negatif terhadap kesejahteraan di Kawasan Indonesia Timur (KIT).

h. Nilai koefisien PTK sebesar -0,204 dan nilai signifikansi PTK sebesar 0,111 lebih besar dari α (1%, 5%, 10%), sehingga dapat diartikan bahwa peningkatan penyerapan tenaga kerja tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima artinya bahwa penyerapan tenaga kerja (PTK) secara langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan di Kawasan Indonesia Timur (KIT).

i. Nilai koefisien TK sebesar -0,280 dan nilai signifikansi TK sebesar 0,012 lebih kecil dari 0,05 ($\alpha=5\%$), sehingga dapat diartikan bahwa jika kemiskinan meningkat sebesar 1 Jiwa, maka secara rata-rata kesejahteraan akan menurun sebesar 0,280 dengan asumsi *ceteris paribus*. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak artinya bahwa kemiskinan (TK) secara langsung berpengaruh signifikan negatif terhadap kesejahteraan di Kawasan Indonesia Timur (KIT).

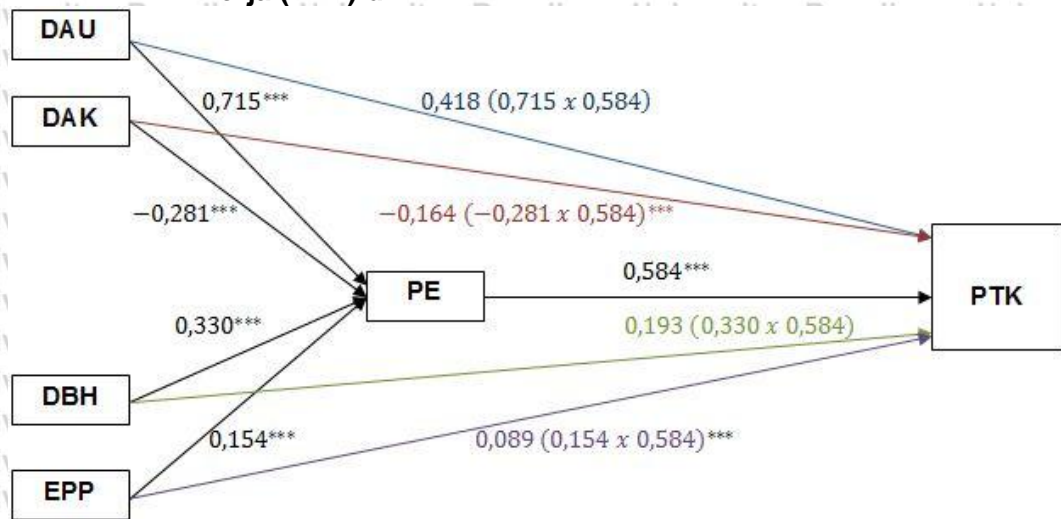
2. Pengaruh Tidak Langsung di Kawasan Indonesia Timur (KIT)

Pada bagian ini akan menyajikan pengaruh tidak langsung dari dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana bagi hasil (DBH), dan efisiensi pengeluaran publik (EPP) terhadap penyerapan tenaga kerja (PTK), kemiskinan (TK) dan kesejahteraan (IPM) melalui pertumbuhan ekonomi (PE) di Kawasan Indonesia Timur (KIT). Hasil pengujian ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

a. Pengaruh Tidak Langsung DAU, DAK, DBH, dan EPP terhadap penyerapan tenaga kerja (PTK) melalui Pertumbuhan Ekonomi di KIT

Hasil pengujian analisis jalur pengaruh tidak langsung DAU, DAK, DBH dan EPP terhadap penyerapan tenaga kerja (PTK) melalui pertumbuhan ekonomi (PE) di Kawasan Indonesia Timur (KIT), dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 5.32: Diagram Jalur Pengaruh Tidak Langsung Penyerapan Tenaga Kerja (PTK) di KIT



Keterangan: ***signifikan pada taraf 1% ($\alpha=0,01$)

Dari gambar 5.32, maka dapat diperoleh model persamaan sebagai berikut:

$$PTK = 0,418 DAU - 0,164 DAK + 0,193 DBH + 0,089 EPP + e$$

Berdasarkan hasil pengujian jalur pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja pada gambar 5.32, dapat dijelaskan bahwa:

- Nilai koefisien DAU sebesar 0,418 dan nilai signifikansi DAU sebesar 1,447 lebih besar dari α (1%, 5%, 10%), sehingga dapat diartikan bahwa peningkatan dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima artinya bahwa dana alokasi umum (DAU) secara tidak langsung tidak berpengaruh signifikan positif terhadap penyerapan tenaga kerja melalui pertumbuhan ekonomi di Kawasan Indonesia Timur (KIT).
- Nilai koefisien DAK sebesar -0,164 dan nilai signifikansi DAK sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,01 ($\alpha=1\%$), sehingga dapat diartikan bahwa jika DAK meningkat sebesar 1 Rupiah, maka secara rata-rata penyerapan tenaga kerja akan menurun sebesar 0,164 jiwa dengan asumsi *ceteris paribus*. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak artinya bahwa dana alokasi khusus (DAK)

secara tidak langsung berpengaruh signifikan negatif terhadap penyerapan tenaga kerja melalui pertumbuhan ekonomi di Kawasan Indonesia Timur (KIT).

c. Nilai koefisien DBH sebesar 0,193 dan nilai signifikansi DBH sebesar 3,587

lebih besar dari α (1%, 5%, 10%), sehingga dapat diartikan bahwa peningkatan dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima artinya bahwa dana bagi hasil (DBH) secara tidak langsung tidak berpengaruh signifikan positif terhadap penyerapan tenaga kerja melalui pertumbuhan ekonomi di Kawasan Indonesia Timur (KIT).

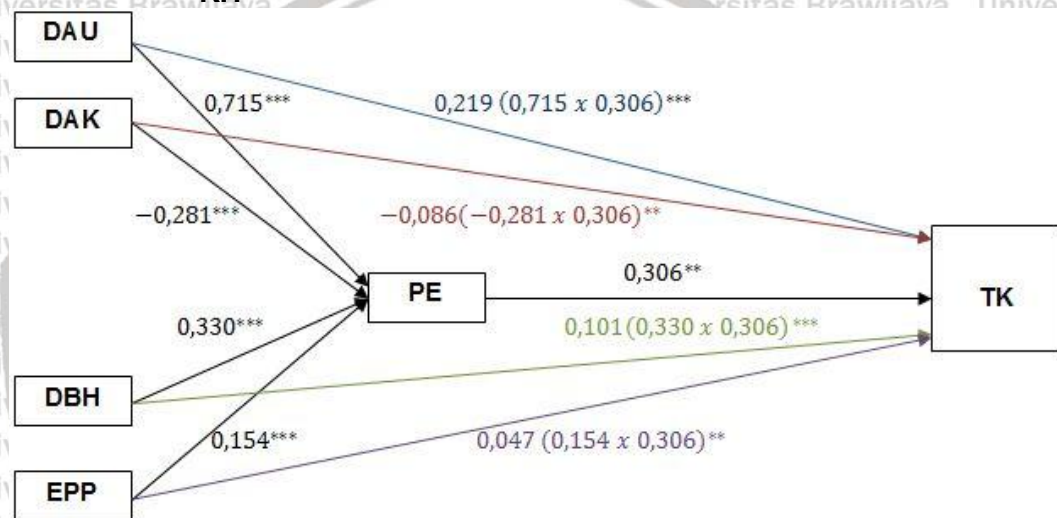
d. Nilai koefisien EPP sebesar 0,089 dan nilai signifikansi EPP sebesar 0,009

lebih kecil dari 0,01 ($\alpha=1\%$), sehingga dapat diartikan bahwa jika EPP meningkat sebesar 1 Rupiah, maka secara rata-rata penyerapan tenaga kerja akan meningkat sebesar 0,089 jiwa dengan asumsi *ceteris paribus*. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak artinya bahwa efisiensi pengeluaran publik secara tidak langsung berpengaruh signifikan positif terhadap penyerapan tenaga kerja melalui pertumbuhan ekonomi di Kawasan Indonesia Timur (KIT).

b. Pengaruh Tidak Langsung DAU, DAK, DBH, dan EPP terhadap Kemiskinan melalui Pertumbuhan Ekonomi di KIT

Hasil pengujian analisis jalur pengaruh tidak langsung DAU, DAK, DBH dan EPP terhadap kemiskinan (TK) melalui pertumbuhan ekonomi (PE) di Kawasan Indonesia Timur (KIT), dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 5.33: Diagram Jalur Pengaruh Tidak Langsung Kemiskinan (TK) di KIT



Keterangan: ***signifikan pada taraf 1% ($\alpha=0,01$) dan **signifikan pada taraf 5% ($\alpha=0,05$)

Dari gambar 5.33, maka dapat diperoleh model persamaan sebagai berikut:

$$TK = 0,219 DAU - 0,086 DAK + 0,101 DBH + 0,047 EPP + e$$

Berdasarkan hasil pengujian jalur pengaruh terhadap kemiskinan pada gambar 5.33, dapat dijelaskan bahwa:

- Nilai koefisien DAU sebesar 0,219 dan nilai signifikansi DAU sebesar 0,005 lebih kecil dari 0,01 ($\alpha=1\%$), sehingga dapat diartikan bahwa jika DAU meningkat sebesar 1 Rupiah, maka secara rata-rata kemiskinan akan meningkat sebesar 0,219 jiwa dengan asumsi *ceteris paribus*. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak artinya bahwa dana alokasi umum (DAU) secara tidak langsung berpengaruh signifikan positif terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di Kawasan Indonesia Timur (KIT).

b. Nilai koefisien DAK sebesar $-0,086$ dan nilai signifikansi DAK sebesar $0,018$

lebih kecil dari $0,05$ ($\alpha=5\%$), sehingga dapat diartikan bahwa jika DAK meningkat sebesar 1 Rupiah, maka secara rata-rata kemiskinan akan menurun sebesar $0,086$ jiwa dengan asumsi *ceteris paribus*. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak artinya bahwa dana alokasi khusus (DAK) secara tidak langsung berpengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di Kawasan Indonesia Timur (KIT).

c. Nilai koefisien DBH sebesar $0,101$ dan nilai signifikansi DBH sebesar $0,009$

lebih kecil dari $0,01$ ($\alpha=1\%$), sehingga dapat diartikan bahwa jika DBH meningkat sebesar 1 Rupiah, maka secara rata-rata kemiskinan akan meningkat sebesar $0,101$ jiwa dengan asumsi *ceteris paribus*. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak artinya bahwa dana bagi hasil (DBH) secara tidak langsung berpengaruh signifikan positif terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di Kawasan Indonesia Timur (KIT).

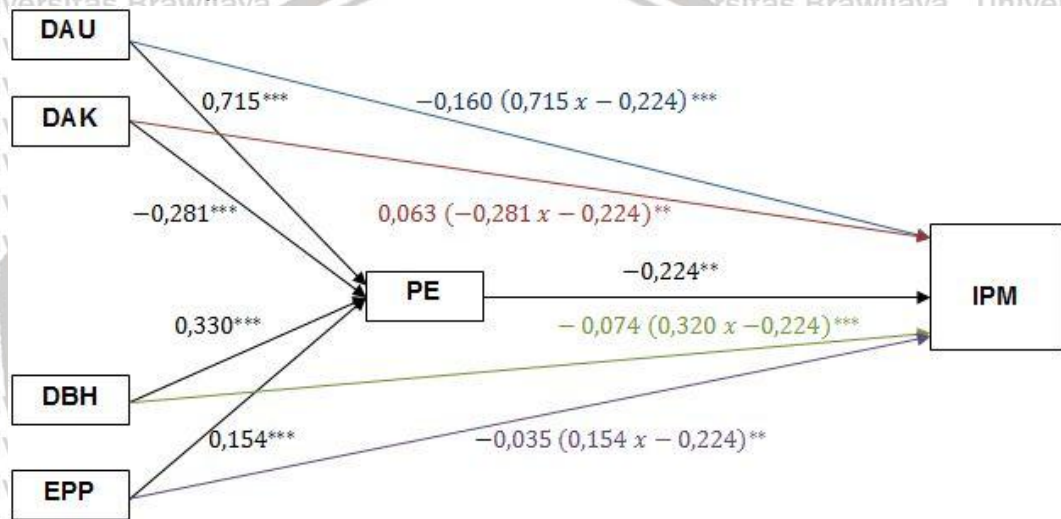
d. Nilai koefisien EPP sebesar $0,047$ dan nilai signifikansi EPP sebesar $0,048$

lebih kecil dari $0,05$ ($\alpha=5\%$), sehingga dapat diartikan bahwa jika EPP meningkat sebesar 1 Rupiah, maka secara rata-rata kemiskinan akan meningkat sebesar $0,047$ jiwa dengan asumsi *ceteris paribus*. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak artinya bahwa efisiensi pengeluaran publik (EPP) secara tidak langsung berpengaruh signifikan positif terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di Kawasan Indonesia Timur (KIT).

c. Pengaruh Tidak Langsung DAU, DAK, DBH, dan EPP terhadap Kesejahteraan melalui Pertumbuhan Ekonomi di KIT

Hasil pengujian analisis jalur pengaruh tidak langsung DAU, DAK, DBH dan EPP terhadap kesejahteraan (IPM) melalui pertumbuhan ekonomi (PE) di Kawasan Indonesia Timur (KIT), dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 5.34: Diagram Jalur Pengaruh Tidak Langsung Kesejahteraan (IPM) di KIT



Keterangan: ***signifikan pada taraf 1% ($\alpha=0,01$) dan **signifikan pada taraf 5% ($\alpha=0,05$)

Dari gambar 5.34, maka dapat diperoleh model persamaan sebagai berikut:

$$IPM = -0,160 DAU + 0,063 DAK - 0,074 DBH - 0,035 EPP + e$$

Berdasarkan hasil pengujian jalur pengaruh terhadap kesejahteraan pada gambar 5.34, dapat dijelaskan bahwa:

- a. Nilai koefisien DAU sebesar $-0,160$ dan nilai signifikansi DAU sebesar $0,003$ lebih kecil dari $0,01$ ($\alpha=1\%$), sehingga dapat diartikan bahwa jika DAU meningkat sebesar 1 Rupiah, maka secara rata-rata kesejahteraan akan menurun sebesar $0,160$ dengan asumsi *ceteris paribus*. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak artinya bahwa dana alokasi umum (DAU) secara tidak langsung berpengaruh signifikan negatif terhadap kesejahteraan melalui pertumbuhan ekonomi di Kawasan Indonesia Timur (KIT).

- b. Nilai koefisien DAK sebesar 0,063 dan nilai signifikansi DAK sebesar 0,012 lebih kecil dari 0,05 ($\alpha=5\%$), sehingga dapat diartikan bahwa jika DAK meningkat sebesar 1 Rupiah, maka secara rata-rata kesejahteraan akan meningkat sebesar 0,063 dengan asumsi *ceteris paribus*. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak artinya bahwa dana alokasi khusus (DAK) secara tidak langsung berpengaruh signifikan positif terhadap kesejahteraan melalui pertumbuhan ekonomi di Kawasan Indonesia Timur (KIT).
- c. Nilai koefisien DBH sebesar -0,074 dan nilai signifikansi sebesar 0,005 lebih kecil dari 0,01 ($\alpha=1\%$), sehingga dapat diartikan bahwa jika DBH meningkat sebesar 1 satuan, maka secara rata-rata kesejahteraan akan menurun sebesar 0,074 dengan asumsi *ceteris paribus*. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak yang artinya bahwa dana bagi hasil (DBH) secara tidak langsung berpengaruh signifikan negatif terhadap kesejahteraan melalui pertumbuhan ekonomi di Kawasan Indonesia Timur (KIT).
- d. Nilai koefisien EPP sebesar -0,035 dan nilai signifikansi EPP sebesar 0,035 lebih kecil dari 0,05 ($\alpha=5\%$), sehingga dapat diartikan bahwa jika EPP meningkat sebesar 1 satuan, maka secara rata-rata kesejahteraan akan menurun sebesar 0,035 dengan asumsi *ceteris paribus*. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak yang artinya bahwa efisiensi pengeluaran publik (EPP) secara tidak langsung berpengaruh signifikan negatif terhadap kesejahteraan melalui pertumbuhan ekonomi di Kawasan Indonesia Timur (KIT).

3. Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung di Kawasan Indonesia Timur (KIT)

Gambar analisis jalur sebelumnya menjelaskan besar koefisien jalur pada setiap pengaruh dua variabel yang bersifat langsung dan tidak langsung. Besar pengaruh langsung dihitung dari koefisien jalur, sedangkan besar pengaruh tidak langsung adalah jumlah hasil dua kali jalur yang menghubungkan pengaruh tidak langsung. Tabel berikut menjelaskan pengaruh langsung dan tidak langsung yang ada dalam model hipotesis penelitian ini dapat disajikan pada tabel 5.13 dibawah ini.

Tabel 5.13: Ringkasan Hasil Estimasi Jalur Pengaruh Langsung (*Direct*), Tidak Langsung (*Indirect*), Pengaruh Total (*Total Effect*), dan R-squared di Kawasan Indonesia Timur (KIT)

Pengaruh Variabel	Pengaruh Kausal (Rekursif)		Total Effect	R-Squared
	Direct	Indirect (Melalui PE)		
DAU terhadap PE	0,715***	-	0,715	51,12%
DAK terhadap PE	-0,281***	-	-0,281	07,90%
DBH terhadap PE	0,330***	-	0,330	10,80%
EPP terhadap PE	0,154***	-	0,154	02,37%
PE terhadap PTK	0,584***	-	0,584	34,11%
PE terhadap TK	0,306**	-	0,306	09,36%
PE terhadap IPM	-0,224**	-	-0,224	05,02%
PTK terhadap IPM	-0,204	-	-0,204	04,16%
TK terhadap IPM	-0,280**	-	-0,280	07,84%
DAU terhadap PTK	0,718	0,418	1,136	01,30%
DAU terhadap TK	0,283	0,219***	0,502	25,20%
DAU terhadap IPM	-0,144	-0,160***	-0,304	09,24%
DAK terhadap PTK	-0,085	-0,164***	-0,249	06,20%
DAK terhadap TK	-0,175	-0,086**	-0,261	06,81%
DAK terhadap IPM	0,237	0,063**	0,300	00,09%
DBH terhadap PTK	-0,105	0,193	0,090	00,81%
DBH terhadap TK	-0,206	0,101***	-0,105	01,10%
DBH terhadap IPM	0,065	-0,074***	-0,009	00,01%
EPP terhadap PTK	-0,348	0,089***	-0,259	06,71%
EPP terhadap TK	0,350	0,047**	-0,303	09,18%
EPP terhadap IPM	0,011	-0,035**	-0,024	00,06%

Sumber: hasil *path analysis* (data diolah)

Keterangan: ***signifikan pada taraf 1% ($\alpha=0,01$) dan **signifikan pada taraf 5% ($\alpha=0,05$)

Berdasarkan tabel 5.13 diatas dapat dilihat bahwa pengaruh langsung yang paling kuat bersumber dari dana alokasi umum (DAU) terhadap pertumbuhan ekonomi dengan koefisien sebesar 0,715, dengan besaran nilai kontribusi (*R-squared*) sebesar 0,5112 artinya kemampuan variabel independen

dana alokasi umum (DAU) dalam menjelaskan variabel dependen pertumbuhan ekonomi (PE) sebesar 51,12% sedangkan sisanya 48,88% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel DAU. Pengaruh tidak langsung yang paling kuat bersumber dari dana alokasi umum (DAU) terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi dengan koefisien sebesar 0,219, dengan besaran nilai kontribusi (*R-squared*) sebesar 0,0480 artinya kemampuan variabel independen dana alokasi umum (DAU) dalam menjelaskan variabel dependen kemiskinan (TK) sebesar 04,88% sedangkan sisanya 95,20% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel DAU. Hasil ini menerangkan pemerintah daerah lebih memprioritaskan penggunaan DAU untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi yang mendukung pengentasan kemiskinan. Hal ini dikarenakan penggunaan DAU yang bersifat *block grant* artinya penggunaan diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan daerahnya sehingga pemerintah daerah menjadi lebih optimal dalam mengalokasikan anggaran untuk membangun daerahnya.

Sedangkan dilihat dari *total effect* yang merupakan hasil penjumlahan dari pengaruh langsung (*direct*) dan pengaruh tidak langsung (*indirect*), dimana pengaruh yang paling kuat bersumber dari pengaruh dana alokasi umum (DAU) terhadap kemiskinan dengan koefisien sebesar 0,502, dengan besaran nilai kontribusi (*R-squared*) sebesar 0,2520 artinya kemampuan variabel independen dana alokasi umum (DAU) dalam menjelaskan variabel dependen kemiskinan (TK) sebesar 25,20% sedangkan sisanya 74,80% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel DAU. Akan tetapi jika dilihat dari hubungannya bahwa pengaruh DAU terhadap kemiskinan bersifat positif artinya bahwa peningkatan DAU berpengaruh terhadap peningkatan kemiskinan. Hasil ini mengindikasikan bahwa penggunaan DAU oleh pemerintah daerah pada program-program yang

bertujuan untuk mendukung kemiskinan (*pro-poor*) dinilai tidak berhasil untuk mengurangi jumlah penduduk miskin di Kawasan Indonesia Timur (KIT).

5.4 Pembahasan Hasil dan Implikasi Penelitian

5.4.1 Efisiensi Pengeluaran Publik

Pengukuran efisiensi pengeluaran publik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan modus optimalisasi *input oriented* yaitu meminimalkan input pada tingkat output tetap dengan modus skala pengembalian yang tetap (*Constant Return to Scale*). Hal ini sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk melakukan efisiensi pengeluaran publik.

Tabel 5.14: Jumlah Provinsi yang Efisien dan Tidak Efisien

Tahun	Jumlah Provinsi	
	Efisien (Nilai =1)	Tidak Efisien (Nilai <1)
2008	15	18
2009	16	17
2010	16	17
2011	25	8
2012	27	6
2013	25	8
2014	22	11
2015	22	11
Rata-rata	21	12

Sumber: Hasil Olahan DEA (2018)

Berdasarkan hasil penelitian DEA, secara keseluruhan sebagian besar provinsi di Indonesia telah melaksanakan pengeluarannya secara efisien.

Hal ini bisa dilihat pada tabel 5.14 jumlah provinsi yang efisien jauh lebih banyak dari provinsi yang belum efisien dari tahun 2008-2015. Secara rata-rata dari tahun 2008-2015 terdapat 21 provinsi yang telah melaksanakan pengeluaran publik secara efisien, sedangkan sisanya terdapat 12 provinsi yang belum melaksanakan pengeluaran publik secara efisien. Jumlah provinsi yang efisien menunjukkan tren peningkatan, sedangkan jumlah provinsi yang tidak efisien menunjukkan tren penurunan. Beberapa provinsi yang telah melakukan pengeluaran publik secara efisien yaitu Sumatera Utara, Kepulauan Bangka

Belitung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Bali, Banten, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Maluku Utara, dan Jawa Timur. Sedangkan provinsi-provinsi yang belum efisien yaitu Aceh, Papua, Lampung, Papua Barat, dan provinsi-provinsi yang belum efisien pada beberapa tahun tertentu selama periode penelitian seperti Kalimantan Selatan, Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Yogyakarta, Kalimantan Tengah, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Maluku, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, NTT, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Bengkulu, dan Sumatera Selatan. Provinsi yang pengeluaran publiknya efisien menunjukkan bahwa besaran input berupa belanja operasional dan belanja modal telah optimal dalam menghasilkan output berupa investasi swasta dan PAD. Sedangkan provinsi yang pengeluaran publiknya tidak efisien (inefisiensi) menunjukkan bahwa besaran input berupa belanja operasional dan belanja modal belum optimal dalam menghasilkan output berupa investasi swasta dan PAD.

Hasil penelitian ini sejalan dengan studi terdahulu yang dilakukan oleh Tirtosuharto (2009) menemukan bahwa pelaksanaan pengeluaran publik sebagian besar provinsi-provinsi di Indonesia belum efisien. Chusnah (2014) dan Parakoso (2016), menemukan bahwa masih banyak kabupaten/kota di Jawa Timur yang belum melakukan pengeluaran publik secara efisien. Alfonso (2013) menemukan bahwa sebagian besar negara-negara OECD belum melaksanakan pengeluaran publiknya secara efisien. Liu *et al* (2016) menemukan bahwa pelaksanaan pengeluaran publik di provinsi-provinsi di Cina belum sepenuhnya efisien. Herrera & Pang (2005) menemukan bahwa sebagian besar negara-negara berkembang belum melaksanakan pengeluaran publiknya secara efisien.

Faktor penyebab pengeluaran publik di beberapa provinsi belum efisien dikarenakan sebagian besar pemerintah daerah belum mampu memanfaatkan anggaran yang dimiliki secara maksimal. Permasalahan realisasi penyerapan

anggaran yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia adalah sebagian besar masih menumpuk di akhir tahun dimana penyerapan APBD semakin cepat dan tinggi di triwulan terakhir yaitu bulan Oktober, November dan Desember. Secara keseluruhan, realisasi penyerapan APBD baik di tingkat propinsi maupun kabupaten menunjukkan pola yang sama dan hampir terjadi setiap tahun. Penumpukkan realisasi anggaran di akhir tahun dikarenakan perencanaan yang kurang matang, proses administrasi yang lamban, dan prosedur lelang dan hukum yang harus di tempuh. Menumpuknya anggaran di akhir tahun merupakan salah satu indikasi kurang efektif dan efisiensi pengeluaran publik di daerah. Gambar dibawah ini akan menjelaskan rata-rata realisasi penyerapan belanja APBD tahun 2011-2014.

Gambar 5.35: Rata-rata Realisasi APBD 2011-2014 (Presentase)



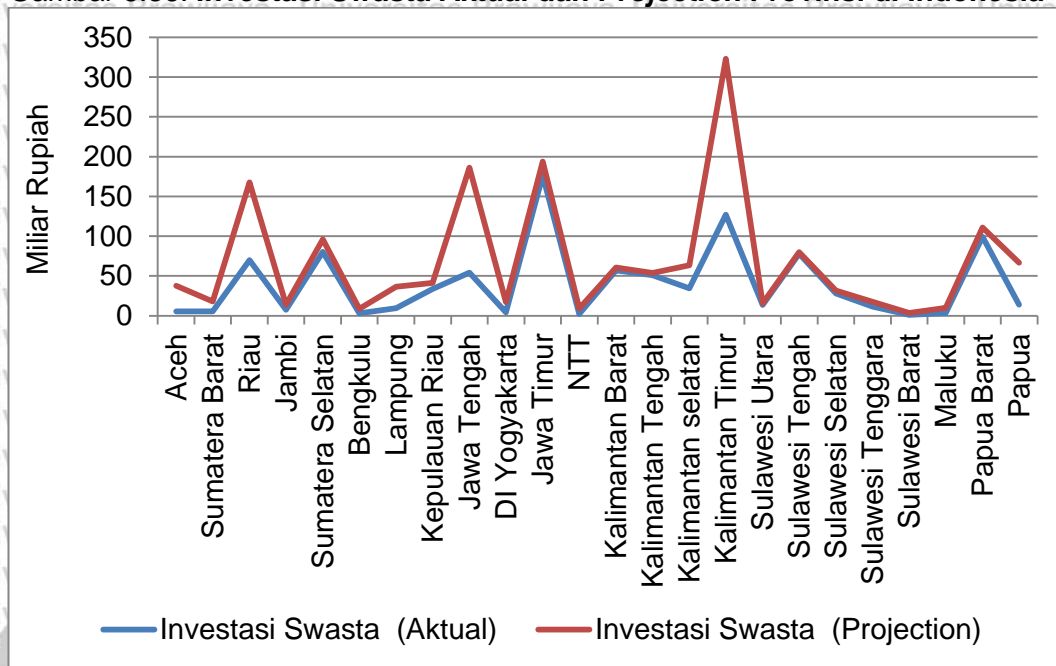
Sumber: Kementerian Keuangan

Berdasarkan gambar 5.35 yang bersumber dari Kementerian Keuangan, menunjukkan rata-rata realisasi anggaran APBD tahun 2011-2014. Realisasi penyerapan belanja APBD hampir mencapai 100 persen atau sekitar 96 persen dari pagu APBD. Rata-rata realisasi belanja pada tahun 2011 mencapai 98,8 persen, tahun 2012 mencapai 96,2 persen, dan ada tahun 2013 mencapai 96,1

persen. Meskipun realisasi penyerapan APBD secara tahunan menunjukkan angka yang cukup drastis, yaitu hampir 100 persen terserap, namun jika dilihat dari pola bulanan dan triwulanan realisasi penyerapan menunjukkan angka yang kurang ideal. Realisasi penyerapan belanja APBD pada bulan Januari berada disekitar 4 sampai 5 persen. Sementara, realisasi triwulanan pertama yang berakhir pada bulan Maret berada disekitar 11 sampai 14 persen. Dan ketika dilihat secara semesteran pada bulan Juni penyerapan juga tidak terlihat cukup baik dan hanya berkisar antara 33 sampai 34 persen.

Melihat pola realisasi penyerapan anggaran yang menumpuk diakhir tahun mengindikasikan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah daerah untuk membelanjakan anggaran menjadi tidak tepat sasaran. Hal ini dapat dilihat dari nilai *proportionate movement* (PM) dari hasil perhitungan DEA (dapat dilihat pada lampiran) pada provinsi yang belum melakukan pengeluaran publik secara efisien, disarankan untuk mengurangi input yaitu belanja operasional dan belanja modal untuk menghasilkan output yaitu PAD dan investasi yang optimal. Setelah dilakukan pengurangan input yaitu belanja operasional dan belanja modal, maka dilihat hasil dari *projection* (perkiraan) input yaitu investasi swasta dan PAD. Nilai *projection* (perkiraan) dari investasi swasta dan pendapatan asli daerah (PAD) dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

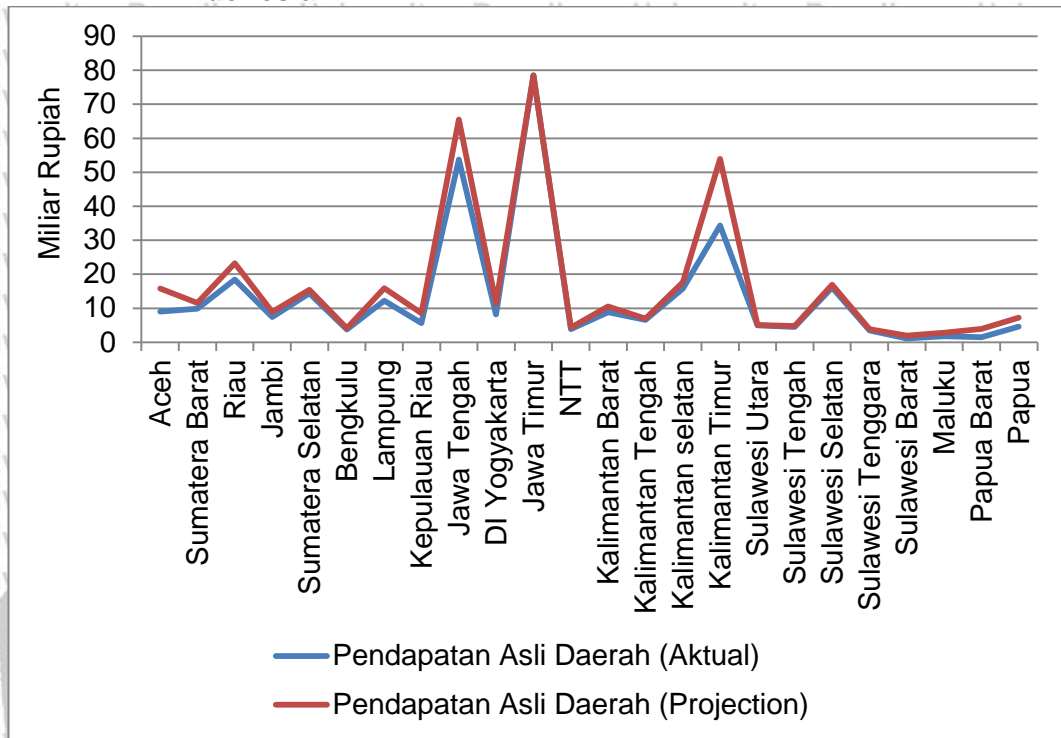
Gambar 5.36: Investasi Swasta Aktual dan *Projection* Provinsi di Indonesia



Sumber: Analisis DEA diolah, 2018

Berdasarkan gambar 5.36 dijelaskan perbandingan investasi swasta aktual dan investasi swasta *projection* (perkiraan) yang merupakan total keseluruhan investasi swasta tahun 2008-2015. Dimana investasi swasta aktual merupakan jumlah realisasi investasi swasta dari masing-masing provinsi, sedangkan investasi swasta *projection* merupakan perkiraan jumlah investasi swasta dari hasil pengukuran DEA setelah dikurangi inputnya yaitu belanja operasional dan belanja modal. Jumlah investasi swasta *projection* jauh lebih besar dari jumlah investasi swasta aktual, dapat dijelaskan bahwa jika pemerintah provinsi mengurangi inputnya yaitu belanja operasional dan belanja modal maka outputnya berupa investasi swasta yang dihasilkan menjadi lebih besar (*input oriented*), sehingga pengeluaran publiknya menjadi efisien.

Gambar 5.37: Pendapatan Asli Daerah Aktual dan *Projection* Provinsi di Indonesia



Sumber: Analisis DEA diolah, 2018.

Berdasarkan gambar 5.37 dijelaskan perbandingan PAD aktual dan PAD *projection* (perkiraan) yang merupakan total keseluruhan PAD tahun 2008-2015.

Dimana PAD aktual merupakan jumlah realisasi PAD dari masing-masing provinsi, sedangkan PAD *projection* merupakan perkiraan jumlah PAD dari hasil pengukuran DEA setelah dikurangi inputnya yaitu belanja operasional dan belanja modal. Jumlah PAD *projection* jauh lebih besar dari jumlah PAD aktual, dapat dijelaskan bahwa jika pemerintah provinsi mengurangi inputnya yaitu belanja operasional dan belanja modal maka outputnya berupa PAD yang dihasilkan menjadi lebih besar (*input oriented*), sehingga pengeluaran publiknya menjadi efisien. Jumlah input memiliki pengaruh yang cukup besar dalam penentuan tingkat efisiensi. Daerah dengan belanja sektor publik yang besar cenderung mendapatkan hasil yang tidak efisien walaupun terkadang nilai outputnya terkadang cukup tinggi. Hasil penelitian ini mendukung studi sebelumnya yang dilakukan oleh Alfonso et al (2003) dan Herrera & Pang (2005)

yang menenunkan bahwa daerah dengan pengeluaran publik yang rendah justru memperoleh hasil yang lebih efisien daripada daerah dengan pengeluaran publik yang besar.

Dari penjelasan diatas sebenarnya memperlihatkan bahwa untuk melaksanakan pengeluaran publik yang efisien, pemerintah tidak harus membelanjakan anggaran dalam jumlah yang besar. Pemerintah dapat mengurangi belanjanya untuk menghasilkan pendapatan dan investasi swasta yang lebih besar. Berdasarkan data realisasi APBD yang diperoleh dari BPS, sebagian besar daerah di Indonesia lebih banyak meangalokasikan anggaran untuk belanja operasional daripada belanja modal. Pemerintah daerah terlalu boros dan menghamburkan anggaran untuk pos-pos belanja yang bukan menjadi prioritas utama, seperti pos belanja pegawai, belanja perjalanan dinas dan rapat, belanja pembangunan gedung-gedung pemerintah, belanja honorarium, serta belanja pengadaan kendaraan. Pemerintah daerah harus lebih meningkatkan belanja modal pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

5.4.2 Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Efisiensi Pengeluaran Publik

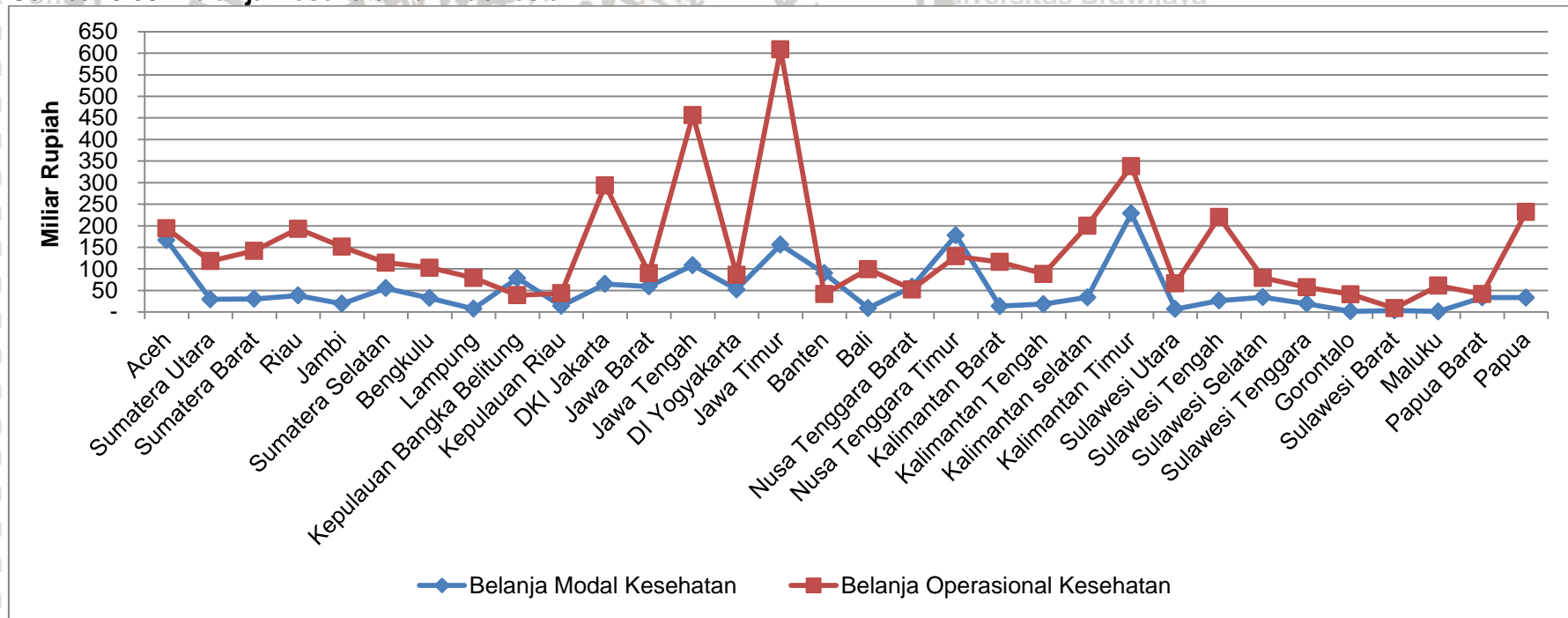
Pada pembahasan ini menjelaskan pengaruh dari rasio desentralisasi fiskal, rasio belanja modal, rasio belanja operasional dan rasio kemandirian penerimaan (pendapatan asli daerah) terhadap efisiensi pengeluaran publik berdasarkan hasil pengujian analisis regresi data panel.

5.4.2.1 Peningkatan Belanja Daerah Berpengaruh Terhadap Penurunan Efisiensi Pengeluaran Publik

Berdasarkan hasil pengujian dari regresi data panel menunjukkan bahwa rasio desentralisasi fiskal yang diukur dari total belanja daerah terhadap belanja nasional berpengaruh negatif signifikan terhadap efisiensi pengeluaran publik, dapat dijelaskan bahwa ketika terjadi peningkatan belanja daerah maka akan mengurangi efisiensi pengeluaran publik. Rasio belanja modal yang diukur dari

total belanja modal terhadap belanja daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap efisiensi pengeluaran publik, dapat dijelaskan bahwa ketika terjadi peningkatan belanja modal maka akan mengurangi efisiensi pengeluaran. Rasio belanja operasional yang diukur dari total belanja operasional terhadap belanja daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap efisiensi pengeluaran publik, dapat dijelaskan bahwa ketika terjadi peningkatan belanja operasional maka akan mengurangi efisiensi pengeluaran pemerintah. Hasil penelitian ini bertentangan dengan teori dimana belanja daerah merupakan indikator kemampuan daerah untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Peningkatan belanja daerah menghasilkan efisiensi yang rendah karena ada belanja sia-sia (*waste spending*) yang terlalu besar. Pemerintah daerah terlalu boros dan menghamburkan anggaran untuk pos-pos belanja yang bukan menjadi prioritas utama, seperti pos belanja pegawai, belanja perjalanan dinas dan rapat, belanja pembangunan gedung-gedung pemerintah, belanja honorarium, serta belanja pengadaan kendaraan. Berdasarkan data realisasi APBD yang diperoleh dari BPS dan Kementerian Keuangan, sebagian besar daerah di Indonesia lebih banyak meangalokasikan anggaran untuk belanja operasional daripada belanja modal. Berikut ini ditunjukkan beberapa data alokasi pada belanja kesehatan dan pendidikan pada provinsi-provinsi di Indonesia. Belanja kesehatan merupakan belanja yang dialokasikan untuk urusan kesehatan yang berhubungan langsung dengan ketersediaan sarana dan layanan kesehatan kepada masyarakat. Sedangkan, belanja pendidikan merupakan belanja yang dialokasikan untuk urusan kesehatan yang berhubungan langsung dengan ketersediaan sarana dan layanan pendidikan kepada masyarakat.

Gambar 5.38: Belanja Kesehatan di Indonesia

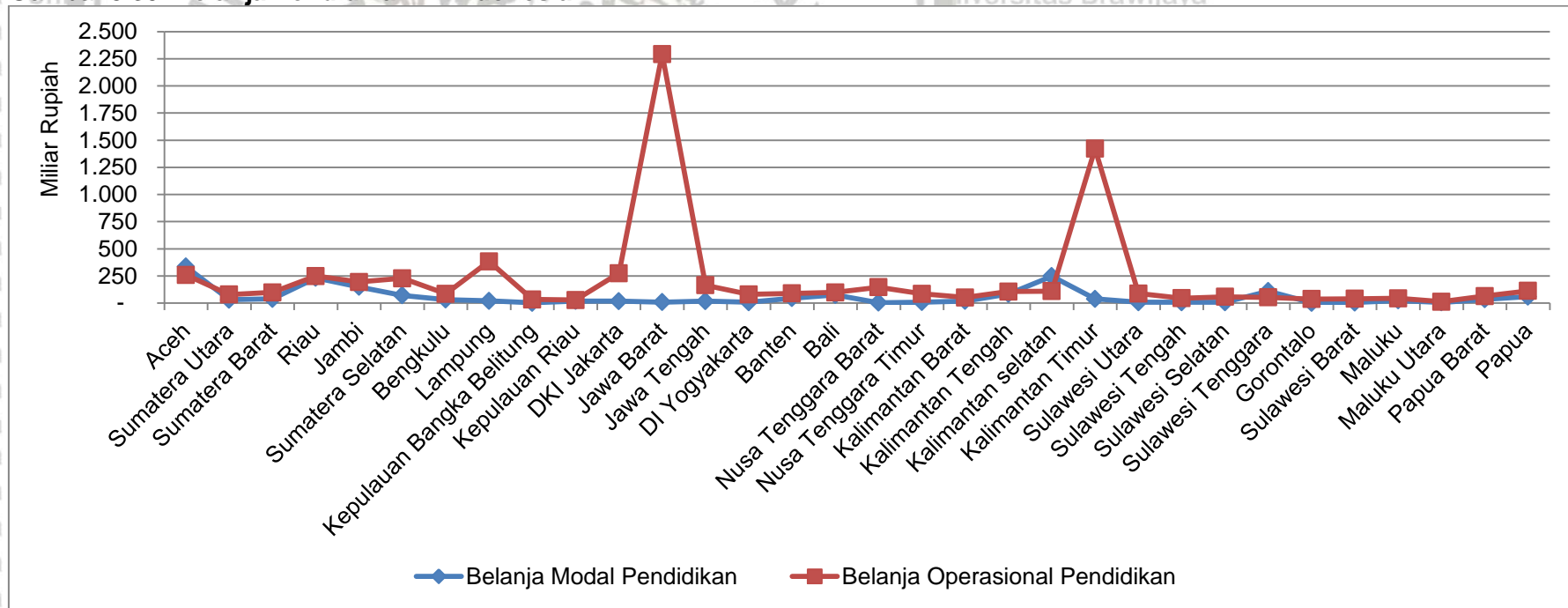


Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan

Berdasarkan gambar 5.38, menunjukkan rata-rata belanja kesehatan daerah di Indonesia tahun 2008-2015, sebagian besar daerah di Indonesia memiliki proporsi alokasi belanja operasional kesehatan lebih besar dibandingkan alokasi belanja modal, kecuali Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan NTT. Belanja modal kesehatan merupakan belanja yang berkaitan langsung dengan pelayanan

kesehatan kepada masyarakat seperti belanja untuk program peningkatan sumber daya aparatur, program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan, program pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana rumah sakit dan puskesmas, program obat dan perbekalan kesehatan, program pencegahan gizi buruk dan penyakit menular, program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak dan program pelayanan kesehatan anak balita dan lansia. Sedangkan untuk belanja operasional kesehatan merupakan belanja barang dan jasa serta belanja pegawai seperti program pengadaan sarana dan prasarana perkantoran, program pelayanan administrasi perkantoran, dan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur seperti kendaraan dinas. Dengan adanya alokasi belanja operasional kesehatan yang lebih besar dari alokasi belanja modal mengindikasikan bahwa pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk pos-pos belanja yang bukan menjadi prioritas utama. Sebagai akibatnya, pembangunan di bidang kesehatan di Indonesia masih menghadapi banyak masalah yang belum terpecahkan. Berdasarkan data profil kesehatan di Indonesia yang dipublikasi oleh Kementerian Kesehatan tahun 2015, jumlah puskesmas di seluruh provinsi di Indonesia sebanyak 8.8820 unit, dengan kondisi baik sebanyak 5.720 unit, dan kondisi rusak sedang dan rusak berat sebanyak 3.162 unit, dimana provinsi Bali terdapat 100 puskesmas yang rusak (dari total 162 unit), Kalimantan Barat terdapat 104 unit yang rusak (dari total 239 unit), Kalimantan Selatan sebanyak 100 unit yang rusak (dari total 229 unit), Sulawesi Barat sebanyak 93 unit yang rusak (dari total 146), dan Maluku sebanyak 82 unit (dari total 174 unit). Selain itu presentase gizi buruk di Indonesia pada tahun 2015 meningkat cukup tajam menjadi 6,50% dari tahun sebelumnya 2014 sebesar 3,12%, dimana provinsi dengan tingkat gizi buruk tertinggi sebagian besar berada di kawasan Indonesia Timur seperti NTT (6,80%), Kalimantan Barat (6,20%), Sulawesi Barat (5,50%), Papua (5,1%), dan Maluku (4,9%).

Gambar 5.39: Belanja Pendidikan Di Indonesia



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan

Berdasarkan gambar 5.39, menunjukkan rata-rata belanja pendidikan daerah di Indonesia tahun 2008-2015, sebagian besar daerah di Indonesia memiliki proporsi alokasi belanja operasional pendidikan lebih besar dibandingkan alokasi belanja modal. Belanja modal pendidikan adalah belanja yang berkaitan langsung dengan penyediaan layanan pendidikan kepada masyarakat seperti program pembinaan dan pengembangan pendidikan tinggi serta kualitas dan kuantitas tenaga kependidikan, program pendidikan anak usia dini,

program pendidikan dayah/pesantren, program pendidikan menengah dan non-formal, program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan. Sedangkan untuk belanja operasional pendidikan adalah merupakan belanja barang dan jasa serta belanja pegawai seperti program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan disiplin aparatur, dan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Dengan adanya alokasi belanja operasional pendidikan yang lebih besar dari alokasi belanja modal mengindikasikan bahwa pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk pos-pos belanja yang bukan menjadi prioritas utama. Sebagai akibatnya, pembangunan di bidang pendidikan di Indonesia masih menghadapi banyak masalah yang belum terpecahkan. Berdasarkan data publikasi Kementerian Keuangan, jumlah sekolah dan siswa pendidikan anak usia dini (PAUD) seluruh provinsi di Indonesia pada tahun 2015 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya 2014, akan tetapi peningkatan tersebut diikuti dengan penurunan jumlah guru di beberapa provinsi (kecuali provinsi Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan yang pada tahun 2015 mengalami peningkatan jumlah guru). Sehingga secara keseluruhan di Indonesia jumlah guru PAUD pada tahun 2015 sebanyak 355.912 jiwa, mengalami penurunan dari tahun 2014 (375.188 jiwa). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistika (BPS), presentase buta huruf di Indonesia masih cukup tinggi khususnya penduduk berusia 45+ (12,25% pada tahun 2015), sedangkan penduduk buta huruf usia 15+ dan usia 15-44 mengalami penurunan akan tetapi penurunan masih relatif kecil. Presentase buta huruf tertinggi sebagian besar terjadi di provinsi-provinsi di kawasan Indonesia Timur seperti Papua, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Kalimantan Barat, NTT, NTB sekitar 17-34%.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil studi terdahulu yang dilakukan oleh Tirtosuharto (2009) menemukan bahwa peningkatan belanja modal dan belanja operasional berpengaruh terhadap penurunan efisiensi pengeluaran publik dan peningkatan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap peningkatan efisiensi pengeluaran publik di Indonesia. Penemuan Tirtosuharto didukung oleh Herrera dan Pang (2005) menemukan bahwa peningkatan belanja pelayanan publik berpengaruh terhadap penurunan efisiensi belanja publik pada negara-negara berkembang. Liu *et al* (2016) mengemukakan bahwa ketidakkonsistenan pengeluaran dan penerimaan fiskal berpengaruh terhadap penurunan efisiensi keuangan daerah. Alfonso (2013) mengemukakan bahwa negara-negara dengan pengeluaran publik kecil memiliki nilai efisiensi yang lebih besar dari negara-negara dengan pengeluaran publik tinggi. Utomo dan Sumarno (2009) menemukan bahwa peningkatan desentralisasi pengeluaran publik berpengaruh terhadap peningkatan inefisiensi pengeluaran publik di Jawa Timur.

Dampak positif dari desentralisasi fiskal terhadap efisiensi keuangan daerah tergantung pada simetri antara pengeluaran dan pendapatan. Pemerintah daerah harus melakukan peningkatan kualitas belanja daerah. Kemampuan daerah untuk memotong atau membatasi anggaran merupakan salah satu faktor penting yang menentukan pengeluaran publik yang efisien. Berdasarkan nilai *Proportionate Movement* (PM) hasil pengujian dengan DEA sebelumnya, disarankan pemerintah untuk mengurangi inputnya yaitu belanja modal dan belanja operasional untuk mendapatkan output berupa investasi swasta dan PAD yang optimal atau dapat dikatakan untuk meningkatkan efisiensi pengeluaran publik. Beberapa alternatif yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk memotong anggaran adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah dapat mengurangi beberapa pos belanja yang tidak menjadi prioritas utama seperti pos belanja pegawai, belanja perjalanan dinas dan rapat, belanja pembangunan gedung-gedung pemerintah, belanja honorarium, serta belanja pengadaan kendaraan.
- b. Pemerintah daerah dapat menerapkan program yang dapat mengurangi belanja seperti meningkatkan efisiensi dan memanfaatkan teknologi untuk mengotomatisasi layanan publik tertentu.

5.4.2.2 Peningkatan Penerimaan Daerah Berpengaruh Terhadap Peningkatan Efisiensi Belanja Pengeluaran Publik

Berdasarkan hasil pengujian dari regresi data panel menunjukkan bahwa rasio kemandirian penerimaan yang diukur dari pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh positif signifikan terhadap efisiensi pengeluaran publik, dapat diartikan bahwa ketika terjadi peningkatan PAD maka akan meningkatkan efisiensi pengeluaran publik. Hasil penelitian sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Musgrave (1959) dan Oates (1993) desentralisasi fiskal mampu meningkatkan efisiensi pemerintah dalam menyediakan barang dan layanan publik. Utomo dan Sumarno, (2009) juga berpendapat bahwa desentralisasi fiskal merupakan salah satu cara untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi ekonomi sehingga berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian ini, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tirtosuharto (2009), menumakan bahwa peningkatan PAD berpengaruh terhadap peningkatan efisiensi pengeluaran daerah. Daerah-daerah yang tidak tergantung pada dana transfer pemerintah pusat seperti provinsi Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, dan beberapa daerah lainnya di Pulau Jawa dan Sumatera, memiliki kemampuan untuk menghasilkan pendapatan sendiri, sehingga dapat mengelola pengeluaran publik secara efisien.

Peningkatan PAD dapat meningkatkan efisiensi daerah artinya bahwa kebijakan pemerintah mengenai pemungutan pajak dan retribusi adalah tepat, dimana pajak dan retribusi daerah yang dipungut dari objek pajak tertentu langsung terkait dengan target-target pengeluarannya. Pendapatan asli daerah (PAD) yang lebih tinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggungjawab dalam menghasilkan pendapatan untuk menutupi kesenjangan fiskal dalam anggaran daerahnya. Setiyawati dan Hamzah (2007), memaparkan bahwa peningkatan PAD dapat mengoptimalkan dan meningkatkan aktivitas pada sektor yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi daerah seperti sektor industri dan perdagangan maupun sektor jasa. Menurut shah (2007), manajemen kas merupakan salah satu cara untuk mendisiplinkan keuangan publik. Manajemen kas bertujuan mendistribusikan dana pemerintah secepat mungkin, melakukan pembiayaan seefisien mungkin dan membuat penggunaan dana yang efektif sampai pada pihak yang membutuhkan untuk biaya operasional. Penggunaan dana yang efisien dan efektif dapat meningkatkan penerimaan daerah.

5.4.3 Pengaruh Langsung Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Efisiensi Pengeluaran Publik Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Penyerapan Tenaga Kerja, Kemiskinan, dan Kesejahteraan

Pada pembahasan ini akan menjelaskan pengaruh langsung dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana bagi hasil (DBH), dan efisiensi pengeluaran publik terhadap pertumbuhan ekonomi, dan pengaruh langsung pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja, kemiskinan, dan kesejahteraan, serta pengaruh langsung penyerapan tenaga kerja dan kemiskinan terhadap kesejahteraan.

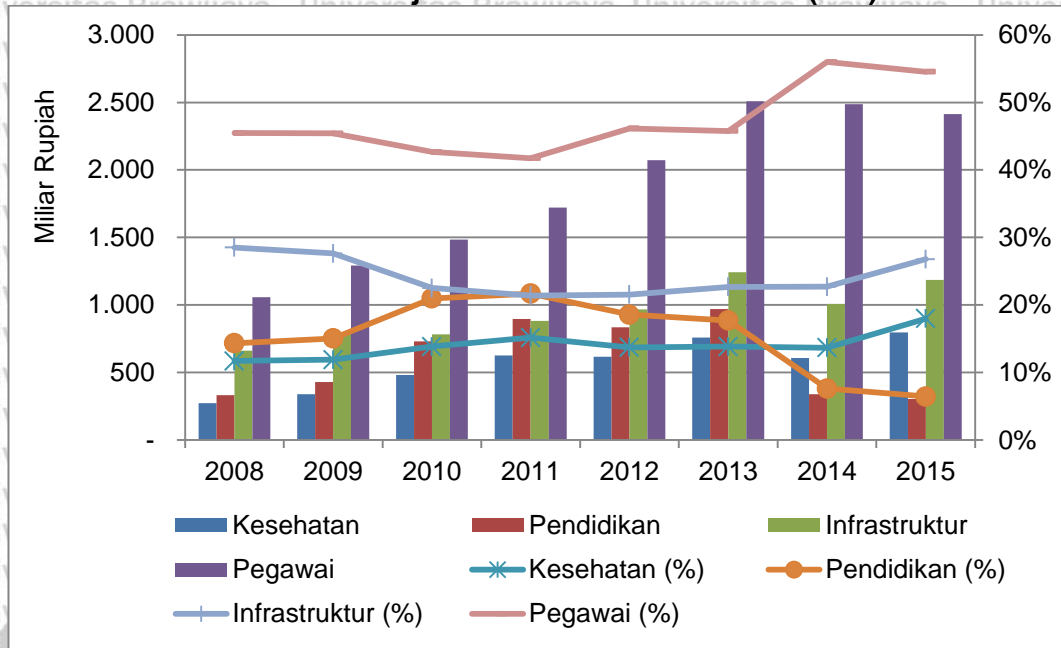
5.4.3.1 Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil pengujian pada penelitian ini ditemukan bahwa peningkatan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kawasan Indonesia Barat (KIB) dan Kawasan Indonesia Timur (KIT). Hasil penelitian ini mendukung teori federalisme fiskal bahwa adanya otonomi daerah melalui desentralisasi fiskal dapat mempercepat peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Karena DAU bersifat *block grant* maka penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerahnya untuk meningkatkan pelayanan publik. Biasanya sebagian besar DAU digunakan untuk membiayai belanja pegawai khususnya bagi daerah yang memiliki kapasitas fiskal rendah. Namun beberapa tahun terakhir ini, sebagian besar daerah telah meningkatkan penggunaan DAU pada belanja pembangunan produktif pada sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Hal ini bisa dilihat pada gambar

5.40 dan 5.41, menunjukkan bahwa realisasi belanja daerah berdasarkan urusan di Kawasan Indonesia Barat (KIB) dan Kawasan Indonesia Timur (KIT).

Gambar 5.40: Realisasi Belanja Kawasan Indonesia Barat (KIB)

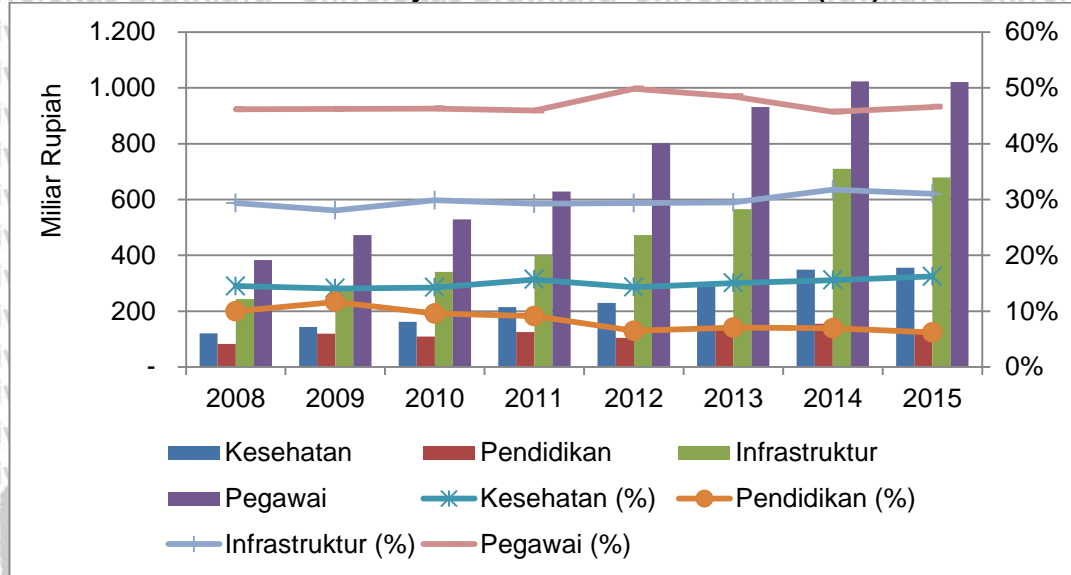


Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan

Berdasarkan pada gambar 5.40, anggaran di KIB sebagian besar dialokasikan untuk belanja pegawai sebesar 40%-55% dan pertumbuhan belanja pegawai cenderung menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2008-2015. Disisi lain, alokasi belanja modal atau produktif juga menunjukkan tren peningkatan. Pertumbuhan belanja kesehatan sebesar 12-18% dan cenderung menunjukkan peningkatan setiap tahun. Pertumbuhan belanja pendidikan di KIB mengalami penurunan pada tahun 2014-2015 menjadi 6-8% dari tahun-tahun sebelumnya yaitu diatas 15%. Pertumbuhan belanja infrastruktur di KIB mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2008-2015 yaitu sekitar 20%-30%. Alokasi belanja infrastruktur lebih besar dibandingkan dengan belanja pendidikan dan kesehatan dikarenakan beberapa tahun terakhir pemerintah fokus untuk melakukan pembangunan infrastruktur jalan dan transportasi di beberapa daerah di KIB seperti pembangunan jalan tol sumatera (JTS), pengembangan *double track* jalur kereta api Lampung-Sumsel, pembangunan pelabuhan di Sumatera, pembangunana jaringan infrastruktur gas bumi di Sumatera, pembangunan

infrastruktur sebagai persiapan penyelenggaraan POV XIX/2016 di provinsi Jawa Barat, dan proyek pembangunan Jalan Tol Trans Jawa.

Gambar 5.41: Realisasi Belanja Kawasan Indonesia Timur (KIT)



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI

Berdasarkan gambar 5.41, anggaran di KIT sebagian besar dialokasikan untuk belanja pegawai sebesar 40%-50% dan pertumbuhan belanja pegawai cenderung menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2008-2015. Disisi lain, alokasi belanja modal atau produktif di KIT juga menunjukkan tren peningkatan. Pertumbuhan belanja kesehatan sebesar 15% dan cenderung menunjukkan peningkatan setiap tahun. Pertumbuhan belanja pendidikan sebesar 7%-12% dan cenderung menunjukkan peningkatan setiap tahun. Pertumbuhan belanja infrastruktur mengalami peningkatan dari tahun 2008-2015 yaitu sebesar 30%. Alokasi belanja infrastruktur lebih besar dibandingkan dengan belanja pendidikan dan kesehatan dikarenakan beberapa tahun terakhir pemerintah fokus untuk melakukan pembangunan infrastruktur jalan dan transportasi di beberapa daerah di KIT seperti pembangunan 320 bandara di Papua dan Papua Barat, pembangunan Jayapura *ring road* dan jembatan Holtekamp ke perbatasan RI, pelebaran jalan Jayapura-Sentani. Pembangunan pelabuhan dan bandara,

pemasangan jaringan listrik, dan pembangunan jalan 21,475 km di Provinsi NTT.

Pembangunan waduk dan irigasi di Sulawesi Utara

Peningkatan alokasi pada belanja produktif khususnya infrastruktur di Kawasan Barat dan Timur Indonesia memberikan *multiplier effect* pada peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Mardiasmo (2002:142)

mengemukakan bahwa tujuan pengalokasian DAU adalah untuk mendorong terciptanya keadilan antar wilayah, untuk meningkatkan akuntabilitas, dan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah. Dengan penggunaan DAU pada pembangunan infrastruktur menggambarkan adanya peningkatan produktivitas sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat di daerah yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian Rolando & Goncalo (2015) dan Chatterjee, *et al* (2018), yang menemukan bahwa peningkatan belanja produktif (investasi publik) pada pembangunan infrastruktur berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi karena mampu menjadi daya tarik investor untuk melakukan investasi. Feiveson (2015), juga menemukan bahwa penggunaan DAU (*general revenue sharing*) pada pelayanan publik berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak sehingga berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat. Hasil penelitian ini juga mendukung studi Tirtosuharto (2009), Mawarni dkk (2013), Tajuddin *et al* (2014), Ingtyas (2016), Yushkov (2015), Maharajabdin *et al* (2015), Anwar dkk (2016), dan Jolianis (2016) yang menemukan bahwa peningkatan DAU berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dikarenakan penggunaan DAU dialokasikan pada proyek-proyek pembangunan yang produktif. Zhenfa (2016), Neyapti (2005), Blochliger dan Egert (2013), Thieben (2003) menemukan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap

peningkatan pertumbuhan ekonomi. Namun hasil penelitian berbeda dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Setiyawati dan Hamzah (2007), Pujiati (2007), Santosa (2013), Fadli (2014), Sasana (2015), Soejoto *et al* (2015) Kresnandra (2016), dan Muti'ah (2017) yang menemukan bahwa peningkatan DAU berpengaruh terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi dikarenakan penggunaan DAU yang lebih besar untuk membiayai belanja pegawai daripada belanja produktif. Zhang dan Zou (1998), Yang (2016), Maria (2011), dan Martinez Vazquez and Mc Nab (2003) yang menemukan bahwa desentralisasi fiskal tidak berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi.

5.4.3.2 Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil pengujian pada penelitian ini menemukan bahwa peningkatan dana alokasi khusus (DAK) berpengaruh terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi di Kawasan Indonesia Barat (KIB) dan Kawasan Indonesia Timur (KIT). Hasil penelitian ini berlawanan dengan teori yang dikemukakan oleh para ahli ekonomi bahwa desentralisasi fiskal akan memberikan dampak positif pada peningkatan pertumbuhan ekonomi.

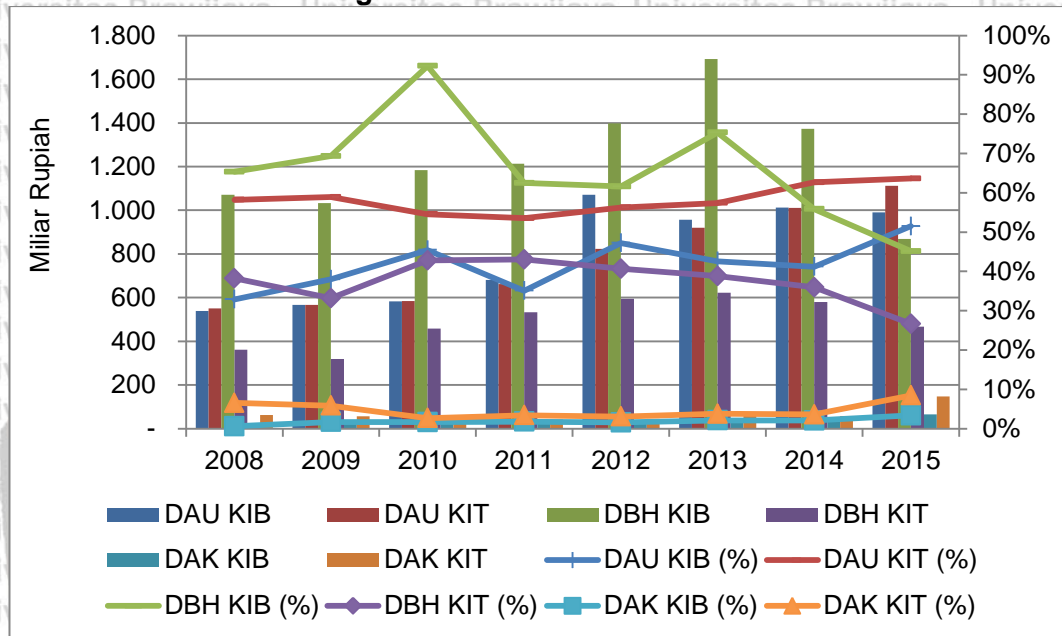
Penggunaan DAK bertujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional antara lain pendidikan, kesehatan, infrastruktur (jalan, irigasi, air minum, sanitasi), pertanian, perdagangan, sarana dan prasarana pemerintahan desa serta sarana dan prasarana kawasan perbatasan. Karena alokasi DAK disesuaikan dengan prioritas nasional menyebabkan penerimaan DAK di setiap daerah berbeda-beda.

Menurut Handra, dkk (2008) dan Qibthiyah, dkk (2009) menyatakan bahwa salah satu penyebab dana DAK tidak memiliki dampak pada pembangunan ekonomi dikarenakan pertumbuhan DAK di beberapa daerah masih lambat. Hal ini bisa dilihat dari pada gambar 5.42 yang menunjukkan perkembangan alokasi

DAK dan perbandingan dengan DAU dan DBH di Kawasan Indonesia Barat (KIB)

dan Kawasan Indonesia Timur (KIT). Perkembangan dana alokasi khusus di KIB dan KIT masih sangat rendah jika dibandingkan dengan DAU dan DBH. Pertumbuhan DAK hanya sekitar 3-7% dari total dana perimbangan.

Gambar 5.42: Perkembangan Dana Alokasi Khusus KIB dan KIT



Sumber: Badan Pusat Statistika

Menurut Handra, dkk (2008), Qibthiyah, dkk (2009), Usman, dkk (2008) mengemukakan bahwa DAK dianggarkan secara tahunan menyebabkan tidak efektifnya pencapaian tujuan DAK karena proyek fisik memerlukan waktu penyelesaian lebih dari satu tahun anggaran sehingga dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi tidak begitu signifikan dalam jangka pendek. Sebagai contoh, dengan penentuan DAK tahunan, maka program yang ditetapkan daerah bisa terputus jika tahun berikutnya tidak turun DAK bersangkutan ke daerah tersebut.

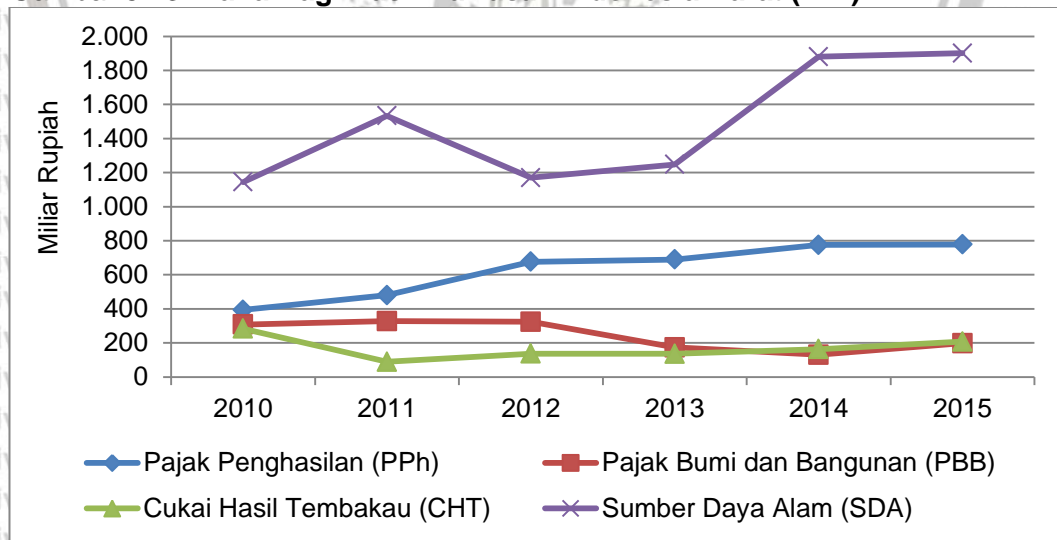
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Kresnandra (2016), Setiyawati dan Hamzah (2007), Tajuddin *et al* (2014), Sasana (2015), Soejoto *et al* (2015), Jolianis (2016), Anwar dkk (2016), dan Muti'ah (2017) menemukan bahwa peningkatan DAK berpengaruh terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Namun hasil penelitian ini berbeda dengan studi terdahulu

yang dilakukan Tirtosuharto (2009), Santosa (2013), Fadli (2014), Yushkov (2015), Maharajabdin *et al* (2015), dan Ingtyas (2016) menemukan bahwa peningkatan DAK berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

5.4.3.3 Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil penelitian ini juga ditemukan bahwa peningkatan dana bagi hasil (DBH) berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di kawasan Indonesia Barat (KIB) dan Kawasan Indonesia Timur (KIT). Tujuan pengalokasian DBH untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. DBH bersumber dari dana bagi hasil pajak (pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, dan cukai hasil tembakau) dan sumber daya alam (kehutanan, mineral dan batu bara, minyak bumi dan gas bumi, perusahaan panas bumi dan perikanan).

Gambar 5.43: Dana Bagi Hasil Kawasan Indonesia Barat (KIB)



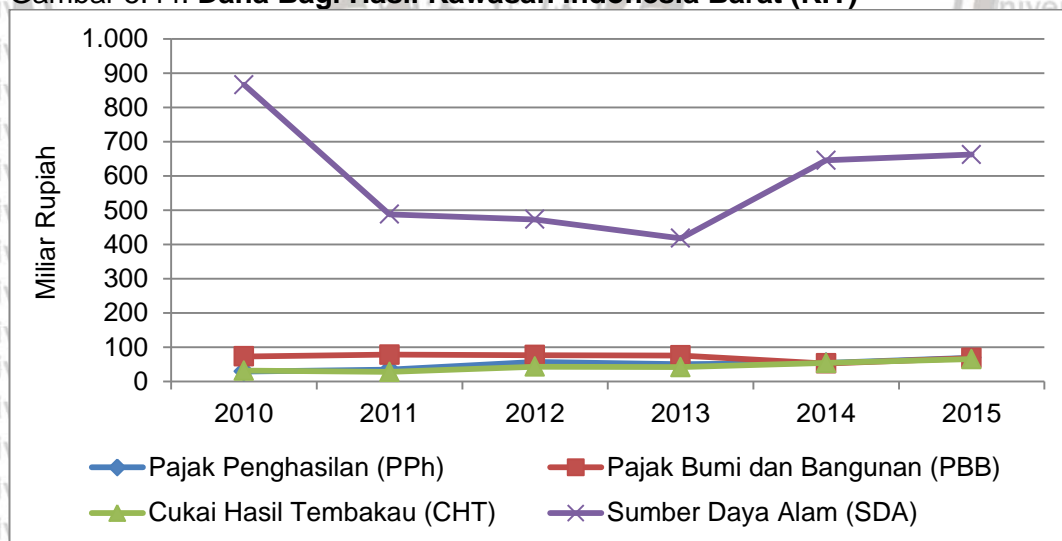
Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Kementerian Keuangan

Karena DBH bersifat *block grant* maka penggunaan DBH hampir sama dengan penggunaan DAU yaitu diserahkan kepada masing-masing daerah penghasil, kecuali DBH cukai hasil tembakau yang paling sedikit 50% digunakan untuk meningkatkan kualitas bahan baku, pembinaan lingkungan sosial,



sosialisasi tentang ketentuan cukai serta pemberantasan barang kena cukai ilegal. Oleh karena itu, pemerintah daerah mengalokasikan DBH pada pembangunan infrastruktur yang akan memberikan *multiplier effect* pada peningkatan penerimaan pajak sehingga berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan pada gambar 5.43 dan 5.44 menunjukkan bahwa penerimaan pajak penghasilan (PPh) dan pajak bumi dan bangunan di kawasan Indonesia Barat (KIB) dan kawasan Indonesia Barat (KIT) pada tahun 2014-2015 mengalami peningkatan. Peningkatan penerimaan pajak dikarenakan selama periode tahun 2014 sampai dengan 2015 pemerintah daerah fokus untuk melakukan investasi pembangunan baik di kawasan barat dan timur Indonesia, sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan daerah, yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Gambar 5.44: Dana Bagi Hasil Kawasan Indonesia Barat (KIT)

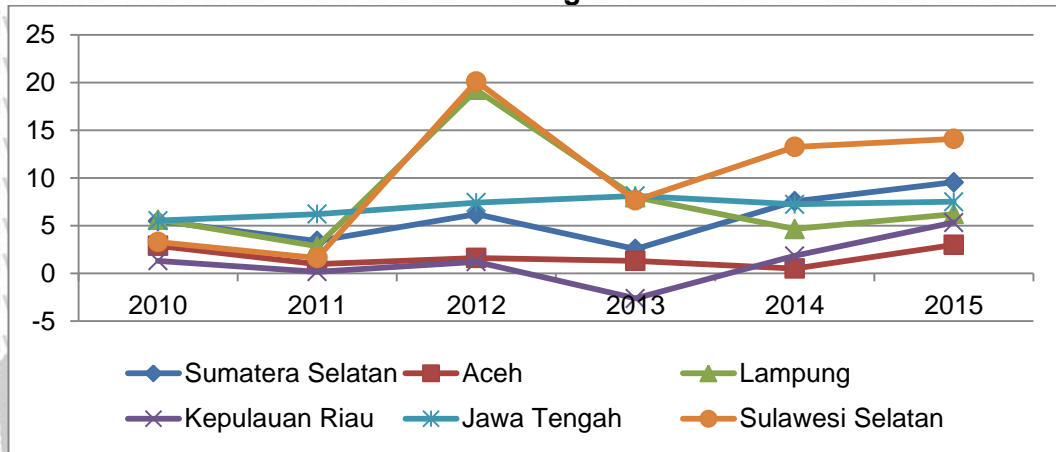


Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Kementerian Keuangan

Selain itu juga penggunaan 50% DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) untuk meningkatkan kualitas bahan baku (tembakau) dinilai mampu mendorong peningkatan produktivitas pengolahan. Peningkatan produktivitas memberikan dampak positif pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Hal ini bisa dilihat pada gambar 5.45 dibawah yang menunjukkan bahwa terjadi peningkatan

pertumbuhan ekonomi pada industri pengolahan tembakau di beberapa provinsi di Indonesia yang memiliki sumber daya tembakau yang cukup besar antara lain provinsi Sumatera Selatan, Aceh, Lampung, Kepulauan Riau, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan pada tahun 2014-2015.

Gambar 5.45: **Pertumbuhan Industri Pengolahan Tembakau**



Sumber: Badan Pusat Statistika (data diolah)

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Tritosuharto (2009), Pujiati (2007), Yushkov (2015), Santosa (2013), Maharajabdin *et al* (2015), dan Muti'ah (2017) yang menemukan bahwa peningkatan DBH berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dikarenakan penggunaan DBH dialokasikan untuk investasi pembangunan yang produktif. Delfin, *et al* (2016) menemukan bahwa dana bagi hasil dari sektor pertambangan berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di Niger. Zhenfa (2016), Neyapti (2005), Blochliger dan Egert (2013), Thieben (2003) menemukan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. Namun hasil penelitian berbeda dengan studi terdahulu yang dilakukan oleh Kresnandra (2016), Ingtyas (2016), Soejoto *et al* (2015), Fadli (2014), Sasana (2015) dan Tajuddin *et al* (2014), yang menemukan bahwa peningkatan DBH tidak berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dikarenakan penggunaan DBH yang lebih besar untuk membiayai belanja yang tidak produktif

seperti pegawai serta belanja barang dan jasa. Zhang dan Zou (1998), Yang (2016), Maria (2011), dan Martinez Vazquez and Mc Nab (2003) yang menemukan bahwa desentralisasi fiskal tidak berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi.

5.4.3.4 Pengaruh Efisiensi Pengeluaran Publik Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa peningkatan efisiensi pengeluaran publik berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi baik di kawasan Indonesia Barat (KIB) dan Kawasan Indonesia Timur (KIT). Hasil penelitian sesuai dengan konsep *value for money* yang salah satu pointnya menekankan pengelolaan anggaran harus bersifat efektif dan didukung oleh teori desentralisasi yang salah satu tujuannya adalah meningkatkan akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi dalam rangka peningkatan kinerja daerah. Bahl dan Linn (1992) mengemukakan bahwa desentralisasi fiskal akan meningkatkan efisiensi ekonomi, sehingga penyerahan sebagian besar kewenangan pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi layanan publik dan pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi regional dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Dari hasil penelitian DEA sebelumnya juga ditemukan bahwa beberapa provinsi telah melakukan pengeluaran publiknya secara efisien antara lain Jakarta, Jawa Barat, Banten, Bali, Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Bali, NTB, Gorontalo, Maluku Utara, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Bengkulu, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Suawesi Selatan, dan Suawesi Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa provinsi-provinsi tersebut telah mengalokasikan belanja daerahnya baik belanja modal dan belanja operasional pada program-program pembangunan yang memberikan *multiplier effect* pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan investasi swasta di daerah. Peningkatan pendapatan

daerah dan investasi daerah akan berdampak positif pada peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian ini mendukung dengan studi yang dilakukan Hamzah (2008), Prakoso (2016) dan Hay (2017) menemukan bahwa peningkatan efisiensi pengeluaran publik berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan peningkatan efisiensi sektor publik mampu menambah alokasi dana pemerintah daerah yang dialihkan untuk mendorong sektor-sektor strategis bagi pembangunan produktif, sehingga efisiensi tersebut berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Khusaini (2016), peningkatan belanja sektor publik cenderung meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui indikator pembangunan ekonomi lokal di bidang pendidikan dan kesehatan, tetapi tidak melalui indikator pembangunan lokal di bidang infrastruktur. Namun hasil penelitian berbeda dengan studi sebelumnya yang dilakukan oleh Tirtosuharto (2009), Astuti (2015), Chusnah (2014), dan Utomo dan Sumarsono (2009) yang menemukan bahwa peningkatan efisiensi pengeluaran publik berpengaruh terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dikarenakan masih banyak provinsi di daerah yang belum melaksanakan pengeluaran publiknya secara efisien.

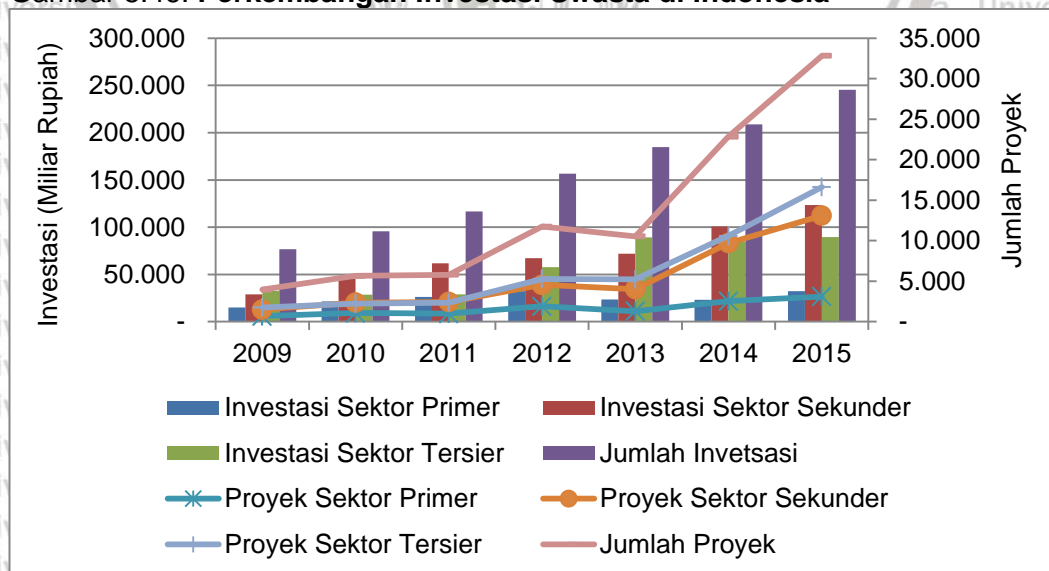
5.4.3.5 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Berdasarkan pada penelitian ini menemukan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja baik di Kawasan Indonesia Barat (KIB) dan Kawasan Indonesia Timur (KIT). Peningkatan pertumbuhan ekonomi mengindikasikan adanya peningkatan output, sehingga untuk memaksimalkan keuntungannya (*profit*) maka perusahaan akan memperluas penggunaan tenaga kerja, akibatnya permintaan tenaga kerja meningkat. Berdasarkan *grand* teori Solow Swan (1946),

mengemukakan bahwa investasi tidak hanya menciptakan permintaan, tetapi juga memperbesar kapasitas produksi. Kapasitas yang produksi yang membesar membutuhkan permintaan yang lebih besar pula agar produksi tidak menurun.

Beberapa tahun terakhir ini sebagian besar daerah di KIB dan KIT fokus untuk pembangunan infrastruktur melalui investasi publik (pemerintah) maupun investasi swasta seperti pembangunan dan pengembangan jalan tol, *double track* jalur kereta api, pelabuhan, dermaga, bandara, Waduk, dan Irigasi di pulau Sumatera, Aceh, Kalimantan, Papua dan Pulau Jawa. Peningkatan investasi publik pada pembangunan infrastruktur ditunjukkan dengan adanya peningkatan penggunaan dana perimbangan pada pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur juga didorong oleh peningkatan investasi swasta. Hal ini bisa dilihat pada gamabr 5.46 bahwa pertumbuhan investasi swasta pada sektor primer (pertanian dan pertambangan), sektor sekunder (industri pengolahan) dan sektor tersier (konstruksi, sektor transportasi, gudang, dan komunikasi) terus mengalami peningkatan dari tahun 2009-2015.

Gambar 5.46: Perkembangan Investasi Swasta di Indonesia



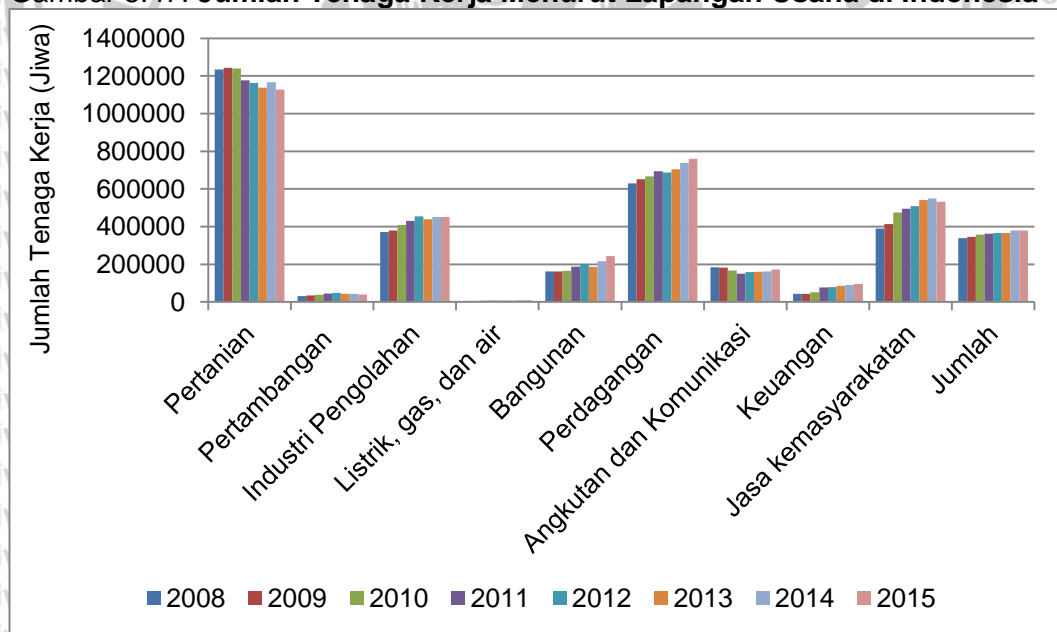
Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal (data diolah)

Dengan adanya peningkatan investasi pembangunan infrastruktur mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi sehingga berpengaruh terhadap



peningkatan permintaan tenaga kerja. Hal ini dapat dilihat pada gambar 5.47 bahwa adanya peningkatan penyerapan tenaga kerja pada lapangan usaha antara lain sektor bangunan, perdagangan, angkutan, pergudangan dan komunikasi selama tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. Peningkatan penyerapan tenaga kerja pada sektor bangunan, perdagangan, angkutan, pergudangan dan komunikasi merupakan dampak dari peningkatan investasi pembangunan infrastruktur transportasi di Kawasan Indonesia Barat (KIB) dan Kawasan Indonesia Timur (KIT). Peningkatan permintaan tenaga kerja menunjukkan bahwa investasi yang dilakukan oleh pemerintah (publik) maupun swasta di beberapa daerah di Indonesia merupakan investasi padat karya yang mampu menyerap banyak tenaga kerja.

Gambar 5.47: Jumlah Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha di Indonesia



Sumber: Kementerian Ketenagakerjaan, 2018 (diolah)

Hasil penelitian ini mendukung studi terdahulu yang dilakukan oleh Sasana (2009), Suwandi (2011), Miar (2014), Indradewa & Ketut (2015) dan Astuti (2015) yang menemukan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja di Indonesia dikarenakan adanya peningkatan investasi padat karya yang menyerap

pertumbuhan tenaga kerja. Namun hasil penelitian berbeda dengan penelitian Tajuddin *et al* (2014), Herman (2011) dan Kurniasih (2017), menemukan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja di Indonesia dikarenakan sebagian besar tenaga kerja terserap di sektor primer (pertanian) sehingga bahwa perubahan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang cukup kecil terhadap perubahan tenaga kerja khususnya sektor pertanian, selain itu negara-negara berkembang seperti Indonesia kemungkinan akan mengalami pertumbuhan angkatan kerja yang lebih cepat daripada pertumbuhan kesempatan kerja.

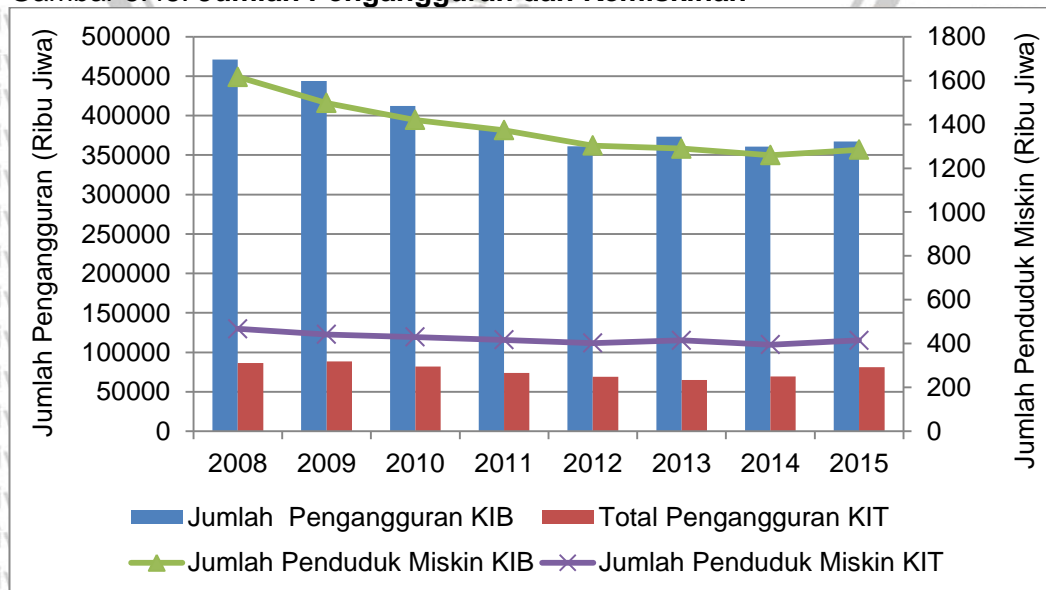
5.4.3.6 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan

Pada penelitian ini menemukan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap peningkatan kemiskinan di Kawasan Indonesia Barat (KIB) dan Kawasan Indonesia Timur (KIT). Dalam model pertumbuhan Solow dijelaskan bahwa pertumbuhan populasi yang tinggi akan mengurangi output pekerja karena jumlah pekerja yang sangat cepat akan membuat persediaan modal dibagi lebih banyak. Hal ini menyebabkan pada kondisi mapan (*steady state*), setiap pekerja di lengkapi dengan modal yang lebih sedikit. Akibatnya peningkatan output yang tercipta juga tidak akan sebanding dengan peningkatan jumlah pekerja (*Law of Diminishing Return*). Pada akhirnya tingkat upah akan mengalami penurunan yang mengakibatkan semakin banyak masyarakat yang jatuh miskin.

Peningkatan kemiskinan dikarenakan adanya penurunan penyerapan tenaga kerja di sektor *tradable* yaitu sektor yang dapat menghasilkan devisa (baik dari jasa maupun barang) dan dapat meningkatkan standar hidup seperti pertanian, pertambangan dan penggalian serta jasa kemasyarakatan, dimana ketiga sektor tersebut merupakan sektor unggulan dan penyumbang PDRB (pertumbuhan ekonomi) terbesar. Penurunan penyerapan tenaga kerja

dikarenakan adanya penurunan produktivitas dari sektor-sektor sebagai dampak dari penurunan harga komoditas pertanian, penurunan harga emas dan tembaga, penurunan komoditas, pelemahan ekonomi global dan depresiasi nilai tukar rupiah. Dengan adanya penurunan pertumbuhan sektor-sektor tersebut maka sebagian besar perusahaan mengurangi inputnya yaitu tenaga kerja dan cenderung menggantikannya dengan tenaga mesin (teknologi) agar menjadi lebih efisien dan efektif. Hal ini menyebabkan sebagian besar pekerja kehilangan lapangan pekerjaannya sehingga pada akhirnya berdampak pada peningkatan jumlah pengangguran. Peningkatan pengangguran berdampak mengurangi pendapatan masyarakat, sehingga tingkat pengeluaran konsumsi masyarakat menurun. Ketika kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi dengan baik maka dampaknya mereka masuk dalam kategori penduduk miskin serta mengakibatkan meningkatnya jumlah penduduk miskin. Hal ini bisa dilihat pada gambar 5.48, bahwa peningkatan jumlah pengangguran pada tahun 2015 diikuti dengan peningkatan jumlah penduduk miskin di kawasan Indonesia Barat (KIB) dan kawasan Indonesia Barat (KIT).

Gambar 5.48: Jumlah Pengangguran dan Kemiskinan

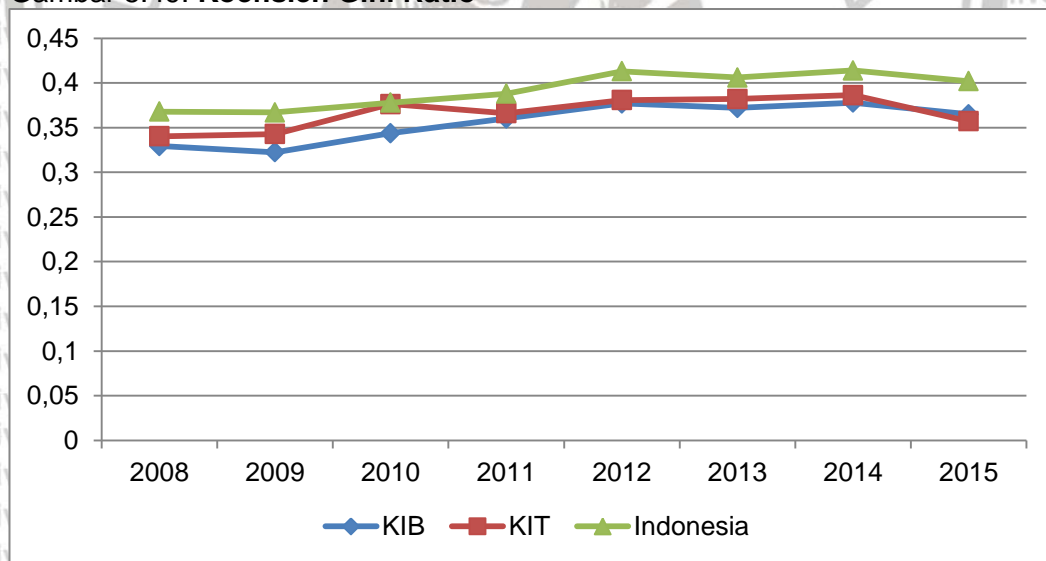


Sumber: Badan Pusat Statstika dan Kementerian Ketenagakerjaan (data diolah)



Peningkatan jumlah pengangguran menyebabkan pendapatan masyarakat semakin menurun akibatnya ketimpangan pendapatan semakin tinggi. Ketimpangan pendapatan menunjukkan adanya perbedaan jumlah pendapatan yang diterima masyarakat sehingga mengakibatkan perbedaan pendapatan yang lebih besar antar golongan dalam masyarakat tersebut, dimana yang kaya akan semakin kaya dan sebaliknya yang miskin akan semakin terpuruk. Salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara keseluruhan adalah dengan melihat nilai koefisien gini ratio. Jika nilai koefisien gini ratio mendekati nol (0) maka dapat disimpulkan bahwa distribusi pendapatan makin merata, sedangkan jika nilai koefisien gini ratio semakin mendekati satu (1) maka distribusi pendapatan semakin tidak merata.

Gambar 5.49: Koefisien Gini Ratio



Sumber: Badan Pusat Statstika (data diolah)

Berdasarkan gambar 5.49, menunjukkan bahwa nilai koefisien gini ratio di kawasan Indonesia Barat (KIB) dan kawasan Indonesia Timur (KIT) maupun nasional berada diantara 0,30 – 0,45, sehingga dapat diartikan bahwa tingkat ketimpangan distribusi pendapatannya sedang atau cukup tinggi. Walaupun tingkat ketimpangan sedang, kondisi dinilai cukup berbahaya karena dilihat dari tren pertumbuhannya kecenderungan menunjukkan adanya peningkatan dan

berpotensi untuk mendekati nilai 0,5, dimana jika nilai koefisien gini ratio sebesar 0,5 maka dapat dapat diartikan tingkat ketimpangannya tinggi. Semakin tinggi ketimpangan pendapatan masyarakat maka akan semakin sulit untuk memerangi peningkatan jumlah penduduk miskin.

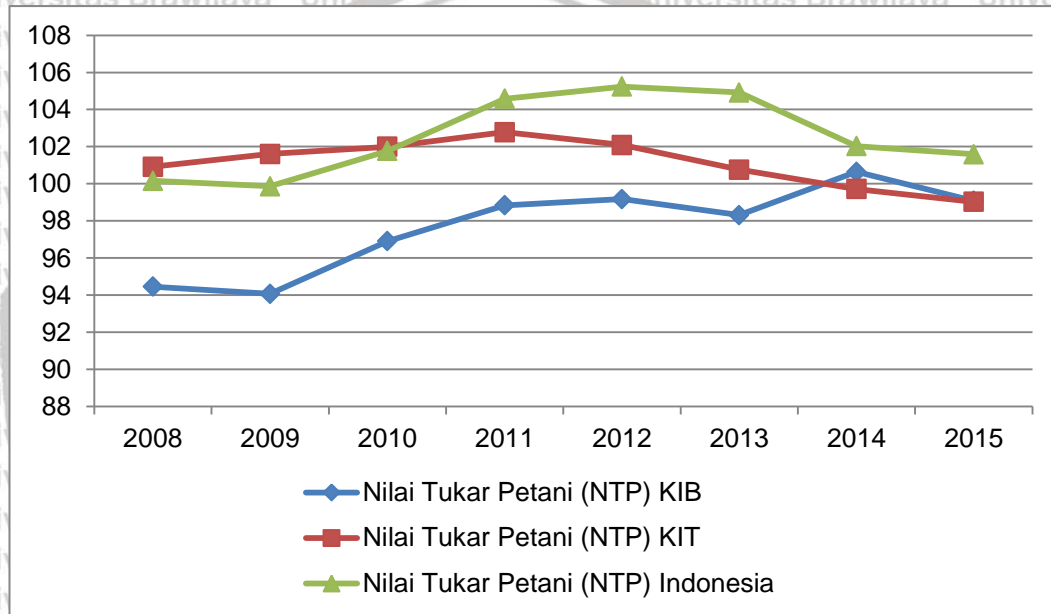
Hasil penelitian ini mendukung penelitian Ferreira *et al* (2010), Iniquez-Montiel (2014), Soejoto *et al* (2015), Astuti (2015), Chen Jiandong (2016), Anwar dkk (2016), dan Purnama (2017) yang menemukan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap peningkatan kemiskinan dikarenakan adanya peningkatan jumlah pengangguran dan ketimpangan pendapatan yang masih tinggi. Namun hasil penelitian ini berbeda dengan studi terdahulu yang dilakukan oleh Siregar dkk (2008), Sasana (2009), Suwandi (2011), dan Lucky (2013) yang menemukan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan.

5.4.3.7 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan

Pada penelitian ini menemukan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap penurunan kesejahteraan di Kawasan Indonesia Barat (KIB) dan Kawasan Indonesia Timur (KIT). Hasil penelitian ini bertentangan dengan teori pembangunan ekonomi yang dikemukakan para ahli ekonom yaitu pertumbuhan ekonomi merupakan motor penggerak terciptanya kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pertumbuhan ekonomi berdampak pada penurunan kesejahteraan masyarakat dikarenakan adanya penurunan pertumbuhan sektor-sektor pertanian, pertambangan dan pengalihan, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan dan sektor jasa kemasyarakatan, dimana sektor-sektor tersebut merupakan sektor unggulan karena banyak menyerap tenaga kerja baik di KIB maupun KIT. Sebagian besar penduduk di Indonesia sangat tergantung pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Hal ini bisa dilihat dengan banyaknya tenaga kerja yang terserap di sektor pertanian. Oleh karena itu

dengan adanya penurunan pertumbuhan sektor pertanian pada beberapa tahun terakhir ini dikarenakan adanya gagal panen dan penurunan harga komoditas pertanian menyebabkan nilai tukar petani (NTP) menurun. Penurunan NTP akan sangat berpengaruh terhadap terhadap kesejahteraan masyarakat khususnya petani.

Gambar 5.50: Nilai Tukar Petani di Indonesia



Sumber: Badan Pusat Statistika (data diolah)

Berdasarkan gambar 5.50 menunjukkan bahwa nilai tukar petani (NTP) di Kawasan Indonesia Barat (KIB) pada tahun 2015 mengalami penurunan, sedangkan Kawasan Indonesia Timur (KIT) dari tahun 2011-2015 terus mengalami penurunan, dan secara nasional NTP mengalami penurunan sejak tahun 2013-2015. Penurunan nilai tukar petani (NTP) mempengaruhi penurunan pendapatan masyarakat yang berdampak pada penurunan daya beli masyarakat, pada akhirnya akan menurunkan kesejahteraan masyarakat.

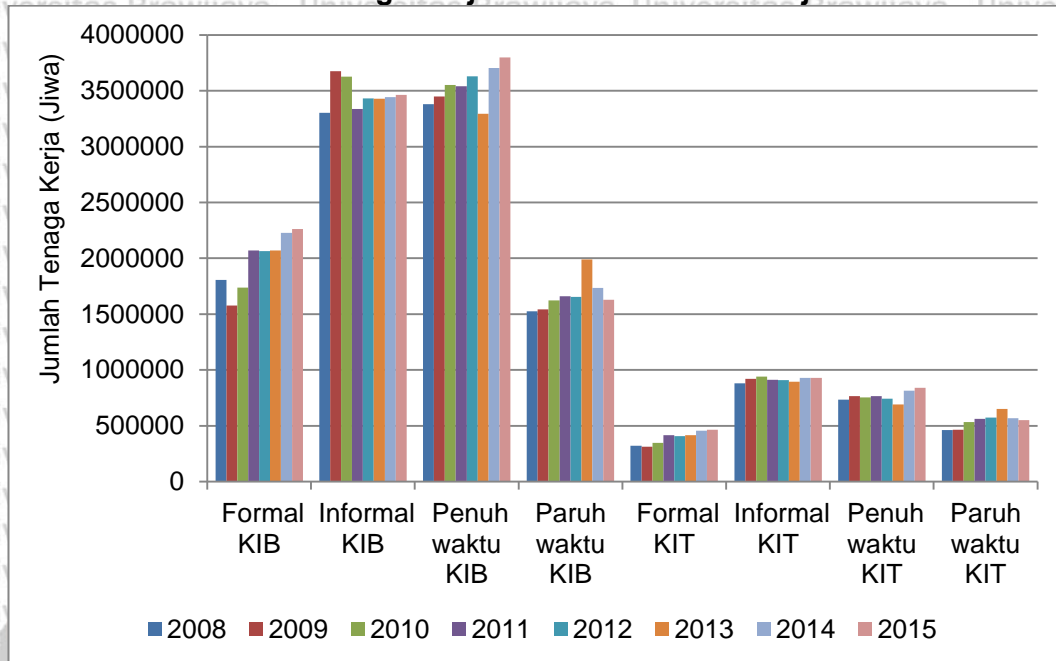
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Meng-Yi *et al* (2016), Prettner dan Werner (2016), Kurniasih (2017), dan Benfica *et al* (2018) menemukan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap penurunan kesejahteraan masyarakat dikarenakan oleh beberapa faktor yaitu

kurangnya investasi pada sektor pertanian sehingga berdampak pada penurunan produktivitas yang pada akhirnya berpengaruh terhadap penurunan pendapatan dan daya beli masyarakat, peningkatan investasi publik dalam jangka pendek berpengaruh terhadap peningkatan pajak yang akan berdampak pada pengurangan penggunaan faktor produksi sehingga produktivitas menurun dan mengakibatkan kesejahteraan juga menurun, dan adanya perbedaan dalam hal percepatan perubahan masing-masing indikator dalam indeks pembangunan manusia (IPM) seperti indikator pengeluaran riil per kapita yang paling mudah berubah, sementara indikator lainnya seperti harapan hidup, angka melek huruf, dan tahun sekolah membutuhkan waktu yang lebih lama untuk meningkatkan nilainya. Namun hasil penelitian ini berbeda penelitian Sasana (2009), Suwandi (2011), Miar (2014) dan Soejoto *et al* (2015) yang menemukan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan.

5.4.3.8 Pengaruh Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Kesejahteraan

Berdasarkan hasil pada penelitian ditemukan bahwa peningkatan penyerapan tenaga kerja berpengaruh terhadap penurunan kesejahteraan di Kawasan Indonesia Barat (KIB), namun tidak berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan di Kawasan Indonesia Timur (KIT). Hal ini dikarenakan sebagian besar tenaga kerja yang terserap bekerja di sektor informal sebagai tenaga produksi operator alat-alat angkutan dan pekerja kasar, buruh pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan, serta buruh pertambangan dan penggalian.

Gambar 5.51: Jumlah Tenaga Kerja Menurut Status Pekerja Utama



Sumber: Kementerian Ketenagakerjaan, 2018 (diolah)

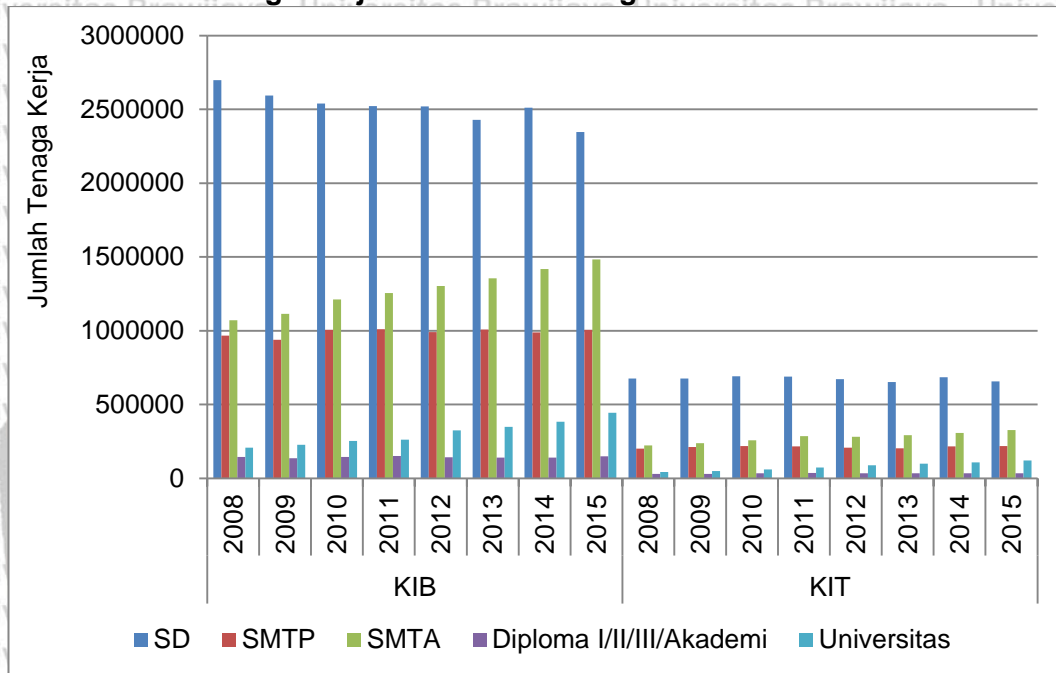
Berdasarkan pada gambar 5.51 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kerja di kawasan Indonesia Barat (KIB) dan kawasan Indonesia Timur (KIT) bekerja di sektor informal dan pertumbuhan tenaga kerja sektor informal menunjukkan adanya tren peningkatan. Dan jika dilihat dari jumlah jam kerjanya setengah dari pekerja tersebut adalah pekerja paruh waktu dimana mereka memiliki jam kerja kurang dari 35 jam kerja dalam seminggu atau dapat dikatakan sebagai setengah pengangguran. Kondisi ini semakin mempersulit untuk menekan pertumbuhan tingkat pengangguran di Indonesia.

Banyaknya tenaga kerja yang terserap di sektor informal dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia (SDM) dari tenaga kerja itu sendiri. Tingkat pendidikan dari tenaga kerja akan menentukan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor informal dikarenakan permintaan kualifikasi pekerja di sektor informal masih rendah atau tidak terlalu sulit. Hal ini bisa dilihat pada gambar 5.52, bahwa sebagian besar tenaga kerja yang terserap di KIB dan KIT memiliki tingkat pendidikan pendidikan SD, SMP

dan SMA sehingga dapat dikatakan bahwa mutu tenaga kerjanya masih rendah.

Sedangkan pekerja dengan tingkat pendidikan dan mutu tinggi yaitu lulusan diploma dan universitas masih sangat rendah.

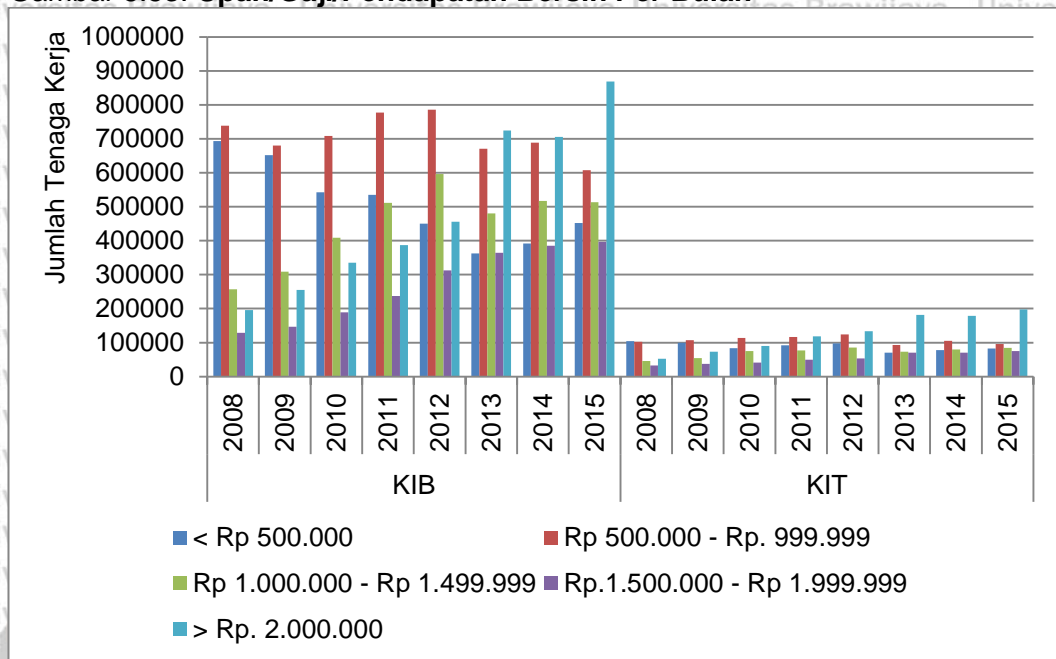
Gambar 5.52: **Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan**



Sumber: Kementerian Ketenagakerjaan, 2018 (diolah)

Dikarenakan sebagian besar tenaga kerja yang terserap di KIB dan KIT memiliki tingkat pendidikan rendah (SD, SMP, dan SMA) maka dapat dikatakan bahwa kualitas SDM tenaga kerja masih rendah, sehingga berpengaruh terhadap penurunan produktivitas tenaga kerja. Penurunan produktivitas tenaga kerja akan berpengaruh besaran tingkat upah atau pendapatan pekerja. Dimana perusahaan akan cenderung menambahkan faktor produksi baru seperti menggunakan mesin (teknologi) untuk meningkatkan output (produktivitas), hal ini akan berpengaruh terhadap kinerja dan performa tenaga kerja seperti berkurangnya jam kerja, sehingga berdampak pada penurunan upah atau pendapatan.

Gambar 5.53: Upah/Gaji/Pendapatan Bersih Per Bulan



Sumber: Kementerian Ketenagakerjaan, 2018 (diolah)

Berdasarkan pada gambar 5.53, bahwa sebagian besar pekerja di KIB dan KIT menerima upah atau pendapatan sebesar Rp.500.000 – Rp.1000.000 per bulan. Disisi lain masih banyak tenaga kerja yang menerima upah di bawah Rp.500.000/per bulan dan sejak tahun 2013 sampai dengan 2015 terus mengalami peningkatan. Dimana upah tersebut masih dibawah rata-rata upah minimum regional (UMR) di Indonesia yaitu sebesar Rp.1.155.680. Hal ini menunjukkan bahwa upah atau pendapatan masyarakat masih sangat rendah. Penerimaan upah gaji yang rendah menyebabkan daya beli masyarakat rendah. Daya beli masyarakat yang rendah menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum secara baik memenuhi kebutuhan hidupnya. Kondisi menyebabkan masyarakat susah untuk mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan layak sehingga berdampak pada penurunan kesejahteraan masyarakat.

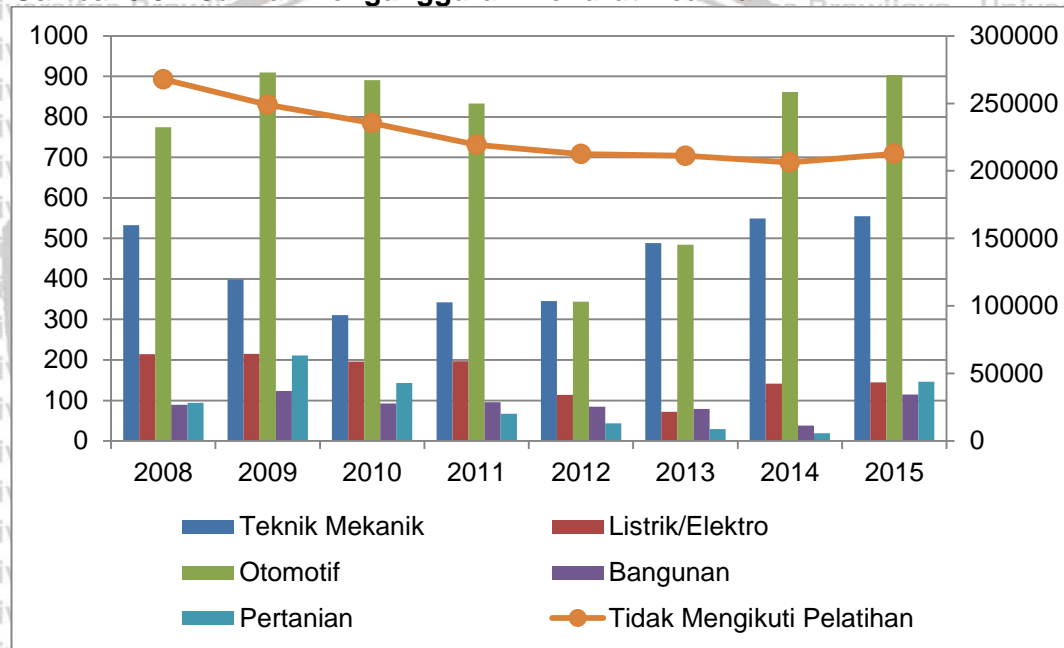
Hasil penelitian ini mendukung beberapa studi terdahulu yang dilakukan Bohringer (2003), Hogue, *et al* (2010), Sandoval, *et al* (2011) dan Madden, *et al*

(2014), mengemukakan bahwa rendahnya sumber daya manusia (*human capital*), berkurangnya jam kerja karena adanya pergantian faktor input (teknologi), dan masalah kesetaraan gender dalam dunia usaha, menyebabkan penurunan kesejahteraan masyarakat. Kim Il-Ho, *et al* (2012) dan Amy & Phillips (2018), mengemukakan bahwa kurangnya perlindungan jaminan sosial dan kesehatan terhadap tenaga kerja menyebabkan pada penurunan kesejahteraan tenaga kerja terutama tenaga kerja muda (anak-anak). Aubry, *et al* (2016) dan Cao & Mukherjee (2018) juga mengemukakan bahwa adanya migrasi global yang berdampak pada peningkatan penyerapan tenaga kerja asing sehingga berpengaruh terhadap penurunan kesejahteraan masyarakat domestik di beberapa negara OECD. Kurniasih (2017), juga menemukan bahwa peningkatan penyerapan tenaga kerja tidak berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dikarenakan sebagian besar tenaga kerja terserap di sektor primer (pertanian) dengan produktivitas yang rendah sehingga pendapatannya juga rendah, sehingga akan menurunkan daya beli masyarakat sebagai salah satu indikator kesejahteraan. (indeks pembangunan manusia/IPM). Namun hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Sasana (2009), Suwandi (2011), dan Miar (2014) menemukan bahwa peningkatan penyerapan tenaga kerja berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan.

5.4.3.9 Pengaruh Kemiskinan Terhadap Kesejahteraan

Berdasarkan hasil pada penelitian ditemukan bahwa peningkatan kemiskinan berpengaruh terhadap penurunan kesejahteraan di Kawasan Indonesia Barat (KIB) dan Kawasan Indonesia Timur (KIT). Penurunan kesejahteraan dikarenakan adanya peningkatan kemiskinan sebagai dampak dari tingkat pengangguran yang cukup masih tinggi.

Gambar 5.54: Jumlah Pengangguran Menurut Keahlian



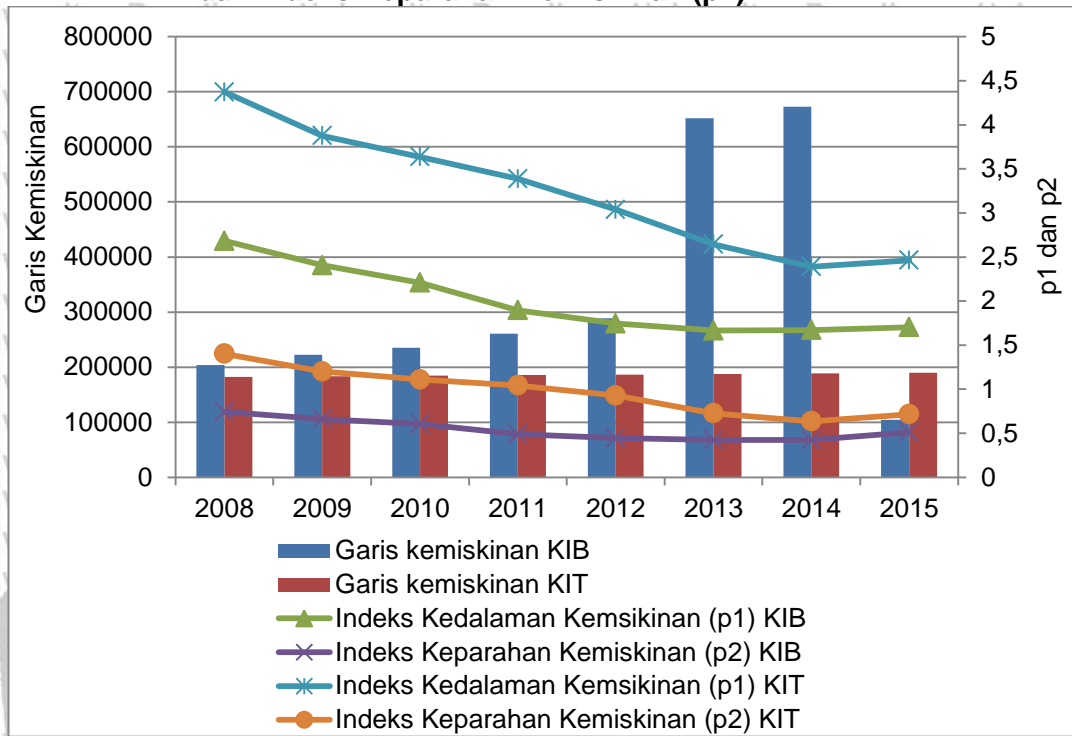
Sumber: Kementerian Ketenagakerjaan (data diolah)

Berdasarkan gambar 5.54, diketahui bahwa jumlah pengangguran berdasarkan keahlian masih cukup tinggi dan menunjukkan peningkatan.

Penyumbang terbesar terhadap peningkatan pengangguran adalah angkatan kerja yang tidak mengikuti pelatihan artinya keahlian masih sangat rendah, hal ini dikarenakan kurangnya penyediaan lapangan kerja yang sesuai dengan keahlian atau pendidikan menyebabkan munculnya fenomena dimana tenaga kerja terdidik justru mengambil lahan pekerjaan kelompok tidak terampil akibatnya pengangguran tenaga kerja tidak terampil meningkat. Pengangguran dengan keahlian teknik mekanik, otomotif dan listrik/elektro, bangunan dan pertanian juga mengalami peningkatan hal ini dikarenakan adanya penurunan produktivitas

atau pertumbuhan pada sektor otomotif dan sektor listrik dan air, sektor pertanian, dan sektor konstruksi. Peningkatan pengangguran pada berbagai pada sektor terutama pada sektor pertanian dan sektor konstruksi menjadi tantangan terbesar bagi pemerintah untuk memerangi kemiskinan, hal ini dikarenakan sebagian besar penduduk di Indonesia sangat bergantung terhadap sektor pertanian dan konstruksi. Berdasarkan survey Bank Dunia (*world bank*) mengemukakan bahwa kurangnya akses informasi mengenai lapangan pekerjaan terutama bagi kaum muda menyebabkan munculnya perusahaan *outsourcing*, hal ini dinilai sangat merugikan pekerja karena rata-rata gaji yang diterima pekerja *outsourcing* berbeda 30% (persen) dibandingkan karyawan kontrak lainnya di perusahaan yang sama, sehingga dapat menurunkan kesejahteraan. Tingkat pengangguran yang tinggi mengindikasikan penerimaan pendapatan masyarakat mengalami penurunan. Penurunan pendapatan masyarakat akan berpengaruh terhadap pola konsumsi masyarakat. Jika masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan dengan baik maka mereka akan digolongkan sebagai masyarakat miskin, hal ini yang menyebabkan jumlah penduduk miskin terus mengalami peningkatan.

Gambar 5.55: Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (p1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (p2)



Sumber: Badan Pusat Statistika (data diolah)

Berdasarkan pada gambar 5.55, menunjukkan bahwa garis kemiskinan mengalami penurunan pada tahun 2015 hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dengan baik karena adanya penurunan upah atau pendapatan karena tidak bekerja atau menganggur.

Kondisi ini yang menyebabkan peningkatan pada indeks kedalaman kemiskinan (p1) yang artinya bahwa rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin semakin jauh dari garis kemiskinan, dan peningkatan keparahan kemiskinan (p2). Peningkatan indeks kedalaman kemiskinan (p1) mengalami peningkatan yang artinya bahwa ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin meningkat. Dengan adanya peningkatan kemiskinan menyebabkan akses masyarakat untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang layak menjadi semakin sulit, sehingga berdampak pada penurunan kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan studi Borjas (2016), Khondker & Raihan (2004), Suwandi (2011), Sasana (2009), Soejoto *et al* (2015), Fording &

Berry (2007), Gao, *et al* (2015) dan Moncarz, *et al* (2018) yang menemukan bahwa peningkatan kemiskinan berpengaruh terhadap penurunan kesejahteraan dikarenakan adanya peningkatan pengangguran yang berpengaruh pada penurunan pendapatan masyarakat dan pola konsumsi masyarakat sehingga menurunkan kesejahteraan masyarakat.

5.4.4 Pengaruh Tidak Langsung Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Efisiensi Pengeluaran Publik terhadap Penyerapan Tenaga Kerja, Kemiskinan, dan Kesejahteraan Melalui Pertumbuhan Ekonomi

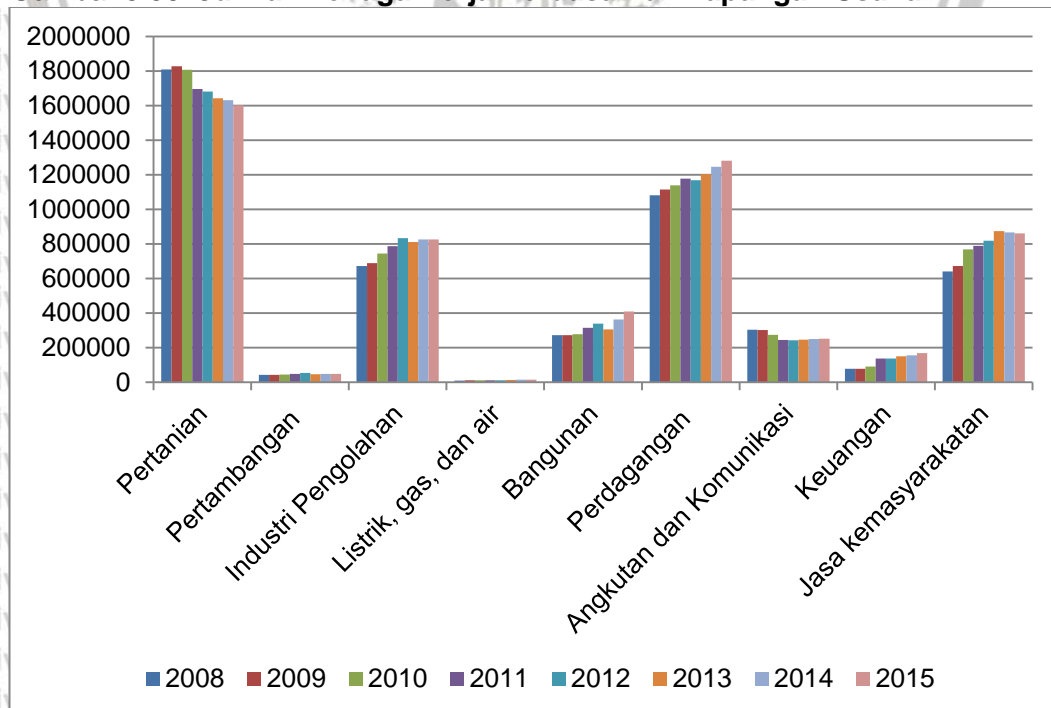
Pada pembahasan ini menjelaskan pengaruh tidak langsung langsung dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana bagi hasil (DBH), efisiensi pengeluaran publik (EPP) terhadap penyerapan tenaga kerja (PTK), kemiskinan (TK), dan kesejahteraan (IPM) melalui pertumbuhan ekonomi (PE).

Posisi pertumbuhan ekonomi sebagai variabel yang diduga menjadi mediasi dalam hubungan tersebut terbukti karena berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini ditemukan bahwa PE memiliki pengaruh langsung signifikan terhadap PTK, TK, dan IPM artinya PE tepat menjadi mediator hubungan dari DAU, DAK, DBH, EPP terhadap PTK, TK, dan IPM.

5.4.4.1 Pengaruh Tidak Langsung Dana Alokasi Umum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja, Kemiskinan dan Kesejahteraan Melalui Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil pengujian pada penelitian ini ditemukan bahwa peningkatan dana alokasi umum (DAU) tidak langsung berpengaruh terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja melalui pertumbuhan ekonomi di Kawasan Indonesia Barat (KIB). Hal ini dikarenakan penggunaan DAU untuk pembangunan infrastruktur dan sarana dan prasarana daerah mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Peningkatan pertumbuhan investasi publik (pemerintah) pada pembangunan infrastruktur pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan, bandara, irigasi dan waduk) mampu menyerap tenaga kerja di kawasan Indonesia Barat (KIB).

Gambar 5.56: Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Lapangan Usaha KIB



Sumber: Badan Pusat Statistika (data diolah)

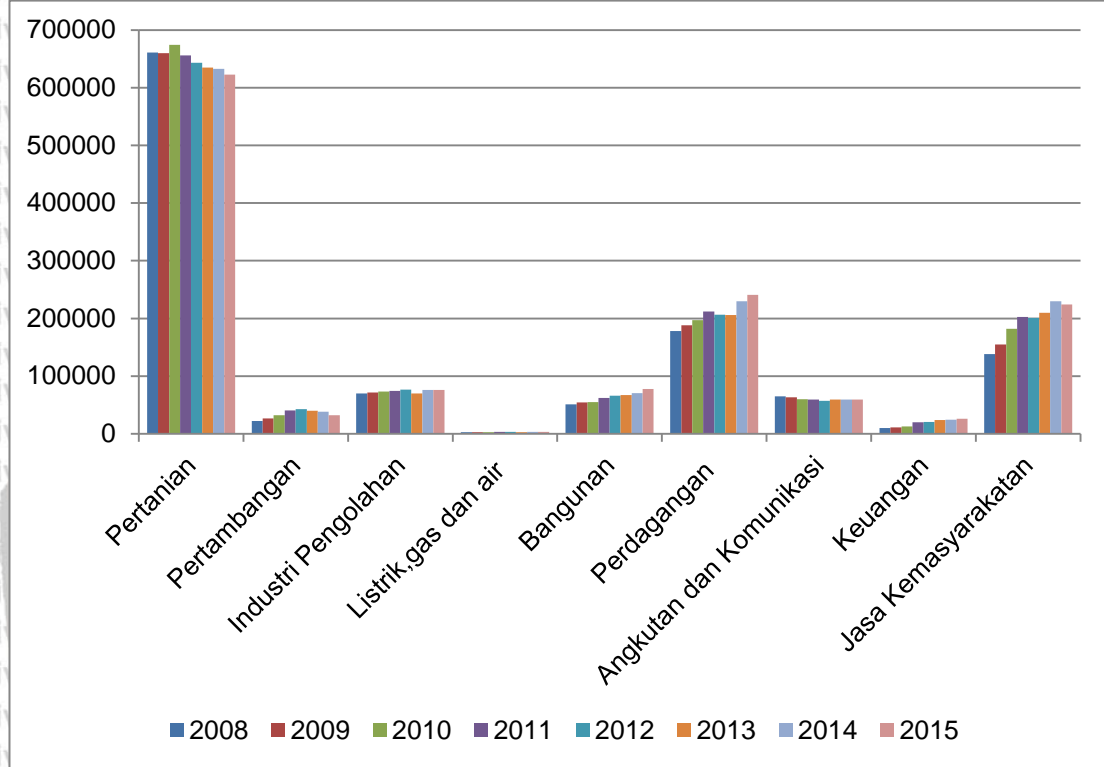
Berdasarkan gambar 5.56, menunjukkan bahwa terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja pada sektor bangunan, sektor angkutan, perdagangan

dan komunikasi di Kawasan Barat Indonesia (KIB). Disisi lain juga terdapat peningkatan penyerapan tenaga kerja pada sektor industri perdagangan dan industri pengolahan hal ini dikarenakan adanya peningkatan investasi swasta pada sektor sekunder. Kondisi ini menunjukkan investasi publik dan investasi swasta merupakan investasi padat karya karena mampu menyerap tenaga kerja di kawasan Indonesia Barat (KIB). Hasil penelitian ini mendukung penelitian Tiebei Li, *et al* (2017), yang menemukan bahwa penggunaan dana desentralisasi fiskal pada pembangunan infrastruktur transportasi berpengaruh terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja di Brisbane, Australia. Kappeler, *et al* (2013), menemukan bahwa peningkatan investasi pada pembangunan infrastuktur berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja Negara-negara Eropa. Santosa (2013), yang menemukan bahwa peningkatan DAU berpengaruh terhadap penurunan pengangguran di Indonesia di Indonesia. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan penyerapan tenaga kerja guna memerangi pengangguran pemerintah harus terus meningkatkan alokasi penggunaan anggaran pada investasi pembangunan yang memiliki dampak positif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Berdasarkan pada hasil pengujian pada penelitian ini, menemukan bahwa peningkatan dana alokasi umum (DAU) secara tidak langsung tidak berpengaruh terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja melalui pertumbuhan ekonomi di KIT. Hal ini dikarenakan sebagian besar daerah di KIT memiliki kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) yang masih lebih rendah dari kebutuhan fiskalnya (*fiscal need*), dimana penerimaan PAD masih sangat rendah sehingga pemerintah daerah masih sangat tergantung terhadap alokasi DAU untuk menutupi celah fiskal tersebut. Adanya peningkatan kebutuhan fiskal seperti gaji pegawai negeri sipil daerah, menyebabkan sebagian besar DAU

digunakan untuk membiayai belanja pegawai, sehingga alokasi belanja untuk pembangunan modal kurang optimal.

Gambar 5.57: Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Lapangan Usaha KIT



Sumber: Badan Pusat Statistika (data diolah)

Berdasarkan pada gambar 5.57 diatas, dapat dilihat bahwa terjadi penurunan penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian, sektor pertambangan dan sektor jasa kemasyarakatan, dikarenakan kurangnya investasi publik pada sektor pertanian dan pertambangan, sehingga berpengaruh terhadap penurunan pertumbuhan produktivitas dan berdampak pada penurunan penyerapan tenaga kerja. Disisi lain penurunan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian dan pertambangan dikarenakan adanya peralihan tenaga kerja sektor pertanian ke sektor bangunan dan angkutan sehingga penyerapan tenaga kerja masih sangat rendah akibatnya tingkat pengangguran masih tetap tinggi. Faktor lain yang mempengaruhi kurangnya penyerapan tenaga kerja di KIB dikarenakan peningkatan tenaga kerja tidak diikuti dengan peningkatan

kesempatan kerja karena lapangan pekerjaan di KIT masih sangat rendah jika dibandingkan dengan KIB.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Alauddin & Tisdell (1995) yang menemukan bahwa penurunan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian dikarenakan adanya relokasi tenaga kerja dari pertanian ke sektor industri. Setiyawati dan Hamzah (2007) juga menemukan bahwa DAU secara tidak langsung berpengaruh terhadap peningkatan pengangguran melalui pertumbuhan ekonomi artinya bahwa tenaga kerja yang terserap berkurang, dan Tajuddin *et al* (2014) juga menemukan bahwa peningkatan DAU secara tidak langsung tidak berpengaruh terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja melalui pertumbuhan ekonomi pada provinsi-provinsi di Pulau Sulawesi. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan penyerapan tenaga kerja di Kawasan Indonesia Timur (KIT), pemerintah sebaiknya tidak terlalu fokus untuk mengalokasikan anggaran pada pembangunan infrastruktur saja tetapi perlu meningkatkan alokasi DAU pada investasi pembangunan sektor pertanian dan pertambangan karena sektor pertanian dan pertambangan merupakan sektor unggulan yang menjadi penyumbang terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) dan sektor pertanian merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja di kawasan Indonesia Timur (KIT).

Berdasarkan dari hasil pengujian pada penelitian ini menemukan bahwa peningkatan dana alokasi umum (DAU) secara tidak langsung tidak berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di Kawasan Indonesia Barat (KIB), berpengaruh terhadap peningkatan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di Kawasan Indonesia Timur (KIT), tidak berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan melalui pertumbuhan ekonomi di Kawasan Indonesia Barat (KIB) dan berpengaruh terhadap penurunan kesejahteraan melalui pertumbuhan ekonomi di Kawasan Indonesia Timur (KIT).

Hal ini dikarenakan penggunaan DAU sebagian besar dialokasikan untuk belanja pegawai dan belanja barang dan jasa yang tidak memiliki dampak secara langsung terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. Meskipun pemerintah telah meningkatkan penggunaan DAU pada investasi pembangunan infrastruktur di KIB dan KIT, namun hal tersebut belum sepenuhnya berhasil mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada penurunan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pembangunan infrastruktur di KIB dan KIT memang berpengaruh terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja akan tetapi peningkatannya hanya terjadi pada sektor bangunan, transportasi dan angkutan yang berkaitan langsung dengan pembangunan infrastruktur. Dan sebagian besar tenaga kerja yang terserap adalah tenaga kerja informal dengan produktivitas sehingga upah atau pendapatan yang diterima masih sangat rendah. Pendapatan masyarakat yang rendah berpengaruh terhadap penurunan daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga hal ini akan berdampak pada peningkatan jumlah penduduk miskin dan menurunnya kesejahteraan masyarakat. Disisi lain jumlah pengangguran di Indonesia masih relatif tinggi juga berdampak pada peningkatan kemiskinan dan penurunan kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Anwar, dkk (2016), Maharajabdinul, *et al* (2015), Soejoto *et al* (2015), dan Jolianis (2016), menemukan bahwa peningkatan DAU tidak berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan dikarenakan ketimpangan pendapatan dimasyarakat masih cukup tinggi.

Harahap (2017), menemukan bahwa peningkatan DAU tidak berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan di Sumatera Utara. Namun hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Setiyawati & Hamzah (2007), Santosa (2013), dan Maharajabdinul, *et al* (2015), yang menemukan bahwa peningkatan DAU secara tidak langsung berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi. Fadli (2014) yang menemukan bahwa peningkatan DAU berpengaruh terhadap penurunan ketimpangan pendapatan di Kawasan Indonesia Timur. Soejoto *et al* (2015) yang menemukan bahwa peningkatan DAU berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan di Indonesia.

5.4.4.2 Pengaruh Tidak Langsung Dana Alokasi Khusus Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja, Kemiskinan, dan Kesejahteraan Melalui Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil pengujian pada penelitian ini menemukan bahwa **peningkatan dana alokasi khusus (DAK) secara tidak langsung berpengaruh terhadap penurunan penyerapan tenaga kerja melalui pertumbuhan ekonomi di Kawasan Indonesia Barat (KIB) dan kawasan Indonesia Timur (KIT)**. Hal ini dikarenakan adanya penurunan penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian, pertambangan dan jasa kemasyarakatan dikarenakan menurunnya produktivitas pada sektor-sektor tersebut yang berdampak pengurangan tenaga kerja. Disisi lain, adanya mobilitas dan migrasi tenaga kerja dari satu sektor ke sektor lainnya. Hal ini terjadi karena kurangnya lapangan pekerjaan dan sebagian besar tenaga kerja di Indonesia bekerja di

sektor informal yaitu mereka yang bekerja sebagai buruh pertanian, pertambangan, dan buruh bangunan. Sebagian besar tidak memiliki pekerjaan tetap artinya mereka bekerja secara kondisional tergantung pada permintaan tenaga kerja dan upah yang ditawarkan. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap permintaan dan penawaran tenaga kerja misalnya ketika terjadi gagal panen dan kekeringan maka sebagian buruh tani kehilangan pekerjaan akibatnya mereka melakukan perpindahan dari sektor pertanian ke sektor lainnya misalnya konstruksi dan angkutan. Begitu juga sebaliknya, ketika tidaknya permintaan tenaga kerja di sektor konstruksi maka mereka akan berpindah ke sektor lainnya. Dengan adanya mobilitas tenaga kerja yang bersifat kondisional ini menunjukkan bahwa pada dasarnya tenaga kerja yang terserap tidak signifikan hal ini bisa dilihat dari tingkat pengangguran yang masih relatif tinggi.

Hasil penelitian sejalan dengan studi terdahulu yang dilakukan oleh Tajuddin *et al* (2014), juga menemukan bahwa peningkatan DAK secara tidak langsung tidak berpengaruh terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja melalui pertumbuhan ekonomi pada provinsi-provinsi di Pulau Sulawesi. Setiyawati dan Hamzah (2007) dan Santosa (2013) menemukan bahwa peningkatan DAK secara tidak langsung tidak berpengaruh terhadap penurunan pengangguran melalui pertumbuhan ekonomi artinya bahwa jika pengangguran tidak berkurang maka penyerapan tenaga kerjanya rendah.

Berdasarkan hasil pengujian pada penelitian menemukan bahwa **peningkatan DAK berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan melalui pertumbuhan ekonomi di Kawasan Indonesia Barat (KIB) dan kawasan Indonesia Timur (KIT)**. Hal ini dikarenakan penggunaan DAK digunakan untuk membiayai kegiatan khusus baik fisik dan non fisik yang disesuaikan dengan prioritas nasional seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, perdagangan, sarana dan prasarana

pemerintah desa, serta sarana prasarana kawasan perbatasan. Pemerintah pusat dan daerah telah banyak melakukan kegiatan atau program-program yang mendukung pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sejauh ini banyak kebijakan-kebijakan dan program-program yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk memerangi kemiskinan seperti stabilitas harga, program subsidi dan dana desa, serta bantuan sosial melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Sejahtera (KKS).

Beberapa tahun terakhir ini terjadi peningkatan pembangunan infrastruktur transportasi di beberapa daerah tertinggal di Indonesia misalnya di kawasan Indonesia Timur untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah. Program-program tersebut dinilai berhasil mengurangi kemiskinan akan tetapi belum sepenuhnya berhasil karena tingkat pengangguran dan kemiskinan masih relatif tinggi. Oleh karena itu, pemerintah harus terus meningkatkan alokasi anggaran pada program-program yang efektif untuk memerangi kemiskinan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan studi terdahulu yang dilakukan oleh Santosa (2013) menemukan bahwa peningkatan DAK secara langsung dan tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap pengurangan kemiskinan di Indonesia. Suwandi (2011) menemukan bahwa desentralisasi fiskal dan otonomi khusus berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan di Papua. Soejoto, *et al* (2015) menemukan bahwa peningkatan DAK berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan di Indonesia. Maharajabdinul, *et al* (2015) menemukan peningkatan dana perimbangan secara tidak langsung berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan melalui investasi dan pertumbuhan ekonomi. Namun hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Jolianis (2016) dan Anwar, *dkk* (2016) menemukan bahwa peningkatan DAK tidak berpengaruh

terhadap penurunan kemiskinan. Harahap (2017), menemukan bahwa peningkatan DAK tidak berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan di Sumatera Utara. Soejoto *et al* (2015) menemukan bahwa peningkatan DAK berpengaruh terhadap peningkatan kemiskinan di Indonesia.

5.4.4.3 Pengaruh Tidak Langsung Dana Bagi Hasil Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja, Kemiskinan, dan Kesejahteraan Melalui Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil pengujian pada penelitian ini, menemukan bahwa peningkatan dana bagi hasil (DBH) secara tidak langsung berpengaruh terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja melalui pertumbuhan ekonomi di Kawasan Indonesia Barat (KIB). Hal ini dikarenakan penggunaan DBH bersifat *block grant* maka penggunaannya sama dengan DAU yaitu dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. Peningkatan pembangunan infrastruktur berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang menyebabkan terjadi peningkatan permintaan tenaga kerja khususnya di sektor konstruksi, transportasi dan angkutan. Hasil penelitian ini sejalan dengan Suwandi (2011), menemukan bahwa peningkatan desentralisasi fiskal (dana perimbangan) berpengaruh terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja di Papua. Santosa (2013), menemukan bahwa DBH secara tidak langsung berpengaruh terhadap penurunan pengangguran melalui pertumbuhan ekonomi, artinya bahwa peningkatan DBH akan diikuti dengan meningkatnya penyerapan tenaga kerja.

Berdasarkan hasil pengujian pada penelitian ini, menemukan bahwa peningkatan dana bagi hasil (DBH) secara tidak langsung tidak berpengaruh terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja (PTK) melalui pertumbuhan ekonomi di Kawasan Indonesia Timur (KIT). Penggunaan DBH yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur memang berpengaruh

terhadap peningkatan tenaga kerja khususnya disektor konstruksi, transportasi dan angkutan. Akan tetapi terjadi penurunan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian dan pertambangan karena kurangnya investasi pembangunan pada sektor pertanian dan pertambangan. Disisi lain penurunan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian dan pertambangan dikarenakan adanya peralihan tenaga kerja sektor pertanian ke sektor bangunan dan angkutan sehingga penyerapan tenaga kerja masih sangat rendah akibatnya tingkat pengangguran masih tetap tinggi. Kurangnya persediaan lapangan pekerjaan (kesempatan kerja) juga berpengaruh terhadap rendahnya penyerapan tenaga kerja di KIT. Hasil penelitian ini sejalan dengan studi terdahulu yang dilakukan oleh Tajuddin *et al* (2014) menemukan bahwa peningkatan DBH secara tidak langsung tidak berpengaruh terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja melalui pertumbuhan ekonomi pada provinsi-provinsi di Pulau Sulawesi.

Berdasarkan hasil pengujian pada penelitian ini, menemukan bahwa **peningkatan dana bagi hasil (DBH) secara tidak langsung tidak berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan dan tidak berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan melalui pertumbuhan ekonomi di Kawasan Indonesia Barat (KIB). Peningkatan dana bagi hasil (DBH) secara tidak langsung berpengaruh terhadap peningkatan kemiskinan dan berpengaruh terhadap penurunan kesejahteraan melalui pertumbuhan ekonomi di Kawasan Indonesia Timur (KIT).** Penggunaan DBH berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi akan tetapi peningkatan pertumbuhan ekonomi dinilai belum sepenuhnya berhasil mendorong penyerapan tenaga kerja akibatnya tingkat pengangguran masih relatif tinggi. Tingkat pengangguran yang tinggi berdampak pada penurunan pendapatan dan daya beli masyarakat sehingga berpengaruh terhadap peningkatan kemiskinan dan penurunan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian ini sejalan dengan

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Harahap (2017), menemukan bahwa peningkatan DBH tidak berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan di Sumatera Utara.

5.4.4.4 Pengaruh Tidak Langsung Efisiensi Pengeluaran Publik Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja, Kemiskinan, dan Kesejahteraan Melalui Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil pengujian pada penelitian ini, menemukan bahwa peningkatan efisiensi pengeluaran publik secara tidak langsung tidak berpengaruh terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja, tidak berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan dan berpengaruh terhadap penurunan kesejahteraan melalui pertumbuhan ekonomi di Kawasan Indonesia Barat (KIB). Peningkatan efisiensi pengeluaran publik secara tidak langsung berpengaruh terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja, berpengaruh terhadap peningkatan kemiskinan dan penurunan kesejahteraan melalui pertumbuhan ekonomi di Kawasan Indonesia Timur (KIT).

Pada penelitian ditemukan bahwa efisiensi pengeluaran publik berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di KIB dan KIT. Namun angka yang ditunjukkan sebenarnya tidak terlalu besar untuk menggambarkan kontribusi efisiensi pengeluaran publik terhadap pertumbuhan ekonomi, dikarenakan banyak provinsi yang digunakan sebagai tolak ukur variabel efisiensi pengeluaran publik menunjukkan inefisiensi. Penyebab utama inefisiensi pengeluaran publik dikarenakan sebagian besar anggaran belanja daerah dialokasikan untuk membiayai belanja operasional seperti belanja pegawai, belanja honorarium, belanja perjalanan dan rapat dinas, belanja pembangunan gedung perkantoran, dan belanja pembelian kendaraan dinas.

Belanja operasional yang tinggi mengakibatkan rendahnya alokasi belanja

modal produktif seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Alokasi belanja modal produktif rendah berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi. Utomo dan Sumarsono (2009) menyatakan kebijakan pengeluaran pemerintah melalui belanja modal secara langsung mendorong pertumbuhan ekonomi, sedangkan belanja operasional memiliki pengaruh yang kecil terhadap penguatan ekonomi daerah karena cenderung konsumtif dan mengarah kepada peningkatan inflasi. Hal ini yang menyebabkan bahwa peningkatan efisiensi pengeluaran publik melalui pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap penurunan penyerapan tenaga kerja, peningkatan kemiskinan, dan penurunan kesejahteraan di KIB dan KIT.

Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian Wilis (2005), yang menemukan bahwa pengeluaran publik tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja terlatih di Jawa Timur. Setyawati dan Hamzah (2007) juga menemukan bahwa belanja pembangunan tidak berpengaruh terhadap penurunan pengangguran artinya penyerapan tenaga kerja masih rendah. Prakoso (2016) menemukan bahwa efisiensi pengeluaran publik memang berpengaruh terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat di Jawa Timur, namun angka yang ditunjukkan tidak begitu besar karena banyak daerah di Jawa Timur yang belum melaksanakan pengeluaran publiknya secara efisien. Ananda *et al* (2017) menemukan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah untuk kesehatan dan infrastruktur berpengaruh terhadap peningkatan kemiskinan. Namun hasil penelitian berbeda dengan studi sebelumnya yang dilakukan oleh Hay (2017), menemukan bahwa efisiensi keuangan daerah berpengaruh terhadap penurunan pengangguran artinya terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja. Wilis (2015), yang menemukan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja terdidik, tidak terdidik, dan tidak terlatih di Jawa Timur. Afiat (2012), menemukan bahwa

peningkatan pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja di provinsi Sulawesi Tenggara. Chusnah (2014) dan Hay (2017), menemukan bahwa efisiensi pengeluaran publik berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan di Jawa Timur.

5.5 Implikasi Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis efisiensi pengeluaran publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi pengeluaran publik di Indonesia, serta menganalisis pengaruh langsung dan tidak langsung dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana bagi hasil (DBH) dan efisiensi pengeluaran publik terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, kemiskinan dan kesejahteraan di Kawasan Indonesia Barat (KIB) dan Kawasan Indonesia Timur (KIT).

Hasil penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar provinsi di Indonesia telah mengalokasikan pengeluaran publiknya secara efisien, akan tetapi peningkatan pengeluaran daerah dalam bentuk belanja operasional dan belanja modal berpengaruh terhadap penurunan efisiensi pengeluaran publik, sedangkan peningkatan penerimaan daerah yaitu pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap peningkatan efisiensi pengeluaran publik. Hasil ini mengindikasikan bahwa dalam melaksanakan pengeluaran publik yang efisien pemerintah daerah dapat meminimalkan inputnya yaitu belanja operasional dan belanja modal pada tingkat tetap untuk menghasilkan output yang optimal yaitu investasi swasta dan PAD. Artinya bahwa pemerintah daerah tidak harus membelanjakan anggaran dalam jumlah besar untuk menghasilkan penerimaan yang besar atau optimal. Secara keseluruhan sebagian besar anggaran belanja daerah dialokasikan untuk membiayai belanja operasional seperti belanja pegawai khususnya gaji PNS, belanja honorarium, belanja perjalanan dan rapat dinas, belanja pengadaan kendaraan dinas dan belanja pembangunan gedung

pemerintahan. Pemerintah daerah dapat meminimalkan belanja operasional seperti belanja pegawai, belanja honorarium, belanja perjalanan dan rapat dinas, belanja pengadaan kendaraan dinas dan belanja pembangunan gedung pemerintahan. Dalam meminimalkan belanja pegawai khususnya gaji PNS, pemerintah pusat dan daerah dapat melakukan moratorium PNS sehingga dapat meningkatkan kualitas dari PNS yang berdampak pada peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat. Pemerintah daerah juga dapat melakukan remunerasi yaitu pembayaran gaji atau kompensasi atau bonus atau honorarium sesuai dengan kinerja dari PNS (*pay for performance*), artinya jika PNS kinerjanya bagus atau telah mencapai target tertentu maka baru bisa mendapatkan remunerasi berupa gaji, tunjangan tetap, bonus atau prestasi, dan tunjangan insentif lainnya. Pemerintah daerah juga harus lebih memprioritaskan pengalokasian anggaran pada belanja modal produktif pada bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang memberikan *multiplier effect* pada peningkatan penerimaan daerah.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa peningkatan dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana bagi hasil (DBH) dan efisiensi pengeluaran publik mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang mendukung penyerapan tenaga kerja (*pro-job*), namun belum berhasil mengurangi kemiskinan (*pro-poor*) yang berdampak pada penurunan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan penggunaan anggaran pada investasi publik yang produktif yaitu pembangunan infrastruktur (jalan, bandara, pelabuhan, waduk dan irigasi) memberikan *multiplier effect* pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan investasi tersebut bersifat padat karya yaitu mampu menyerap tenaga kerja. Sehingga ketika ada pembangunan proyek pemerintah maka disitu akan banyak menyerap tenaga kerja. Akan tetapi karena sebagian besar tenaga kerja yang terserap di adalah tenaga kerja informal dengan kualitas sumber daya

manusai (SDM) yang masih relatif rendah seperti buruh pertanian, buruh angkutan, dan buruh pertambangan, menyebabkan upah yang didapatkan masih sangat rendah sehingga berdampak pada penurunan daya beli masyarakat akibatnya belum berhasil mengurangi kemiskinan yang berdampak pada penurunan kesejahteraan masyarakat. Disisi lain peningkatan penyerapan tenaga kerja belum berhasil mengurangi pengangguran, hal ini dibuktikan dengan masih tingginya tingkat pengangguran terbuka TPT di daerah maupun nasional dikarenakan adanya perpindahan atau perputaran sektor. Dimana tenaga kerja yang sebelumnya bekerja di sektor pertanian beralih ke sektor industri, konstruksi dan pertambangan dikarenakan sebagian besar mereka bukan pekerja tetap/serabutan atau setengah menganggur, sehingga belum berhasil mengurangi pengangguran yang berdampak pada peningkatan kemiskinan dan penurunan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah seharusnya tidak hanya fokus untuk mengalokasikan anggaran pada pembangunan fisik saja seperti pembangunan jalan, pelabuhan, bandara, gedung sekolah, rumah sakit, jaringan listrik dan komunikasi, jaringan irigasi, waduk, dan sarana serta prasarana publik lainnya. Pemerintah baik pusat dan daerah juga harus mengimbangnya dengan pembangunan non fisik yang berfokus pada peningkatan modal manusia (sumber daya manusia). Misalnya dengan mendirikan balai pelatihan dan bimbingan seperti Usaha Mikro Kecil dan Menengah khususnya bagi tenaga kerja informal sehingga mampu meningkatkan kualitas dan produktivitas yang berdampak pada peningkatan upah dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah juga meningkatkan pembangunan non fisik pada sektor kesehatan dan pendidikan yang memiliki dampak langsung terhadap pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat seperti peningkatan sumber daya manusia atau modal manusia pada berbagai aspek kehidupan khususnya kesehatan dan pendidikan seperti program

pengecahan gizi buruk dan penyakit menular, program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak, program pelayanan kesehatan anak balita dan lansia, peningkatan dan pengembangan tenaga kesehatan, program pendidikan menengah dan non-formal, program peningkatan dan pengembangan kualitas tenaga pendidik, program pengembangan budaya membaca dan pembinaan perpustakaan untuk mengatasi buta aksara.

Jika dilihat pengaruhnya secara keseluruhan dana alokasi umum (DAU) memiliki pengaruh yang paling kuat atau dominan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, kemiskinan dan kesejahteraan di Kawasan Indonesia Barat (KIB) maupun Kawasan Indonesia Timur (KIT). Hasil ini menerangkan bahwa pemerintah daerah lebih memprioritaskan penggunaan DAU dikarenakan penggunaan DAU yang bersifat *block grant* artinya penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan daerahnya sehingga pemerintah daerah menjadi lebih optimal dalam mengalokasikan anggaran untuk membangun daerahnya. Oleh karena itu, seharusnya pemerintah lebih fokus untuk mengalokasikan DAU pada pembangunan produktif seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang memiliki dampak langsung dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yaitu pertumbuhan yang mendukung penyerapan tenaga kerja (*pro-job*), yang mendukung pengentasan kemiskinan (*pro-poor*) dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (*growth with equity*).

Adanya perbedaan karakteristik dan potensi antara Kawasan Indonesia Barat (KIB) dan Kawasan Indonesia Timur (KIT) maka pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerahnya masing-masing. Perbedaan karakteristik dikarenakan beberapa faktor yaitu kondisi geografis, sumber daya alam (*natural resources*), dan sumber daya manusia (*human resources*).

Kawasan Indonesia Barat (KIB) lebih unggul dalam hal sumber daya manusia yang berdampak pada kemajuan pembangunan ekonomi terutama pada sektor industri dan sektor perdagangan yang menjadi *leading sector*. Sedangkan Kawasan Indonesia Timur memiliki kekayaan sumber daya alam yang berlimpah sehingga sebagian masyarakat sangat tergantung pada sektor pertanian, pertambangan, pariwisata yang menjadi *leading sector*. Oleh karena itu, pemerintah daerah di KIB seharusnya lebih fokus untuk mengalokasikan anggaran pada program-program yang mendukung pertumbuhan sektor industri dan sektor perdagangan misalnya dengan menyediakan dana atau kredit usaha bagi UMKM dalam mengembangkan dan meningkatkan usahanya dan terus meningkatkan kualitas dari UMKM dengan mengadakan bimbingan dan pelatihan wirausaha. Sedangkan, untuk pemerintah daerah di KIT seharusnya lebih fokus untuk mengalokasikan anggaran pada sektor pertanian, pertambangan dan pariwisata misalnya mendirikan balai pelatihan pertanian, menyediakan pupuk dan obat pencegahan hama, dan pembangunan infrastruktur (jalan, bandara, pelabuhan, waduk dan irigasi). Pembangunan infrastruktur yang bagus dan memadai akan mampu meningkatkan pembangunan ekonomi di daerah dimana mobilitas antar daerah terus meningkat sehingga mampu meningkatkan daya saing antar daerah dan investasi swasta di daerah.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Tesis ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi pengeluaran publik dan menganalisis pengaruh langsung dan tidak langsung desentralisasi fiskal dan efisiensi pengeluaran publik terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, kemiskinan, dan kesejahteraan pada Kawasan Indonesia Barat (KIB) serta Kawasan Indonesia Timur (KIT). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan beberapa poin sebagai berikut:

1. Sebagian besar provinsi di Indonesia telah melaksanakan pengeluaran publiknya secara efisien.
2. Peningkatan belanja daerah berpengaruh terhadap penurunan efisiensi pengeluaran publik, sedangkan peningkatan pendapatan daerah berpengaruh terhadap peningkatan efisiensi pengeluaran publik di Indonesia.
3. Peningkatan dana alokasi umum (DAU), dana bagi hasil (DBH) dan efisiensi pengeluaran publik berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi, sedangkan peningkatan dana alokasi khusus (DAK) berpengaruh terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi di Kawasan Indonesia Barat (KIB) dan Kawasan Indonesia Timur (KIT).
4. Peningkatan pertumbuhan ekonomi mampu mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja (*pro-job*), namun belum berhasil mengatasi kemiskinan (*pro-poor*) dan kesejahteraan (*growth with equity*) di Kawasan Indonesia Barat (KIB) dan Kawasan Indonesia Timur (KIT).
5. Penyerapan tenaga kerja yang tinggi belum berhasil mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kawasan Indonesia Barat (KIB) dan Kawasan Indonesia Timur (KIT).

6. Peningkatan kemiskinan berdampak pada penurunan kesejahteraan masyarakat di Kawasan Indonesia Barat (KIB) dan Kawasan Indonesia Timur (KIT).

7. Penggunaan dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) yang tinggi pada pembangunan produktif yaitu infrastruktur secara tidak langsung berpengaruh terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja melalui pertumbuhan ekonomi, namun belum berhasil mengurangi kemiskinan sehingga kesejahteraan masyarakat menurun di KIB. Di KIT penggunaan DAU yang tinggi tidak berhasil menyerap tenaga kerja akibatnya kemiskinan meningkat dan kesejahteraan masyarakat menurun.

8. Peningkatan dana alokasi khusus (DAK) secara tidak langsung berpengaruh terhadap penurunan penyerapan tenaga kerja, namun berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan melalui pertumbuhan ekonomi di Kawasan Indonesia Barat (KIB) dan Kawasan Indonesia Timur (KIT).

9. Peningkatan efisiensi pengeluaran publik secara tidak langsung mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja namun belum berhasil mendorong pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan melalui pertumbuhan ekonomi di Kawasan Indonesia Barat (KIB) dan Kawasan Indonesia Timur (KIT).

6.2 Saran

Dalam melaksanakan pengeluaran publik yang efisien pemerintah daerah dapat meminimalkan belanja daerah pada tingkat tetap untuk menghasilkan penerimaan daerah yang optimal. Artinya bahwa pemerintah daerah tidak harus membelanjakan anggaran dalam jumlah besar untuk menghasilkan penerimaan yang besar atau optimal. Pemerintah daerah dapat meminimalkan belanja operasional seperti belanja pegawai, belanja honorarium, belanja perjalanan dan rapat dinas, belanja pengadaan kendaraan dinas dan belanja pembangunan gedung pemerintahan. Dalam meminimalkan belanja pegawai khususnya gaji PNS, pemerintah pusat dan daerah dapat melakukan moratorium PNS sehingga dapat meningkatkan kualitas dari PNS yang berdampak pada peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat. Pemerintah daerah juga dapat melakukan remunerasi yaitu pembayaran gaji atau kompensasi atau bonus sesuai dengan kinerja dari PNS (*pay for performance*), artinya jika PNS kinerjanya bagus atau telah mencapai target tertentu maka baru bisa mendapatkan remunerasi berupa gaji, tunjangan tetap, bonus atau prestasi, dan tunjangan insentif lainnya. Pemerintah daerah juga harus lebih memprioritaskan pengalokasian anggaran pada belanja modal produktif pada bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang memberikan *multiplier effect* pada peningkatan penerimaan daerah.

Pemerintah daerah seharusnya tidak hanya fokus untuk mengalokasikan anggaran pada pembangunan fisik saja seperti pembangunan jalan, pelabuhan, bandara, irigasi, gedung sekolah, rumah sakit dan fasilitas umum lainnya.

Pemerintah daerah juga harus mengimbangnya dengan pembangunan non fisik yang berfokus pada peningkatan modal manusia (sumber daya manusia).

Misalnya dengan mendirikan balai pelatihan dan bimbingan seperti Usaha Mikro Kecil dan Menengah khususnya bagi tenaga kerja informal sehingga mampu

meningkatkan kualitas dan produktivitas yang berdampak pada peningkatan upah dan kesejahteraan masyarakat.

Dana alokasi umum (DAU) memiliki pengaruh yang paling kuat atau dominan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, kemiskinan dan kesejahteraan di Kawasan Indonesia Barat (KIB) maupun Kawasan Indonesia Timur (KIT). Oleh karena itu, seharusnya pemerintah lebih fokus untuk mengalokasikan DAU pada pembangunan produktif seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang memiliki dampak langsung dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yaitu pertumbuhan yang mendukung penyerapan tenaga kerja (*pro-job*), yang mendukung pengentasan kemiskinan (*pro-poor*) dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (*growth with equity*).

Dikarenakan adanya perbedaan karakteristik dan potensi antara Kawasan Indonesia Barat (KIB) dan Kawasan Indonesia Timur (KIT) maka pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerahnya masing-masing.

DAFTAR PUSTKA

- Abdullah, Syukriy, dan Abdul Halim. 2006. Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, Volume 2 No.
- Adi, Priyo Hari. 2006. Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali). *Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang*.
- Aditia Nico. 2010. Meningkatkan Kualitas Belanja. Working Paper. Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.
- Afiat, Muhammad Nur. 2012. Pengaruh Investasi, pengeluaran Pemerintah dan Perubahan Struktural Ekonomi terhadap Penyerapan tenaga Kerja Di Provinsi Sulawesi Tenggara. Disertasi, Program Doktor Ilmu Ekonomi, Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis, universitas Brawijaya, Malang.
- Afonso, António; Schuknecht, Ludger; Tanzi, Vito. 2003. Public Sector Efficiency: An International Comparison. *ECB Working Paper*, No.242, European Central Bank.
- Agama, J. Cofie. 2003. Fiscal Decentralization Ghanas Experience: Lesson and Issues. Ad-Hoc Expert Group Meeting, Fiscal Policy and Growth in Africa; Fiscal Federalism, Decentralization and the Incidence of Taxation, Economic Commission for Africa.
- Ahmad, Imtiaz. 2008. Effect Of Government Spending and Macro-Economic Uncertainty on Private Investment in Services Sector: Evidence From Pakistan. *European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences* ISSN 1450-2275 Issue 11.
- Ajija, Shochrul Rohmatul dkk. 2011. *Cara Cerdas Menguasai Eviews*. Jakarta: Salemba Empat.
- Akai, Nobuo & Masayo Sakata. 2002. Fiscal Decentralization Contributes to Economic Growth: Evidence from State-Level Cross-Section Data for United States. *Journal of Urban Economic* 52 (2002) 93-108.
- Alauddin, Mohammad & Tisdell, Clem. 1995. Labor Absorption and Agriculture Development: Bangladesh's Experience and Pedicament. *World Development*, Volume 23, Issue 2, Pages 281-297.



Amy S.He, Jon D.Phillips, Erica L. Lizano, & Shaua Rienks. 2018. Examining Internal and External Job Resources in Child Welfare: Protecting Against Caseworker Burnout. *Child Abuse & Neglect*, Volume 81, July 2018, Pages 48-59.

Ananda, Candra Fajri. 2002. Problems of The Implementation of Fiscal Decentralization in Regional Autonomy: The Case of Malang Municipality and Trenggalek District. *Regional University Research on Decentralization in Indonesia*, Faculty Of Economics, Brawijaya University.

Ananda, Candra Fajri; Moh. Khusaini; Atu Bagus Wiguna. 2017. Does Government Quality Spending Can Reduce Poverty? A case in East Java Province. *Global Journal of Business and Social Scienci Review* 5 (1) 53-58.

Anwar, M.L, Sutomo Wim Palr, Jaclinel.Sumual. 2016. Pengaruh DAU, DAK, PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan (Kota Mandao Tahun 2001-2003). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol.16, No.02.

Arsyad, Lincolin. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Unit Peneliti dan Percetakan STIM YKPN Yogyakarta.

Asghar, Nabeela. 2016. Interrelationship Between Foreign Aid, Fscial Decentralization and Economic Growth in Pakistan: *An Econometrci Analysis. Journal of Political Studies, Vol. 23, Isuus- 2, 2016, 525:540*.

Astuti, Wuku. 2015. Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya terhadap Pengangguran dan Kemiskinan (Studi pada Kabupaten dan Kota di Pulaui Jawa Periode 2007-2011). *Jurnal EBBANK*, Vol.6, No.1, Hal 1-18.

Aubry, Amandine, Michal Burzynski & Frederic Docquier. 2016. The Welfare Impact of Glibal Migration in ORCD Countries. *Journal of International Economics*, Volume 101, July 2016, Pages 1-21.

Badan Koordinasi Penanaman Modal. Perkembangan Realisasi Investasi PMDN dan PMA berdasarkan Laporan Kegiatan Penanman Modal (LKPM) menurut Lokasi. <http://www.bkpm.go.id/id/investasi-di-indonesia/statistik>.

Badan Pusat Statistika. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Indonesia. <http://www.bps.go.id>.

Bahl, Roy W & Linn Johannes F. 1992. *Urban Public Finance in Developing Countries*. A World Bank Book, Oxford University Press.

Bahl, Roy. 1999. Implementation Rules for Fiscal Decentralization. International Studies Program, *Working Paper 99-1*, Georgia State University.

Baldwin, Robert E. 1981. Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi di Negara-negara Berkembang. Jakarta: Bina Aksara. Lima tahap pertumbuhan Rostow.

Bank Indonesia. 2018. Kajian Regional. Kajian Ekonomi Regional. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomi-regional/Contents/Default.aspx>, diakses pada 10 April 2018.

Bappenas. 2011. Laporan Akhir Kualitas Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Direktorat Otonomi Daerah, Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah.

Bardhan, Pranab. 2002. Decentralization of Governance and Development. *Journal of Economic Perspectives*, Vol.16, No. 4, pp.185-205.

Barzelay, Michael. 1991. Managing Local Development, Lesson from Spain. *Policy Sciences*, 24, 271 – 290.

Bayar, Yilmaz. 2014. Saving, Foreign Direct Investment Inflows and Economic Growth in Emerging Asian Economies. *Asian Economic and Financial Review*, 2014, 4(8): 1106-1122.

Bendavid-Val, Avrom. 1991. Regional and Local Economic Analysis for Practitioners. New York: Greenwood Publishing Group, Inc.

Benfica, Ria, Benedito Cunguara, James Thurlow. 2018. Linking Agriculture Investments to Growth and Poverty: An Economywidw Approach Apllied to Mozambique. *Agriculture Systems*.

Besley, Tim. 1997. Political Economy of Alleviating Poverty, Theory and Intitutions. *Annual Conference on Delopment Economics*, Washington DC: The world Bank.

Bird, Richard M. 1993. Threading The Fiscal Labyrinth: Some Issues in Fiscal Decentralization. *National Tax Journal*, Vol.46, No.2 (June,1993), pp.207-227.

Bjornestad, Liv. 2009. Fiscal Decentralization, Fsicel Incentives, And Pro-Poor Outcomes: Evidence from Vietnam. Asian Development Bank Economics Working Paper Series No.168, July 2009.

Blochliker, H and B. Egert. 2013. Decentralisation and Economic Growth - Part 2: The Impact on Economic Activity, Productivity and Investment. *OECD Working Papers on Fiscal Federalism*, No. 15.

- Boediono. 2012. Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No.4: Teori Pertumbuhan Ekonomi. Yogyakarta: BPFE.
- Bohringer, Christoph & Andreas Keller, Edwin van der Werf. 2013. Are Green Hopes Too Rosy? Employment and Welfare Impacts of Renewable Energy Promotion. *Energy Economics* 36 (2013) 277-285).
- Borjas, George J. 2016. Does Welfare Reduce Poverty. *Research Poverty*, Volume 70, Issue 1, March 2016, Pages 143-157.
- Borner, Silvio & Frank Bodmer, and Matkus Kobler. 2004. Institutional Efficiency and Its Determinants: The Role of Political Factors in Economic Growth. Development Centre Studies, Paris, France: OECD.
- Brauninger, Michael and Niebuhr, Annekatrin. 2005. Agglomeration, Spatial Interaction and Convergence in the EU. Hamburg Institute of International Economics.
- Brennan, Geofferey & Buchanan, James M. 1980. The Power to Tax: Analytical Foundations of a Fiscal Constitution. Cambridge, England: Cambridge University Press.
- Brueckner, Jank K. 2004. Fiscal Decentralization with Distortionary Taxation: Tiebout vs Tax Competition. *International Tax and Public Finance*, 11 (2): 133-153.
- Burin, Ferdinandus Diri; Ananda, Candra Fajri; Kaluge, David. 2015. Analisis Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Daerah. *Ingenta Connect: Ekonomi-Bisnis, Volume 6, Number 2, pp.177-188(12)*.
- Cao, Jiyun & Arijit Mukherjee. 2018. Foreign Direct Investment, Unionised Labour Markets and Welfare. *Internatinal Review Of Economics & Finance*.
- Case, Karl E & Fair, Ray C. Prinsip-prinsip Ekonomi. Jakarta: Erlangga.
- Chatterjee, Santanu, John Gibson, Felix Rioja. 2018. Public Invesmnet, Debt, and Welfare: A quntitative Analysis. *Journal of Macroeconomics*, Volume 56, June 2018, Pages 204-217.
- Chen, Jiandong, Yun Wang, Jie Wen, Fuqian Fang, & Malin Song. 2016. The influence of aging population and Economic Growth on Chinese Rural Poverty. *Journal of Rural Studies*, Vol.47, Pages 665-676.
- Churchill, S. Awaworyi & Yew, S.L. 2017. Are Government Transfer Harmful To Economic Growth? A Meta-Analysisi. *Economic Modelling*, Volume 64, August 2017, Pages 270-287.

Chusnah, Saidatul. 2014. Efisiensi Sektor Publik dan Kinerja Ekonomi Daerah (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa Timur). Jurnal Ilmiah, Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya.

Davoodi, Hamid and Heng-fu Zou. 1998. Fiscal Decentralization and Growth. *Journal of Urban Economics*, 43 (2): 35-58.

Delfin S.Go, Sherman Robinson, Karen Thierfelder. 2016. Natural Resource Revenue, spending Strategies and Economic Growth in Niger. *Economic Modelling*, Volume 52, Part B, Pages 564-573.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2018. Data Keuangan daerah. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412>, diakses pada 23 April 2018.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. 2017. Konsep Pinjaman daerah. http://www.djpk.depkeu.go.id/?page_id=328

Djojohadikusumo, Sumitro. 1955. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: PT. Ratu Buana.

Djojohadikusumo, Sumitro. 1973. *Masalah Penduduk dan Lapangan Kerja, Pertumbuhan Ekonomi dan Perdagangan Internasional*. Jakarta: PT. Ratu Buana.

Djojohadikusumo, Sumitro. 1994. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: PT Pusaka LP3ES Indonesia.

Dumairy. 1997. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.

Erenburg, Sharon J. 1993. *The Relationship Between Public and Private Investment*. Working Paper No. 85.

Fadli, Faishal. 2014. Analysis of Direct and Indirect Effect of Fscial Decentralization and Regional Disparity (case Study Provinces in East and West Indonesia Year 2006-2012). *Jurnal of Economics and Sustainable Development*, Vol.5, No.18.

Feiveson, Laura. 2015. General Revenue Sharing and Public Sector Unions. *Jurnal of Public Economics*, Volume 125, Pages 28-45.

Ferreira, Francisco H. G, Phillippe G.Leite & Martin Ravallion. 2010. Poverty Reduction Without Economic Growth?; Explaining Brazil's Poverty Dynamics, 1985-2004. *Journal of Development Economics*, Volume 93, Issue 1, September 2010, Pages 20-36.

Fording, Richard C & Berry William D. 2007. The Historical Impact of Welfare Programs on Poverty: Evidence from the America States. Policy Studies Journal, Volume 35, Issue 1.

Gao, Qin, Sui Yang, Shi Li. 2015. Welfare, Targeting, and Anti-Poverty Wffwctiveness: The Case of Urban China. The Quartely Review of Economics and Finance, Volume 56, May 2015, Pages 30-42.

Gujarati, Damodar N. 2002. Dasar-dasar Ekonometrika. Jakarta: Salemba Empat.

Gujarati, Damodar R. 2006. *Dasar-dasar Ekonometrika*. Jakarta: Salemba Empat.

Hamzah, Ardi. 2008. Analisa Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kpengangguran, dan Kemiskinan: Pendekatan Analisis Jalur (Studi pada 29 Kabupaten dan 9 kota di provinsi Jawa Timur Periode 2001-2006). Jurnal Studi Ekonomi, Vol.III, No.1, Juni 2008.

Hamzah, Muhammad Zilal. 2008. Kajian Teori Desentralisais Fiskal. Jakarta: The Institute Of Publishing, Indonesian Bussiness School.

Handoko, Budiono Sri. 2001. Pemikiran Pendekatan Pembangunan Di Awal Millenium: Penekanan Pada Kualitas Pertumbuhan. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 6. No. 2, Yogyakarta: FE UII.

Handra, Hefrizal, Raksaka Mahi, Masrizal, Syariffudin, Erizal. 2008. Pengalihan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang Mendanai Urusan Daerah Menjadi Dana Alokasi Khusus (DAK). Penelitian Tim Asistensi bidang Desentralisasi Fiskal, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Harahap, Riva Ubar. 2017. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alikasi Khusus, Dana Bagi Hasil Terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara. KITABAH: Volume 1, No.1.

Hay, Theresia. 2017. Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Penganguran di Provinsi Papua Barat. Tesis, Program Magister Ilmu Ekonomi, Pascasarjanan Fakultas Ekonmi dan Bisnis, Universitas Brawijaya.

Heriwibowo D. 2016. Kajian Kualitas Belanja Daerah: Dinamika dan Pengukurannya Dalam Pembangunan Wilayah di Indonesia. Disertasi: Institut Pertanian Bogor.

Herman, Emillia. 2011. The Impact of Economic Growth Process on Employment in European Union Countries. *The Romanian Economic Journal*, Year XIV, No.42, Pages 47-67.

Herrera, Santiago & Gaobo Pang. 2005. Efficiency of Public Spending in Developing Countries: An Efficiency Frontier Approach. *Working Paper Series No. 3645*, World Bank.

Hogue, Aaron, Sarah Dauber, Christopher Dasaro, Jon Morgenstern. 2010. Predictors, of Employment in Substance-using Male and Female Welfare Recipients. *Journal of Substance Abuse Treatment*, Volume 38, Issue 2, March 2010, Pages 108-118.

<http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.106.1265&rep=rep1&type=pdf>.

Indah, Siska Permata. 2011. Analisis Dampak desentralisasi Fiskal dan Pengaruhnya Terhadap PDRB, Tenaga Kerja, dan Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat. Thesisi, Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor.

Inradewa, I Gusti Agung & Ketut Suardhika Natha. 2015. Pengaruh Inflasi, PDRB, dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana* Vol.4, No.8, Hal.923-950.

Ingtyas, Ajeng Jasita. 2016. The Effect Of Local Revenue and Revenue Sharing on Economic Growth in East Java (Case Study of District/City in East Java Province Period of 2011-2015). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, Vol.5, No.2, Universitas Brawijaya.

Iniquez-Montiel, Alberto Javier. 2014. Growth with Equity for The Development of Mexico: Poverty, Inequality, and Economic Growth (1992-2008). *World Development*, Volume 59, July 2014, Pages 313-326.

Jhingan, M.L. 2003. *Ekonomi dan Pembangunan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Jin, Hehui, Yingyi Qian & Barry R. Weingast. 1999. Regional Decentralization and Fiscal Incentives: Federalism, Chinese Style. Department Of Economic Stanford University. <http://www.siepr.stanford.edu/workp/swp99013.pdf>

Jolianis. 2016. Analisis Pengaruh PAD, DAU, dan DAK Terhadap Kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dengan Pertumbuhan

Ekonomi Sebagai Variabel Intervening. *Journal of Economic and Economic Education (ECONOMICA)*, Vol.4, No.2 (192-209).

Juanda B, Halim A, Azis N, Kaiwai H, Heriwibowo D. 2013. Evaluasi Regulasi Pengelolaan Keuangan daerah dan Pengaruhnya Terhadap Upaya Peningkatan Kualitas Belanja Daerah. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Jumadi, M.Pudjiharjo, Ghozali Maski, Moh.Khusani. 2013. The Impact of Fiscal Decentralization on Local Economic Developmnt in Eat Java. *IOSR Journal of Humanities and Social Science*, Voume 13, Issue 1, Pages 01-07.

Kappeler, Andreas, Albert Sole-Olle, Andreas Stephan, Timo Valila. 2013. 2013. Does Fiscal Decentralization Foster Regional Investment in Productive Infrastructure. *European Journal of Political Economy*, Volume 31, September 2013, Pages 15-25.

Katos, KK & Sjahrir BS. 2017. The Impact of Fiscal and Political Decentralization on Local Public Investment in Indonesia. *Journal of Comparative Economics* 45 (2017) 344-365.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2018. Profil Kesehatan Indonesia. <http://www.depkes.go.id/folder/view/01/structure-web-content-publikasi-data.html>, diakses 23 April 2018.

Kementerian ketenagakerjaan Republik Indonesia. 2018. Pusat data dan informasi Ketenagakerjaan. http://pusdatin.kemnaker.go.id/pusdatinaker-kuprovinci/table_pybprov.php, diakses pada 26 April 2018.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2014. Pengelolaan Keuangan Daerah: Materi Pelatihan Bagi Peserta Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah, Edisi Tahun 2014.

Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia. 2018. Statistik Pendidikan Anak Usia Dini. <http://publikasi.data.kemdikbud.go.id/index.php?thn=all>, diakses pada 23 April 2018.

Khan, Mohsin S & Carmen M. Reinhart. 1990. Private Investment and Economic Growth in Developing Countries. *World Development*, Vol.18, No.1, pp. 19-27.

https://www.researchgate.net/profile/Carmen_Reinhart/publication/240198616_Public_Investment_and_Economic_Growth_in_Developing_Countries/links/5849570008ae5038263d80bd.pdf



Khondker, Bazlul H & Raihan Selim. 2004. Welfare and Poverty Impacts of Policy Reforms in Bangladesh: A general Equilibrium Approach. Department of Economics, University of Dhaka, Bangladesh.

Khusaini, Mohammad. 2006. Ekonomi Publik (Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah). Malang. Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya (BPFE Unibraw).

Khusaini, Mohamad. 2016. The Role of Public Sector Expenditure on Local Economic Development. Int. J. Economic Policy in Emerging Economies, Vol.9, No.2.

Kim Il-Ho, et al. 2012. Welfare States, Flexible Employment, and Health: A critical Review. Health Policy 104 (2014) 99-127.

Kresnandra, ANG. Anak. 2016. Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Dana Perimbangan dan Investasi Swasta Sebagai Variabel Pemodreasi. Tesis. Program Magister Akuntansi, Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang.

Kuncoro, Engkos Acmad, Riduwan, Alam Buchari. 2008. Cara Menggunakan dan Memaknai Analisis Jalur (*Path Analysis*). Bandung: Alfabeta.

Kuncoro, Mudrajad. 2003. Ekonomi Pembangunan, edisi ketiga. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Kuncoro, Mudrajad. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah, Jakarta: Erlangga.

Kurniasih, Erni Panca. 2017. Effect of Economic Growth on Income Inequality, Labor Absorption, and Welfare In Indonesia. Economic Journal of Emerging Markets, 9 (2) October 2017, 181-188.

Kusnadi. 1999. Akuntansi Biaya: Tradisional & Modern. Bandung: Bandung Universitas Jenderal Achamad Yani, Fakultas Ekonomi.

Kuznets, Simon. 1955. Economic Growth and Income Inequality. *The American Economic Review*, Vol.45, No.1.

Lamsiraroj, Sasi & Mehmet Ali Ulubasoglu. 2015. Foreign direct investment and economic growth: A real relationship or wishful thinking? *Economic Modelling* 51 (2015) 200-213.

Li Xiaoying & Xiaming Liu. 2005. Foreign Direct Investment and Economic Growth: An Increasingly Endogenous Relationship. *World Development*, Volume 33, Issue 3 (March 2005), Pages 393-407.

Listiana, Yufita. 2016. Kualitas Belanja Daerah dan Hubungannya dengan Kinerja Pembangunan di Provinsi Jawa Timur. Tesis, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.

Liu Jlanmin, Xlamomei Hu, and Hongli Tang. 2016. Fiscal Decentralization and Regional Financial Efficiency: An Empirical Analysis of Spatial Durbin Model. *Hindawi Publishing Corporation, Discrete Dynamics in Nature and Society* Volume 2016, Article ID 6597138, 14 pages.

Lucky, Dihan. 2013. Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan ekonomi dan Kemiskinan Melalui Belanja Modal (Studi Kasus Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2011). Tesis, Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang.

Madden, Elissa E & Maria Scannapieco & Kirsten Painter. 2014. An Examination of Retention and Length of Employment Among Public Welfare Workers. *Children and Youth Services Review* 41 (2014) 37-44.

Maharajabdinul, Rahmatia, Abd. Hamid Paddu, & Nursini. 2015. Contribution of Fiscal Decentralization to Poverty Reduction in Eastern Indonesia. *IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM) e-ISSN: 2278-487X, p-ISSN: 2319-7668. Volume 17, Issue 12 .Ver. III (Dec. 2015), PP 53-60*.

Mangkoesoebroto, Guritno. 1991. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: BPFE.

Mankiw, N. Gregory. 2006. *Makro Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.

Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

Martin, Ronald L. 2003. A Study on the Factors of Regional Competitiveness: A Draft Final Report For European Commission Directorate-General Regional Policy. Cambridge Econometrics, University of Cambridge.
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/3cr/competitiveness.pdf

Martinez Vazquez, Jorge and Mc Nab, Robert M. 2003. Fiscal Decentralization and Economic Growth. *World Development*, Vol 31, Issue 9, September 2003, Pages 1597-1616.

Mawarmi, Darwanis & Syukriy Abduallah. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya terhadap Pertumbuhan ekonomi Daerah (Studi Kabupaten dan Kota Di Aceh). *Jurnal akuntansi Universitas Syiah Kuala*, ISSN 2302-0164 pp.80-90.



Meng-Yi Tai, C.C.Chao, Lee-Jung Lu, Shih-Wen Hu, Vey Wang. 2016. Land Conservation, Growth and Welfare. *The North American Journal of Economic and Finance*, Volume 38, November 2016, Pages 102-110.

Miar. 2014. Influence of Economic Growth to Manpower Absorption and People Welfare in Regencies/Cities in Central Kalimantan Province. *Journal of Economic and Sustainable Development*, Vol.5, No.21.

Mohamed, MR & Keshimender Singh Jit Singh. 2013. Impact Of Foreign Direct Investment & Domestic Investment on Economic Growth Malaysia. *Malaysian Journal of Economic Studies* 50 (1): 21-35,2013.

Moncarz, Pedro, Sergio Barone, Ricardo Descalzi. 2018. Shocks to The International Prices of Agriculture Commodities and Effects on Welfare and Poverty. A Simulation of the extance Long-run Effects for Uruguay. *Internatinal Economics*.

Mubyarto & Hamid, EdY Suandi. 1986. Meningkatkan Efisiensi Nasional. Yogyakarta: BPF.

Muharam, Harjum & Riszki Pusvitasari. 2007. Analisi Perbandingan Efiseinsi bank Syariah di Indonesia Dengan Metode Data Envelopment Analysis (Periode Tahun 2005). Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, Vol.II, No.3.

Murty, K.N. and Soumya, A. 2006. Effects of Public Investment in Infrastructure on Growth and Poverty in India. Working Paper 2006-06, Indira Gandhi Institute of Development Research, Mumbai.

Musgrave, Richard A & Musgrave B.Peggy. 1991. Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek. Jakarta: Erlangga.

Muti'ah. 2017. The Effect of Regional Revenue, Revenue Sharing Fund, General Allocation Fund, and Special Allocation Fund on Regional Economic Growth: Empirical Study In the 33 Provinces in Inondesia Year 2011-2014. *Research Journal of finance and Accounting*, Vol.8, No.8.

Nalle, Frederic Winston. 2015. Analisis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Kabupaten Timor Tengah Utara. Tesis, Program Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Brawijaya, Malang.

Nazmi, Nader & Miguel D. Ramirez.1997. Public and Private Investment and Economis Growth in Mexico. *Contemporary Economic Policy*; Jan 1997; 15, 1; Proquest pg. 65.

Ndadari, Laras Wulan dan Priyo Hari Adi. 2008. Perilaku Asimetris Pemerintah Daerah Terhadap Transfer Pemerintah Pusat. Makalah Disampaikan Dalam The 2nd National Conference Ukwms. Surabaya.

Neyapti, Billin. 2013. Fiscal Decentralization, Fiscal Rules and Fiscal Discipline. *Economic Letters* 121 (2013) 528-532.

Nistor, Paula. 2014. FDI and Economic Growth, The Case of Romania. *Procedia Economics and Finance* 15 (2014) 577-582.

Noor, Any. 2009. Manajemen Event. Bandung. Alfabeta.

Oates, Wallace E. 1993. Fiscal Decentralization and Economic Development. *National Tax Journal*, Vol.46, no.2, (June,1993), pp.237-43).

Oates, Wallace. E. 1999. An Essay on Fiscal Federalism. *Journal of Economic Literature*, Vol.37, No.3, pp.1120-1149.

Oates, Wallace. E. 2005. Toward A Second-Generation Theory of Fiscal Federalism. *International Tax and public Finance*, 12, 349-373, 2005.

Pal, Sarmistal and Wahhaj, Zaki. 2017. Fiscal decentralization, Local Institution and Public Good Provision: evidence from Indonesia. *Journal Of Comparative Economics* 45 (2017) 383-409.

Parviz, Asheghian. 2005. The Impact of Foreign Direct Investment On Japans Economic Growth. IDEAS Working Paper Series from RePec; St.Louis, 2005.

Pepinsky, Thomas B & Maria M. Wihardaja. 2011. Decentralization and Economic Performance in Indonesia. *Journal of East Asian Studies* 11 (2011), 337-371.

Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar Menteri Keuangan.
<http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2007/91~PMK.05~2007Per.htm>

Peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah.
<http://www.djpk.depkeu.go.id/?p=396>

Perera, Liyanage Devangi H & Grace H.Y.Lee. 2013. Have Economic Growth and Institutional Quality Contributed to Poverty and Inequality Reduction in Asia. *Journal of Asian Economics*, Volume 27, August 2013, Pages 71-86.

Pigou, A.C M.A. 1960. The Economic of Welfare: Fourth Edition. London; Mac Millan & CO LTD.

Porter, M. (1996), *The Competitive Advantage of Nations*, New York, NY: The Free.

Porter, Michael E. 2000 .Location, Competition and Economic DevelopmentLocal Cluster in a Global Economy. *Econommmic Develoment Quarterly*, Vol. 14, Issue 1, pp15-34.

Prakoso, Kristianto BH. 2016. Analisis Pengaruh Efisinesi Pengeluaran Sektor Publik terhadap Kinerja Pembangunan Ekonomi dan Kualitas Hidup Masyarakat di Jawa Timur (Studi pada 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur). *Jurnal Ilmiah, Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya*.

Prasetiawan, Moch Ardi; Pudjihardjo, Muhammad, Pudjihardjo; Ananda, Candra Fajri; Maskie Ghozali. 2015. The Competitiveness and Economic Performance of RegencyCity in East Java Indonesia. *IOSR Journal of Economic and Finance (IOSR-JEF), Volume 6, Issue 1, Ver.II, PP. 01-16*.

Prasetya, Ferry. 2012. Modul Ekonomi Publik V: Teori Pengeluaran Pemerintah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya Malang.

Prasetyo, Eko P. 2008. The Quality of Growth: Peran Teknologi dan Investasi Human Capital Sebagai Pemacu Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas. *JEJAK, Volume 1, Nomor 1, September 2008*.

Prawoto, Agus. 2015. Pengantar Keuangan Publik. Yogyakarta: BPFE.

Prettner, Klaus & Werner Katharina. 2016. Why it Pays off to pays us well: The Impact of Basic Research On Economic Growth and Welfare (OECD Countries). *Research Policy, Volume 45, Issue 5, June 2106, Pages 1075-1090*.

Prud'homme, Remy. 1995. On the Danger of Decentralization. The World Bank, Policy Research Working Paper, 1252.

Pujiati, Amin. 2007. Analisis Pertumbuhan Ekonomi Di Karesidenan Semarang Era Desentralsisi Fiskal. *Jurnal Ekonomi Pembangunan (Kajian Ekonomi Negara Berkembang) Hal: 61-70*.

Purnama, Nadia Ika. 2017. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomikawan*.

Purwanto, R. Nugroho & Erwinta Siswadi. 2006. Pengolahan Data Skala Terbatas dengan Metode Data Envelopment Analysis (DEA): Studi Kasus Efektivitas Proses Peluncuran Produk Baru. Lemabga Management, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

- Qiao, B., J. Martinez-Vazquez, and Y. Xu. 2002. Growth and Equity Tradeoff in Decentralization Policy: China Experience. *Working Paper 02-16*, Andrew Young School of Policy Studies, Georgia State.
- Qibthiyah, dkk. 2009. Implementasi dan Ekspektasi Kebijakan Dana Alokasi Khusus: Perspektif Daerah. Penelitian Tim Asistensi bidang Desentralisasi Fiskal, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Raharjo, Adi. 2006. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi Swasta dan angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Tahun 1982-2003 (studi kasus di Kota Semarang). Tesis. Program studi Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Universitas Diponegoro.
- Riduwan & Engkos Achmad Kuncoro. 2010. Cara Menggunakan dan Memaknai Path Analysis (Analisis Jalur). Bandung: Alfabeta Bandung.
- Rolando A. Escobar-Posada & Goncalo Monteiro. 2015. Long-run Growth and Welfare in a Two Sector Endogenous Growth Model with Productive and Non-productive Government Expenditure. *Journal of Macroeconomics*, Volume 46, december 2015, Pages 218-234.
- Samuelson, A Paul. 1954. The Pure Theory of Public Expenditure. *The Review of Economics and Statistics*, Vol.36, No.4 (Nov 1954), pp 387-389.
- Sandoval, J.S. Onesimo, Robert Cervero, & John Landis. 2011. The Transition from Welfare-to-work: How Cars and Human Capital Facilitate Employment for Welfare Recipients. *Applied Geography*, Volume 31, Issue 1, January 2011, Pages 352-362.
- Sanjaya, I Made dan Nursechafia. 2016. Inklusi Keuangan dan Pertumbuhan Inklusif: Analisis Antar Provinsi di Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Volume 18, Nomor 3.
- Santosa, Budi. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan pada 33 Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Keuangan & Bisnis Program Studi Magister Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Harapan*, Vol.5, No.2.
- Sasana, Hadi. 2009. Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi di Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah. *Journal Ekonomi Pembangunan* Vol. 10, No.1, Jni 2009, hal. 103-124.

Sasana, Hadi. 2015. Dampak Implementasi Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Stabilitas Harga di Provinsi Indonesia. *Media Ekonomi dan Manajemen* Vol. 3 No. 1 Januari 2015.

Sen, Huseyin & Kaya, Ayse. 2014. Crowding-Out or Crowding-In? Analyzing Spending on Private Investment in Turkey. *Panoeconomicus*, Pages 631-651.

Setiyawati, Anis & Hamzah, Ardi. 2007. Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan Belanja Pembangunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran: Pendekatan Analisis Jalur. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol.4, No.2, Hal.211-228.

Shah, Anwar. 2007. *Local Public Financial Management: Public Sector Governance and Accountability Series*. The World Bank, Washington, D.C.

Sholihah, Dyah H.A. 2014. Pertumbuhan Inklusif: Faktor-faktor yang Mempengaruhi dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Menengah di Indonesia. Tesis, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.

Siregar, Hermanto dan Dwi Wahyuniarti. 2008. Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Miskian. Direktur Akademik MB-IPB dan direktur Kajian Ekonomi & Lingkungan Brighten Institute. Institut Pertanian Bogor

Sjafii, Achmad. 2009. Pengaruh Investasi Fisik dan Investasi Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Timur 1990-2004. *Journal of Indonesian Applied Economics*, Vol.3, No.1, Pages 59-76.

Soeherman Achmad SG, Mursinoto Djoko and Ratnawati Tri. 2014. The Influential of Private Investment, Public Investment on Economic Growth and Labor Absorption and Public Welfare of District/City in East Java Province. *GSTF, Journal on Business Review (GBR)* Vol.3, No.4, November 2014.

Soejoto, Ady & Waspo Tjipto Subroto & Suyanto. 2015. Fiscal Decentralization Policy in Promoting Indonesia Human Development. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 2015, 5(3), 763-77, ISSN: 2146-4138.

Suaryana. 2010. Pengaruh Moderasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, Keserasian Belanja Daerah, dan Kemampuan Ekonomi Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Riset. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Udayana. Denpasar.

Sudrajad. 2011. Kiat Mengentaskan Pengangguran dan Kemiskinan Melalui Wirausaha. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suhardi, Imelda Yuliana dan Llewelyn. 2001. Penggunaan Model Regresi Tobit untuk Menganalisa Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Kepuasan Konsumen untuk Jasa Pengangkutan Barang. *Jurnal Manajemen & Kewirausahaan* Vol.3, No.2, September 2001:106-112.

Sukirno, Sadono. 1985. *Ekonomi Pembangunan (Proses, Masalah, Dan Dasar Kebijakan)*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Ui dengan Bima Grafika.

Suparmoko, M. 1979. *Asas-asas Ilmu Keuangan Negara*. Yogyakarta: BPFE.

Suparmoko, M. 2001. *Ekonomi Publik: Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: ANDI.

Suparmoko, M. *Keuangan Negara: Dalam Teori dan Praktek Edisi Keempat*. Yogyakarta: BPFE.

Suparta, I Wayan. 2009. *Spillover Effect* Perekonomian Provinsi DKI Jakarta dan Sumatera Selatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol.10, N0.1, Juni 2009, hal 32-48.

Suwandi. 2011. Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan ekonomi, Penyerapan Tenaga Kerja, Kemiskinan dan Kesejahteraan Di Kabupaten/Kota Papua. Disertasi. Program Doktor Ilmu Ekonomi, Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang.

Tajuddin, Ilham, Basri Hasanuddin, Rahmatia, Paulus Uppun. 2014. The effect of General Allocation Funds, Special Allocation Funds And Revenue-Sharing Funds On Investment, Economic Growth, Economic Structure, And Employment. *Journal of Research in Business and Management*, Volume 2-Issue 10, pp: 54-61.

Tandelilin, Eduardus. 2010. *Portofolio dan Investasi (Teori dan Aplikasi)*. 1rd ed. Yogyakarta: Kanisius.

Tanzi, Vito. 1995. Fiscal Federalism and Decentralization: A Review of Some Efficiency and Macro Economic Aspects. *Annual World Bank Conference on Development Economics*, The International Bank for Reconstruction and Development, The World Bank.

Thanassoulis, Emmanuel. 2001. Introduction to the Theory and Application of Data Envelopment Analysis. A Foundation Text with Intergrated Software. Norwell, MA: Kluwer Academic Publishers.

Thieben, Ulrich. 2003. Fiscal Decentralisation and Economic Growth In High-Income OECD Countries. Fiscal Studies (2003) vol.24. no. 3, pp. 237-274.

Tiebei Li, Matthew Burke & Jago Dodson. 2017. Transport Impacts of Government Employment Decentralization in An Australian City-Testing Scenarios Using Transport Simulation. Socio-Economic Planning Sciences, Volume 58, June 2017, Pages 63-71.

Tiebout, M Charles. 1956. A Pure Theory of Local Expenditure. *The Journal of Political Econmy, Vol.64, No.5, (Oct 1956), pp.416-424.*

Tirtosuharto, Darius. 2009. Regional Competitiveness in Indonesia: The Incentives of Fiscal Decentralization on State Efficiency and Economic Growth. A dissertation submitted in *partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy at George Mason Universit.*

Todaro, Michael & Stephen C Smith. 2006. Ekonomi Pembangunan: Edisi Kesembilan. Jakarta: Erlangga.

Todaro, Michael & Stephen C Smith. 2011. Ekonomi Pembangunan: Edisi Kesebelas. Jakarta: Erlangga.

Todaro, Michael P. 2003. Economic Development, Eight Edition, United Kngdom, Perason Education Limited.

Todaro, Michael. 1994. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Jakarta: Erlangga.

Todaro, Michael. 2000. Pembangunan Ekonomi. Jakarta: Erlangga.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

Usman, S, Sulton Mawardi, Adri Posesoro, Asep Suryhadi. 2008. Mekanisme Penggunaan Dana Alokasu Khusus (DAK). Universitas Griffith: Charles Sampford.

Utomo, SH & Hadi Sumarsono. 2009. Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Efisiensi Sektor Publik dan Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur. JESP, Vol.1, No.2.

Wang, Baoti. 2005. Effects of Government Expenditure on Private Investment: Canadian Empirical Evidence. *Empirical Economics*, 30: 439-504, DOI 10.1007/s00181-005-0245-9.

Wanjiru, Isaac Waithaka. 2015. Effects Of Government Spending On Private Investment In Kenya. A Project Submittes To The School Of Economics In Partial Fulfillment Of The Requirements For The Award Of Master Of Art Degree In Economics Of The University Of Nairobi.

Whithaker, William H. and Frederico, Ronald C. 1997. Social welfare in Today's World: Second Edition. New York: the McGraw-Hill Companies.

Wijaya, HAW. 2005. Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia. Jakarta: PT Raja Garfindo Persada.

Wilis, Retno. 2015. Analisis Pengaruh Upah minimum, Investasi dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja berdasarkan Pendidikan (studi Kasus pada 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur). Tesis, Program Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Brawijaya, Malang.

Wulansari, Retno. 2010. Efiseinsi relatif Operasional Puskesmas-Puskesmas di Kota Semarang Tahun 2009. Tesis. Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

World Bank. 2010. Laporan Penelitian Dana Transfer Pusat Ke Daerah. Penyempurnaan Grand Design Desentralisasi Fiskal.

Yang, Zhou. 2016. Tax Reform, Fiscal Decentralization, and Regional Economic Growth: New Evidence From China. *Economic Modelling* 59 (2016) 520-528.

Yani, Ahmad. 2002. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Jakarta: PT Raja Garfindo Persada.

Yongyou, Li & Shen Yupling. 2012. Vertical Distribution of Fiscal Revenue and Its Effect on Balancing Economic Growth. *Journal Social Sciences in China*, Volume 32, Issue 1.

Yushkov, Andrey. 2015. Fiscal decentralization and Regional Economic Growth: Theory, Empirics, and The Russian Experience. *Russian Journal of Economics* 1 (2015) 404-418.

Zakaria, Syawal. 2012. Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional di Kawasan Timur Indonesia/

Disertasi, Program Doktor Ilmu Ekonomi, Pascasarjana Fakultas Ilmu
Ekonomi, Unvestias Brawijaya, Malang.

Zamrowi, M. Taufik. 2007. Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri
Kecil. Tesis: Program Pascasarjana: Universitas Diponegoro, Semarang.

Zhang, Tao & Zou, Heng Fu. 1998. Fiscal Decentralization, Public Spending, and
Economic Growth in China. *Journal of Public Economies*, Vol.67, Issue 2,
1 February 1998, Pages 221-240.

Zhenfa, Xie & Zhang Wei. 2016. Fiscal Decentraliaztion and Economic Growth in
China: A Meta-Regression Anlysis. *China Economist Vol 11, No. 5,*
September-October 2016.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

